

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	Uraian
Lampiran	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Lampiran I.1	Ringkasi LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Lampiran I.2	Ringkasan APBD yang di Klasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Lampiran I.3	Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1.01.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.01.2.22.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
1.01.2.22.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1.02.0.00.	Dinas Kesehatan
1.03.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.2.10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.10.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
1.03.2.10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman
1.04.2.11.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman
1.04.2.11.	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
2.11.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
1.04.2.11.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
1.04.2.11.	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
1.05.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.0.00.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.06.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1.06.2.08.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.2.08.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
2.07.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2.07.2.18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2.07.2.18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.09.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2.09.3.25.	Dinas Pangan dan Pertanian
3.25.	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
2.09.3.25.	Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
2.09.3.25.	Dinas Pangan dan Pertanian
2.12.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.0.00.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.15.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
2.15.0.00.	Dinas Perhubungan

Kode Rekening	Uraian
2.16.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
2.16.2.20.	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
2.16.2.20.	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
2.16.2.20.	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.3.30.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.30.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
2.17.3.30.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.31.	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
2.17.3.30.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.19.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3.26.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3.26.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
2.19.3.26.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2.23.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2.23.2.24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
2.23.2.24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
4.01.	Sekretariat Daerah
4.01.0.00.	Sekretariat Daerah
4.02.	Sekretariat DPRD
4.02.0.00.	Sekretariat DPRD
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
5.01.	Perencanaan
5.01.5.05.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.	Penelitian dan Pengembangan
5.01.5.05.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.02.	Keuangan
5.02.0.00.	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.03.	Kepegawaian
5.03.5.04.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.	Pendidikan dan Pelatihan
5.03.5.04.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
6.01.	Inspektorat
6.01.0.00.	Inspektorat Daerah
7	Unsur Kewilayahan
07.01.	Kecamatan
7.01.0.00.	Kecamatan Padang Panjang Timur
07.01.	Kecamatan
7.01.0.00.	Kecamatan Padang Panjang Barat
8	Unsur Pemerintahan Umum
8.01.	Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening	Uraian
8.01.1.05.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa Politik
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1.05.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
8.01.1.05.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa Politik
Lampiran I.4	Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Lampiran III	Laporan Operasional
Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran V	Neraca
Lampiran VI	Laporan Arus Kas
Lampiran VII	Catatan Atas Laporan Keuangan
Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Lampiran XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan
Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah
Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek
Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang
Lampiran XIX	Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya
Lampiran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
Lampiran XX.1	Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024
Lampiran XX.2	Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

WALI KOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5);

7. Peraturan...

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALI KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 berupa laporan keuangan memuat:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. neraca;
   c. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   d. laporan operasional;
   e. laporan arus kas;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. pendapatan sebesar Rp565.000.090.757,76 (lima ratus enam puluh lima miliar sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen);
b. belanja sebesar Rp531.654.227.109,81 (lima ratus tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah delapan puluh satu sen);
c. surplus antara pendapatan dan belanja sebesar Rp33.345.863.647,95 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah sembilan puluh lima sen);

d. pembiayaan...

d. pembiayaan terdiri atas:
   1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp6.451.405.669,94 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen); dan
   2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
e. pembiayaan netto sebesar Rp6.451.405.669,94 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen);
f. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun yang berkenaan sebesar Rp39.797.269.317,89 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah delapan puluh sembilan sen).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp22.001.113.689,24 (dua puluh dua miliar satu juta seratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen) dengan rincian:
   1. anggaran sebesar Rp587.001.204.447,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar satu juta dua ratus empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah); dan
   2. realisasi sebesar Rp565.000.090.757,76 (lima ratus enam puluh lima miliar sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen).
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp61.798.383.007,13 (enam puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh rupiah tiga belas sen) dengan rincian:
   1. anggaran sebesar Rp593.452.610.116,94 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam belas rupiah sembilan puluh empat sen); dan
   2. realisasi sebesar Rp531.654.227.109,81 (lima ratus tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah delapan puluh satu sen).
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sebesar Rp39.797.269.317,89 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah delapan puluh sembilan sen) dengan rincian:
   1. defisit sebesar Rp6.451.405.669,94 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen); dan

2. realisasi...

2. realisasi sebesar Rp33.345.863.647,95 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah sembilan puluh lima sen).

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian:
   1. anggaran sebesar Rp6.451.405.669,94 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen); dan
   2. realisasi sebesar Rp6.451.405.669,94 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen).

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian:
   1. anggaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
   2. realisasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian:
   1. anggaran sebesar Rp6.451.405.669,94 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen); dan
   2. realisasi sebesar Rp6.451.405.669,94 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen).

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. aset sebesar Rp1.423.682.153.096,60 (satu triliun empat ratus dua puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah enam puluh sen);
b. kewajiban sebesar Rp21.236.412.579,09 (dua puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan sen); dan
c. ekuitas sebesar Rp1.402.445.740.517,51 (satu triliun empat ratus dua miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah lima puluh satu sen).

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp6.451.405.669,94 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen);

b. penggunaan...

b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp6.451.405.669,94 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen);
c. sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp39.797.269.317,89 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah delapan puluh sembilan sen); dan
d. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp39.797.269.317,89 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah delapan puluh sembilan sen).

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. pendapatan sebesar Rp572.016.739.614,68 (lima ratus tujuh puluh dua miliar enam belas juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah enam puluh delapan sen);
b. belanja sebesar 537.932.998.376,11 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah sebelas sen);
c. surplus dari kegiatan non operasional Rp0,00 (nol rupiah);
d. pos luar biasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
e. surplus sebesar Rp34.083.741.238,57 (tiga puluh empat miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh tujuh sen).

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp87.838.445.223,51 (delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah lima puluh satu sen);
b. arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp54.492.581.575,56 (lima puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah lima puluh enam sen);
c. arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
d. arus kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp74.200,00 (tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
e. kenaikan kas sebesar Rp33.345.937.847,95 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah sembilan puluh lima sen);

f. saldo...

f. saldo awal kas di bendahara umum daerah sebesar Rp6.451.405.669,94 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen);
g. saldo akhir kas di bendahara umum daerah sebesar Rp39.797.269.317,89 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah delapan puluh sembilan sen);
h. kas lain di bendahara pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
i. saldo kas akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp39.797.269.317,89 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah delapan puluh sembilan sen).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f terdiri atas:
a. ekuitas awal sebesar Rp1.366.938.989.052,48 (satu triliun tiga ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh dua rupiah empat puluh delapan sen);
b. surplus laporan operasional sebesar Rp34.083.741.238,57 (tiga puluh empat miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh tujuh sen);
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp1.423.010.226,46 (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah empat puluh enam sen); dan
d. ekuitas akhir sebesar Rp1.402.445.740.517,51 (satu triliun empat ratus dua miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah lima puluh satu sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas:
   1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

2. ringkasan...

2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan.

b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Lampiran III membuat laporan operasional;
d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
e. Lampiran V memuat neraca;
f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l. Lampitan XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX memuat daftar subkegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t. Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
   1. Lampiran XX.1 yang memuat laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
   2. Lampiran XX.2 yang memuat laporan keuangan (laporan/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12...

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 3 Agustus 2026

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 3 Agustus 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

KUARTINI DETI PUTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2026 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT: (2/29/2026).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada hakikatnya merupakan pelaksanaan demokrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, yang pada akhirnya bermuara kepada rakyat sebagai pemberi mandat. Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dapat dianalisis dan diketahui bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun. Laporan pengelolaan keuangan daerah tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjaga prinsip akuntabilitas pelaksanaan kebijakan keuangan atau anggaran setiap tahunnya, agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam konteks penganggaran semakin efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan serta dikontrol oleh publik.

Selanjutnya sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, disusun dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah yang memuat laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini, pada dasarnya merupakan realisasi keuangan secara riil dari pelaksanaan APBD, baik dari sisi Pendapatan maupun dari sisi Belanja yang disusun menurut kode rekening, serta Laporan Pertanggungjawaban dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran. Makna realisasi pelaksanaan APBD Tahun 2025, sangat berkaitan langsung dengan realisasi berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kota Padang Panjang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 2

LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAMPIRAN I.1
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

KOTA PADANG PANJANG

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	Pendapatan	587.001.204.447,00	565.000.090.757,76	(22.001.113.689,24)	96,25
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	72.614.304.072,00	62.444.590.945,00	(10.169.713.127,00)	85,99
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	70.213.334.897,00	61.572.219.094,00	(8.641.115.803,00)	87,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		DINAS KESEHATAN	4.300.000.000,00	0,00	(4.300.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	4.300.000.000,00	0,00	(4.300.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.300.000.000,00	0,00	(4.300.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	300.000.000,00	(320.000,00)	(300.320.000,00)	(0,11)
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.000.000.000,00	320.000,00	(3.999.680.000,00)	0,01
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	65.913.334.897,00	57.082.426.825,00	(8.830.908.072,00)	86,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4	PENDAPATAN DAERAH	65.913.334.897,00	57.082.426.825,00	(8.830.908.072,00)	86,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65.913.334.897,00	57.082.426.825,00	(8.830.908.072,00)	86,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1.02	Retribusi Daerah	65.299.756.697,00	56.565.375.554,00	(8.734.381.143,00)	86,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	613.578.200,00	517.051.271,00	(96.526.929,00)	84,27
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		PUSKESMAS KOTO KATIK	0,00	744.444.522,00	744.444.522,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	744.444.522,00	744.444.522,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	744.444.522,00	744.444.522,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	32.756.000,00	32.756.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	711.688.522,00	711.688.522,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS	0,00	1.607.064.880,00	1.607.064.880,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.607.064.880,00	1.607.064.880,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	1.607.064.880,00	1.607.064.880,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	66.650.000,00	66.650.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	1.540.414.880,00	1.540.414.880,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN	0,00	1.251.566.894,00	1.251.566.894,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.251.566.894,00	1.251.566.894,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	1.251.566.894,00	1.251.566.894,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	54.493.000,00	54.493.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	1.197.073.894,00	1.197.073.894,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		PUSKESMAS GUNUNG	0,00	886.715.973,00	886.715.973,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	886.715.973,00	886.715.973,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	886.715.973,00	886.715.973,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	61.821.000,00	61.821.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	824.894.973,00	824.894.973,00	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	635.000.000,00	178.945.851,00	(456.054.149,00)	28,18

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000		**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**635.000.000,00**	**178.945.851,00**	**(456.054.149,00)**	**28,18**
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**635.000.000,00**	**178.945.851,00**	**(456.054.149,00)**	**28,18**
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**635.000.000,00**	**178.945.851,00**	**(456.054.149,00)**	**28,18**
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	4.1.02	**Retribusi Daerah**	**635.000.000,00**	**178.945.851,00**	**(456.054.149,00)**	**28,18**
1.04			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**1.765.969.175,00**	**693.426.000,00**	**(1.072.543.175,00)**	**39,27**
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000		**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**	**1.765.969.175,00**	**693.426.000,00**	**(1.072.543.175,00)**	**39,27**
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.765.969.175,00**	**693.426.000,00**	**(1.072.543.175,00)**	**39,27**
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.765.969.175,00**	**693.426.000,00**	**(1.072.543.175,00)**	**39,27**
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	4.1.02	**Retribusi Daerah**	**1.765.969.175,00**	**693.426.000,00**	**(1.072.543.175,00)**	**39,27**
2			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**7.183.569.000,00**	**6.089.176.547,00**	**(1.094.392.453,00)**	**84,77**
2.09			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**409.739.000,00**	**273.182.000,00**	**(136.557.000,00)**	**66,67**
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000		**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**	**409.739.000,00**	**273.182.000,00**	**(136.557.000,00)**	**66,67**
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**409.739.000,00**	**273.182.000,00**	**(136.557.000,00)**	**66,67**
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**409.739.000,00**	**273.182.000,00**	**(136.557.000,00)**	**66,67**
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	4.1.02	**Retribusi Daerah**	**390.918.000,00**	**245.423.000,00**	**(145.495.000,00)**	**62,78**
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**18.821.000,00**	**27.759.000,00**	**8.938.000,00**	**147,49**
2.17			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**4.473.830.000,00**	**4.090.445.547,00**	**(383.384.453,00)**	**91,43**
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**	**4.473.830.000,00**	**4.090.445.547,00**	**(383.384.453,00)**	**91,43**
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**4.473.830.000,00**	**4.090.445.547,00**	**(383.384.453,00)**	**91,43**
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**4.473.830.000,00**	**4.090.445.547,00**	**(383.384.453,00)**	**91,43**
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4.1.02	**Retribusi Daerah**	**4.473.830.000,00**	**3.855.750.209,00**	**(618.079.791,00)**	**86,18**
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**0,00**	**234.695.338,00**	**234.695.338,00**	**0,00**
2.19			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**1.250.000.000,00**	**1.067.842.000,00**	**(182.158.000,00)**	**85,43**
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000		**DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA**	**1.250.000.000,00**	**1.067.842.000,00**	**(182.158.000,00)**	**85,43**
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.250.000.000,00**	**1.067.842.000,00**	**(182.158.000,00)**	**85,43**
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.250.000.000,00**	**1.067.842.000,00**	**(182.158.000,00)**	**85,43**
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	4.1.02	**Retribusi Daerah**	**1.250.000.000,00**	**1.067.842.000,00**	**(182.158.000,00)**	**85,43**
2.15			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**850.000.000,00**	**656.107.000,00**	**(193.893.000,00)**	**77,19**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		**DINAS PERHUBUNGAN**	**850.000.000,00**	**656.107.000,00**	**(193.893.000,00)**	**77,19**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**850.000.000,00**	**656.107.000,00**	**(193.893.000,00)**	**77,19**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**850.000.000,00**	**656.107.000,00**	**(193.893.000,00)**	**77,19**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	**Retribusi Daerah**	**850.000.000,00**	**644.607.000,00**	**(205.393.000,00)**	**75,84**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**0,00**	**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	**0,00**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.16			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**200.000.000,00**	**1.600.000,00**	**(198.400.000,00)**	**0,80**
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**200.000.000,00**	**1.600.000,00**	**(198.400.000,00)**	**0,80**
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**200.000.000,00**	**1.600.000,00**	**(198.400.000,00)**	**0,80**
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**200.000.000,00**	**1.600.000,00**	**(198.400.000,00)**	**0,80**
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	4.1.02	**Retribusi Daerah**	**200.000.000,00**	**1.600.000,00**	**(198.400.000,00)**	**0,80**
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**550.000.000,00**	**369.368.520,00**	**(180.631.480,00)**	**67,16**
4.01			**SEKRETARIAT DAERAH**	**550.000.000,00**	**369.368.520,00**	**(180.631.480,00)**	**67,16**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		**SEKRETARIAT DAERAH**	**550.000.000,00**	**369.368.520,00**	**(180.631.480,00)**	**67,16**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**550.000.000,00**	**369.368.520,00**	**(180.631.480,00)**	**67,16**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**550.000.000,00**	**369.368.520,00**	**(180.631.480,00)**	**67,16**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	**Retribusi Daerah**	**550.000.000,00**	**369.228.000,00**	**(180.772.000,00)**	**67,13**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**0,00**	**140.520,00**	**140.520,00**	**0,00**
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**506.653.331.375,00**	**496.096.954.745,76**	**(10.556.376.629,24)**	**97,92**
5.02			**KEUANGAN**	**506.653.331.375,00**	**496.096.954.745,76**	**(10.556.376.629,24)**	**97,92**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**	**506.653.331.375,00**	**496.096.954.745,76**	**(10.556.376.629,24)**	**97,92**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4	**PENDAPATAN DAERAH**	**506.653.331.375,00**	**496.096.954.745,76**	**(10.556.376.629,24)**	**97,92**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**32.394.476.398,00**	**31.522.914.095,76**	**(871.562.302,24)**	**97,31**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.01	**Pajak Daerah**	**20.372.697.142,00**	**17.367.910.078,00**	**(3.004.787.064,00)**	**85,25**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	**Retribusi Daerah**	**25.000.000,00**	**15.285.000,00**	**(9.715.000,00)**	**61,14**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**7.991.779.256,00**	**7.991.779.256,00**	**0,00**	**100,00**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**4.005.000.000,00**	**6.147.939.761,76**	**2.142.939.761,76**	**153,51**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**470.208.854.977,00**	**460.518.396.206,00**	**(9.690.458.771,00)**	**97,94**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**438.168.129.880,00**	**435.977.261.779,00**	**(2.190.868.101,00)**	**99,50**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**32.040.725.097,00**	**24.541.134.427,00**	**(7.499.590.670,00)**	**76,59**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**4.050.000.000,00**	**4.055.644.444,00**	**5.644.444,00**	**100,14**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.01	**Pendapatan Hibah**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.02	**Dana Darurat**	**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**0,00**	**5.644.444,00**	**5.644.444,00**	**0,00**
		5	**Belanja**	**593.452.610.116,94**	**531.654.227.109,81**	**(61.798.383.007,13)**	**89,59**
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**350.116.766.262,88**	**321.248.893.090,19**	**(28.867.873.172,69)**	**91,75**
1.01			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**112.588.067.195,00**	**105.847.309.383,08**	**(6.740.757.811,92)**	**94,01**
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**112.588.067.195,00**	**105.847.309.383,08**	**(6.740.757.811,92)**	**94,01**
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**112.588.067.195,00**	**105.847.309.383,08**	**(6.740.757.811,92)**	**94,01**
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**98.772.267.858,00**	**93.282.277.815,00**	**(5.489.990.043,00)**	**94,44**
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**72.442.326.025,00**	**69.972.573.722,00**	**(2.469.752.303,00)**	**96,59**
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**21.364.241.833,00**	**18.556.746.509,00**	**(2.807.495.324,00)**	**86,86**
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.05	**Belanja Hibah**	**4.375.700.000,00**	**4.276.457.584,00**	**(99.242.416,00)**	**97,73**
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**	**590.000.000,00**	**476.500.000,00**	**(113.500.000,00)**	**80,76**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	13.815.799.337,00	12.565.031.568,08	(1.250.767.768,92)	90,95
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.762.434.974,00	2.437.860.098,00	(324.574.876,00)	88,25
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.954.917.658,00	9.051.013.714,08	(903.903.943,92)	90,92
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	933.446.705,00	911.322.756,00	(22.123.949,00)	97,63
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	165.000.000,00	164.835.000,00	(165.000,00)	99,90
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	164.925.438.036,88	149.772.636.265,32	(15.152.801.771,56)	90,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		DINAS KESEHATAN	81.764.420.901,00	77.497.531.527,60	(4.266.889.373,40)	94,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	81.764.420.901,00	77.497.531.527,60	(4.266.889.373,40)	94,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	77.950.561.981,00	73.937.401.047,60	(4.013.160.933,40)	94,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	62.157.613.826,00	59.570.055.279,00	(2.587.558.547,00)	95,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.692.948.155,00	14.267.345.768,60	(1.425.602.386,40)	90,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.813.858.920,00	3.560.130.480,00	(253.728.440,00)	93,35
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.887.281.000,00	1.831.992.500,00	(55.288.500,00)	97,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.200.260.000,00	1.003.137.979,00	(197.122.021,00)	83,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	726.317.920,00	725.000.001,00	(1.317.919,00)	99,82
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	74.197.854.743,88	64.236.888.035,72	(9.960.966.708,16)	86,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	74.197.854.743,88	64.236.888.035,72	(9.960.966.708,16)	86,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	60.404.803.243,88	52.682.146.251,00	(7.722.656.992,88)	87,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	28.115.167.330,00	20.669.784.630,00	(7.445.382.700,00)	73,52
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.289.635.913,88	32.012.361.621,00	(277.274.292,88)	99,14
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	13.793.051.500,00	11.554.741.784,72	(2.238.309.715,28)	83,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.842.700.000,00	3.494.858.030,00	(1.347.841.970,00)	72,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.950.351.500,00	8.059.883.754,72	(890.467.745,28)	90,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		PUSKESMAS KOTO KATIK	1.827.682.040,00	1.560.760.954,00	(266.921.086,00)	85,40
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	1.827.682.040,00	1.560.760.954,00	(266.921.086,00)	85,40
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.734.444.440,00	1.467.698.354,00	(266.746.086,00)	84,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	457.000.000,00	450.846.150,00	(6.153.850,00)	98,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.277.444.440,00	1.016.852.204,00	(260.592.236,00)	79,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	93.237.600,00	93.062.600,00	(175.000,00)	99,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.237.600,00	93.062.600,00	(175.000,00)	99,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS	2.813.393.436,00	2.559.662.390,00	(253.731.046,00)	90,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	2.813.393.436,00	2.559.662.390,00	(253.731.046,00)	90,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.662.473.436,00	2.453.748.390,00	(208.725.046,00)	92,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	959.035.162,00	920.592.228,00	(38.442.934,00)	95,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.703.438.274,00	1.533.156.162,00	(170.282.112,00)	90,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	150.920.000,00	105.914.000,00	(45.006.000,00)	70,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.920.000,00	105.914.000,00	(45.006.000,00)	70,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN	2.268.092.611,00	2.057.903.392,00	(210.189.219,00)	90,73
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	2.268.092.611,00	2.057.903.392,00	(210.189.219,00)	90,73
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.222.002.611,00	2.011.813.612,00	(210.188.999,00)	90,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	650.000.000,00	636.852.938,00	(13.147.062,00)	97,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.572.002.611,00	1.374.960.674,00	(197.041.937,00)	87,47
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	46.090.000,00	46.089.780,00	(220,00)	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.090.000,00	46.089.780,00	(220,00)	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		PUSKESMAS GUNUNG	2.053.994.305,00	1.859.889.966,00	(194.104.339,00)	90,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	2.053.994.305,00	1.859.889.966,00	(194.104.339,00)	90,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.883.994.305,00	1.713.039.558,00	(170.954.747,00)	90,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	550.000.000,00	501.334.397,00	(48.665.603,00)	91,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.333.994.305,00	1.211.705.161,00	(122.289.144,00)	90,83

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	170.000.000,00	146.850.408,00	(23.149.592,00)	86,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.000.000,00	146.850.408,00	(23.149.592,00)	86,38
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	25.884.202.551,00	21.446.532.129,79	(4.437.670.421,21)	82,86
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	25.884.202.551,00	21.446.532.129,79	(4.437.670.421,21)	82,86
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	25.884.202.551,00	21.446.532.129,79	(4.437.670.421,21)	82,86
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	12.698.631.212,00	10.612.874.183,42	(2.085.757.028,58)	83,57
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.323.909.565,00	6.189.270.753,00	(134.638.812,00)	97,87
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.374.721.647,00	4.423.603.430,42	(1.951.118.216,58)	69,39
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	13.185.571.339,00	10.833.657.946,37	(2.351.913.392,63)	82,16
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.915.600,00	75.243.000,00	(3.672.600,00)	95,35
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.051.571.000,00	653.216.625,00	(1.398.354.375,00)	31,84
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.055.084.739,00	10.105.198.321,37	(949.886.417,63)	91,41
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	18.596.229.364,00	17.439.166.110,00	(1.157.063.254,00)	93,78
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	18.394.664.211,00	17.255.014.326,00	(1.139.649.885,00)	93,80
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	18.394.664.211,00	17.255.014.326,00	(1.139.649.885,00)	93,80
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.294.283.711,00	9.436.042.895,00	(858.240.816,00)	91,66
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.109.605.670,00	5.961.200.636,00	(148.405.034,00)	97,57
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.764.678.041,00	1.254.842.259,00	(509.835.782,00)	71,11
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.420.000.000,00	2.220.000.000,00	(200.000.000,00)	91,74
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	8.100.380.500,00	7.818.971.431,00	(281.409.069,00)	96,53
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.939.100,00	85.900.000,00	(4.039.100,00)	95,51
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.010.441.400,00	7.733.071.431,00	(277.369.969,00)	96,54
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	201.565.153,00	184.151.784,00	(17.413.369,00)	91,36
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	201.565.153,00	184.151.784,00	(17.413.369,00)	91,36
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	201.565.153,00	184.151.784,00	(17.413.369,00)	91,36
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.565.153,00	184.151.784,00	(17.413.369,00)	91,36
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.499.724.126,00	18.579.509.421,00	(920.214.705,00)	95,28
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	13.726.650.523,00	13.232.956.393,00	(493.694.130,00)	96,40
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	13.726.650.523,00	13.232.956.393,00	(493.694.130,00)	96,40
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.335.088.423,00	10.951.782.453,00	(383.305.970,00)	96,62
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.076.137.405,00	5.975.511.375,00	(100.626.030,00)	98,34
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.258.951.018,00	4.976.271.078,00	(282.679.940,00)	94,62
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.391.562.100,00	2.281.173.940,00	(110.388.160,00)	95,38
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.311.602.100,00	2.281.173.940,00	(30.428.160,00)	98,68
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.960.000,00	0,00	(79.960.000,00)	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	5.773.073.603,00	5.346.553.028,00	(426.520.575,00)	92,61
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.773.073.603,00	5.346.553.028,00	(426.520.575,00)	92,61
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.773.073.603,00	5.346.553.028,00	(426.520.575,00)	92,61
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.235.727.921,00	3.945.818.023,00	(289.909.898,00)	93,16

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.537.345.682,00**	**1.400.735.005,00**	**(136.610.677,00)**	**91,11**
1.06			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**8.623.104.990,00**	**8.163.739.781,00**	**(459.365.209,00)**	**94,67**
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000		**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**8.623.104.990,00**	**8.163.739.781,00**	**(459.365.209,00)**	**94,67**
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**8.623.104.990,00**	**8.163.739.781,00**	**(459.365.209,00)**	**94,67**
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**8.410.089.690,00**	**7.956.383.831,00**	**(453.705.859,00)**	**94,61**
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**4.964.648.537,00**	**4.756.313.929,00**	**(208.334.608,00)**	**95,80**
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.445.441.153,00**	**3.200.069.902,00**	**(245.371.251,00)**	**92,88**
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**213.015.300,00**	**207.355.950,00**	**(5.659.350,00)**	**97,34**
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**213.015.300,00**	**207.355.950,00**	**(5.659.350,00)**	**97,34**
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**76.227.686.605,00**	**67.954.395.957,36**	**(8.273.290.647,64)**	**89,15**
2.07			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**5.477.599.112,00**	**4.762.855.364,00**	**(714.743.748,00)**	**86,95**
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**5.477.599.112,00**	**4.762.855.364,00**	**(714.743.748,00)**	**86,95**
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**5.477.599.112,00**	**4.762.855.364,00**	**(714.743.748,00)**	**86,95**
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.274.915.662,00**	**4.574.604.015,00**	**(700.311.647,00)**	**86,72**
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**3.057.274.148,00**	**2.983.970.043,00**	**(73.304.105,00)**	**97,60**
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.217.641.514,00**	**1.590.633.972,00**	**(627.007.542,00)**	**71,73**
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**202.683.450,00**	**188.251.349,00**	**(14.432.101,00)**	**92,88**
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**202.683.450,00**	**188.251.349,00**	**(14.432.101,00)**	**92,88**
2.08			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**797.339.090,00**	**598.685.734,00**	**(198.653.356,00)**	**75,09**
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000		**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**797.339.090,00**	**598.685.734,00**	**(198.653.356,00)**	**75,09**
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**797.339.090,00**	**598.685.734,00**	**(198.653.356,00)**	**75,09**
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**797.339.090,00**	**598.685.734,00**	**(198.653.356,00)**	**75,09**
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**797.339.090,00**	**598.685.734,00**	**(198.653.356,00)**	**75,09**
2.09			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**8.361.984.816,00**	**7.841.719.421,00**	**(520.265.395,00)**	**93,78**
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000		**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**	**8.361.984.816,00**	**7.841.719.421,00**	**(520.265.395,00)**	**93,78**
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**8.361.984.816,00**	**7.841.719.421,00**	**(520.265.395,00)**	**93,78**
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**8.351.984.816,00**	**7.833.097.921,00**	**(518.886.895,00)**	**93,79**
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**6.434.264.772,00**	**6.129.507.428,00**	**(304.757.344,00)**	**95,26**
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.841.545.044,00**	**1.630.415.493,00**	**(211.129.551,00)**	**88,54**
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**	**76.175.000,00**	**73.175.000,00**	**(3.000.000,00)**	**96,06**
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**10.000.000,00**	**8.621.500,00**	**(1.378.500,00)**	**86,22**
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**10.000.000,00**	**8.621.500,00**	**(1.378.500,00)**	**86,22**
2.10			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**81.149.700,00**	**29.345.175,00**	**(51.804.525,00)**	**36,16**
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000		**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**81.149.700,00**	**29.345.175,00**	**(51.804.525,00)**	**36,16**
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**81.149.700,00**	**29.345.175,00**	**(51.804.525,00)**	**36,16**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	81.149.700,00	29.345.175,00	(51.804.525,00)	36,16
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.149.700,00	29.345.175,00	(51.804.525,00)	36,16
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10.762.395.542,00	8.242.264.804,00	(2.520.130.738,00)	76,58
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	10.392.298.142,00	8.007.184.501,00	(2.385.113.641,00)	77,05
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	10.392.298.142,00	8.007.184.501,00	(2.385.113.641,00)	77,05
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.425.794.340,00	7.647.291.501,00	(778.502.839,00)	90,76
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.425.794.340,00	7.647.291.501,00	(778.502.839,00)	90,76
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.966.503.802,00	359.893.000,00	(1.606.610.802,00)	18,30
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.000.000,00	153.949.200,00	(50.800,00)	99,97
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.812.503.802,00	205.943.800,00	(1.606.560.002,00)	11,36
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	370.097.400,00	235.080.303,00	(135.017.097,00)	63,52
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	370.097.400,00	235.080.303,00	(135.017.097,00)	63,52
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	337.830.400,00	203.795.643,00	(134.034.757,00)	60,32
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.830.400,00	203.795.643,00	(134.034.757,00)	60,32
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	32.267.000,00	31.284.660,00	(982.340,00)	96,96
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.267.000,00	31.284.660,00	(982.340,00)	96,96
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.222.599.142,00	2.900.388.706,00	(322.210.436,00)	90,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.222.599.142,00	2.900.388.706,00	(322.210.436,00)	90,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.222.599.142,00	2.900.388.706,00	(322.210.436,00)	90,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.171.469.342,00	2.853.346.906,00	(318.122.436,00)	89,97
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.278.958.353,00	2.197.555.155,00	(81.403.198,00)	96,43
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	892.510.989,00	655.791.751,00	(236.719.238,00)	73,48
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	51.129.800,00	47.041.800,00	(4.088.000,00)	92,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.129.800,00	47.041.800,00	(4.088.000,00)	92,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.299.785.065,00	1.882.793.012,00	(416.992.053,00)	81,87
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.299.785.065,00	1.882.793.012,00	(416.992.053,00)	81,87
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.299.785.065,00	1.882.793.012,00	(416.992.053,00)	81,87
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.299.785.065,00	1.882.793.012,00	(416.992.053,00)	81,87
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.299.785.065,00	1.882.793.012,00	(416.992.053,00)	81,87
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	11.737.042.929,00	11.027.094.193,00	(709.948.736,00)	93,95
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERHUBUNGAN	11.737.042.929,00	11.027.094.193,00	(709.948.736,00)	93,95
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	11.737.042.929,00	11.027.094.193,00	(709.948.736,00)	93,95
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.584.619.229,00	10.878.455.939,00	(706.163.290,00)	93,90
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.282.559.952,00	6.180.648.231,00	(101.911.721,00)	98,38
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.302.059.277,00	4.697.807.708,00	(604.251.569,00)	88,60
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	152.423.700,00	148.638.254,00	(3.785.446,00)	97,52
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.023.700,00	7.199.999,00	(2.823.701,00)	71,83

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	142.400.000,00	141.438.255,00	(961.745,00)	99,32
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.669.402.686,00	7.181.704.553,00	(487.698.133,00)	93,64
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.669.402.686,00	7.181.704.553,00	(487.698.133,00)	93,64
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.669.402.686,00	7.181.704.553,00	(487.698.133,00)	93,64
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.651.063.886,00	7.164.817.553,00	(486.246.333,00)	93,64
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.595.998.294,00	3.421.202.531,00	(174.795.763,00)	95,14
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.055.065.592,00	3.743.615.022,00	(311.450.570,00)	92,32
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	18.338.800,00	16.887.000,00	(1.451.800,00)	92,08
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.338.800,00	16.887.000,00	(1.451.800,00)	92,08
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	11.843.888.505,00	10.766.541.340,00	(1.077.347.165,00)	90,90
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	11.843.888.505,00	10.766.541.340,00	(1.077.347.165,00)	90,90
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	11.843.888.505,00	10.766.541.340,00	(1.077.347.165,00)	90,90
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.755.738.505,00	10.688.962.340,00	(1.066.776.165,00)	90,93
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.447.996.289,00	6.173.569.865,00	(274.426.424,00)	95,74
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.062.753.714,00	1.852.092.467,00	(210.661.247,00)	89,79
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.04	Belanja Subsidi	134.546.684,00	60.700.008,00	(73.846.676,00)	45,11
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.110.441.818,00	2.602.600.000,00	(507.841.818,00)	83,67
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	88.150.000,00	77.579.000,00	(10.571.000,00)	88,01
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.150.000,00	77.579.000,00	(10.571.000,00)	88,01
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	98.761.000,00	54.452.357,00	(44.308.643,00)	55,14
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	98.761.000,00	54.452.357,00	(44.308.643,00)	55,14
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	98.761.000,00	54.452.357,00	(44.308.643,00)	55,14
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	98.761.000,00	54.452.357,00	(44.308.643,00)	55,14
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.761.000,00	54.452.357,00	(44.308.643,00)	55,14
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.971.862.245,00	7.166.112.466,36	(805.749.778,64)	89,89
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	7.971.862.245,00	7.166.112.466,36	(805.749.778,64)	89,89
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.971.862.245,00	7.166.112.466,36	(805.749.778,64)	89,89
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.618.561.218,00	6.846.773.766,36	(771.787.451,64)	89,87
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.952.868.499,00	3.703.038.706,00	(249.829.793,00)	93,68
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.123.192.719,00	2.663.095.148,00	(460.097.571,00)	85,27
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	542.500.000,00	480.639.912,36	(61.860.087,64)	88,60
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	353.301.027,00	319.338.700,00	(33.962.327,00)	90,39
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.184.300,00	34.119.100,00	(6.065.200,00)	84,91
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	313.116.727,00	285.219.600,00	(27.897.127,00)	91,09
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	5.505.000,00	4.376.925,00	(1.128.075,00)	79,51
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.505.000,00	4.376.925,00	(1.128.075,00)	79,51
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.505.000,00	4.376.925,00	(1.128.075,00)	79,51
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.505.000,00	4.376.925,00	(1.128.075,00)	79,51
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.505.000,00	4.376.925,00	(1.128.075,00)	79,51

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.21			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**3.850.000,00**	**2.895.000,00**	**(955.000,00)**	**75,19**
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**3.850.000,00**	**2.895.000,00**	**(955.000,00)**	**75,19**
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**3.850.000,00**	**2.895.000,00**	**(955.000,00)**	**75,19**
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.850.000,00**	**2.895.000,00**	**(955.000,00)**	**75,19**
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.850.000,00**	**2.895.000,00**	**(955.000,00)**	**75,19**
2.22			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**643.712.000,00**	**600.964.100,00**	**(42.747.900,00)**	**93,36**
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**643.712.000,00**	**600.964.100,00**	**(42.747.900,00)**	**93,36**
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**643.712.000,00**	**600.964.100,00**	**(42.747.900,00)**	**93,36**
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**629.724.000,00**	**586.976.100,00**	**(42.747.900,00)**	**93,21**
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**629.724.000,00**	**586.976.100,00**	**(42.747.900,00)**	**93,21**
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**13.988.000,00**	**13.988.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**13.988.000,00**	**13.988.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.23			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**5.235.141.923,00**	**4.878.751.757,00**	**(356.390.166,00)**	**93,19**
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**5.235.141.923,00**	**4.878.751.757,00**	**(356.390.166,00)**	**93,19**
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**5.235.141.923,00**	**4.878.751.757,00**	**(356.390.166,00)**	**93,19**
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.235.141.923,00**	**4.878.751.757,00**	**(356.390.166,00)**	**93,19**
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**3.358.654.693,00**	**3.229.281.608,00**	**(129.373.085,00)**	**96,15**
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.876.487.230,00**	**1.649.470.149,00**	**(227.017.081,00)**	**87,90**
2.24			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**15.667.850,00**	**13.451.050,00**	**(2.216.800,00)**	**85,85**
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**15.667.850,00**	**13.451.050,00**	**(2.216.800,00)**	**85,85**
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**15.667.850,00**	**13.451.050,00**	**(2.216.800,00)**	**85,85**
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**15.667.850,00**	**13.451.050,00**	**(2.216.800,00)**	**85,85**
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**15.667.850,00**	**13.451.050,00**	**(2.216.800,00)**	**85,85**
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**12.463.283.192,00**	**9.762.042.925,98**	**(2.701.240.266,02)**	**78,33**
3.25			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**297.764.400,00**	**225.728.750,00**	**(72.035.650,00)**	**75,81**
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000		**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**	**297.764.400,00**	**225.728.750,00**	**(72.035.650,00)**	**75,81**
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**297.764.400,00**	**225.728.750,00**	**(72.035.650,00)**	**75,81**
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**272.764.400,00**	**225.728.750,00**	**(47.035.650,00)**	**82,76**
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**231.384.400,00**	**203.523.750,00**	**(27.860.650,00)**	**87,96**
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**	**41.380.000,00**	**22.205.000,00**	**(19.175.000,00)**	**53,66**
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**25.000.000,00**	**0,00**	**(25.000.000,00)**	**0,00**
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**25.000.000,00**	**0,00**	**(25.000.000,00)**	**0,00**
3.26			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**1.660.572.120,00**	**905.183.993,00**	**(755.388.127,00)**	**54,51**
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000		**DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA**	**1.660.572.120,00**	**905.183.993,00**	**(755.388.127,00)**	**54,51**
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**1.660.572.120,00**	**905.183.993,00**	**(755.388.127,00)**	**54,51**
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.610.572.120,00**	**855.455.993,00**	**(755.116.127,00)**	**53,12**
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.610.572.120,00**	**855.455.993,00**	**(755.116.127,00)**	**53,12**
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**50.000.000,00**	**49.728.000,00**	**(272.000,00)**	**99,46**
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**50.000.000,00**	**49.728.000,00**	**(272.000,00)**	**99,46**
3.27			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**2.127.459.660,00**	**1.887.178.877,00**	**(240.280.783,00)**	**88,71**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	2.127.459.660,00	1.887.178.877,00	(240.280.783,00)	88,71
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.127.459.660,00	1.887.178.877,00	(240.280.783,00)	88,71
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.127.459.660,00	1.887.178.877,00	(240.280.783,00)	88,71
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	828.934.660,00	686.693.877,00	(142.240.783,00)	82,84
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.298.525.000,00	1.200.485.000,00	(98.040.000,00)	92,45
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7.824.865.210,00	6.282.820.605,98	(1.542.044.604,02)	80,29
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	7.824.865.210,00	6.282.820.605,98	(1.542.044.604,02)	80,29
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.824.865.210,00	6.282.820.605,98	(1.542.044.604,02)	80,29
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.175.621.010,00	5.711.463.893,59	(1.464.157.116,41)	79,60
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	34.000.000,00	30.250.000,00	(3.750.000,00)	88,97
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.141.621.010,00	5.681.213.893,59	(1.460.407.116,41)	79,55
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	649.244.200,00	571.356.712,39	(77.887.487,61)	88,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.244.200,00	148.691.500,00	(74.552.700,00)	66,60
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	426.000.000,00	422.665.212,39	(3.334.787,61)	99,22
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	552.621.802,00	461.130.700,00	(91.491.102,00)	83,44
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	552.621.802,00	461.130.700,00	(91.491.102,00)	83,44
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	552.621.802,00	461.130.700,00	(91.491.102,00)	83,44
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	552.621.802,00	461.130.700,00	(91.491.102,00)	83,44
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.621.802,00	461.130.700,00	(91.491.102,00)	83,44
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	79.116.266.921,00	69.696.503.470,91	(9.419.763.450,09)	88,09
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	47.308.703.699,00	40.538.431.604,91	(6.770.272.094,09)	85,69
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DAERAH	47.308.703.699,00	40.538.431.604,91	(6.770.272.094,09)	85,69
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	47.308.703.699,00	40.538.431.604,91	(6.770.272.094,09)	85,69
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	44.137.593.519,00	37.856.701.685,91	(6.280.891.833,09)	85,77
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	15.777.108.069,00	15.223.602.463,00	(553.505.606,00)	96,49
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.787.485.450,00	21.439.196.862,91	(5.348.288.587,09)	80,03
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	910.000.000,00	743.902.360,00	(166.097.640,00)	81,75
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	663.000.000,00	450.000.000,00	(213.000.000,00)	67,87
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.171.110.180,00	2.681.729.919,00	(489.380.261,00)	84,57
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.171.110.180,00	2.681.729.919,00	(489.380.261,00)	84,57
4.02			SEKRETARIAT DPRD	31.807.563.222,00	29.158.071.866,00	(2.649.491.356,00)	91,67
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DPRD	31.807.563.222,00	29.158.071.866,00	(2.649.491.356,00)	91,67
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	31.807.563.222,00	29.158.071.866,00	(2.649.491.356,00)	91,67
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	30.715.837.022,00	28.239.833.974,00	(2.476.003.048,00)	91,94
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	11.293.106.196,00	11.001.049.708,00	(292.056.488,00)	97,41
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.422.730.826,00	17.238.784.266,00	(2.183.946.560,00)	88,76
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.091.726.200,00	918.237.892,00	(173.488.308,00)	84,11
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	321.726.200,00	208.393.023,00	(113.333.177,00)	64,77
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	770.000.000,00	709.844.869,00	(60.155.131,00)	92,19
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	32.564.061.875,06	23.298.160.361,00	(9.265.901.514,06)	71,55
5.01			PERENCANAAN	5.483.067.077,00	4.955.773.206,00	(527.293.871,00)	90,38
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.483.067.077,00	4.955.773.206,00	(527.293.871,00)	90,38
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.483.067.077,00	4.955.773.206,00	(527.293.871,00)	90,38

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.483.067.077,00	4.955.773.206,00	(527.293.871,00)	90,38
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.487.399.252,00	4.232.302.203,00	(255.097.049,00)	94,32
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	995.667.825,00	723.471.003,00	(272.196.822,00)	72,66
5.02			KEUANGAN	17.276.698.845,06	9.874.418.250,00	(7.402.280.595,06)	57,15
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	17.276.698.845,06	9.874.418.250,00	(7.402.280.595,06)	57,15
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	17.276.698.845,06	9.874.418.250,00	(7.402.280.595,06)	57,15
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.329.711.945,06	9.174.778.466,00	(1.154.933.479,06)	88,82
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.148.419.419,06	6.784.466.718,00	(363.952.701,06)	94,91
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.181.292.526,00	2.390.311.748,00	(790.980.778,00)	75,14
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	107.070.900,00	68.376.000,00	(38.694.900,00)	63,86
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.570.900,00	62.676.000,00	(894.900,00)	98,59
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.500.000,00	5.700.000,00	(7.800.000,00)	42,22
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.239.916.000,00	631.263.784,00	(5.608.652.216,00)	10,12
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.239.916.000,00	631.263.784,00	(5.608.652.216,00)	10,12
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	8.701.182.993,00	7.612.346.466,00	(1.088.836.527,00)	87,49
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.701.182.993,00	7.612.346.466,00	(1.088.836.527,00)	87,49
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.701.182.993,00	7.612.346.466,00	(1.088.836.527,00)	87,49
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.588.918.793,00	7.504.896.471,00	(1.084.022.322,00)	87,38
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.223.870.718,00	6.340.201.139,00	(883.669.579,00)	87,77
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.365.048.075,00	1.164.695.332,00	(200.352.743,00)	85,32
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	112.264.200,00	107.449.995,00	(4.814.205,00)	95,71
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.264.200,00	107.449.995,00	(4.814.205,00)	95,71
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	800.414.000,00	603.860.576,00	(196.553.424,00)	75,44
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	800.414.000,00	603.860.576,00	(196.553.424,00)	75,44
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	800.414.000,00	603.860.576,00	(196.553.424,00)	75,44
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	800.414.000,00	603.860.576,00	(196.553.424,00)	75,44
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.414.000,00	603.860.576,00	(196.553.424,00)	75,44
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	302.698.960,00	251.761.863,00	(50.937.097,00)	83,17
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	302.698.960,00	251.761.863,00	(50.937.097,00)	83,17
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	302.698.960,00	251.761.863,00	(50.937.097,00)	83,17
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	302.698.960,00	251.761.863,00	(50.937.097,00)	83,17
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.698.960,00	251.761.863,00	(50.937.097,00)	83,17
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	5.854.888.067,00	5.533.353.067,00	(321.535.000,00)	94,51
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	5.854.888.067,00	5.533.353.067,00	(321.535.000,00)	94,51
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		INSPEKTORAT DAERAH	5.854.888.067,00	5.533.353.067,00	(321.535.000,00)	94,51
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.854.888.067,00	5.533.353.067,00	(321.535.000,00)	94,51
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.762.141.067,00	5.440.608.066,00	(321.533.001,00)	94,42
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.826.175.457,00	4.580.077.350,00	(246.098.107,00)	94,90
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	935.965.610,00	860.530.716,00	(75.434.894,00)	91,94
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	92.747.000,00	92.745.001,00	(1.999,00)	100,00

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**92.747.000,00**	**92.745.001,00**	**(1.999,00)**	**100,00**
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**	**33.912.935.728,00**	**31.281.105.371,00**	**(2.631.830.357,00)**	**92,24**
7.01			**KECAMATAN**	**33.912.935.728,00**	**31.281.105.371,00**	**(2.631.830.357,00)**	**92,24**
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		**KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR**	**16.711.452.140,00**	**15.657.645.506,00**	**(1.053.806.634,00)**	**93,69**
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**16.711.452.140,00**	**15.657.645.506,00**	**(1.053.806.634,00)**	**93,69**
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**16.447.414.440,00**	**15.525.897.701,00**	**(921.516.739,00)**	**94,40**
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**8.651.571.995,00**	**8.527.413.146,00**	**(124.158.849,00)**	**98,56**
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**7.795.842.445,00**	**6.998.484.555,00**	**(797.357.890,00)**	**89,77**
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**264.037.700,00**	**131.747.805,00**	**(132.289.895,00)**	**49,90**
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**13.037.700,00**	**11.325.000,00**	**(1.712.700,00)**	**86,86**
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**251.000.000,00**	**120.422.805,00**	**(130.577.195,00)**	**47,98**
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		**KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT**	**17.201.483.588,00**	**15.623.459.865,00**	**(1.578.023.723,00)**	**90,83**
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**17.201.483.588,00**	**15.623.459.865,00**	**(1.578.023.723,00)**	**90,83**
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**16.981.314.388,00**	**15.559.626.165,00**	**(1.421.688.223,00)**	**91,63**
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	**Belanja Pegawai**	**7.939.063.278,00**	**7.799.881.221,00**	**(139.182.057,00)**	**98,25**
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**9.042.251.110,00**	**7.759.744.944,00**	**(1.282.506.166,00)**	**85,82**
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2	**BELANJA MODAL**	**220.169.200,00**	**63.833.700,00**	**(156.335.500,00)**	**28,99**
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**159.529.200,00**	**63.833.700,00**	**(95.695.500,00)**	**40,01**
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**60.640.000,00**	**0,00**	**(60.640.000,00)**	**0,00**
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**3.196.721.466,00**	**2.879.772.866,37**	**(316.948.599,63)**	**90,09**
8.01			**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**3.196.721.466,00**	**2.879.772.866,37**	**(316.948.599,63)**	**90,09**
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK**	**3.196.721.466,00**	**2.879.772.866,37**	**(316.948.599,63)**	**90,09**
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	5	**BELANJA DAERAH**	**3.196.721.466,00**	**2.879.772.866,37**	**(316.948.599,63)**	**90,09**
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.196.721.466,00**	**2.879.772.866,37**	**(316.948.599,63)**	**90,09**
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.692.736.550,00**	**1.380.007.614,00**	**(312.728.936,00)**	**81,53**
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	5.1.05	**Belanja Hibah**	**1.503.984.916,00**	**1.499.765.252,37**	**(4.219.663,63)**	**99,72**
			Jumlah	**(6.451.405.669,94)**	**33.345.863.647,95**	**39.797.269.317,89**	**(516,88)**

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.2
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAHAN KOTA PADANG PANJANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**587.001.204.447,00**	**565.000.090.757,76**	**96,25**	**583.202.667.534,88**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**112.742.349.470,00**	**100.426.050.107,76**	**89,07**	**94.371.566.806,88**
4.1.01	Pajak Daerah	20.372.697.142,00	17.367.910.078,00	85,25	9.688.742.631,00
4.1.02	Retribusi Daerah	75.740.473.872,00	63.852.882.614,00	84,30	64.086.171.794,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.991.779.256,00	7.991.779.256,00	100,00	7.922.888.824,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.637.399.200,00	11.213.478.159,76	129,82	12.673.763.557,88
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**112.742.349.470,00**	**100.426.050.107,76**	**89,07**	**94.371.566.806,88**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**470.208.854.977,00**	**460.518.396.206,00**	**97,93**	**488.770.713.144,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	438.168.129.880,00	435.977.261.779,00	99,49	459.088.864.897,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.040.725.097,00	24.541.134.427,00	76,59	29.681.848.247,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**32.040.725.097,00**	**24.541.134.427,00**	**76,59**	**29.681.848.247,00**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**470.208.854.977,00**	**460.518.396.206,00**	**97,93**	**488.770.713.144,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**4.050.000.000,00**	**4.055.644.444,00**	**100,13**	**60.387.584,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.644.444,00	0,00	60.387.584,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**4.050.000.000,00**	**4.055.644.444,00**	**100,13**	**60.387.584,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**587.001.204.447,00**	**565.000.090.757,76**	**96,25**	**583.202.667.534,88**
5	**BELANJA DAERAH**	**593.452.610.116,94**	**531.654.227.109,81**	**89,58**	**625.753.832.103,60**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**522.167.052.361,94**	**475.913.255.150,25**	**91,14**	**553.232.938.495,14**
5.1.01	Belanja Pegawai	295.830.460.825,06	278.088.171.575,00	94,00	311.212.828.135,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.570.338.118,88	183.618.653.458,52	87,20	214.426.378.424,14
5.1.04	Belanja Subsidi	134.546.684,00	60.700.008,00	45,11	4.456.800,00
5.1.05	Belanja Hibah	7.432.184.916,00	7.100.765.108,73	95,54	17.174.049.136,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.199.521.818,00	7.044.965.000,00	85,91	10.415.226.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**522.167.052.361,94**	**475.913.255.150,25**	**91,14**	**553.232.938.495,14**
5.2	**BELANJA MODAL**	**64.445.641.755,00**	**55.109.708.175,56**	**85,51**	**71.751.888.415,46**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	9.421.400,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.474.130.304,00	14.811.794.052,00	84,76	14.731.124.143,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.016.356.885,00	20.311.104.559,19	84,57	39.342.022.232,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.826.707.861,00	18.910.651.808,37	86,63	16.570.946.513,46
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	933.446.705,00	911.322.756,00	97,62	1.004.874.127,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	195.000.000,00	164.835.000,00	84,53	93.500.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**64.445.641.755,00**	**55.109.708.175,56**	**85,51**	**71.751.888.415,46**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**6.239.916.000,00**	**631.263.784,00**	**10,11**	**769.005.193,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.239.916.000,00	631.263.784,00	10,11	769.005.193,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**6.239.916.000,00**	**631.263.784,00**	**10,11**	**769.005.193,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**600.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**600.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH BELANJA	**593.452.610.116,94**	**531.654.227.109,81**	**89,58**	**625.753.832.103,60**
	SURPLUS/DEFISIT	**(6.451.405.669,94)**	**33.345.863.647,95**	**(516,87)**	**(42.551.164.568,72)**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**6.451.405.669,94**	**6.451.405.669,94**	**100,00**	**49.002.570.238,66**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**6.451.405.669,94**	**6.451.405.669,94**	**100,00**	**50.002.570.238,66**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	100,00	48.615.812.049,66
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	1.386.758.189,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**6.451.405.669,94**	**6.451.405.669,94**	**100,00**	**50.002.570.238,66**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**6.451.405.669,94**	**6.451.405.669,94**	**100,00**	**49.002.570.238,66**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**39.797.269.317,89**	**0,00**	**6.451.405.669,94**

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	112.588.067.195,00	105.847.309.383,08	(6.740.757.811,92)	94,01	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.065.091.839,00	72.074.907.923,00	(2.990.183.916,00)	96,01	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	72.442.326.025,00	69.972.573.722,00	(2.469.752.303,00)	96,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	72.442.326.025,00	69.972.573.722,00	(2.469.752.303,00)	96,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	72.442.326.025,00	69.972.573.722,00	(2.469.752.303,00)	96,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	72.442.326.025,00	69.972.573.722,00	(2.469.752.303,00)	96,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	484.330.000,00	418.860.177,00	(65.469.823,00)	86,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	484.330.000,00	418.860.177,00	(65.469.823,00)	86,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	484.330.000,00	418.860.177,00	(65.469.823,00)	86,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	484.330.000,00	418.860.177,00	(65.469.823,00)	86,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	330.624.238,00	275.079.256,00	(55.544.982,00)	83,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12.645.900,00	12.059.040,00	(586.860,00)	95,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.645.900,00	12.059.040,00	(586.860,00)	95,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.645.900,00	12.059.040,00	(586.860,00)	95,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	69.161.138,00	67.120.640,00	(2.040.498,00)	97,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	69.161.138,00	67.120.640,00	(2.040.498,00)	97,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.161.138,00	67.120.640,00	(2.040.498,00)	97,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	38.453.200,00	25.644.850,00	(12.808.350,00)	66,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	38.453.200,00	25.644.850,00	(12.808.350,00)	66,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.453.200,00	25.644.850,00	(12.808.350,00)	66,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	210.364.000,00	170.254.726,00	(40.109.274,00)	80,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	210.364.000,00	170.254.726,00	(40.109.274,00)	80,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.364.000,00	170.254.726,00	(40.109.274,00)	80,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	150.611.800,00	83.842.000,00	(66.769.800,00)	55,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	66.680.000,00	12.000.000,00	(54.680.000,00)	17,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	66.000.000,00	12.000.000,00	(54.000.000,00)	18,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.000.000,00	12.000.000,00	(54.000.000,00)	18,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	49.931.800,00	49.842.000,00	(89.800,00)	99,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	49.931.800,00	49.842.000,00	(89.800,00)	99,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.931.800,00	49.842.000,00	(89.800,00)	99,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	34.000.000,00	22.000.000,00	(12.000.000,00)	64,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	34.000.000,00	22.000.000,00	(12.000.000,00)	64,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.000.000,00	22.000.000,00	(12.000.000,00)	64,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.028.499.776,00	819.060.418,00	(209.439.358,00)	79,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.005.800,00	2.470.000,00	(535.800,00)	82,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.005.800,00	2.470.000,00	(535.800,00)	82,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.005.800,00	2.470.000,00	(535.800,00)	82,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	131.385.976,00	78.676.948,00	(52.709.028,00)	59,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	131.385.976,00	78.676.948,00	(52.709.028,00)	59,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.385.976,00	78.676.948,00	(52.709.028,00)	59,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	894.108.000,00	737.913.470,00	(156.194.530,00)	82,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	894.108.000,00	737.913.470,00	(156.194.530,00)	82,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	894.108.000,00	737.913.470,00	(156.194.530,00)	82,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	628.700.000,00	505.492.350,00	(123.207.650,00)	80,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	194.288.000,00	85.689.350,00	(108.598.650,00)	44,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	194.288.000,00	85.689.350,00	(108.598.650,00)	44,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.288.000,00	85.689.350,00	(108.598.650,00)	44,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	25.000.000,00	10.594.000,00	(14.406.000,00)	42,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	10.594.000,00	(14.406.000,00)	42,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	10.594.000,00	(14.406.000,00)	42,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	9.740.000,00	9.560.000,00	(180.000,00)	98,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.740.000,00	9.560.000,00	(180.000,00)	98,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.740.000,00	9.560.000,00	(180.000,00)	98,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	399.672.000,00	399.649.000,00	(23.000,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	399.672.000,00	399.649.000,00	(23.000,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.672.000,00	399.649.000,00	(23.000,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	37.522.975.356,00	33.772.401.460,08	(3.750.573.895,92)	90,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	17.833.797.800,00	15.982.482.959,80	(1.851.314.840,20)	89,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	3.327.242.100,00	2.849.617.380,50	(477.624.719,50)	85,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	172.685.000,00	119.931.975,00	(52.753.025,00)	69,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.685.000,00	119.931.975,00	(52.753.025,00)	69,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	3.154.557.100,00	2.729.685.405,50	(424.871.694,50)	86,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.648.200,00	55.194.750,00	(453.450,00)	99,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.098.908.900,00	2.674.490.655,50	(424.418.244,50)	86,30	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	290.000.000,00	285.935.112,00	(4.064.888,00)	98,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	290.000.000,00	285.935.112,00	(4.064.888,00)	98,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	290.000.000,00	285.935.112,00	(4.064.888,00)	98,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016		PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	82.500.000,00	82.417.500,00	(82.500,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.2	BELANJA MODAL	82.500.000,00	82.417.500,00	(82.500,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	82.500.000,00	82.417.500,00	(82.500,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0019		PEMELIHARAAN RUTIN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	305.000.000,00	304.175.598,00	(824.402,00)	99,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	305.000.000,00	304.175.598,00	(824.402,00)	99,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.000.000,00	304.175.598,00	(824.402,00)	99,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	131.423.800,00	91.952.700,00	(39.471.100,00)	69,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	131.423.800,00	91.952.700,00	(39.471.100,00)	69,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.423.800,00	91.952.700,00	(39.471.100,00)	69,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	2.856.504.000,00	2.400.690.690,00	(455.813.310,00)	84,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	2.856.504.000,00	2.400.690.690,00	(455.813.310,00)	84,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.856.504.000,00	2.400.690.690,00	(455.813.310,00)	84,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	532.846.900,00	317.782.499,00	(215.064.401,00)	59,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	532.846.900,00	317.782.499,00	(215.064.401,00)	59,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.846.900,00	317.782.499,00	(215.064.401,00)	59,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	30.000.000,00	16.011.100,00	(13.988.900,00)	53,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	16.011.100,00	(13.988.900,00)	53,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	16.011.100,00	(13.988.900,00)	53,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	5.611.750.000,00	5.469.914.364,00	(141.835.636,00)	97,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	4.478.222.664,00	4.355.146.857,00	(123.075.807,00)	97,25	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.981.522.664,00	2.893.213.365,00	(88.309.299,00)	97,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.05	Belanja Hibah	1.496.700.000,00	1.461.933.492,00	(34.766.508,00)	97,67	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	1.133.527.336,00	1.114.767.507,00	(18.759.829,00)	98,34	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	546.927.631,00	542.263.851,00	(4.663.780,00)	99,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	586.599.705,00	572.503.656,00	(14.096.049,00)	97,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	20.000.000,00	6.918.450,00	(13.081.550,00)	34,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	6.918.450,00	(13.081.550,00)	34,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	6.918.450,00	(13.081.550,00)	34,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	20.000.000,00	3.338.250,00	(16.661.750,00)	16,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	3.338.250,00	(16.661.750,00)	16,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	3.338.250,00	(16.661.750,00)	16,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0042		PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TIK	93.886.000,00	92.907.000,00	(979.000,00)	98,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0042	5.1	BELANJA OPERASI	93.886.000,00	92.907.000,00	(979.000,00)	98,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.886.000,00	92.907.000,00	(979.000,00)	98,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0045		PERLENGKAPAN DASAR BUKU TEKS DAN NON TEKS PESERTA DIDIK	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0045	5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0045	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	136.890.000,00	129.715.950,00	(7.174.050,00)	94,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	136.890.000,00	129.715.950,00	(7.174.050,00)	94,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.890.000,00	129.715.950,00	(7.174.050,00)	94,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	3.804.600.000,00	3.446.754.816,30	(357.845.183,70)	90,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.2	BELANJA MODAL	3.792.600.000,00	3.446.754.816,30	(345.845.183,70)	90,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.982.000,00	0,00	(128.982.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.663.618.000,00	3.446.754.816,30	(216.863.183,70)	94,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	87.725.000,00	34.351.550,00	(53.373.450,00)	39,15	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	87.725.000,00	34.351.550,00	(53.373.450,00)	39,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.725.000,00	34.351.550,00	(53.373.450,00)	39,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR	333.430.000,00	280.000.000,00	(53.430.000,00)	83,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	5.1	BELANJA OPERASI	333.430.000,00	280.000.000,00	(53.430.000,00)	83,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.930.000,00	0,00	(6.930.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	326.500.000,00	280.000.000,00	(46.500.000,00)	85,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	10.342.481.650,00	9.010.169.057,70	(1.332.312.592,30)	87,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	214.143.460,00	182.064.613,20	(32.078.846,80)	85,01	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	118.205.000,00	110.930.130,00	(7.274.870,00)	93,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.205.000,00	110.930.130,00	(7.274.870,00)	93,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2	BELANJA MODAL	95.938.460,00	71.134.483,20	(24.803.976,80)	74,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.938.460,00	71.134.483,20	(24.803.976,80)	74,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	1.831.070.000,00	1.696.041.810,50	(135.028.189,50)	92,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.1	BELANJA OPERASI	157.330.000,00	148.733.880,00	(8.596.120,00)	94,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.330.000,00	148.733.880,00	(8.596.120,00)	94,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.2	BELANJA MODAL	1.673.740.000,00	1.547.307.930,50	(126.432.069,50)	92,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.673.740.000,00	1.547.307.930,50	(126.432.069,50)	92,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	960.479.100,00	903.992.107,00	(56.486.993,00)	94,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	264.000.000,00	227.976.062,00	(36.023.938,00)	86,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.000.000,00	227.976.062,00	(36.023.938,00)	86,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2	BELANJA MODAL	696.479.100,00	676.016.045,00	(20.463.055,00)	97,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	696.479.100,00	676.016.045,00	(20.463.055,00)	97,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027		PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	84.150.000,00	82.417.500,00	(1.732.500,00)	97,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.1	BELANJA OPERASI	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.2	BELANJA MODAL	82.500.000,00	82.417.500,00	(82.500,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	82.500.000,00	82.417.500,00	(82.500,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0030		PEMELIHARAAN RUTIN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	300.000.000,00	291.560.408,00	(8.439.592,00)	97,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0030	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	291.560.408,00	(8.439.592,00)	97,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	291.560.408,00	(8.439.592,00)	97,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	267.990.000,00	195.991.400,00	(71.998.600,00)	73,13	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	267.990.000,00	195.991.400,00	(71.998.600,00)	73,13	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.490.000,00	491.400,00	(4.998.600,00)	8,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	262.500.000,00	195.500.000,00	(67.000.000,00)	74,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	194.712.500,00	128.587.100,00	(66.125.400,00)	66,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	194.712.500,00	128.587.100,00	(66.125.400,00)	66,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.712.500,00	128.587.100,00	(66.125.400,00)	66,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	1.369.418.400,00	999.146.698,00	(370.271.702,00)	72,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1	BELANJA OPERASI	1.369.418.400,00	999.146.698,00	(370.271.702,00)	72,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.369.418.400,00	999.146.698,00	(370.271.702,00)	72,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	227.762.800,00	98.896.065,00	(128.866.735,00)	43,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	227.762.800,00	98.896.065,00	(128.866.735,00)	43,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.762.800,00	98.896.065,00	(128.866.735,00)	43,42	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	3.871.500.000,00	3.761.780.776,00	(109.719.224,00)	97,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	2.848.574.459,00	2.749.843.336,00	(98.731.123,00)	96,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.348.274.459,00	2.273.022.109,00	(75.252.350,00)	96,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.05	Belanja Hibah	500.300.000,00	476.821.227,00	(23.478.773,00)	95,30	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2	BELANJA MODAL	1.022.925.541,00	1.011.937.440,00	(10.988.101,00)	98,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	706.280.541,00	703.320.340,00	(2.960.201,00)	99,58	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	316.645.000,00	308.617.100,00	(8.027.900,00)	97,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	13.965.000,00	3.591.300,00	(10.373.700,00)	25,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1	BELANJA OPERASI	13.965.000,00	3.591.300,00	(10.373.700,00)	25,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.965.000,00	3.591.300,00	(10.373.700,00)	25,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	20.000.000,00	10.549.300,00	(9.450.700,00)	52,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	10.549.300,00	(9.450.700,00)	52,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.549.300,00	(9.450.700,00)	52,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	270.000.000,00	0,00	(270.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1	BELANJA OPERASI	270.000.000,00	0,00	(270.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	0,00	(270.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0061		PERLENGKAPAN DASAR BUKU TEKS DAN NON TEKS PESERTA DIDIK	115.254.000,00	115.241.000,00	(13.000,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0061	5.1	BELANJA OPERASI	115.254.000,00	115.241.000,00	(13.000,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0061	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.254.000,00	115.241.000,00	(13.000,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	452.176.390,00	391.457.980,00	(60.718.410,00)	86,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	5.1	BELANJA OPERASI	452.176.390,00	391.457.980,00	(60.718.410,00)	86,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.176.390,00	391.457.980,00	(60.718.410,00)	86,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	30.000.000,00	29.970.000,00	(30.000,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	29.970.000,00	(30.000,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.970.000,00	(30.000,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0068		PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TIK	119.860.000,00	118.881.000,00	(979.000,00)	99,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0068	5.1	BELANJA OPERASI	119.860.000,00	118.881.000,00	(979.000,00)	99,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0068	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.860.000,00	118.881.000,00	(979.000,00)	99,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03		PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	7.324.054.426,00	7.015.581.945,00	(308.472.481,00)	95,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009		PENGADAAN PERLENGKAPAN PAUD	870.099.000,00	831.731.765,00	(38.367.235,00)	95,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	870.099.000,00	831.731.765,00	(38.367.235,00)	95,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.099.000,00	0,00	(23.099.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.1.05	Belanja Hibah	847.000.000,00	831.731.765,00	(15.268.235,00)	98,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK PAUD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PAUD	4.370.700.000,00	4.191.100.000,00	(179.600.000,00)	95,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	5.1	BELANJA OPERASI	4.370.700.000,00	4.191.100.000,00	(179.600.000,00)	95,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.370.700.000,00	4.191.100.000,00	(179.600.000,00)	95,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD	343.776.600,00	311.014.470,00	(32.762.130,00)	90,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1	BELANJA OPERASI	343.776.600,00	311.014.470,00	(32.762.130,00)	90,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.776.600,00	311.014.470,00	(32.762.130,00)	90,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	49.870.000,00	27.605.220,00	(22.264.780,00)	55,35	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1	BELANJA OPERASI	49.870.000,00	27.605.220,00	(22.264.780,00)	55,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.870.000,00	27.605.220,00	(22.264.780,00)	55,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018		PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	1.363.800.000,00	1.338.034.300,00	(25.765.700,00)	98,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1	BELANJA OPERASI	1.341.470.000,00	1.315.704.300,00	(25.765.700,00)	98,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.070.000,00	85.033.200,00	(36.800,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.05	Belanja Hibah	1.256.400.000,00	1.230.671.100,00	(25.728.900,00)	97,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2	BELANJA MODAL	22.330.000,00	22.330.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.330.000,00	12.330.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	14.115.000,00	11.073.825,00	(3.041.175,00)	78,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	5.1	BELANJA OPERASI	14.115.000,00	11.073.825,00	(3.041.175,00)	78,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.115.000,00	11.073.825,00	(3.041.175,00)	78,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	15.760.000,00	14.209.675,00	(1.550.325,00)	90,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	5.1	BELANJA OPERASI	15.760.000,00	14.209.675,00	(1.550.325,00)	90,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.760.000,00	14.209.675,00	(1.550.325,00)	90,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0041		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	19.944.496,00	19.944.496,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0041	5.1	BELANJA OPERASI	19.944.496,00	19.944.496,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.944.496,00	19.944.496,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0045		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	175.000.000,00	170.701.114,00	(4.298.886,00)	97,54	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0045	5.1	BELANJA OPERASI	1.420.000,00	0,00	(1.420.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0045	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.420.000,00	0,00	(1.420.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0045	5.2	BELANJA MODAL	173.580.000,00	170.701.114,00	(2.878.886,00)	98,34	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0045	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	173.580.000,00	170.701.114,00	(2.878.886,00)	98,34	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK PAUD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.1.05	Belanja Hibah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD	79.989.330,00	79.167.080,00	(822.250,00)	98,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047	5.1	BELANJA OPERASI	79.989.330,00	79.167.080,00	(822.250,00)	98,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.989.330,00	79.167.080,00	(822.250,00)	98,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04		PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	2.022.641.480,00	1.764.167.497,58	(258.473.982,42)	87,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	94.466.300,00	86.116.000,00	(8.350.300,00)	91,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014	5.1	BELANJA OPERASI	94.466.300,00	86.116.000,00	(8.350.300,00)	91,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.466.300,00	86.116.000,00	(8.350.300,00)	91,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	34.651.500,00	20.382.603,00	(14.268.897,00)	58,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	5.1	BELANJA OPERASI	34.651.500,00	20.382.603,00	(14.268.897,00)	58,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.651.500,00	20.382.603,00	(14.268.897,00)	58,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	12.197.800,00	93.146.350,00	80.948.550,00	763,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1	BELANJA OPERASI	12.197.800,00	93.146.350,00	80.948.550,00	763,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.197.800,00	6.796.350,00	(5.401.450,00)	55,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1.05	Belanja Hibah	0,00	86.350.000,00	86.350.000,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017		PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	437.900.000,00	350.700.000,00	(87.200.000,00)	80,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	382.698.000,00	295.498.000,00	(87.200.000,00)	77,21	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.398.000,00	126.548.000,00	(850.000,00)	99,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	255.300.000,00	168.950.000,00	(86.350.000,00)	66,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2	BELANJA MODAL	55.202.000,00	55.202.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.202.000,00	20.202.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0018		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	7.677.850,00	4.350.300,00	(3.327.550,00)	56,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0018	5.1	BELANJA OPERASI	7.677.850,00	4.350.300,00	(3.327.550,00)	56,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.677.850,00	4.350.300,00	(3.327.550,00)	56,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	12.143.850,00	10.870.175,00	(1.273.675,00)	89,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027	5.1	BELANJA OPERASI	12.143.850,00	10.870.175,00	(1.273.675,00)	89,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.143.850,00	10.870.175,00	(1.273.675,00)	89,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0039		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	1.356.749.900,00	1.140.624.714,58	(216.125.185,42)	84,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0039	5.1	BELANJA OPERASI	10.749.900,00	0,00	(10.749.900,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.749.900,00	0,00	(10.749.900,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0039	5.2	BELANJA MODAL	1.346.000.000,00	1.140.624.714,58	(205.375.285,42)	84,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0039	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.867.702,00	0,00	(96.867.702,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0039	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.249.132.298,00	1.140.624.714,58	(108.507.583,42)	91,31	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	66.854.280,00	57.977.355,00	(8.876.925,00)	86,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1	BELANJA OPERASI	52.866.280,00	43.989.355,00	(8.876.925,00)	83,20	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.866.280,00	43.989.355,00	(8.876.925,00)	83,20	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.2	BELANJA MODAL	13.988.000,00	13.988.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.988.000,00	13.988.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	112.588.067.195,00	105.847.309.383,08	(6.740.757.811,92)	94,01	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(112.588.067.195,00)	(105.847.309.383,08)	6.740.757.811,92	94,01	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(112.588.067.195,00)	(105.847.309.383,08)	6.740.757.811,92	94,01	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	643.712.000,00	600.964.100,00	(42.747.900,00)	93,35	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	643.712.000,00	600.964.100,00	(42.747.900,00)	93,35	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01		PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	383.919.000,00	352.475.325,00	(31.443.675,00)	91,80	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	383.919.000,00	352.475.325,00	(31.443.675,00)	91,80	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	383.919.000,00	352.475.325,00	(31.443.675,00)	91,80	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	383.919.000,00	352.475.325,00	(31.443.675,00)	91,80	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02		PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	88.769.000,00	87.272.325,00	(1.496.675,00)	98,31	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA	26.621.000,00	26.440.500,00	(180.500,00)	99,32	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.621.000,00	26.440.500,00	(180.500,00)	99,32	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.621.000,00	26.440.500,00	(180.500,00)	99,32	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA TRADISIONAL	62.148.000,00	60.831.825,00	(1.316.175,00)	97,88	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.160.000,00	46.843.825,00	(1.316.175,00)	97,26	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.160.000,00	46.843.825,00	(1.316.175,00)	97,26	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	13.988.000,00	13.988.000,00	0,00	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.988.000,00	13.988.000,00	0,00	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03		PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	171.024.000,00	161.216.450,00	(9.807.550,00)	94,26	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN LEMBAGA ADAT	151.524.000,00	141.776.450,00	(9.747.550,00)	93,56	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	151.524.000,00	141.776.450,00	(9.747.550,00)	93,56	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.524.000,00	141.776.450,00	(9.747.550,00)	93,56	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0003		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN LEMBAGA ADAT	19.500.000,00	19.440.000,00	(60.000,00)	99,69	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	19.440.000,00	(60.000,00)	99,69	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	19.440.000,00	(60.000,00)	99,69	
				JUMLAH BELANJA	643.712.000,00	600.964.100,00	(42.747.900,00)	93,35	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(643.712.000,00)	(600.964.100,00)	42.747.900,00	93,35	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(643.712.000,00)	(600.964.100,00)	42.747.900,00	93,35	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : DINAS KESEHATAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	70.213.334.897,00	61.572.219.094,00	(8.641.115.803,00)	87,69	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.213.334.897,00	61.572.219.094,00	(8.641.115.803,00)	87,69	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	65.599.756.697,00	56.780.775.554,00	(8.818.981.143,00)	86,55	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.613.578.200,00	4.791.443.540,00	177.865.340,00	103,85	
				JUMLAH PENDAPATAN	70.213.334.897,00	61.572.219.094,00	(8.641.115.803,00)	87,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	164.925.438.036,88	149.772.636.265,32	(15.152.801.771,56)	90,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	134.348.905.357,88	121.982.952.829,00	(12.365.952.528,88)	90,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	62.157.613.826,00	59.570.055.279,00	(2.587.558.547,00)	95,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	62.157.613.826,00	59.570.055.279,00	(2.587.558.547,00)	95,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	62.157.613.826,00	59.570.055.279,00	(2.587.558.547,00)	95,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	62.157.613.826,00	59.570.055.279,00	(2.587.558.547,00)	95,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	173.294.066,00	135.551.610,00	(37.742.456,00)	78,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.779.920,00	3.388.000,00	(1.391.920,00)	70,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.779.920,00	3.388.000,00	(1.391.920,00)	70,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.779.920,00	3.388.000,00	(1.391.920,00)	70,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	26.219.146,00	24.681.000,00	(1.538.146,00)	94,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	26.219.146,00	24.681.000,00	(1.538.146,00)	94,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.219.146,00	24.681.000,00	(1.538.146,00)	94,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.910.000,00	11.547.840,00	(1.362.160,00)	89,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.910.000,00	11.547.840,00	(1.362.160,00)	89,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.910.000,00	11.547.840,00	(1.362.160,00)	89,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	129.385.000,00	95.934.770,00	(33.450.230,00)	74,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	129.385.000,00	95.934.770,00	(33.450.230,00)	74,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.385.000,00	95.934.770,00	(33.450.230,00)	74,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	30.644.100,00	26.517.000,00	(4.127.100,00)	86,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	30.644.100,00	26.517.000,00	(4.127.100,00)	86,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.128.300,00	0,00	(1.128.300,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.128.300,00	0,00	(1.128.300,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	29.515.800,00	26.517.000,00	(2.998.800,00)	89,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.515.800,00	26.517.000,00	(2.998.800,00)	89,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.297.065.370,00	1.109.953.696,00	(187.111.674,00)	85,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	997.900,00	990.000,00	(7.900,00)	99,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	997.900,00	990.000,00	(7.900,00)	99,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	997.900,00	990.000,00	(7.900,00)	99,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	219.709.070,00	174.224.625,00	(45.484.445,00)	79,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	219.709.070,00	174.224.625,00	(45.484.445,00)	79,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.709.070,00	174.224.625,00	(45.484.445,00)	79,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.076.358.400,00	934.739.071,00	(141.619.329,00)	86,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.076.358.400,00	934.739.071,00	(141.619.329,00)	86,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.076.358.400,00	934.739.071,00	(141.619.329,00)	86,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	435.736.845,00	281.854.638,00	(153.882.207,00)	64,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	11.905.600,00	8.652.550,00	(3.253.050,00)	72,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.905.600,00	8.652.550,00	(3.253.050,00)	72,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.905.600,00	8.652.550,00	(3.253.050,00)	72,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	368.461.245,00	242.896.838,00	(125.564.407,00)	65,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	368.461.245,00	242.896.838,00	(125.564.407,00)	65,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.461.245,00	242.896.838,00	(125.564.407,00)	65,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	40.370.000,00	22.217.250,00	(18.152.750,00)	55,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	40.370.000,00	22.217.250,00	(18.152.750,00)	55,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.370.000,00	22.217.250,00	(18.152.750,00)	55,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	15.000.000,00	8.088.000,00	(6.912.000,00)	53,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	8.088.000,00	(6.912.000,00)	53,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	8.088.000,00	(6.912.000,00)	53,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	70.254.551.150,88	60.859.020.606,00	(9.395.530.544,88)	86,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	70.254.551.150,88	60.859.020.606,00	(9.395.530.544,88)	86,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	64.251.603.550,88	56.322.357.554,00	(7.929.245.996,88)	87,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	30.731.202.492,00	23.179.410.343,00	(7.551.792.149,00)	75,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.520.401.058,88	33.142.947.211,00	(377.453.847,88)	98,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	6.002.947.600,00	4.536.663.052,00	(1.466.284.548,00)	75,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.302.947.600,00	3.886.774.818,00	(1.416.172.782,00)	73,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	700.000.000,00	649.888.234,00	(50.111.766,00)	92,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	29.164.265.229,00	26.622.723.814,32	(2.541.541.414,68)	91,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.542.686.820,00	12.379.152.129,32	(1.163.534.690,68)	91,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002		PEMBANGUNAN PUSKESMAS	936.000.000,00	740.595.804,00	(195.404.196,00)	79,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	936.000.000,00	740.595.804,00	(195.404.196,00)	79,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	936.000.000,00	740.595.804,00	(195.404.196,00)	79,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007		PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	1.396.317.920,00	1.374.905.001,00	(21.412.919,00)	98,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	1.396.317.920,00	1.374.905.001,00	(21.412.919,00)	98,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	670.000.000,00	649.905.000,00	(20.095.000,00)	97,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	726.317.920,00	725.000.001,00	(1.317.919,00)	99,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	322.910.000,00	264.292.175,00	(58.617.825,00)	81,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	58.650.000,00	1.750.000,00	(56.900.000,00)	2,98	

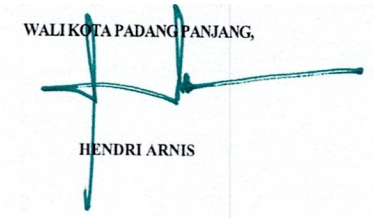
KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.650.000,00	1.750.000,00	(56.900.000,00)	2,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	264.260.000,00	262.542.175,00	(1.717.825,00)	99,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	264.260.000,00	262.542.175,00	(1.717.825,00)	99,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	1.180.500.000,00	1.155.570.500,00	(24.929.500,00)	97,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	1.180.000.000,00	1.155.570.500,00	(24.429.500,00)	97,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.180.000.000,00	1.155.570.500,00	(24.429.500,00)	97,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020		PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	103.982.400,00	103.929.588,00	(52.812,00)	99,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	103.982.400,00	103.929.588,00	(52.812,00)	99,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.982.400,00	103.929.588,00	(52.812,00)	99,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0022		PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT	8.250.351.500,00	7.409.995.520,72	(840.355.979,28)	89,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	8.250.351.500,00	7.409.995.520,72	(840.355.979,28)	89,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0022	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.250.351.500,00	7.409.995.520,72	(840.355.979,28)	89,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	1.352.625.000,00	1.329.863.540,60	(22.761.459,40)	98,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	1.352.625.000,00	1.329.863.540,60	(22.761.459,40)	98,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.352.625.000,00	1.329.863.540,60	(22.761.459,40)	98,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.601.378.409,00	14.228.871.685,00	(1.372.506.724,00)	91,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	161.790.000,00	121.356.194,00	(40.433.806,00)	75,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	161.790.000,00	121.356.194,00	(40.433.806,00)	75,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.790.000,00	121.356.194,00	(40.433.806,00)	75,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	20.000.100,00	19.971.498,00	(28.602,00)	99,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.100,00	19.971.498,00	(28.602,00)	99,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.100,00	19.971.498,00	(28.602,00)	99,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	20.000.000,00	18.950.000,00	(1.050.000,00)	94,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	18.950.000,00	(1.050.000,00)	94,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.950.000,00	(1.050.000,00)	94,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	19.999.700,00	19.991.400,00	(8.300,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.999.700,00	19.991.400,00	(8.300,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.700,00	19.991.400,00	(8.300,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	174.250.000,00	149.765.200,00	(24.484.800,00)	85,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	174.250.000,00	149.765.200,00	(24.484.800,00)	85,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.250.000,00	149.765.200,00	(24.484.800,00)	85,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	89.490.000,00	67.781.000,00	(21.709.000,00)	75,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	89.490.000,00	67.781.000,00	(21.709.000,00)	75,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.490.000,00	67.781.000,00	(21.709.000,00)	75,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	360.968.920,00	326.055.905,00	(34.913.015,00)	90,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	360.968.920,00	326.055.905,00	(34.913.015,00)	90,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.968.920,00	326.055.905,00	(34.913.015,00)	90,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	34.998.800,00	34.796.520,00	(202.280,00)	99,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	34.998.800,00	34.796.520,00	(202.280,00)	99,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.998.800,00	34.796.520,00	(202.280,00)	99,42	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	218.177.100,00	210.641.000,00	(7.536.100,00)	96,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	218.177.100,00	210.641.000,00	(7.536.100,00)	96,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.177.100,00	210.641.000,00	(7.536.100,00)	96,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	42.594.600,00	35.002.500,00	(7.592.100,00)	82,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	42.594.600,00	35.002.500,00	(7.592.100,00)	82,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.594.600,00	35.002.500,00	(7.592.100,00)	82,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	23.400.000,00	17.350.000,00	(6.050.000,00)	74,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	23.400.000,00	17.350.000,00	(6.050.000,00)	74,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	17.350.000,00	(6.050.000,00)	74,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	67.106.800,00	63.164.000,00	(3.942.800,00)	94,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	67.106.800,00	63.164.000,00	(3.942.800,00)	94,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.106.800,00	63.164.000,00	(3.942.800,00)	94,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)	41.103.800,00	8.388.250,00	(32.715.550,00)	20,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	41.103.800,00	8.388.250,00	(32.715.550,00)	20,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.103.800,00	8.388.250,00	(32.715.550,00)	20,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	1.529.795.950,00	1.394.872.624,00	(134.923.326,00)	91,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	1.529.795.950,00	1.394.872.624,00	(134.923.326,00)	91,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.529.795.950,00	1.394.872.624,00	(134.923.326,00)	91,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	99.848.400,00	92.783.750,00	(7.064.650,00)	92,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	99.848.400,00	92.783.750,00	(7.064.650,00)	92,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.848.400,00	92.783.750,00	(7.064.650,00)	92,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	161.850.000,00	74.154.450,00	(87.695.550,00)	45,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	161.850.000,00	74.154.450,00	(87.695.550,00)	45,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.850.000,00	74.154.450,00	(87.695.550,00)	45,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	117.156.000,00	104.800.230,00	(12.355.770,00)	89,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	117.156.000,00	104.800.230,00	(12.355.770,00)	89,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.156.000,00	104.800.230,00	(12.355.770,00)	89,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	71.310.000,00	36.500.050,00	(34.809.950,00)	51,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	71.310.000,00	36.500.050,00	(34.809.950,00)	51,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.310.000,00	36.500.050,00	(34.809.950,00)	51,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	25.400.000,00	15.550.000,00	(9.850.000,00)	61,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	25.400.000,00	15.550.000,00	(9.850.000,00)	61,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	15.550.000,00	(9.850.000,00)	61,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	723.024.500,00	608.941.380,00	(114.083.120,00)	84,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	723.024.500,00	608.941.380,00	(114.083.120,00)	84,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	723.024.500,00	608.941.380,00	(114.083.120,00)	84,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	9.045.649.492,00	8.665.279.786,00	(380.369.706,00)	95,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	9.045.649.492,00	8.665.279.786,00	(380.369.706,00)	95,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.045.649.492,00	8.665.279.786,00	(380.369.706,00)	95,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028		PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL	5.380.000,00	440.000,00	(4.940.000,00)	8,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	5.380.000,00	440.000,00	(4.940.000,00)	8,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.380.000,00	440.000,00	(4.940.000,00)	8,17	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029		PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT	54.200.000,00	42.881.550,00	(11.318.450,00)	79,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1	BELANJA OPERASI	54.200.000,00	42.881.550,00	(11.318.450,00)	79,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.200.000,00	42.881.550,00	(11.318.450,00)	79,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	722.953.000,00	587.383.977,00	(135.569.023,00)	81,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	722.953.000,00	587.383.977,00	(135.569.023,00)	81,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	722.953.000,00	587.383.977,00	(135.569.023,00)	81,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034		OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	132.272.000,00	82.208.200,00	(50.063.800,00)	62,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	132.272.000,00	82.208.200,00	(50.063.800,00)	62,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.272.000,00	82.208.200,00	(50.063.800,00)	62,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035		PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA	10.000.100,00	9.925.650,00	(74.450,00)	99,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.100,00	9.925.650,00	(74.450,00)	99,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.100,00	9.925.650,00	(74.450,00)	99,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0038		PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT)	918.691.247,00	804.932.691,00	(113.758.556,00)	87,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	910.926.047,00	804.932.691,00	(105.993.356,00)	88,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	910.926.047,00	804.932.691,00	(105.993.356,00)	88,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0038	5.2	BELANJA MODAL	7.765.200,00	0,00	(7.765.200,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0038	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.765.200,00	0,00	(7.765.200,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	267.940.900,00	264.704.900,00	(3.236.000,00)	98,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	267.940.900,00	264.704.900,00	(3.236.000,00)	98,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.940.900,00	264.704.900,00	(3.236.000,00)	98,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	30.636.000,00	28.401.980,00	(2.234.020,00)	92,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	30.636.000,00	28.401.980,00	(2.234.020,00)	92,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.636.000,00	28.401.980,00	(2.234.020,00)	92,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	280.091.000,00	233.447.000,00	(46.644.000,00)	83,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	280.091.000,00	233.447.000,00	(46.644.000,00)	83,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.091.000,00	233.447.000,00	(46.644.000,00)	83,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	41.000.000,00	40.300.000,00	(700.000,00)	98,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	41.000.000,00	40.300.000,00	(700.000,00)	98,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	40.300.000,00	(700.000,00)	98,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0048		PENGELOLAAN LAYANAN IMUNISASI	90.300.000,00	48.150.000,00	(42.150.000,00)	53,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0048	5.1	BELANJA OPERASI	90.300.000,00	48.150.000,00	(42.150.000,00)	53,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.300.000,00	48.150.000,00	(42.150.000,00)	53,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	20.200.000,00	14.700.000,00	(5.500.000,00)	72,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	20.200.000,00	14.700.000,00	(5.500.000,00)	72,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.200.000,00	14.700.000,00	(5.500.000,00)	72,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	14.700.000,00	(5.500.000,00)	72,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	384.083.150,00	342.140.750,00	(41.942.400,00)	89,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01		PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	10.000.300,00	6.094.100,00	(3.906.200,00)	60,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN SERTA TINDAK LANJUT PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	10.000.300,00	6.094.100,00	(3.906.200,00)	60,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.300,00	6.094.100,00	(3.906.200,00)	60,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.300,00	6.094.100,00	(3.906.200,00)	60,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	374.082.850,00	336.046.650,00	(38.036.200,00)	89,83	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	374.082.850,00	336.046.650,00	(38.036.200,00)	89,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	374.082.850,00	336.046.650,00	(38.036.200,00)	89,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.082.850,00	336.046.650,00	(38.036.200,00)	89,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	497.679.700,00	376.758.942,00	(120.920.758,00)	75,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01		PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	66.840.850,00	60.103.800,00	(6.737.050,00)	89,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	66.840.850,00	60.103.800,00	(6.737.050,00)	89,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	66.840.850,00	60.103.800,00	(6.737.050,00)	89,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.840.850,00	60.103.800,00	(6.737.050,00)	89,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03		PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	132.963.500,00	122.922.975,00	(10.040.525,00)	92,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	132.963.500,00	122.922.975,00	(10.040.525,00)	92,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	132.963.500,00	122.922.975,00	(10.040.525,00)	92,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.963.500,00	122.922.975,00	(10.040.525,00)	92,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06		PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	297.875.350,00	193.732.167,00	(104.143.183,00)	65,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001		PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN	297.875.350,00	193.732.167,00	(104.143.183,00)	65,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	297.875.350,00	193.732.167,00	(104.143.183,00)	65,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.875.350,00	193.732.167,00	(104.143.183,00)	65,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	530.504.600,00	448.059.930,00	(82.444.670,00)	84,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01		ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	288.400.000,00	228.053.700,00	(60.346.300,00)	79,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001		PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	288.400.000,00	228.053.700,00	(60.346.300,00)	79,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	288.400.000,00	228.053.700,00	(60.346.300,00)	79,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.400.000,00	128.053.700,00	(60.346.300,00)	67,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02		PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.000.000,00	23.747.950,00	(1.252.050,00)	94,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001		PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	25.000.000,00	23.747.950,00	(1.252.050,00)	94,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	23.747.950,00	(1.252.050,00)	94,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.747.950,00	(1.252.050,00)	94,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	217.104.600,00	196.258.280,00	(20.846.320,00)	90,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	217.104.600,00	196.258.280,00	(20.846.320,00)	90,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	217.104.600,00	196.258.280,00	(20.846.320,00)	90,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.104.600,00	196.258.280,00	(20.846.320,00)	90,39	
				JUMLAH BELANJA	164.925.438.036,88	149.772.636.265,32	(15.152.801.771,56)	90,81	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(94.712.103.139,88)	(88.200.417.171,32)	6.511.685.968,56	93,12	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(94.712.103.139,88)	(88.200.417.171,32)	6.511.685.968,56	93,12	

WALI KOTA PADANG PANJANG,



HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	635.000.000,00	178.945.851,00	(456.054.149,00)	28,18	
	1.03.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	635.000.000,00	178.945.851,00	(456.054.149,00)	28,18	
	1.03.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	635.000.000,00	178.945.851,00	(456.054.149,00)	28,18	
				JUMLAH PENDAPATAN	635.000.000,00	178.945.851,00	(456.054.149,00)	28,18	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	25.884.202.551,00	21.446.532.129,79	(4.437.670.421,21)	82,85	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.169.801.914,00	6.923.810.731,00	(245.991.183,00)	96,56	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.364.949.565,00	6.223.610.753,00	(141.338.812,00)	97,77	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.364.949.565,00	6.223.610.753,00	(141.338.812,00)	97,77	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.364.949.565,00	6.223.610.753,00	(141.338.812,00)	97,77	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.323.909.565,00	6.189.270.753,00	(134.638.812,00)	97,87	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.040.000,00	34.340.000,00	(6.700.000,00)	83,67	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	174.194.233,00	170.222.043,00	(3.972.190,00)	97,71	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.550.000,00	2.507.200,00	(42.800,00)	98,32	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.550.000,00	2.507.200,00	(42.800,00)	98,32	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.507.200,00	(42.800,00)	98,32	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	25.499.533,00	24.647.650,00	(851.883,00)	96,65	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	25.499.533,00	24.647.650,00	(851.883,00)	96,65	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.499.533,00	24.647.650,00	(851.883,00)	96,65	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.249.700,00	8.966.400,00	(1.283.300,00)	87,47	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.249.700,00	8.966.400,00	(1.283.300,00)	87,47	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.249.700,00	8.966.400,00	(1.283.300,00)	87,47	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	135.895.000,00	134.100.793,00	(1.794.207,00)	98,67	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	135.895.000,00	134.100.793,00	(1.794.207,00)	98,67	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.895.000,00	134.100.793,00	(1.794.207,00)	98,67	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	314.999.116,00	285.624.335,00	(29.374.781,00)	90,67	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	20.499.116,00	18.396.438,00	(2.102.678,00)	89,74	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.499.116,00	18.396.438,00	(2.102.678,00)	89,74	

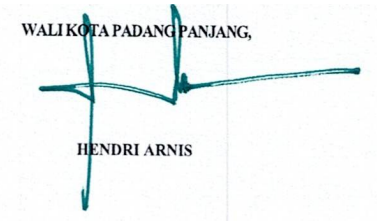
KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.499.116,00	18.396.438,00	(2.102.678,00)	89,74	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	292.500.000,00	265.227.897,00	(27.272.103,00)	90,67	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	292.500.000,00	265.227.897,00	(27.272.103,00)	90,67	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.500.000,00	265.227.897,00	(27.272.103,00)	90,67	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	315.659.000,00	244.353.600,00	(71.305.400,00)	77,41	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	39.196.000,00	34.072.450,00	(5.123.550,00)	86,92	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.196.000,00	34.072.450,00	(5.123.550,00)	86,92	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.196.000,00	34.072.450,00	(5.123.550,00)	86,92	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	230.368.000,00	193.417.150,00	(36.950.850,00)	83,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	230.368.000,00	193.417.150,00	(36.950.850,00)	83,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.368.000,00	193.417.150,00	(36.950.850,00)	83,96	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	35.935.000,00	11.155.000,00	(24.780.000,00)	31,04	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	35.935.000,00	11.155.000,00	(24.780.000,00)	31,04	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.935.000,00	11.155.000,00	(24.780.000,00)	31,04	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0007		PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	4.000.000,00	2.730.000,00	(1.270.000,00)	68,25	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	2.730.000,00	(1.270.000,00)	68,25	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	2.730.000,00	(1.270.000,00)	68,25	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	6.160.000,00	2.979.000,00	(3.181.000,00)	48,36	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.160.000,00	2.979.000,00	(3.181.000,00)	48,36	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.160.000,00	2.979.000,00	(3.181.000,00)	48,36	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.982.406.630,00	2.925.489.700,37	(56.916.929,63)	98,09	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.02.2.01		PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	923.000.000,00	893.431.580,00	(29.568.420,00)	96,79	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093		NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI	923.000.000,00	893.431.580,00	(29.568.420,00)	96,79	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	18.000.000,00	(22.000.000,00)	45,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	18.000.000,00	(22.000.000,00)	45,00	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.2	BELANJA MODAL	883.000.000,00	875.431.580,00	(7.568.420,00)	99,14	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	883.000.000,00	875.431.580,00	(7.568.420,00)	99,14	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.02.2.02		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.059.406.630,00	2.032.058.120,37	(27.348.509,63)	98,67	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014		REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	2.059.406.630,00	2.032.058.120,37	(27.348.509,63)	98,67	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	439.877.000,00	427.817.527,00	(12.059.473,00)	97,25	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.877.000,00	427.817.527,00	(12.059.473,00)	97,25	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	1.619.529.630,00	1.604.240.593,37	(15.289.036,63)	99,05	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.619.529.630,00	1.604.240.593,37	(15.289.036,63)	99,05	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	364.936.340,00	355.534.000,00	(9.402.340,00)	97,42	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.03.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	364.936.340,00	355.534.000,00	(9.402.340,00)	97,42	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032		PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	364.936.340,00	355.534.000,00	(9.402.340,00)	97,42	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	364.936.340,00	355.534.000,00	(9.402.340,00)	97,42	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.936.340,00	355.534.000,00	(9.402.340,00)	97,42	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	823.951.100,00	589.453.114,00	(234.497.986,00)	71,53	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.05.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	823.951.100,00	589.453.114,00	(234.497.986,00)	71,53	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0021		PENINGKATAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)	209.889.500,00	208.062.000,00	(1.827.500,00)	99,12	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	209.889.500,00	208.062.000,00	(1.827.500,00)	99,12	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0021	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	209.889.500,00	208.062.000,00	(1.827.500,00)	99,12	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0022		PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN	331.500.000,00	313.753.000,00	(17.747.000,00)	94,64	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	288.395.000,00	(11.605.000,00)	96,13	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	288.395.000,00	(11.605.000,00)	96,13	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	31.500.000,00	25.358.000,00	(6.142.000,00)	80,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0022	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.500.000,00	25.358.000,00	(6.142.000,00)	80,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0038		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)	282.561.600,00	67.638.114,00	(214.923.486,00)	23,93	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	282.561.600,00	67.638.114,00	(214.923.486,00)	23,93	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.561.600,00	67.638.114,00	(214.923.486,00)	23,93	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.810.936.850,00	2.680.612.942,00	(1.130.323.908,00)	70,33	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.06.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.810.936.850,00	2.680.612.942,00	(1.130.323.908,00)	70,33	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0024		PENINGKATAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	1.566.094.000,00	1.150.268.000,00	(415.826.000,00)	73,44	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	26.644.000,00	17.408.000,00	(9.236.000,00)	65,33	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.644.000,00	17.408.000,00	(9.236.000,00)	65,33	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0024	5.2	BELANJA MODAL	1.539.450.000,00	1.132.860.000,00	(406.590.000,00)	73,58	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0024	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.539.450.000,00	1.132.860.000,00	(406.590.000,00)	73,58	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0031		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	2.244.842.850,00	1.530.344.942,00	(714.497.908,00)	68,17	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0031	5.1	BELANJA OPERASI	1.194.342.850,00	515.211.942,00	(679.130.908,00)	43,13	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.194.342.850,00	515.211.942,00	(679.130.908,00)	43,13	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0031	5.2	BELANJA MODAL	1.050.500.000,00	1.015.133.000,00	(35.367.000,00)	96,63	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0031	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.000.000,00	44.355.000,00	(3.645.000,00)	92,40	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0031	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.002.500.000,00	970.778.000,00	(31.722.000,00)	96,83	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.125.827.000,00	1.133.832.294,00	(1.991.994.706,00)	36,27	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01		PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	3.125.827.000,00	1.133.832.294,00	(1.991.994.706,00)	36,27	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018		PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.597.737.000,00	685.033.294,00	(912.703.706,00)	42,87	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	969.166.000,00	425.298.669,00	(543.867.331,00)	43,88	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	969.166.000,00	425.298.669,00	(543.867.331,00)	43,88	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	628.571.000,00	259.734.625,00	(368.836.375,00)	41,32	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	628.571.000,00	259.734.625,00	(368.836.375,00)	41,32	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021		PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.463.260.000,00	405.532.000,00	(1.057.728.000,00)	27,71	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	40.260.000,00	12.050.000,00	(28.210.000,00)	29,93	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.260.000,00	12.050.000,00	(28.210.000,00)	29,93	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	1.423.000.000,00	393.482.000,00	(1.029.518.000,00)	27,65	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.423.000.000,00	393.482.000,00	(1.029.518.000,00)	27,65	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023		PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG	64.830.000,00	43.267.000,00	(21.563.000,00)	66,73	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	64.830.000,00	43.267.000,00	(21.563.000,00)	66,73	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.830.000,00	43.267.000,00	(21.563.000,00)	66,73	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	6.848.497.617,00	6.334.902.488,42	(513.595.128,58)	92,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.10.2.01		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	6.848.497.617,00	6.334.902.488,42	(513.595.128,58)	92,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032		PEMBANGUNAN JALAN	1.050.239.273,00	1.036.141.058,00	(14.098.215,00)	98,65	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.008,00	9.645.200,00	(354.808,00)	96,45	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.008,00	9.645.200,00	(354.808,00)	96,45	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	1.040.239.265,00	1.026.495.858,00	(13.743.407,00)	98,67	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.040.239.265,00	1.026.495.858,00	(13.743.407,00)	98,67	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034		PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	4.785.758.344,00	4.289.813.490,00	(495.944.854,00)	89,63	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.1	BELANJA OPERASI	61.282.000,00	31.591.200,00	(29.690.800,00)	51,55	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.282.000,00	31.591.200,00	(29.690.800,00)	51,55	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.2	BELANJA MODAL	4.724.476.344,00	4.258.222.290,00	(466.254.054,00)	90,13	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.724.476.344,00	4.258.222.290,00	(466.254.054,00)	90,13	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	1.012.500.000,00	1.008.947.940,42	(3.552.059,58)	99,64	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	1.008.000.000,00	1.005.197.940,42	(2.802.059,58)	99,72	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.008.000.000,00	1.005.197.940,42	(2.802.059,58)	99,72	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.2	BELANJA MODAL	4.500.000,00	3.750.000,00	(750.000,00)	83,33	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.500.000,00	3.750.000,00	(750.000,00)	83,33	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	92.376.500,00	88.314.700,00	(4.061.800,00)	95,60	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.01		PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	56.693.600,00	54.469.200,00	(2.224.400,00)	96,07	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010		FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN TEKNISI ATAU ANALIS	56.693.600,00	54.469.200,00	(2.224.400,00)	96,07	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	25.778.000,00	23.581.200,00	(2.196.800,00)	91,47	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.778.000,00	23.581.200,00	(2.196.800,00)	91,47	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	30.915.600,00	30.888.000,00	(27.600,00)	99,91	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.915.600,00	30.888.000,00	(27.600,00)	99,91	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.02		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.752.900,00	28.641.900,00	(1.111.000,00)	96,26	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.02.0012		PENYEDIAAN PERANGKAT PENDUKUNG LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI	2.289.900,00	1.590.000,00	(699.900,00)	69,43	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	2.289.900,00	1.590.000,00	(699.900,00)	69,43	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.289.900,00	1.590.000,00	(699.900,00)	69,43	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.02.0013		PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN KABUPATEN/KOTA	27.463.000,00	27.051.900,00	(411.100,00)	98,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	27.463.000,00	27.051.900,00	(411.100,00)	98,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.463.000,00	27.051.900,00	(411.100,00)	98,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.04		PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	5.930.000,00	5.203.600,00	(726.400,00)	87,75	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0004		PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI KABUPATEN/KOTA	5.930.000,00	5.203.600,00	(726.400,00)	87,75	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.930.000,00	5.203.600,00	(726.400,00)	87,75	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.930.000,00	5.203.600,00	(726.400,00)	87,75	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	665.468.600,00	414.582.160,00	(250.886.440,00)	62,29	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.02		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	123.318.600,00	86.941.810,00	(36.376.790,00)	70,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0005		PENYUSUNAN RDTR KABUPATEN/KOTA	123.318.600,00	86.941.810,00	(36.376.790,00)	70,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	123.318.600,00	86.941.810,00	(36.376.790,00)	70,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.318.600,00	86.941.810,00	(36.376.790,00)	70,50	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.03		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	83.140.000,00	80.024.358,00	(3.115.642,00)	96,25	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0007		SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENATAAN RUANG	83.140.000,00	80.024.358,00	(3.115.642,00)	96,25	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	83.140.000,00	80.024.358,00	(3.115.642,00)	96,25	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.140.000,00	80.024.358,00	(3.115.642,00)	96,25	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.04		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	459.010.000,00	247.615.992,00	(211.394.008,00)	53,94	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0009		OPERASIONALISASI TUGAS DAN FUNGSI FORUM PENATAAN RUANG	400.500.000,00	236.548.492,00	(163.951.508,00)	59,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	400.500.000,00	236.548.492,00	(163.951.508,00)	59,06	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.500.000,00	236.548.492,00	(163.951.508,00)	59,06	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0011		PENGAWASAN TURBINLAK DAN PENGAWASAN FUNGSI DAN MANFAAT	58.510.000,00	11.067.500,00	(47.442.500,00)	18,91	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0011	5.1	BELANJA OPERASI	58.510.000,00	11.067.500,00	(47.442.500,00)	18,91	
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.510.000,00	11.067.500,00	(47.442.500,00)	18,91	
				JUMLAH BELANJA	25.884.202.551,00	21.446.532.129,79	(4.437.670.421,21)	82,85	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(25.249.202.551,00)	(21.267.586.278,79)	3.981.616.272,21	84,23	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(25.249.202.551,00)	(21.267.586.278,79)	3.981.616.272,21	84,23	

WALI KOTA PADANG PANJANG,



HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	635.000.000,00	178.945.851,00	(456.054.149,00)	28,18	
	1.03.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	635.000.000,00	178.945.851,00	(456.054.149,00)	28,18	
	1.03.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	635.000.000,00	178.945.851,00	(456.054.149,00)	28,18	
				JUMLAH PENDAPATAN	635.000.000,00	178.945.851,00	(456.054.149,00)	28,18	
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	81.149.700,00	29.345.175,00	(51.804.525,00)	36,16	
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	81.149.700,00	29.345.175,00	(51.804.525,00)	36,16	
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01		PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.149.700,00	29.345.175,00	(51.804.525,00)	36,16	
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH	81.149.700,00	29.345.175,00	(51.804.525,00)	36,16	
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	81.149.700,00	29.345.175,00	(51.804.525,00)	36,16	
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.149.700,00	29.345.175,00	(51.804.525,00)	36,16	
				JUMLAH BELANJA	81.149.700,00	29.345.175,00	(51.804.525,00)	36,16	
				SURPLUS / (DEFISIT)	553.850.300,00	149.600.676,00	(404.249.624,00)	27,01	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	553.850.300,00	149.600.676,00	(404.249.624,00)	27,01	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.11.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.765.969.175,00	693.426.000,00	(1.072.543.175,00)	39,26	
	1.04.2.11.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.765.969.175,00	693.426.000,00	(1.072.543.175,00)	39,26	
	1.04.2.11.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.765.969.175,00	693.426.000,00	(1.072.543.175,00)	39,26	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.765.969.175,00	693.426.000,00	(1.072.543.175,00)	39,26	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	18.394.664.211,00	17.255.014.326,00	(1.139.649.885,00)	93,80	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.053.950.826,00	6.657.228.690,00	(396.722.136,00)	94,37	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.126.705.670,00	5.968.040.636,00	(158.665.034,00)	97,41	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.126.705.670,00	5.968.040.636,00	(158.665.034,00)	97,41	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.126.705.670,00	5.968.040.636,00	(158.665.034,00)	97,41	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.109.605.670,00	5.961.200.636,00	(148.405.034,00)	97,57	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	6.840.000,00	(10.260.000,00)	40,00	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	182.417.156,00	174.788.912,00	(7.628.244,00)	95,81	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.006.300,00	3.784.000,00	(222.300,00)	94,45	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.006.300,00	3.784.000,00	(222.300,00)	94,45	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.006.300,00	3.784.000,00	(222.300,00)	94,45	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	29.762.006,00	27.243.100,00	(2.518.906,00)	91,53	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	29.762.006,00	27.243.100,00	(2.518.906,00)	91,53	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.762.006,00	27.243.100,00	(2.518.906,00)	91,53	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	14.645.850,00	9.881.100,00	(4.764.750,00)	67,46	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.645.850,00	9.881.100,00	(4.764.750,00)	67,46	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.645.850,00	9.881.100,00	(4.764.750,00)	67,46	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	134.003.000,00	133.880.712,00	(122.288,00)	99,90	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	134.003.000,00	133.880.712,00	(122.288,00)	99,90	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.003.000,00	133.880.712,00	(122.288,00)	99,90	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	92.119.100,00	85.900.000,00	(6.219.100,00)	93,24	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	92.119.100,00	85.900.000,00	(6.219.100,00)	93,24	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.180.000,00	0,00	(2.180.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.180.000,00	0,00	(2.180.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	89.939.100,00	85.900.000,00	(4.039.100,00)	95,50	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.939.100,00	85.900.000,00	(4.039.100,00)	95,50	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	429.752.900,00	350.868.558,00	(78.884.342,00)	81,64	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	28.222.500,00	16.232.288,00	(11.990.212,00)	57,51	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.222.500,00	16.232.288,00	(11.990.212,00)	57,51	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.222.500,00	16.232.288,00	(11.990.212,00)	57,51	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	401.530.400,00	334.636.270,00	(66.894.130,00)	83,34	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	401.530.400,00	334.636.270,00	(66.894.130,00)	83,34	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.530.400,00	334.636.270,00	(66.894.130,00)	83,34	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	222.956.000,00	77.630.584,00	(145.325.416,00)	34,81	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	46.690.000,00	17.320.000,00	(29.370.000,00)	37,09	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.690.000,00	17.320.000,00	(29.370.000,00)	37,09	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.690.000,00	17.320.000,00	(29.370.000,00)	37,09	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	139.480.000,00	49.324.800,00	(90.155.200,00)	35,36	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	139.480.000,00	49.324.800,00	(90.155.200,00)	35,36	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.480.000,00	49.324.800,00	(90.155.200,00)	35,36	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	31.330.000,00	6.786.400,00	(24.543.600,00)	21,66	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	31.330.000,00	6.786.400,00	(24.543.600,00)	21,66	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.330.000,00	6.786.400,00	(24.543.600,00)	21,66	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	5.456.000,00	4.199.384,00	(1.256.616,00)	76,96	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.456.000,00	4.199.384,00	(1.256.616,00)	76,96	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.456.000,00	4.199.384,00	(1.256.616,00)	76,96	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	374.760.230,00	292.922.665,00	(81.837.565,00)	78,16	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.02.2.01		PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	51.723.450,00	51.336.550,00	(386.900,00)	99,25	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0009		IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	51.723.450,00	51.336.550,00	(386.900,00)	99,25	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	51.723.450,00	51.336.550,00	(386.900,00)	99,25	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.723.450,00	51.336.550,00	(386.900,00)	99,25	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.02.2.03		PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	46.488.000,00	0,00	(46.488.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0001		REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	46.488.000,00	0,00	(46.488.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.488.000,00	0,00	(46.488.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.488.000,00	0,00	(46.488.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.02.2.05		PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	276.548.780,00	241.586.115,00	(34.962.665,00)	87,35	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001		FASILITASI PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN PEMILIK/PENGHUNI RUMAH SUSUN	276.548.780,00	241.586.115,00	(34.962.665,00)	87,35	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	276.548.780,00	241.586.115,00	(34.962.665,00)	87,35	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.548.780,00	241.586.115,00	(34.962.665,00)	87,35	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.514.285.960,00	2.313.008.900,00	(201.277.060,00)	91,99	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.04.2.01		PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.514.285.960,00	2.313.008.900,00	(201.277.060,00)	91,99	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001		PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	2.514.285.960,00	2.313.008.900,00	(201.277.060,00)	91,99	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.514.285.960,00	2.313.008.900,00	(201.277.060,00)	91,99	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.285.960,00	93.008.900,00	(1.277.060,00)	98,64	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.420.000.000,00	2.220.000.000,00	(200.000.000,00)	91,73	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	8.451.667.195,00	7.991.854.071,00	(459.813.124,00)	94,55	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.05.2.01		URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	8.451.667.195,00	7.991.854.071,00	(459.813.124,00)	94,55	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002		PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN	8.451.667.195,00	7.991.854.071,00	(459.813.124,00)	94,55	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	441.225.795,00	258.782.640,00	(182.443.155,00)	58,65	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.225.795,00	258.782.640,00	(182.443.155,00)	58,65	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	8.010.441.400,00	7.733.071.431,00	(277.369.969,00)	96,53	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.010.441.400,00	7.733.071.431,00	(277.369.969,00)	96,53	
				JUMLAH BELANJA	18.394.664.211,00	17.255.014.326,00	(1.139.649.885,00)	93,80	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(16.628.695.036,00)	(16.561.588.326,00)	67.106.710,00	99,59	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.628.695.036,00)	(16.561.588.326,00)	67.106.710,00	99,59	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001		5	BELANJA DAERAH	201.565.153,00	184.151.784,00	(17.413.369,00)	91,36	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	201.565.153,00	184.151.784,00	(17.413.369,00)	91,36	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	24.154.453,00	20.969.980,00	(3.184.473,00)	86,81	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.456.900,00	1.242.000,00	(214.900,00)	85,24	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.456.900,00	1.242.000,00	(214.900,00)	85,24	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.456.900,00	1.242.000,00	(214.900,00)	85,24	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	7.004.153,00	6.180.700,00	(823.453,00)	88,24	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.004.153,00	6.180.700,00	(823.453,00)	88,24	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.004.153,00	6.180.700,00	(823.453,00)	88,24	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	458.400,00	390.000,00	(68.400,00)	85,07	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	458.400,00	390.000,00	(68.400,00)	85,07	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.400,00	390.000,00	(68.400,00)	85,07	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	15.235.000,00	13.157.280,00	(2.077.720,00)	86,36	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	15.235.000,00	13.157.280,00	(2.077.720,00)	86,36	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.235.000,00	13.157.280,00	(2.077.720,00)	86,36	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	109.367.700,00	102.236.195,00	(7.131.505,00)	93,47	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	34.532.500,00	29.085.568,00	(5.446.932,00)	84,22	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.532.500,00	29.085.568,00	(5.446.932,00)	84,22	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.532.500,00	29.085.568,00	(5.446.932,00)	84,22	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	74.835.200,00	73.150.627,00	(1.684.573,00)	97,74	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	74.835.200,00	73.150.627,00	(1.684.573,00)	97,74	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.835.200,00	73.150.627,00	(1.684.573,00)	97,74	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	68.043.000,00	60.945.609,00	(7.097.391,00)	89,56	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	34.045.000,00	27.994.600,00	(6.050.400,00)	82,22	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.045.000,00	27.994.600,00	(6.050.400,00)	82,22	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.045.000,00	27.994.600,00	(6.050.400,00)	82,22	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.990.000,00	3.000.000,00	(990.000,00)	75,18	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.990.000,00	3.000.000,00	(990.000,00)	75,18	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.990.000,00	3.000.000,00	(990.000,00)	75,18	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	30.008.000,00	29.951.009,00	(56.991,00)	99,81	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.008.000,00	29.951.009,00	(56.991,00)	99,81	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.008.000,00	29.951.009,00	(56.991,00)	99,81	
				JUMLAH BELANJA	201.565.153,00	184.151.784,00	(17.413.369,00)	91,36	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(201.565.153,00)	(184.151.784,00)	17.413.369,00	91,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(201.565.153,00)	(184.151.784,00)	17.413.369,00	91,36	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.11.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.765.969.175,00	693.426.000,00	(1.072.543.175,00)	39,26	
	1.04.2.11.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.765.969.175,00	693.426.000,00	(1.072.543.175,00)	39,26	
	1.04.2.11.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.765.969.175,00	693.426.000,00	(1.072.543.175,00)	39,26	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.765.969.175,00	693.426.000,00	(1.072.543.175,00)	39,26	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	10.392.298.142,00	8.007.184.501,00	(2.385.113.641,00)	77,04	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	171.067.200,00	145.110.625,00	(25.956.575,00)	84,82	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.02.2.02		PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	171.067.200,00	145.110.625,00	(25.956.575,00)	84,82	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0005		PENYELENGGARAAN KLHS RENCANA TATA RUANG	171.067.200,00	145.110.625,00	(25.956.575,00)	84,82	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	171.067.200,00	145.110.625,00	(25.956.575,00)	84,82	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.067.200,00	145.110.625,00	(25.956.575,00)	84,82	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	41.781.100,00	38.895.685,00	(2.885.415,00)	93,09	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.2.01		PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	8.824.000,00	8.259.380,00	(564.620,00)	93,60	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	8.824.000,00	8.259.380,00	(564.620,00)	93,60	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.824.000,00	8.259.380,00	(564.620,00)	93,60	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.824.000,00	8.259.380,00	(564.620,00)	93,60	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.2.02		PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	32.957.100,00	30.636.305,00	(2.320.795,00)	92,95	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0001		PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT	32.957.100,00	30.636.305,00	(2.320.795,00)	92,95	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	32.957.100,00	30.636.305,00	(2.320.795,00)	92,95	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.957.100,00	30.636.305,00	(2.320.795,00)	92,95	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.842.699.370,00	1.783.636.207,00	(59.063.163,00)	96,79	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.04.2.01		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	1.842.699.370,00	1.783.636.207,00	(59.063.163,00)	96,79	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004		PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	1.842.699.370,00	1.783.636.207,00	(59.063.163,00)	96,79	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.842.699.370,00	1.783.636.207,00	(59.063.163,00)	96,79	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.842.699.370,00	1.783.636.207,00	(59.063.163,00)	96,79	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	28.218.360,00	25.587.205,00	(2.631.155,00)	90,67	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.05.2.01		PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	11.415.560,00	10.022.145,00	(1.393.415,00)	87,79	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002		VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	11.415.560,00	10.022.145,00	(1.393.415,00)	87,79	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.415.560,00	10.022.145,00	(1.393.415,00)	87,79	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.415.560,00	10.022.145,00	(1.393.415,00)	87,79	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.05.2.02		PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.802.800,00	15.565.060,00	(1.237.740,00)	92,63	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.05.2.02.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM RANGKA PENGANGKUTAN, PEMANFAATAN, PENGOLAHAN, DAN/ATAU PENIMBUNAN	16.802.800,00	15.565.060,00	(1.237.740,00)	92,63	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.802.800,00	15.565.060,00	(1.237.740,00)	92,63	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.802.800,00	15.565.060,00	(1.237.740,00)	92,63	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	17.987.420,00	14.831.965,00	(3.155.455,00)	82,45	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.06.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.987.420,00	14.831.965,00	(3.155.455,00)	82,45	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0009		PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	17.987.420,00	14.831.965,00	(3.155.455,00)	82,45	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	17.987.420,00	14.831.965,00	(3.155.455,00)	82,45	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.987.420,00	14.831.965,00	(3.155.455,00)	82,45	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	117.395.900,00	84.998.865,00	(32.397.035,00)	72,40	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.08.2.01		PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	117.395.900,00	84.998.865,00	(32.397.035,00)	72,40	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005		PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL/LEMBAGA MASYARAKAT/KOMUNITAS/KELOMPOK MASYARAKAT	117.395.900,00	84.998.865,00	(32.397.035,00)	72,40	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	117.395.900,00	84.998.865,00	(32.397.035,00)	72,40	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.395.900,00	84.998.865,00	(32.397.035,00)	72,40	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	78.454.650,00	37.101.485,00	(41.353.165,00)	47,29	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.09.2.01		PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	78.454.650,00	37.101.485,00	(41.353.165,00)	47,29	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001		PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	78.454.650,00	37.101.485,00	(41.353.165,00)	47,29	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	78.454.650,00	37.101.485,00	(41.353.165,00)	47,29	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.454.650,00	37.101.485,00	(41.353.165,00)	47,29	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	8.536.700,00	751.820,00	(7.784.880,00)	8,80	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.10.2.01		PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	8.536.700,00	751.820,00	(7.784.880,00)	8,80	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004		PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA	8.536.700,00	751.820,00	(7.784.880,00)	8,80	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.536.700,00	751.820,00	(7.784.880,00)	8,80	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.536.700,00	751.820,00	(7.784.880,00)	8,80	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.086.157.442,00	5.876.270.644,00	(2.209.886.798,00)	72,67	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.2.01		PENGELOLAAN SAMPAH	8.086.157.442,00	5.876.270.644,00	(2.209.886.798,00)	72,67	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004		PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	44.347.500,00	9.907.850,00	(34.439.650,00)	22,34	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	44.347.500,00	9.907.850,00	(34.439.650,00)	22,34	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.347.500,00	9.907.850,00	(34.439.650,00)	22,34	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	4.372.807.802,00	2.281.341.324,00	(2.091.466.478,00)	52,17	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.406.304.000,00	1.921.448.324,00	(484.855.676,00)	79,85	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.406.304.000,00	1.921.448.324,00	(484.855.676,00)	79,85	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	1.966.503.802,00	359.893.000,00	(1.606.610.802,00)	18,30	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.000.000,00	153.949.200,00	(50.800,00)	99,96	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.812.503.802,00	205.943.800,00	(1.606.560.002,00)	11,36	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020		PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST KABUPATEN/KOTA ATAU TPA/TPST REGIONAL	3.669.002.140,00	3.585.021.470,00	(83.980.670,00)	97,71	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	3.669.002.140,00	3.585.021.470,00	(83.980.670,00)	97,71	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.669.002.140,00	3.585.021.470,00	(83.980.670,00)	97,71	
				JUMLAH BELANJA	10.392.298.142,00	8.007.184.501,00	(2.385.113.641,00)	77,04	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(8.626.328.967,00)	(7.313.758.501,00)	1.312.570.466,00	84,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.626.328.967,00)	(7.313.758.501,00)	1.312.570.466,00	84,78	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001		5	BELANJA DAERAH	370.097.400,00	235.080.303,00	(135.017.097,00)	63,51	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	370.097.400,00	235.080.303,00	(135.017.097,00)	63,51	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001	2.11.03.2.01		PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	370.097.400,00	235.080.303,00	(135.017.097,00)	63,51	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001	2.11.03.2.01.0015		PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	370.097.400,00	235.080.303,00	(135.017.097,00)	63,51	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001	2.11.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	337.830.400,00	203.795.643,00	(134.034.757,00)	60,32	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001	2.11.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.830.400,00	203.795.643,00	(134.034.757,00)	60,32	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001	2.11.03.2.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	32.267.000,00	31.284.660,00	(982.340,00)	96,95	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001	2.11.03.2.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.267.000,00	31.284.660,00	(982.340,00)	96,95	
				JUMLAH BELANJA	370.097.400,00	235.080.303,00	(135.017.097,00)	63,51	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(370.097.400,00)	(235.080.303,00)	135.017.097,00	63,51	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(370.097.400,00)	(235.080.303,00)	135.017.097,00	63,51	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001		5	BELANJA DAERAH	201.565.153,00	184.151.784,00	(17.413.369,00)	91,36	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	201.565.153,00	184.151.784,00	(17.413.369,00)	91,36	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	24.154.453,00	20.969.980,00	(3.184.473,00)	86,81	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.456.900,00	1.242.000,00	(214.900,00)	85,24	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.456.900,00	1.242.000,00	(214.900,00)	85,24	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.456.900,00	1.242.000,00	(214.900,00)	85,24	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	7.004.153,00	6.180.700,00	(823.453,00)	88,24	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.004.153,00	6.180.700,00	(823.453,00)	88,24	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.004.153,00	6.180.700,00	(823.453,00)	88,24	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	458.400,00	390.000,00	(68.400,00)	85,07	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	458.400,00	390.000,00	(68.400,00)	85,07	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.400,00	390.000,00	(68.400,00)	85,07	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	15.235.000,00	13.157.280,00	(2.077.720,00)	86,36	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	15.235.000,00	13.157.280,00	(2.077.720,00)	86,36	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.235.000,00	13.157.280,00	(2.077.720,00)	86,36	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	109.367.700,00	102.236.195,00	(7.131.505,00)	93,47	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	34.532.500,00	29.085.568,00	(5.446.932,00)	84,22	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.532.500,00	29.085.568,00	(5.446.932,00)	84,22	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.532.500,00	29.085.568,00	(5.446.932,00)	84,22	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	74.835.200,00	73.150.627,00	(1.684.573,00)	97,74	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	74.835.200,00	73.150.627,00	(1.684.573,00)	97,74	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.835.200,00	73.150.627,00	(1.684.573,00)	97,74	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	68.043.000,00	60.945.609,00	(7.097.391,00)	89,56	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	34.045.000,00	27.994.600,00	(6.050.400,00)	82,22	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.045.000,00	27.994.600,00	(6.050.400,00)	82,22	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.045.000,00	27.994.600,00	(6.050.400,00)	82,22	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.990.000,00	3.000.000,00	(990.000,00)	75,18	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.990.000,00	3.000.000,00	(990.000,00)	75,18	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.990.000,00	3.000.000,00	(990.000,00)	75,18	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	30.008.000,00	29.951.009,00	(56.991,00)	99,81	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.008.000,00	29.951.009,00	(56.991,00)	99,81	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.008.000,00	29.951.009,00	(56.991,00)	99,81	
				JUMLAH BELANJA	201.565.153,00	184.151.784,00	(17.413.369,00)	91,36	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(201.565.153,00)	(184.151.784,00)	17.413.369,00	91,36	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(201.565.153,00)	(184.151.784,00)	17.413.369,00	91,36	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001		5	BELANJA DAERAH	370.097.400,00	235.080.303,00	(135.017.097,00)	63,51	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	370.097.400,00	235.080.303,00	(135.017.097,00)	63,51	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001	2.11.03.2.01		PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	370.097.400,00	235.080.303,00	(135.017.097,00)	63,51	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001	2.11.03.2.01.0015		PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	370.097.400,00	235.080.303,00	(135.017.097,00)	63,51	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001	2.11.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	337.830.400,00	203.795.643,00	(134.034.757,00)	60,32	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001	2.11.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.830.400,00	203.795.643,00	(134.034.757,00)	60,32	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001	2.11.03.2.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	32.267.000,00	31.284.660,00	(982.340,00)	96,95	
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001	2.11.03.2.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.267.000,00	31.284.660,00	(982.340,00)	96,95	
				JUMLAH BELANJA	370.097.400,00	235.080.303,00	(135.017.097,00)	63,51	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(370.097.400,00)	(235.080.303,00)	135.017.097,00	63,51	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(370.097.400,00)	(235.080.303,00)	135.017.097,00	63,51	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	13.726.650.523,00	13.232.956.393,00	(493.694.130,00)	96,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.938.000.323,00	6.753.429.053,00	(184.571.270,00)	97,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.091.187.405,00	5.990.561.375,00	(100.626.030,00)	98,34	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.091.187.405,00	5.990.561.375,00	(100.626.030,00)	98,34	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.091.187.405,00	5.990.561.375,00	(100.626.030,00)	98,34	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.076.137.405,00	5.975.511.375,00	(100.626.030,00)	98,34	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	158.668.578,00	154.801.860,00	(3.866.718,00)	97,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.287.300,00	4.273.600,00	(13.700,00)	99,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.287.300,00	4.273.600,00	(13.700,00)	99,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.287.300,00	4.273.600,00	(13.700,00)	99,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	23.828.940,00	22.661.500,00	(1.167.440,00)	95,10	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	23.828.940,00	22.661.500,00	(1.167.440,00)	95,10	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.828.940,00	22.661.500,00	(1.167.440,00)	95,10	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	14.767.898,00	12.529.900,00	(2.237.998,00)	84,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.767.898,00	12.529.900,00	(2.237.998,00)	84,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.767.898,00	12.529.900,00	(2.237.998,00)	84,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	115.784.440,00	115.336.860,00	(447.580,00)	99,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	115.784.440,00	115.336.860,00	(447.580,00)	99,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.784.440,00	115.336.860,00	(447.580,00)	99,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	65.850.800,00	61.800.000,00	(4.050.800,00)	93,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	65.850.800,00	61.800.000,00	(4.050.800,00)	93,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	65.850.800,00	61.800.000,00	(4.050.800,00)	93,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.850.800,00	61.800.000,00	(4.050.800,00)	93,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	119.102.140,00	116.780.768,00	(2.321.372,00)	98,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.843.700,00	1.540.000,00	(303.700,00)	83,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.843.700,00	1.540.000,00	(303.700,00)	83,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.843.700,00	1.540.000,00	(303.700,00)	83,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	19.867.240,00	17.957.568,00	(1.909.672,00)	90,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.867.240,00	17.957.568,00	(1.909.672,00)	90,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.867.240,00	17.957.568,00	(1.909.672,00)	90,38	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	97.391.200,00	97.283.200,00	(108.000,00)	99,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	97.391.200,00	97.283.200,00	(108.000,00)	99,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.391.200,00	97.283.200,00	(108.000,00)	99,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	503.191.400,00	429.485.050,00	(73.706.350,00)	85,35	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	436.339.000,00	369.994.550,00	(66.344.450,00)	84,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	436.339.000,00	369.994.550,00	(66.344.450,00)	84,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.339.000,00	369.994.550,00	(66.344.450,00)	84,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	16.508.400,00	9.998.000,00	(6.510.400,00)	60,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.508.400,00	9.998.000,00	(6.510.400,00)	60,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.508.400,00	9.998.000,00	(6.510.400,00)	60,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	50.344.000,00	49.492.500,00	(851.500,00)	98,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	50.344.000,00	49.492.500,00	(851.500,00)	98,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.344.000,00	49.492.500,00	(851.500,00)	98,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.854.966.500,00	3.692.337.050,00	(162.629.450,00)	95,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01		PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.643.226.400,00	3.524.750.800,00	(118.475.600,00)	96,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015		PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	3.639.726.400,00	3.524.750.800,00	(114.975.600,00)	96,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	3.639.726.400,00	3.524.750.800,00	(114.975.600,00)	96,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.639.726.400,00	3.524.750.800,00	(114.975.600,00)	96,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0017		PENYEDIAAN LAYANAN DASAR DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERTURAN KEPALA DAERAH	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	211.740.100,00	167.586.250,00	(44.153.850,00)	79,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011		PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	211.740.100,00	167.586.250,00	(44.153.850,00)	79,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	139.204.500,00	99.709.750,00	(39.494.750,00)	71,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.204.500,00	99.709.750,00	(39.494.750,00)	71,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	5.2	BELANJA MODAL	72.535.600,00	67.876.500,00	(4.659.100,00)	93,57	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.535.600,00	67.876.500,00	(4.659.100,00)	93,57	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.933.683.700,00	2.787.190.290,00	(146.493.410,00)	95,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01		PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.889.424.700,00	2.747.292.690,00	(142.132.010,00)	95,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002		PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	497.749.000,00	464.837.250,00	(32.911.750,00)	93,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	497.749.000,00	464.837.250,00	(32.911.750,00)	93,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	497.749.000,00	464.837.250,00	(32.911.750,00)	93,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI	2.391.675.700,00	2.282.455.440,00	(109.220.260,00)	95,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	177.500.000,00	169.142.000,00	(8.358.000,00)	95,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.500.000,00	169.142.000,00	(8.358.000,00)	95,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2	BELANJA MODAL	2.214.175.700,00	2.113.313.440,00	(100.862.260,00)	95,44	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.134.215.700,00	2.113.313.440,00	(20.902.260,00)	99,02	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.960.000,00	0,00	(79.960.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.05		PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA	44.259.000,00	39.897.600,00	(4.361.400,00)	90,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.05.0001		PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA PERISTIWA YANG MENIMPA, MEMBAHAYAKAN, DAN/ATAU MENGANCAM KESELAMATAN MANUSIA	5.259.000,00	1.713.600,00	(3.545.400,00)	32,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.259.000,00	1.713.600,00	(3.545.400,00)	32,58	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.259.000,00	1.713.600,00	(3.545.400,00)	32,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.05.0005		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA/PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	39.000.000,00	38.184.000,00	(816.000,00)	97,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.05.0005	5.2	BELANJA MODAL	39.000.000,00	38.184.000,00	(816.000,00)	97,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.05.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.000.000,00	38.184.000,00	(816.000,00)	97,90	
				JUMLAH BELANJA	13.726.650.523,00	13.232.956.393,00	(493.694.130,00)	96,40	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(13.726.650.523,00)	(13.232.956.393,00)	493.694.130,00	96,40	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.726.650.523,00)	(13.232.956.393,00)	493.694.130,00	96,40	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000		5	BELANJA DAERAH	797.339.090,00	598.685.734,00	(198.653.356,00)	75,08	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	254.165.440,00	196.914.350,00	(57.251.090,00)	77,47	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01		PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	23.598.100,00	18.060.150,00	(5.537.950,00)	76,53	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0008		SOSIALISASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PUG KEWENANGAN KAB/KOTA	23.598.100,00	18.060.150,00	(5.537.950,00)	76,53	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	23.598.100,00	18.060.150,00	(5.537.950,00)	76,53	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.598.100,00	18.060.150,00	(5.537.950,00)	76,53	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	230.567.340,00	178.854.200,00	(51.713.140,00)	77,57	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0003		PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	230.567.340,00	178.854.200,00	(51.713.140,00)	77,57	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	230.567.340,00	178.854.200,00	(51.713.140,00)	77,57	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.567.340,00	178.854.200,00	(51.713.140,00)	77,57	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	147.632.000,00	94.048.050,00	(53.583.950,00)	63,70	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	46.755.350,00	(3.244.650,00)	93,51	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	46.755.350,00	(3.244.650,00)	93,51	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	46.755.350,00	(3.244.650,00)	93,51	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	46.755.350,00	(3.244.650,00)	93,51	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	68.587.000,00	21.720.000,00	(46.867.000,00)	31,66	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	68.587.000,00	21.720.000,00	(46.867.000,00)	31,66	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	68.587.000,00	21.720.000,00	(46.867.000,00)	31,66	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.587.000,00	21.720.000,00	(46.867.000,00)	31,66	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.045.000,00	25.572.700,00	(3.472.300,00)	88,04	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03.0002		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	29.045.000,00	25.572.700,00	(3.472.300,00)	88,04	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.045.000,00	25.572.700,00	(3.472.300,00)	88,04	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.045.000,00	25.572.700,00	(3.472.300,00)	88,04	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	79.570.950,00	65.537.550,00	(14.033.400,00)	82,36	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01		PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	26.310.400,00	24.543.350,00	(1.767.050,00)	93,28	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	26.310.400,00	24.543.350,00	(1.767.050,00)	93,28	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.310.400,00	24.543.350,00	(1.767.050,00)	93,28	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.310.400,00	24.543.350,00	(1.767.050,00)	93,28	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	53.260.550,00	40.994.200,00	(12.266.350,00)	76,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02.0004		PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.260.550,00	40.994.200,00	(12.266.350,00)	76,96	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	53.260.550,00	40.994.200,00	(12.266.350,00)	76,96	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.260.550,00	40.994.200,00	(12.266.350,00)	76,96	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	315.970.700,00	242.185.784,00	(73.784.916,00)	76,64	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	103.224.800,00	84.959.570,00	(18.265.230,00)	82,30	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0004		ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN /PROGRAM/ KEGIATAN PENCEGAHAN KTA	57.000.000,00	50.163.970,00	(6.836.030,00)	88,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	57.000.000,00	50.163.970,00	(6.836.030,00)	88,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	50.163.970,00	(6.836.030,00)	88,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0005		PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK KEWENANGAN KAB/ KOTA	46.224.800,00	34.795.600,00	(11.429.200,00)	75,27	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	46.224.800,00	34.795.600,00	(11.429.200,00)	75,27	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.224.800,00	34.795.600,00	(11.429.200,00)	75,27	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	172.770.900,00	123.345.414,00	(49.425.486,00)	71,39	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0005		PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.630.900,00	2.561.200,00	(69.700,00)	97,35	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.630.900,00	2.561.200,00	(69.700,00)	97,35	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.630.900,00	2.561.200,00	(69.700,00)	97,35	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0007		KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK	170.140.000,00	120.784.214,00	(49.355.786,00)	70,99	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	170.140.000,00	120.784.214,00	(49.355.786,00)	70,99	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.140.000,00	120.784.214,00	(49.355.786,00)	70,99	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.975.000,00	33.880.800,00	(6.094.200,00)	84,75	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0006		PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/	39.975.000,00	33.880.800,00	(6.094.200,00)	84,75	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	39.975.000,00	33.880.800,00	(6.094.200,00)	84,75	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.975.000,00	33.880.800,00	(6.094.200,00)	84,75	
				JUMLAH BELANJA	797.339.090,00	598.685.734,00	(198.653.356,00)	75,08	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(797.339.090,00)	(598.685.734,00)	198.653.356,00	75,08	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(797.339.090,00)	(598.685.734,00)	198.653.356,00	75,08	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

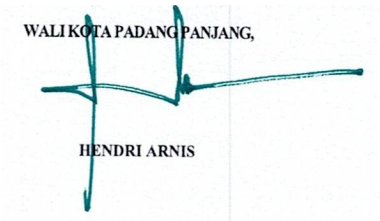
Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.299.785.065,00	1.882.793.012,00	(416.992.053,00)	81,86	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	73.344.600,00	65.076.231,00	(8.268.369,00)	88,72	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.01		PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	7.358.800,00	6.141.650,00	(1.217.150,00)	83,45	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.01.0019		IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL	7.358.800,00	6.141.650,00	(1.217.150,00)	83,45	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	7.358.800,00	6.141.650,00	(1.217.150,00)	83,45	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.358.800,00	6.141.650,00	(1.217.150,00)	83,45	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02		PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.985.800,00	58.934.581,00	(7.051.219,00)	89,31	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0012		PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA	19.200.000,00	17.700.000,00	(1.500.000,00)	92,18	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	17.700.000,00	(1.500.000,00)	92,18	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	17.700.000,00	(1.500.000,00)	92,18	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0013		PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB	24.000.000,00	19.635.831,00	(4.364.169,00)	81,81	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	19.635.831,00	(4.364.169,00)	81,81	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	19.635.831,00	(4.364.169,00)	81,81	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0015		PEMBENTUKAN DAN OPERASIONALISASI RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG KB UNTUK MEMPERKUAT INTEGRASI PROGRAM BANGGA KENCANA DI SEKTOR LAIN	22.785.800,00	21.598.750,00	(1.187.050,00)	94,79	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	22.785.800,00	21.598.750,00	(1.187.050,00)	94,79	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.785.800,00	21.598.750,00	(1.187.050,00)	94,79	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.005.030.465,00	694.835.891,00	(310.194.574,00)	69,13	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01		PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	428.975.465,00	310.693.041,00	(118.282.424,00)	72,42	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0008		PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK	60.000.000,00	46.532.466,00	(13.467.534,00)	77,55	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	46.532.466,00	(13.467.534,00)	77,55	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	46.532.466,00	(13.467.534,00)	77,55	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0010		PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA	97.997.465,00	67.538.400,00	(30.459.065,00)	68,91	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	97.997.465,00	67.538.400,00	(30.459.065,00)	68,91	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.997.465,00	67.538.400,00	(30.459.065,00)	68,91	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0011		PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)	40.000.000,00	38.567.975,00	(1.432.025,00)	96,41	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	38.567.975,00	(1.432.025,00)	96,41	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	38.567.975,00	(1.432.025,00)	96,41	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0012		PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG	125.000.000,00	116.119.200,00	(8.880.800,00)	92,89	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	116.119.200,00	(8.880.800,00)	92,89	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	116.119.200,00	(8.880.800,00)	92,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0014		ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA	105.978.000,00	41.935.000,00	(64.043.000,00)	39,56	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	105.978.000,00	41.935.000,00	(64.043.000,00)	39,56	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.978.000,00	41.935.000,00	(64.043.000,00)	39,56	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02		PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	344.000.000,00	248.750.000,00	(95.250.000,00)	72,31	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02.0004		PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)	128.000.000,00	33.000.000,00	(95.000.000,00)	25,78	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	128.000.000,00	33.000.000,00	(95.000.000,00)	25,78	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.000.000,00	33.000.000,00	(95.000.000,00)	25,78	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02.0005		PEMBINAAN IMP DAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI LINI LAPANGAN OLEH PKB/PLKB	216.000.000,00	215.750.000,00	(250.000,00)	99,88	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	216.000.000,00	215.750.000,00	(250.000,00)	99,88	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.000.000,00	215.750.000,00	(250.000,00)	99,88	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03		PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	127.940.000,00	52.600.300,00	(75.339.700,00)	41,11	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0001		PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	7.184.000,00	2.325.000,00	(4.859.000,00)	32,36	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.184.000,00	2.325.000,00	(4.859.000,00)	32,36	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.184.000,00	2.325.000,00	(4.859.000,00)	32,36	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0003		PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	103.659.000,00	41.671.300,00	(61.987.700,00)	40,20	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	103.659.000,00	41.671.300,00	(61.987.700,00)	40,20	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.659.000,00	41.671.300,00	(61.987.700,00)	40,20	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0008		PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	17.097.000,00	8.604.000,00	(8.493.000,00)	50,32	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	17.097.000,00	8.604.000,00	(8.493.000,00)	50,32	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.097.000,00	8.604.000,00	(8.493.000,00)	50,32	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04		PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	104.115.000,00	82.792.550,00	(21.322.450,00)	79,52	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0001		PENGUATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN MITRA KERJA LAINNYA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	14.515.000,00	0,00	(14.515.000,00)	0,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.515.000,00	0,00	(14.515.000,00)	0,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.515.000,00	0,00	(14.515.000,00)	0,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0002		INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB	13.300.000,00	12.295.000,00	(1.005.000,00)	92,44	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.300.000,00	12.295.000,00	(1.005.000,00)	92,44	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	12.295.000,00	(1.005.000,00)	92,44	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0006		PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	76.300.000,00	70.497.550,00	(5.802.450,00)	92,39	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	76.300.000,00	70.497.550,00	(5.802.450,00)	92,39	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.300.000,00	70.497.550,00	(5.802.450,00)	92,39	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.221.410.000,00	1.122.880.890,00	(98.529.110,00)	91,93	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	762.168.000,00	734.470.345,00	(27.697.655,00)	96,36	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0008		PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (MENJADI ORANG TUA HEBAT, GENERASI BERENCANA, KELANJUTUSIAAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA)	73.990.000,00	72.409.000,00	(1.581.000,00)	97,86	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	73.990.000,00	72.409.000,00	(1.581.000,00)	97,86	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.990.000,00	72.409.000,00	(1.581.000,00)	97,86	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0016		PENGELOLAAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS)	9.598.000,00	9.111.350,00	(486.650,00)	94,92	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	9.598.000,00	9.111.350,00	(486.650,00)	94,92	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.598.000,00	9.111.350,00	(486.650,00)	94,92	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0018		PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	130.000.000,00	117.749.995,00	(12.250.005,00)	90,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	117.749.995,00	(12.250.005,00)	90,57	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	117.749.995,00	(12.250.005,00)	90,57	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0024		PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA (KADER) KETAHANAN DAN KESEJAHERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	548.580.000,00	535.200.000,00	(13.380.000,00)	97,56	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	548.580.000,00	535.200.000,00	(13.380.000,00)	97,56	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.580.000,00	535.200.000,00	(13.380.000,00)	97,56	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02		PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	459.242.000,00	388.410.545,00	(70.831.455,00)	84,57	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0003		PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS MITRA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENGELOLAAN PROGRAM KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)	185.662.000,00	120.155.545,00	(65.506.455,00)	64,71	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	185.662.000,00	120.155.545,00	(65.506.455,00)	64,71	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.662.000,00	120.155.545,00	(65.506.455,00)	64,71	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0004		PROMOSI DAN SOSIALISASI PROGRAM KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BAGI MITRA KERJA	9.580.000,00	8.655.000,00	(925.000,00)	90,34	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.580.000,00	8.655.000,00	(925.000,00)	90,34	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.580.000,00	8.655.000,00	(925.000,00)	90,34	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0005		PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)	120.000.000,00	118.000.000,00	(2.000.000,00)	98,33	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	118.000.000,00	(2.000.000,00)	98,33	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	118.000.000,00	(2.000.000,00)	98,33	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0006		PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)	144.000.000,00	141.600.000,00	(2.400.000,00)	98,33	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	144.000.000,00	141.600.000,00	(2.400.000,00)	98,33	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	141.600.000,00	(2.400.000,00)	98,33	
				JUMLAH BELANJA	2.299.785.065,00	1.882.793.012,00	(416.992.053,00)	81,86	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.299.785.065,00)	(1.882.793.012,00)	416.992.053,00	81,86	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.299.785.065,00)	(1.882.793.012,00)	416.992.053,00	81,86	

WALI KOTA PADANG PANJANG,



HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

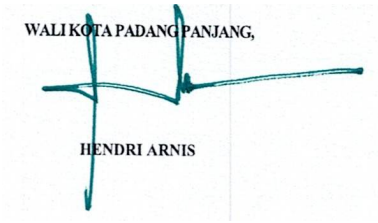
KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.623.104.990,00	8.163.739.781,00	(459.365.209,00)	94,67	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.090.399.166,00	5.769.962.849,00	(320.436.317,00)	94,73	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.964.648.537,00	4.756.313.929,00	(208.334.608,00)	95,80	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.964.648.537,00	4.756.313.929,00	(208.334.608,00)	95,80	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.964.648.537,00	4.756.313.929,00	(208.334.608,00)	95,80	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.964.648.537,00	4.756.313.929,00	(208.334.608,00)	95,80	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	158.906.819,00	155.433.025,00	(3.473.794,00)	97,81	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.391.700,00	5.030.925,00	(360.775,00)	93,30	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.391.700,00	5.030.925,00	(360.775,00)	93,30	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.391.700,00	5.030.925,00	(360.775,00)	93,30	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	38.789.970,00	37.849.200,00	(940.770,00)	97,57	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	38.789.970,00	37.849.200,00	(940.770,00)	97,57	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.789.970,00	37.849.200,00	(940.770,00)	97,57	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.461.149,00	12.457.800,00	(3.349,00)	99,97	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.461.149,00	12.457.800,00	(3.349,00)	99,97	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.461.149,00	12.457.800,00	(3.349,00)	99,97	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	102.264.000,00	100.095.100,00	(2.168.900,00)	97,87	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	102.264.000,00	100.095.100,00	(2.168.900,00)	97,87	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.264.000,00	100.095.100,00	(2.168.900,00)	97,87	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	16.988.000,00	13.980.000,00	(3.008.000,00)	82,29	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	16.988.000,00	13.980.000,00	(3.008.000,00)	82,29	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	16.988.000,00	13.980.000,00	(3.008.000,00)	82,29	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.988.000,00	13.980.000,00	(3.008.000,00)	82,29	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	688.157.810,00	632.274.656,00	(55.883.154,00)	91,87	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	43.237.810,00	26.675.656,00	(16.562.154,00)	61,69	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.237.810,00	26.675.656,00	(16.562.154,00)	61,69	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.237.810,00	26.675.656,00	(16.562.154,00)	61,69	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	644.920.000,00	605.599.000,00	(39.321.000,00)	93,90	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	644.920.000,00	605.599.000,00	(39.321.000,00)	93,90	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	644.920.000,00	605.599.000,00	(39.321.000,00)	93,90	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	261.698.000,00	211.961.239,00	(49.736.761,00)	80,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	121.830.000,00	98.733.239,00	(23.096.761,00)	81,04	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	121.830.000,00	98.733.239,00	(23.096.761,00)	81,04	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.830.000,00	98.733.239,00	(23.096.761,00)	81,04	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	69.200.000,00	57.932.000,00	(11.268.000,00)	83,71	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	69.200.000,00	57.932.000,00	(11.268.000,00)	83,71	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.200.000,00	57.932.000,00	(11.268.000,00)	83,71	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.800.000,00	7.699.000,00	(13.101.000,00)	37,01	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.800.000,00	7.699.000,00	(13.101.000,00)	37,01	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	7.699.000,00	(13.101.000,00)	37,01	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	49.868.000,00	47.597.000,00	(2.271.000,00)	95,44	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	49.868.000,00	47.597.000,00	(2.271.000,00)	95,44	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.868.000,00	47.597.000,00	(2.271.000,00)	95,44	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.068.070.000,00	1.040.648.011,00	(27.421.989,00)	97,43	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03		PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.068.070.000,00	1.040.648.011,00	(27.421.989,00)	97,43	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0001		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	273.420.300,00	270.185.998,00	(3.234.302,00)	98,81	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	273.420.300,00	270.185.998,00	(3.234.302,00)	98,81	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.420.300,00	270.185.998,00	(3.234.302,00)	98,81	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0002		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0004		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	701.256.100,00	683.045.213,00	(18.210.887,00)	97,40	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	511.918.800,00	496.359.263,00	(15.559.537,00)	96,96	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	511.918.800,00	496.359.263,00	(15.559.537,00)	96,96	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.2	BELANJA MODAL	189.337.300,00	186.685.950,00	(2.651.350,00)	98,59	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	189.337.300,00	186.685.950,00	(2.651.350,00)	98,59	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0005		PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	90.543.600,00	84.566.800,00	(5.976.800,00)	93,39	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	90.543.600,00	84.566.800,00	(5.976.800,00)	93,39	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.543.600,00	84.566.800,00	(5.976.800,00)	93,39	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.106.400.584,00	1.027.505.951,00	(78.894.633,00)	92,86	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01		REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	752.042.450,00	718.794.051,00	(33.248.399,00)	95,57	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0001		PENYEDIAAN PERMAKANAN	543.868.450,00	532.952.251,00	(10.916.199,00)	97,99	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	543.868.450,00	532.952.251,00	(10.916.199,00)	97,99	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.868.450,00	532.952.251,00	(10.916.199,00)	97,99	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0002		PENYEDIAAN SANDANG	133.615.000,00	123.134.500,00	(10.480.500,00)	92,15	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	133.615.000,00	123.134.500,00	(10.480.500,00)	92,15	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.615.000,00	123.134.500,00	(10.480.500,00)	92,15	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0003		PENYEDIAAN ALAT BANTU	35.186.000,00	33.390.750,00	(1.795.250,00)	94,89	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	35.186.000,00	33.390.750,00	(1.795.250,00)	94,89	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.186.000,00	33.390.750,00	(1.795.250,00)	94,89	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0005		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	28.974.000,00	20.495.000,00	(8.479.000,00)	70,73	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.974.000,00	20.495.000,00	(8.479.000,00)	70,73	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.974.000,00	20.495.000,00	(8.479.000,00)	70,73	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0006		PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT	10.399.000,00	8.821.550,00	(1.577.450,00)	84,83	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.399.000,00	8.821.550,00	(1.577.450,00)	84,83	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.399.000,00	8.821.550,00	(1.577.450,00)	84,83	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02		REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	354.358.134,00	308.711.900,00	(45.646.234,00)	87,11	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0003		PENYEDIAAN PERMAKANAN	47.300.000,00	46.107.500,00	(1.192.500,00)	97,47	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	47.300.000,00	46.107.500,00	(1.192.500,00)	97,47	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.300.000,00	46.107.500,00	(1.192.500,00)	97,47	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0004		PENYEDIAAN SANDANG	44.000.000,00	42.130.000,00	(1.870.000,00)	95,75	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	44.000.000,00	42.130.000,00	(1.870.000,00)	95,75	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	42.130.000,00	(1.870.000,00)	95,75	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0005		PENYEDIAAN ALAT BANTU	7.500.000,00	6.686.250,00	(813.750,00)	89,15	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	6.686.250,00	(813.750,00)	89,15	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	6.686.250,00	(813.750,00)	89,15	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0007		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	166.756.330,00	144.224.050,00	(22.532.280,00)	86,48	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	166.756.330,00	144.224.050,00	(22.532.280,00)	86,48	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.756.330,00	144.224.050,00	(22.532.280,00)	86,48	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0014		KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL KABUPATEN/KOTA	88.801.804,00	69.564.100,00	(19.237.704,00)	78,33	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	88.801.804,00	69.564.100,00	(19.237.704,00)	78,33	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.801.804,00	69.564.100,00	(19.237.704,00)	78,33	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	70.905.900,00	62.327.220,00	(8.578.680,00)	87,90	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.905.900,00	62.327.220,00	(8.578.680,00)	87,90	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0001		PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.438.300,00	5.047.000,00	(2.391.300,00)	67,85	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.438.300,00	5.047.000,00	(2.391.300,00)	67,85	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.438.300,00	5.047.000,00	(2.391.300,00)	67,85	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0003		FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	63.467.600,00	57.280.220,00	(6.187.380,00)	90,25	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	63.467.600,00	57.280.220,00	(6.187.380,00)	90,25	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.467.600,00	57.280.220,00	(6.187.380,00)	90,25	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	179.661.840,00	178.348.250,00	(1.313.590,00)	99,26	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01		PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	103.293.000,00	102.967.000,00	(326.000,00)	99,68	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0002		PENYEDIAAN SANDANG	101.850.000,00	101.525.000,00	(325.000,00)	99,68	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	101.850.000,00	101.525.000,00	(325.000,00)	99,68	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.850.000,00	101.525.000,00	(325.000,00)	99,68	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0005		PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	1.443.000,00	1.442.000,00	(1.000,00)	99,93	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.443.000,00	1.442.000,00	(1.000,00)	99,93	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.443.000,00	1.442.000,00	(1.000,00)	99,93	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.02		PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	76.368.840,00	75.381.250,00	(987.590,00)	98,70	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.02.0002		KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	76.368.840,00	75.381.250,00	(987.590,00)	98,70	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	69.678.840,00	68.691.250,00	(987.590,00)	98,58	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.678.840,00	68.691.250,00	(987.590,00)	98,58	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	6.690.000,00	6.690.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.690.000,00	6.690.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	107.667.500,00	84.947.500,00	(22.720.000,00)	78,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07.2.01		PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	107.667.500,00	84.947.500,00	(22.720.000,00)	78,89	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07.2.01.0002		PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	107.667.500,00	84.947.500,00	(22.720.000,00)	78,89	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	107.667.500,00	84.947.500,00	(22.720.000,00)	78,89	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.667.500,00	84.947.500,00	(22.720.000,00)	78,89	
				JUMLAH BELANJA	8.623.104.990,00	8.163.739.781,00	(459.365.209,00)	94,67	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(8.623.104.990,00)	(8.163.739.781,00)	459.365.209,00	94,67	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.623.104.990,00)	(8.163.739.781,00)	459.365.209,00	94,67	

WALI KOTA PADANG PANJANG,



HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.477.599.112,00	4.762.855.364,00	(714.743.748,00)	86,95	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.007.420.912,00	3.826.286.595,00	(181.134.317,00)	95,48	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.057.274.148,00	2.983.970.043,00	(73.304.105,00)	97,60	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.057.274.148,00	2.983.970.043,00	(73.304.105,00)	97,60	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.057.274.148,00	2.983.970.043,00	(73.304.105,00)	97,60	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.057.274.148,00	2.983.970.043,00	(73.304.105,00)	97,60	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	143.278.914,00	140.994.550,00	(2.284.364,00)	98,40	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.768.700,00	1.732.500,00	(36.200,00)	97,95	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.768.700,00	1.732.500,00	(36.200,00)	97,95	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.768.700,00	1.732.500,00	(36.200,00)	97,95	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	14.203.214,00	13.495.500,00	(707.714,00)	95,01	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.203.214,00	13.495.500,00	(707.714,00)	95,01	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.203.214,00	13.495.500,00	(707.714,00)	95,01	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.151.100,00	10.871.300,00	(1.279.800,00)	89,46	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.151.100,00	10.871.300,00	(1.279.800,00)	89,46	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.151.100,00	10.871.300,00	(1.279.800,00)	89,46	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	110.817.000,00	110.683.200,00	(133.800,00)	99,87	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	110.817.000,00	110.683.200,00	(133.800,00)	99,87	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.817.000,00	110.683.200,00	(133.800,00)	99,87	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	4.338.900,00	4.212.050,00	(126.850,00)	97,07	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	4.338.900,00	4.212.050,00	(126.850,00)	97,07	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.338.900,00	4.212.050,00	(126.850,00)	97,07	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	202.683.450,00	188.251.349,00	(14.432.101,00)	92,87	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	202.683.450,00	188.251.349,00	(14.432.101,00)	92,87	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	202.683.450,00	188.251.349,00	(14.432.101,00)	92,87	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202.683.450,00	188.251.349,00	(14.432.101,00)	92,87	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	491.638.400,00	427.460.853,00	(64.177.547,00)	86,94	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.403.700,00	500.000,00	(903.700,00)	35,62	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.403.700,00	500.000,00	(903.700,00)	35,62	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.403.700,00	500.000,00	(903.700,00)	35,62	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	254.263.500,00	227.818.353,00	(26.445.147,00)	89,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	254.263.500,00	227.818.353,00	(26.445.147,00)	89,59	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.263.500,00	227.818.353,00	(26.445.147,00)	89,59	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	235.971.200,00	199.142.500,00	(36.828.700,00)	84,39	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	235.971.200,00	199.142.500,00	(36.828.700,00)	84,39	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.971.200,00	199.142.500,00	(36.828.700,00)	84,39	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	112.546.000,00	85.609.800,00	(26.936.200,00)	76,06	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	63.404.000,00	43.763.800,00	(19.640.200,00)	69,02	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	63.404.000,00	43.763.800,00	(19.640.200,00)	69,02	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.404.000,00	43.763.800,00	(19.640.200,00)	69,02	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	28.930.000,00	21.682.500,00	(7.247.500,00)	74,94	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	28.930.000,00	21.682.500,00	(7.247.500,00)	74,94	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.930.000,00	21.682.500,00	(7.247.500,00)	74,94	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	20.212.000,00	20.163.500,00	(48.500,00)	99,76	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.212.000,00	20.163.500,00	(48.500,00)	99,76	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.212.000,00	20.163.500,00	(48.500,00)	99,76	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	640.769.000,00	418.713.630,00	(222.055.370,00)	65,34	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.03.2.01		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	640.769.000,00	418.713.630,00	(222.055.370,00)	65,34	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001		PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	333.239.000,00	298.530.180,00	(34.708.820,00)	89,58	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	333.239.000,00	298.530.180,00	(34.708.820,00)	89,58	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.239.000,00	298.530.180,00	(34.708.820,00)	89,58	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0002		KOORDINASI LINTAS LEMBAGA DAN KERJA SAMA DENGAN SEKTOR SWASTA UNTUK PENYEDIAAN INSTRUKTUR SERTA SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PELATIHAN KERJA	307.530.000,00	120.183.450,00	(187.346.550,00)	39,08	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	307.530.000,00	120.183.450,00	(187.346.550,00)	39,08	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.530.000,00	120.183.450,00	(187.346.550,00)	39,08	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	226.222.000,00	31.831.139,00	(194.390.861,00)	14,07	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.04.2.03		PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	226.222.000,00	31.831.139,00	(194.390.861,00)	14,07	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0003		JOB FAIR/BURSA KERJA	226.222.000,00	31.831.139,00	(194.390.861,00)	14,07	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	226.222.000,00	31.831.139,00	(194.390.861,00)	14,07	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.222.000,00	31.831.139,00	(194.390.861,00)	14,07	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	603.187.200,00	486.024.000,00	(117.163.200,00)	80,57	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.05.2.02		PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	603.187.200,00	486.024.000,00	(117.163.200,00)	80,57	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005		PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA	603.187.200,00	486.024.000,00	(117.163.200,00)	80,57	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	603.187.200,00	486.024.000,00	(117.163.200,00)	80,57	
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	603.187.200,00	486.024.000,00	(117.163.200,00)	80,57	
				JUMLAH BELANJA	5.477.599.112,00	4.762.855.364,00	(714.743.748,00)	86,95	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.477.599.112,00)	(4.762.855.364,00)	714.743.748,00	86,95	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.477.599.112,00)	(4.762.855.364,00)	714.743.748,00	86,95	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	98.761.000,00	54.452.357,00	(44.308.643,00)	55,13	
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	55.991.000,00	52.109.607,00	(3.881.393,00)	93,06	
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.02.2.02		PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	55.991.000,00	52.109.607,00	(3.881.393,00)	93,06	
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0004		PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	55.991.000,00	52.109.607,00	(3.881.393,00)	93,06	
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	55.991.000,00	52.109.607,00	(3.881.393,00)	93,06	
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.991.000,00	52.109.607,00	(3.881.393,00)	93,06	
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	42.270.000,00	1.842.750,00	(40.427.250,00)	4,35	
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.03.2.01		PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.270.000,00	1.842.750,00	(40.427.250,00)	4,35	
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002		PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.270.000,00	1.842.750,00	(40.427.250,00)	4,35	
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.270.000,00	1.842.750,00	(40.427.250,00)	4,35	
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.270.000,00	1.842.750,00	(40.427.250,00)	4,35	
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.04.2.01		PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007		PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	98.761.000,00	54.452.357,00	(44.308.643,00)	55,13	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(98.761.000,00)	(54.452.357,00)	44.308.643,00	55,13	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(98.761.000,00)	(54.452.357,00)	44.308.643,00	55,13	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

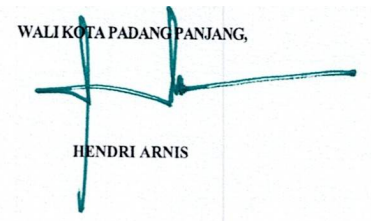
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.09.3.25.3.27.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	409.739.000,00	273.182.000,00	(136.557.000,00)	66,67	
	2.09.3.25.3.27.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	409.739.000,00	273.182.000,00	(136.557.000,00)	66,67	
	2.09.3.25.3.27.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	390.918.000,00	245.423.000,00	(145.495.000,00)	62,78	
	2.09.3.25.3.27.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	18.821.000,00	27.759.000,00	8.938.000,00	147,48	
				JUMLAH PENDAPATAN	409.739.000,00	273.182.000,00	(136.557.000,00)	66,67	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.361.984.816,00	7.841.719.421,00	(520.265.395,00)	93,77	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.247.103.916,00	7.730.565.171,00	(516.538.745,00)	93,73	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.449.314.772,00	6.141.547.428,00	(307.767.344,00)	95,22	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.449.314.772,00	6.141.547.428,00	(307.767.344,00)	95,22	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.449.314.772,00	6.141.547.428,00	(307.767.344,00)	95,22	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.434.264.772,00	6.129.507.428,00	(304.757.344,00)	95,26	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.050.000,00	12.040.000,00	(3.010.000,00)	80,00	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	170.369.090,00	154.271.363,00	(16.097.727,00)	90,55	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.570.200,00	9.345.000,00	(225.200,00)	97,64	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.570.200,00	9.345.000,00	(225.200,00)	97,64	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.570.200,00	9.345.000,00	(225.200,00)	97,64	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	36.138.390,00	32.149.540,00	(3.988.850,00)	88,96	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	36.138.390,00	32.149.540,00	(3.988.850,00)	88,96	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.138.390,00	32.149.540,00	(3.988.850,00)	88,96	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.596.500,00	8.462.670,00	(133.830,00)	98,44	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.596.500,00	8.462.670,00	(133.830,00)	98,44	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.596.500,00	8.462.670,00	(133.830,00)	98,44	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	116.064.000,00	104.314.153,00	(11.749.847,00)	89,87	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	116.064.000,00	104.314.153,00	(11.749.847,00)	89,87	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.064.000,00	104.314.153,00	(11.749.847,00)	89,87	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	10.000.000,00	8.621.500,00	(1.378.500,00)	86,21	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.000.000,00	8.621.500,00	(1.378.500,00)	86,21	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	8.621.500,00	(1.378.500,00)	86,21	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	8.621.500,00	(1.378.500,00)	86,21	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.240.731.234,00	1.111.536.060,00	(129.195.174,00)	89,58	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.535.800,00	3.000.000,00	(535.800,00)	84,84	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.535.800,00	3.000.000,00	(535.800,00)	84,84	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.535.800,00	3.000.000,00	(535.800,00)	84,84	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	199.999.034,00	116.725.706,00	(83.273.328,00)	58,36	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	199.999.034,00	116.725.706,00	(83.273.328,00)	58,36	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.034,00	116.725.706,00	(83.273.328,00)	58,36	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.037.196.400,00	991.810.354,00	(45.386.046,00)	95,62	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.037.196.400,00	991.810.354,00	(45.386.046,00)	95,62	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.037.196.400,00	991.810.354,00	(45.386.046,00)	95,62	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	376.688.820,00	314.588.820,00	(62.100.000,00)	83,51	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	264.844.920,00	218.604.850,00	(46.240.070,00)	82,54	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	264.844.920,00	218.604.850,00	(46.240.070,00)	82,54	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.844.920,00	218.604.850,00	(46.240.070,00)	82,54	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	40.791.900,00	31.382.900,00	(9.409.000,00)	76,93	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	40.791.900,00	31.382.900,00	(9.409.000,00)	76,93	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.791.900,00	31.382.900,00	(9.409.000,00)	76,93	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	71.052.000,00	64.601.070,00	(6.450.930,00)	90,92	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	71.052.000,00	64.601.070,00	(6.450.930,00)	90,92	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.052.000,00	64.601.070,00	(6.450.930,00)	90,92	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	114.880.900,00	111.154.250,00	(3.726.650,00)	96,75	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.03.2.01		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	86.175.000,00	83.132.000,00	(3.043.000,00)	96,46	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.03.2.01.0002		PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	86.175.000,00	83.132.000,00	(3.043.000,00)	96,46	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	86.175.000,00	83.132.000,00	(3.043.000,00)	96,46	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.957.000,00	(43.000,00)	99,57	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.03.2.01.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	76.175.000,00	73.175.000,00	(3.000.000,00)	96,06	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.03.2.04		PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	28.705.900,00	28.022.250,00	(683.650,00)	97,61	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.03.2.04.0002		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	28.705.900,00	28.022.250,00	(683.650,00)	97,61	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.705.900,00	28.022.250,00	(683.650,00)	97,61	
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.705.900,00	28.022.250,00	(683.650,00)	97,61	
				JUMLAH BELANJA	8.361.984.816,00	7.841.719.421,00	(520.265.395,00)	93,77	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.952.245.816,00)	(7.568.537.421,00)	383.708.395,00	95,17	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.952.245.816,00)	(7.568.537.421,00)	383.708.395,00	95,17	

WALI KOTA PADANG PANJANG,



HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.09.3.25.3.27.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	409.739.000,00	273.182.000,00	(136.557.000,00)	66,67	
	2.09.3.25.3.27.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	409.739.000,00	273.182.000,00	(136.557.000,00)	66,67	
	2.09.3.25.3.27.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	390.918.000,00	245.423.000,00	(145.495.000,00)	62,78	
	2.09.3.25.3.27.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	18.821.000,00	27.759.000,00	8.938.000,00	147,48	
				JUMLAH PENDAPATAN	409.739.000,00	273.182.000,00	(136.557.000,00)	66,67	
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000		5	BELANJA DAERAH	297.764.400,00	225.728.750,00	(72.035.650,00)	75,80	
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	285.489.500,00	216.082.000,00	(69.407.500,00)	75,68	
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.04.2.04		PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	285.489.500,00	216.082.000,00	(69.407.500,00)	75,68	
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.04.2.04.0002		PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	260.489.500,00	204.957.000,00	(55.532.500,00)	78,68	
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	235.489.500,00	204.957.000,00	(30.532.500,00)	87,03	
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.109.500,00	182.752.000,00	(11.357.500,00)	94,14	
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	41.380.000,00	22.205.000,00	(19.175.000,00)	53,66	
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.04.2.04.0009		PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.000.000,00	11.125.000,00	(13.875.000,00)	44,50	
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.04.2.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	11.125.000,00	(13.875.000,00)	44,50	
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.04.2.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	11.125.000,00	(13.875.000,00)	44,50	
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	12.274.900,00	9.646.750,00	(2.628.150,00)	78,58	
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.06.2.01		PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL	12.274.900,00	9.646.750,00	(2.628.150,00)	78,58	
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.06.2.01.0005		PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN SKALA USAHA DAN RISIKO	12.274.900,00	9.646.750,00	(2.628.150,00)	78,58	
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.274.900,00	9.646.750,00	(2.628.150,00)	78,58	
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.274.900,00	9.646.750,00	(2.628.150,00)	78,58	
				JUMLAH BELANJA	297.764.400,00	225.728.750,00	(72.035.650,00)	75,80	
				SURPLUS / (DEFISIT)	111.974.600,00	47.453.250,00	(64.521.350,00)	42,37	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	111.974.600,00	47.453.250,00	(64.521.350,00)	42,37	

WALI KOTA PADANG PANJANG,



HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.09.3.25.3.27.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	409.739.000,00	273.182.000,00	(136.557.000,00)	66,67	
	2.09.3.25.3.27.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	409.739.000,00	273.182.000,00	(136.557.000,00)	66,67	
	2.09.3.25.3.27.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	390.918.000,00	245.423.000,00	(145.495.000,00)	62,78	
	2.09.3.25.3.27.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	18.821.000,00	27.759.000,00	8.938.000,00	147,48	
				JUMLAH PENDAPATAN	409.739.000,00	273.182.000,00	(136.557.000,00)	66,67	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.127.459.660,00	1.887.178.877,00	(240.280.783,00)	88,70	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.720.137.280,00	1.566.498.525,00	(153.638.755,00)	91,06	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.01		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	373.895.000,00	360.241.700,00	(13.653.300,00)	96,34	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.01.0002		PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	373.895.000,00	360.241.700,00	(13.653.300,00)	96,34	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	373.895.000,00	360.241.700,00	(13.653.300,00)	96,34	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.870.000,00	95.656.700,00	(3.213.300,00)	96,74	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	275.025.000,00	264.585.000,00	(10.440.000,00)	96,20	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.02		PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	97.875.000,00	86.441.200,00	(11.433.800,00)	88,31	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.02.0002		PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN	97.875.000,00	86.441.200,00	(11.433.800,00)	88,31	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	97.875.000,00	86.441.200,00	(11.433.800,00)	88,31	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.875.000,00	86.441.200,00	(11.433.800,00)	88,31	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.03		PENINGKATAN MUTU DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA PAKAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	192.777.130,00	152.569.525,00	(40.207.605,00)	79,14	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.03.0001		PENGAWASAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK, BAHAN PAKAN/PAKAN/TANAMAN SKALA KECIL	192.777.130,00	152.569.525,00	(40.207.605,00)	79,14	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	192.777.130,00	152.569.525,00	(40.207.605,00)	79,14	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.777.130,00	152.569.525,00	(40.207.605,00)	79,14	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.06		PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	1.055.590.150,00	967.246.100,00	(88.344.050,00)	91,63	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.06.0003		PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	1.055.590.150,00	967.246.100,00	(88.344.050,00)	91,63	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.055.590.150,00	967.246.100,00	(88.344.050,00)	91,63	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.090.150,00	39.346.100,00	(744.050,00)	98,14	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.015.500.000,00	927.900.000,00	(87.600.000,00)	91,37	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	69.549.780,00	39.732.950,00	(29.816.830,00)	57,12	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03.2.02		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	47.473.600,00	26.376.350,00	(21.097.250,00)	55,56	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03.2.02.0003		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03.2.02.0009		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA	19.073.600,00	19.073.600,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	19.073.600,00	19.073.600,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.073.600,00	11.073.600,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03.2.02.0010		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI	8.400.000,00	7.302.750,00	(1.097.250,00)	86,93	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	7.302.750,00	(1.097.250,00)	86,93	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	7.302.750,00	(1.097.250,00)	86,93	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03.2.03		PENGELOLAAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK DAN RUMPUN/GALUR TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	22.076.180,00	13.356.600,00	(8.719.580,00)	60,50	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03.2.03.0001		PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK DAN RUMPUN/GALUR TERNAK	22.076.180,00	13.356.600,00	(8.719.580,00)	60,50	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.076.180,00	13.356.600,00	(8.719.580,00)	60,50	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.076.180,00	13.356.600,00	(8.719.580,00)	60,50	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	105.143.200,00	98.167.952,00	(6.975.248,00)	93,36	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.04.2.01		PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	96.944.200,00	91.065.752,00	(5.878.448,00)	93,93	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.04.2.01.0003		PENANGGULANGAN DAERAH TERDAMPAK WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR	1.975.800,00	0,00	(1.975.800,00)	0,00	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.975.800,00	0,00	(1.975.800,00)	0,00	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.975.800,00	0,00	(1.975.800,00)	0,00	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.04.2.01.0008		PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	94.968.400,00	91.065.752,00	(3.902.648,00)	95,89	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	94.968.400,00	91.065.752,00	(3.902.648,00)	95,89	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.968.400,00	91.065.752,00	(3.902.648,00)	95,89	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.04.2.04		PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	8.199.000,00	7.102.200,00	(1.096.800,00)	86,62	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.04.2.04.0002		PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN	8.199.000,00	7.102.200,00	(1.096.800,00)	86,62	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.199.000,00	7.102.200,00	(1.096.800,00)	86,62	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.199.000,00	7.102.200,00	(1.096.800,00)	86,62	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	7.600.000,00	0,00	(7.600.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.05.2.01		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	7.600.000,00	0,00	(7.600.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.05.2.01.0006		PENANGGULANGAN PASCA BENCANA ALAM BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	7.600.000,00	0,00	(7.600.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.600.000,00	0,00	(7.600.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	0,00	(7.600.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	225.029.400,00	182.779.450,00	(42.249.950,00)	81,22	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.07.2.01		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	225.029.400,00	182.779.450,00	(42.249.950,00)	81,22	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.07.2.01.0002		PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	22.087.400,00	17.065.450,00	(5.021.950,00)	77,26	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.087.400,00	17.065.450,00	(5.021.950,00)	77,26	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.087.400,00	17.065.450,00	(5.021.950,00)	77,26	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.07.2.01.0003		PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN	143.662.000,00	106.434.000,00	(37.228.000,00)	74,08	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.07.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	143.662.000,00	106.434.000,00	(37.228.000,00)	74,08	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.07.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.662.000,00	106.434.000,00	(37.228.000,00)	74,08	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.07.2.01.0006		PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN	59.280.000,00	59.280.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.07.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	59.280.000,00	59.280.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.07.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.280.000,00	59.280.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.127.459.660,00	1.887.178.877,00	(240.280.783,00)	88,70	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.717.720.660,00)	(1.613.996.877,00)	103.723.783,00	93,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.717.720.660,00)	(1.613.996.877,00)	103.723.783,00	93,96	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

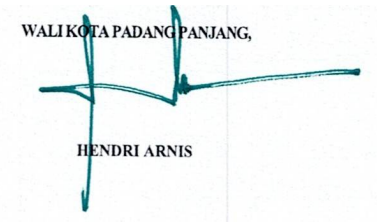
Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.222.599.142,00	2.900.388.706,00	(322.210.436,00)	90,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.820.682.482,00	2.557.007.284,00	(263.675.198,00)	90,65	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.290.358.353,00	2.206.675.155,00	(83.683.198,00)	96,34	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.290.358.353,00	2.206.675.155,00	(83.683.198,00)	96,34	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.290.358.353,00	2.206.675.155,00	(83.683.198,00)	96,34	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.278.958.353,00	2.197.555.155,00	(81.403.198,00)	96,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	9.120.000,00	(2.280.000,00)	80,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	112.395.705,00	78.076.752,00	(34.318.953,00)	69,46	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.114.200,00	1.634.000,00	(480.200,00)	77,28	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.114.200,00	1.634.000,00	(480.200,00)	77,28	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.114.200,00	1.634.000,00	(480.200,00)	77,28	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	15.991.305,00	12.310.500,00	(3.680.805,00)	76,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.991.305,00	12.310.500,00	(3.680.805,00)	76,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.991.305,00	12.310.500,00	(3.680.805,00)	76,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.167.700,00	3.378.100,00	(789.600,00)	81,05	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.167.700,00	3.378.100,00	(789.600,00)	81,05	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.167.700,00	3.378.100,00	(789.600,00)	81,05	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	90.122.500,00	60.754.152,00	(29.368.348,00)	67,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	90.122.500,00	60.754.152,00	(29.368.348,00)	67,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.122.500,00	60.754.152,00	(29.368.348,00)	67,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.564.900,00	3.607.500,00	(1.957.400,00)	64,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.564.900,00	3.607.500,00	(1.957.400,00)	64,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	5.564.900,00	3.607.500,00	(1.957.400,00)	64,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.564.900,00	3.607.500,00	(1.957.400,00)	64,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	223.521.524,00	152.451.677,00	(71.069.847,00)	68,20	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	41.461.524,00	25.222.587,00	(16.238.937,00)	60,83	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.461.524,00	25.222.587,00	(16.238.937,00)	60,83	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.461.524,00	25.222.587,00	(16.238.937,00)	60,83	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	182.060.000,00	127.229.090,00	(54.830.910,00)	69,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	182.060.000,00	127.229.090,00	(54.830.910,00)	69,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.060.000,00	127.229.090,00	(54.830.910,00)	69,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	188.842.000,00	116.196.200,00	(72.645.800,00)	61,53	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	146.540.000,00	78.498.800,00	(68.041.200,00)	53,56	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	146.540.000,00	78.498.800,00	(68.041.200,00)	53,56	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.540.000,00	78.498.800,00	(68.041.200,00)	53,56	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	9.360.000,00	5.000.000,00	(4.360.000,00)	53,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.360.000,00	5.000.000,00	(4.360.000,00)	53,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.360.000,00	5.000.000,00	(4.360.000,00)	53,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	32.942.000,00	32.697.400,00	(244.600,00)	99,25	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	32.942.000,00	32.697.400,00	(244.600,00)	99,25	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.942.000,00	32.697.400,00	(244.600,00)	99,25	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	195.078.840,00	182.790.502,00	(12.288.338,00)	93,70	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01		PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	15.773.720,00	13.064.600,00	(2.709.120,00)	82,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK	761.720,00	705.500,00	(56.220,00)	92,61	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	761.720,00	705.500,00	(56.220,00)	92,61	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	761.720,00	705.500,00	(56.220,00)	92,61	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004		PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	15.012.000,00	12.359.100,00	(2.652.900,00)	82,32	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.012.000,00	12.359.100,00	(2.652.900,00)	82,32	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.012.000,00	12.359.100,00	(2.652.900,00)	82,32	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02		PENATAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	147.754.920,00	140.899.302,00	(6.855.618,00)	95,36	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0001		PENYUSUNAN TATA CARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINDUK TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK	5.564.900,00	3.607.500,00	(1.957.400,00)	64,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	5.564.900,00	3.607.500,00	(1.957.400,00)	64,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.564.900,00	3.607.500,00	(1.957.400,00)	64,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002		PENGADAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SELAIN BLANGKO KTP-EL, FORMULIR, DAN BUKU TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	142.190.020,00	137.291.802,00	(4.898.218,00)	96,55	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	102.190.020,00	97.465.002,00	(4.725.018,00)	95,37	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.190.020,00	97.465.002,00	(4.725.018,00)	95,37	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	40.000.000,00	39.826.800,00	(173.200,00)	99,56	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	39.826.800,00	(173.200,00)	99,56	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03		PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	31.550.200,00	28.826.600,00	(2.723.600,00)	91,36	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0005		SOSIALISASI PENDAFTARAN PENDUDUK	31.550.200,00	28.826.600,00	(2.723.600,00)	91,36	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	31.550.200,00	28.826.600,00	(2.723.600,00)	91,36	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.550.200,00	28.826.600,00	(2.723.600,00)	91,36	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	98.276.970,00	79.554.154,00	(18.722.816,00)	80,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01		PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	98.276.970,00	79.554.154,00	(18.722.816,00)	80,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002		PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	98.276.970,00	79.554.154,00	(18.722.816,00)	80,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	98.276.970,00	79.554.154,00	(18.722.816,00)	80,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.276.970,00	79.554.154,00	(18.722.816,00)	80,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	98.579.850,00	73.371.766,00	(25.208.084,00)	74,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03		PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	98.579.850,00	73.371.766,00	(25.208.084,00)	74,42	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003		FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	20.717.000,00	8.700.100,00	(12.016.900,00)	41,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.717.000,00	8.700.100,00	(12.016.900,00)	41,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.717.000,00	8.700.100,00	(12.016.900,00)	41,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005		SOSIALISASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	9.336.000,00	3.536.000,00	(5.800.000,00)	37,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.336.000,00	3.536.000,00	(5.800.000,00)	37,87	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.336.000,00	3.536.000,00	(5.800.000,00)	37,87	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0007		KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT	68.526.850,00	61.135.666,00	(7.391.184,00)	89,21	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	68.526.850,00	61.135.666,00	(7.391.184,00)	89,21	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.526.850,00	61.135.666,00	(7.391.184,00)	89,21	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	9.981.000,00	7.665.000,00	(2.316.000,00)	76,79	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01		PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	9.981.000,00	7.665.000,00	(2.316.000,00)	76,79	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001		PENYEDIAAN DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN/KOTA	9.981.000,00	7.665.000,00	(2.316.000,00)	76,79	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.981.000,00	7.665.000,00	(2.316.000,00)	76,79	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.981.000,00	7.665.000,00	(2.316.000,00)	76,79	
				JUMLAH BELANJA	3.222.599.142,00	2.900.388.706,00	(322.210.436,00)	90,00	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.222.599.142,00)	(2.900.388.706,00)	322.210.436,00	90,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.222.599.142,00)	(2.900.388.706,00)	322.210.436,00	90,00	

WALI KOTA PADANG PANJANG,



HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

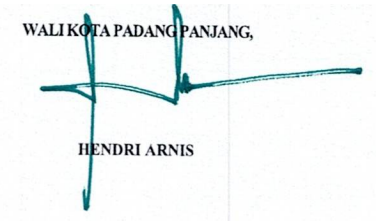
Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	850.000.000,00	656.107.000,00	(193.893.000,00)	77,18	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	850.000.000,00	656.107.000,00	(193.893.000,00)	77,18	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	850.000.000,00	644.607.000,00	(205.393.000,00)	75,83	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	850.000.000,00	656.107.000,00	(193.893.000,00)	77,18	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	11.737.042.929,00	11.027.094.193,00	(709.948.736,00)	93,95	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.322.289.073,00	8.094.937.010,00	(227.352.063,00)	97,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.282.559.952,00	6.180.648.231,00	(101.911.721,00)	98,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.282.559.952,00	6.180.648.231,00	(101.911.721,00)	98,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.282.559.952,00	6.180.648.231,00	(101.911.721,00)	98,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.282.559.952,00	6.180.648.231,00	(101.911.721,00)	98,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	190.774.551,00	177.818.208,00	(12.956.343,00)	93,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.940.580,00	5.777.000,00	(163.580,00)	97,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.940.580,00	5.777.000,00	(163.580,00)	97,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.940.580,00	5.777.000,00	(163.580,00)	97,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	32.163.476,00	28.561.000,00	(3.602.476,00)	88,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	32.163.476,00	28.561.000,00	(3.602.476,00)	88,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.163.476,00	28.561.000,00	(3.602.476,00)	88,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	40.177.095,00	31.223.500,00	(8.953.595,00)	77,71	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	40.177.095,00	31.223.500,00	(8.953.595,00)	77,71	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.177.095,00	31.223.500,00	(8.953.595,00)	77,71	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	112.493.400,00	112.256.708,00	(236.692,00)	99,78	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	112.493.400,00	112.256.708,00	(236.692,00)	99,78	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.493.400,00	112.256.708,00	(236.692,00)	99,78	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7.523.700,00	7.199.999,00	(323.701,00)	95,69	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.523.700,00	7.199.999,00	(323.701,00)	95,69	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	7.523.700,00	7.199.999,00	(323.701,00)	95,69	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.523.700,00	7.199.999,00	(323.701,00)	95,69	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.463.024.120,00	1.417.312.342,00	(45.711.778,00)	96,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	59.999.700,00	50.558.521,00	(9.441.179,00)	84,26	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	59.999.700,00	50.558.521,00	(9.441.179,00)	84,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.999.700,00	50.558.521,00	(9.441.179,00)	84,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.403.024.420,00	1.366.753.821,00	(36.270.599,00)	97,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.403.024.420,00	1.366.753.821,00	(36.270.599,00)	97,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.403.024.420,00	1.366.753.821,00	(36.270.599,00)	97,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	378.406.750,00	311.958.230,00	(66.448.520,00)	82,43	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	86.790.000,00	59.541.550,00	(27.248.450,00)	68,60	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	86.790.000,00	59.541.550,00	(27.248.450,00)	68,60	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.790.000,00	59.541.550,00	(27.248.450,00)	68,60	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	125.210.000,00	118.797.330,00	(6.412.670,00)	94,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	125.210.000,00	118.797.330,00	(6.412.670,00)	94,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.210.000,00	118.797.330,00	(6.412.670,00)	94,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0003		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR	125.234.850,00	100.117.350,00	(25.117.500,00)	79,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	125.234.850,00	100.117.350,00	(25.117.500,00)	79,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.234.850,00	100.117.350,00	(25.117.500,00)	79,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	28.771.300,00	22.897.000,00	(5.874.300,00)	79,58	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	28.771.300,00	22.897.000,00	(5.874.300,00)	79,58	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.771.300,00	22.897.000,00	(5.874.300,00)	79,58	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	12.400.600,00	10.605.000,00	(1.795.600,00)	85,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	12.400.600,00	10.605.000,00	(1.795.600,00)	85,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.400.600,00	10.605.000,00	(1.795.600,00)	85,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.414.753.856,00	2.932.157.183,00	(482.596.673,00)	85,86	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	2.536.842.036,00	2.451.180.348,00	(85.661.688,00)	96,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	2.449.258.036,00	2.374.387.169,00	(74.870.867,00)	96,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.306.858.036,00	2.232.948.914,00	(73.909.122,00)	96,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.306.858.036,00	2.232.948.914,00	(73.909.122,00)	96,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	142.400.000,00	141.438.255,00	(961.745,00)	99,32	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	142.400.000,00	141.438.255,00	(961.745,00)	99,32	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0003		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN	87.584.000,00	76.793.179,00	(10.790.821,00)	87,67	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	85.084.000,00	76.793.179,00	(8.290.821,00)	90,25	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.084.000,00	76.793.179,00	(8.290.821,00)	90,25	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03		PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C	2.955.200,00	1.417.500,00	(1.537.700,00)	47,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0006		PENGAWASAN OPERASIONAL TERMINAL PENUMPANG TIPE C	2.955.200,00	1.417.500,00	(1.537.700,00)	47,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.955.200,00	1.417.500,00	(1.537.700,00)	47,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.955.200,00	1.417.500,00	(1.537.700,00)	47,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04		PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	11.799.000,00	2.310.000,00	(9.489.000,00)	19,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	11.799.000,00	2.310.000,00	(9.489.000,00)	19,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.799.000,00	2.310.000,00	(9.489.000,00)	19,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.799.000,00	2.310.000,00	(9.489.000,00)	19,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05		PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	84.000.000,00	83.210.000,00	(790.000,00)	99,05	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007		PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	84.000.000,00	83.210.000,00	(790.000,00)	99,05	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	5.1	BELANJA OPERASI	84.000.000,00	83.210.000,00	(790.000,00)	99,05	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	83.210.000,00	(790.000,00)	99,05	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06		PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	277.780.714,00	264.186.335,00	(13.594.379,00)	95,10	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004		PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	116.765.984,00	111.154.400,00	(5.611.584,00)	95,19	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	116.765.984,00	111.154.400,00	(5.611.584,00)	95,19	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.765.984,00	111.154.400,00	(5.611.584,00)	95,19	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015		FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	19.583.500,00	18.300.000,00	(1.283.500,00)	93,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015	5.1	BELANJA OPERASI	19.583.500,00	18.300.000,00	(1.283.500,00)	93,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.583.500,00	18.300.000,00	(1.283.500,00)	93,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0016		PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN DALAM RANGKA MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	72.971.830,00	71.510.085,00	(1.461.745,00)	97,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0016	5.1	BELANJA OPERASI	72.971.830,00	71.510.085,00	(1.461.745,00)	97,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.971.830,00	71.510.085,00	(1.461.745,00)	97,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0017		PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	68.459.400,00	63.221.850,00	(5.237.550,00)	92,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0017	5.1	BELANJA OPERASI	68.459.400,00	63.221.850,00	(5.237.550,00)	92,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.459.400,00	63.221.850,00	(5.237.550,00)	92,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09		PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	501.376.906,00	129.853.000,00	(371.523.906,00)	25,89	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	501.376.906,00	129.853.000,00	(371.523.906,00)	25,89	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	501.376.906,00	129.853.000,00	(371.523.906,00)	25,89	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.376.906,00	129.853.000,00	(371.523.906,00)	25,89	
				JUMLAH BELANJA	11.737.042.929,00	11.027.094.193,00	(709.948.736,00)	93,95	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(10.887.042.929,00)	(10.370.987.193,00)	516.055.736,00	95,25	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.887.042.929,00)	(10.370.987.193,00)	516.055.736,00	95,25	

WALI KOTA PADANG PANJANG,



HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

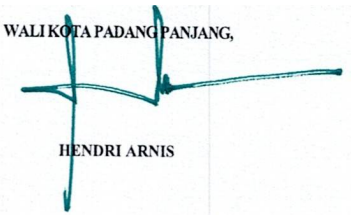
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	200.000.000,00	1.600.000,00	(198.400.000,00)	0,80	
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.000.000,00	1.600.000,00	(198.400.000,00)	0,80	
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	200.000.000,00	1.600.000,00	(198.400.000,00)	0,80	
				JUMLAH PENDAPATAN	200.000.000,00	1.600.000,00	(198.400.000,00)	0,80	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.669.402.686,00	7.181.704.553,00	(487.698.133,00)	93,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.105.152.286,00	4.734.773.225,00	(370.379.061,00)	92,74	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.595.998.294,00	3.421.202.531,00	(174.795.763,00)	95,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.595.998.294,00	3.421.202.531,00	(174.795.763,00)	95,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.595.998.294,00	3.421.202.531,00	(174.795.763,00)	95,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.595.998.294,00	3.421.202.531,00	(174.795.763,00)	95,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	136.480.944,00	132.195.550,00	(4.285.394,00)	96,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.551.700,00	2.550.300,00	(1.400,00)	99,94	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.551.700,00	2.550.300,00	(1.400,00)	99,94	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.551.700,00	2.550.300,00	(1.400,00)	99,94	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	19.893.119,00	19.714.000,00	(179.119,00)	99,09	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.893.119,00	19.714.000,00	(179.119,00)	99,09	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.893.119,00	19.714.000,00	(179.119,00)	99,09	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.638.625,00	3.631.900,00	(6.725,00)	99,81	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.638.625,00	3.631.900,00	(6.725,00)	99,81	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.638.625,00	3.631.900,00	(6.725,00)	99,81	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	110.397.500,00	106.299.350,00	(4.098.150,00)	96,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	110.397.500,00	106.299.350,00	(4.098.150,00)	96,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.397.500,00	106.299.350,00	(4.098.150,00)	96,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	13.306.800,00	12.225.000,00	(1.081.800,00)	91,87	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	13.306.800,00	12.225.000,00	(1.081.800,00)	91,87	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	13.306.800,00	12.225.000,00	(1.081.800,00)	91,87	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.306.800,00	12.225.000,00	(1.081.800,00)	91,87	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.235.209.048,00	1.057.694.394,00	(177.514.654,00)	85,62	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	64.960.000,00	58.870.147,00	(6.089.853,00)	90,62	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	64.960.000,00	58.870.147,00	(6.089.853,00)	90,62	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.960.000,00	58.870.147,00	(6.089.853,00)	90,62	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.170.249.048,00	998.824.247,00	(171.424.801,00)	85,35	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.170.249.048,00	998.824.247,00	(171.424.801,00)	85,35	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.170.249.048,00	998.824.247,00	(171.424.801,00)	85,35	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	124.157.200,00	111.455.750,00	(12.701.450,00)	89,76	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	83.127.200,00	75.599.500,00	(7.527.700,00)	90,94	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	83.127.200,00	75.599.500,00	(7.527.700,00)	90,94	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.127.200,00	75.599.500,00	(7.527.700,00)	90,94	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	17.980.000,00	16.513.000,00	(1.467.000,00)	91,84	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	17.980.000,00	16.513.000,00	(1.467.000,00)	91,84	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.980.000,00	16.513.000,00	(1.467.000,00)	91,84	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	23.050.000,00	19.343.250,00	(3.706.750,00)	83,91	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	23.050.000,00	19.343.250,00	(3.706.750,00)	83,91	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.050.000,00	19.343.250,00	(3.706.750,00)	83,91	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.204.723.400,00	1.154.274.150,00	(50.449.250,00)	95,81	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.204.723.400,00	1.154.274.150,00	(50.449.250,00)	95,81	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014		RELASI MEDIA	1.127.515.500,00	1.103.086.900,00	(24.428.600,00)	97,83	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	1.127.515.500,00	1.103.086.900,00	(24.428.600,00)	97,83	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.127.515.500,00	1.103.086.900,00	(24.428.600,00)	97,83	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017		PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3.552.000,00	1.821.750,00	(1.730.250,00)	51,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	3.552.000,00	1.821.750,00	(1.730.250,00)	51,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.552.000,00	1.821.750,00	(1.730.250,00)	51,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021		PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	73.655.900,00	49.365.500,00	(24.290.400,00)	67,02	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	68.623.900,00	44.703.500,00	(23.920.400,00)	65,14	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.623.900,00	44.703.500,00	(23.920.400,00)	65,14	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	5.032.000,00	4.662.000,00	(370.000,00)	92,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.032.000,00	4.662.000,00	(370.000,00)	92,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.359.527.000,00	1.292.657.178,00	(66.869.822,00)	95,08	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02		PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.359.527.000,00	1.292.657.178,00	(66.869.822,00)	95,08	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0021		PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH	14.685.000,00	11.790.480,00	(2.894.520,00)	80,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	14.685.000,00	11.790.480,00	(2.894.520,00)	80,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.685.000,00	11.790.480,00	(2.894.520,00)	80,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0030		PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE	1.344.842.000,00	1.280.866.698,00	(63.975.302,00)	95,24	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0030	5.1	BELANJA OPERASI	1.344.842.000,00	1.280.866.698,00	(63.975.302,00)	95,24	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.344.842.000,00	1.280.866.698,00	(63.975.302,00)	95,24	
				JUMLAH BELANJA	7.669.402.686,00	7.181.704.553,00	(487.698.133,00)	93,64	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.469.402.686,00)	(7.180.104.553,00)	289.298.133,00	96,12	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.469.402.686,00)	(7.180.104.553,00)	289.298.133,00	96,12	

WALI KOTA PADANG PANJANG,



HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	200.000.000,00	1.600.000,00	(198.400.000,00)	0,80	
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.000.000,00	1.600.000,00	(198.400.000,00)	0,80	
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	200.000.000,00	1.600.000,00	(198.400.000,00)	0,80	
				JUMLAH PENDAPATAN	200.000.000,00	1.600.000,00	(198.400.000,00)	0,80	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.505.000,00	4.376.925,00	(1.128.075,00)	79,50	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	5.505.000,00	4.376.925,00	(1.128.075,00)	79,50	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.505.000,00	4.376.925,00	(1.128.075,00)	79,50	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0008		PENINGKATAN PERAN STATISTIK SEKTORAL TERHADAP SISTEM STATISTIK NASIONAL	5.505.000,00	4.376.925,00	(1.128.075,00)	79,50	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.505.000,00	4.376.925,00	(1.128.075,00)	79,50	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.505.000,00	4.376.925,00	(1.128.075,00)	79,50	
				JUMLAH BELANJA	5.505.000,00	4.376.925,00	(1.128.075,00)	79,50	
				SURPLUS / (DEFISIT)	194.495.000,00	(2.776.925,00)	(197.271.925,00)	(1,42)	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	194.495.000,00	(2.776.925,00)	(197.271.925,00)	(1,42)	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	200.000.000,00	1.600.000,00	(198.400.000,00)	0,80	
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.000.000,00	1.600.000,00	(198.400.000,00)	0,80	
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	200.000.000,00	1.600.000,00	(198.400.000,00)	0,80	
				JUMLAH PENDAPATAN	200.000.000,00	1.600.000,00	(198.400.000,00)	0,80	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.850.000,00	2.895.000,00	(955.000,00)	75,19	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	3.850.000,00	2.895.000,00	(955.000,00)	75,19	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.850.000,00	2.895.000,00	(955.000,00)	75,19	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	3.850.000,00	2.895.000,00	(955.000,00)	75,19	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.850.000,00	2.895.000,00	(955.000,00)	75,19	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	2.895.000,00	(955.000,00)	75,19	
				JUMLAH BELANJA	3.850.000,00	2.895.000,00	(955.000,00)	75,19	
				SURPLUS / (DEFISIT)	196.150.000,00	(1.295.000,00)	(197.445.000,00)	(0,66)	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	196.150.000,00	(1.295.000,00)	(197.445.000,00)	(0,66)	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	4.473.830.000,00	4.090.445.547,00	(383.384.453,00)	91,43	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.473.830.000,00	4.090.445.547,00	(383.384.453,00)	91,43	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	4.473.830.000,00	3.855.750.209,00	(618.079.791,00)	86,18	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	234.695.338,00	234.695.338,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	4.473.830.000,00	4.090.445.547,00	(383.384.453,00)	91,43	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		5	BELANJA DAERAH	11.843.888.505,00	10.766.541.340,00	(1.077.347.165,00)	90,90	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.013.010.003,00	7.579.479.448,00	(433.530.555,00)	94,58	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.463.046.289,00	6.188.619.865,00	(274.426.424,00)	95,75	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.463.046.289,00	6.188.619.865,00	(274.426.424,00)	95,75	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.463.046.289,00	6.188.619.865,00	(274.426.424,00)	95,75	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.447.996.289,00	6.173.569.865,00	(274.426.424,00)	95,74	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	334.435.137,00	307.865.899,00	(26.569.238,00)	92,05	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.733.200,00	10.733.200,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.733.200,00	10.733.200,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.733.200,00	10.733.200,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	52.304.331,00	48.034.190,00	(4.270.141,00)	91,83	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	52.304.331,00	48.034.190,00	(4.270.141,00)	91,83	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.304.331,00	48.034.190,00	(4.270.141,00)	91,83	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.674.606,00	3.281.950,00	(12.392.656,00)	20,93	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.674.606,00	3.281.950,00	(12.392.656,00)	20,93	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.674.606,00	3.281.950,00	(12.392.656,00)	20,93	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	255.723.000,00	245.816.559,00	(9.906.441,00)	96,12	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	255.723.000,00	245.816.559,00	(9.906.441,00)	96,12	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.723.000,00	245.816.559,00	(9.906.441,00)	96,12	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	88.150.000,00	77.579.000,00	(10.571.000,00)	88,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	83.650.000,00	74.300.000,00	(9.350.000,00)	88,82	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	83.650.000,00	74.300.000,00	(9.350.000,00)	88,82	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.650.000,00	74.300.000,00	(9.350.000,00)	88,82	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.500.000,00	3.279.000,00	(1.221.000,00)	72,86	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	4.500.000,00	3.279.000,00	(1.221.000,00)	72,86	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	3.279.000,00	(1.221.000,00)	72,86	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	630.549.130,00	562.276.692,00	(68.272.438,00)	89,17	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.998.500,00	1.490.000,00	(1.508.500,00)	49,69	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.998.500,00	1.490.000,00	(1.508.500,00)	49,69	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.998.500,00	1.490.000,00	(1.508.500,00)	49,69	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	52.629.830,00	42.403.052,00	(10.226.778,00)	80,56	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.629.830,00	42.403.052,00	(10.226.778,00)	80,56	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.629.830,00	42.403.052,00	(10.226.778,00)	80,56	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	574.920.800,00	518.383.640,00	(56.537.160,00)	90,16	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	574.920.800,00	518.383.640,00	(56.537.160,00)	90,16	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	574.920.800,00	518.383.640,00	(56.537.160,00)	90,16	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	496.829.447,00	443.137.992,00	(53.691.455,00)	89,19	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	108.144.000,00	93.149.552,00	(14.994.448,00)	86,13	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	108.144.000,00	93.149.552,00	(14.994.448,00)	86,13	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.144.000,00	93.149.552,00	(14.994.448,00)	86,13	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	82.630.000,00	69.210.800,00	(13.419.200,00)	83,75	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	82.630.000,00	69.210.800,00	(13.419.200,00)	83,75	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.630.000,00	69.210.800,00	(13.419.200,00)	83,75	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	35.000.000,00	24.464.000,00	(10.536.000,00)	69,89	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	24.464.000,00	(10.536.000,00)	69,89	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	24.464.000,00	(10.536.000,00)	69,89	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	35.337.200,00	20.635.200,00	(14.702.000,00)	58,39	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	35.337.200,00	20.635.200,00	(14.702.000,00)	58,39	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.337.200,00	20.635.200,00	(14.702.000,00)	58,39	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	235.718.247,00	235.678.440,00	(39.807,00)	99,98	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	235.718.247,00	235.678.440,00	(39.807,00)	99,98	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.718.247,00	235.678.440,00	(39.807,00)	99,98	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01		PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0004		PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	111.200.000,00	101.219.550,00	(9.980.450,00)	91,02	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.06.2.01		PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	111.200.000,00	101.219.550,00	(9.980.450,00)	91,02	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.06.2.01.0005		PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, STANDARISASI, DAN RESTRUKTURISASI USAHA	111.200.000,00	101.219.550,00	(9.980.450,00)	91,02	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	111.200.000,00	101.219.550,00	(9.980.450,00)	91,02	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.200.000,00	101.219.550,00	(9.980.450,00)	91,02	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	531.666.684,00	409.938.192,00	(121.728.492,00)	77,10	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01		PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	531.666.684,00	409.938.192,00	(121.728.492,00)	77,10	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0002		PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO	355.166.684,00	245.200.008,00	(109.966.676,00)	69,03	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	355.166.684,00	245.200.008,00	(109.966.676,00)	69,03	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.620.000,00	184.500.000,00	(36.120.000,00)	83,62	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0002	5.1.04	Belanja Subsidi	134.546.684,00	60.700.008,00	(73.846.676,00)	45,11	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0004		PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	176.500.000,00	164.738.184,00	(11.761.816,00)	93,33	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	176.500.000,00	164.738.184,00	(11.761.816,00)	93,33	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.500.000,00	164.738.184,00	(11.761.816,00)	93,33	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.186.401.818,00	2.674.294.150,00	(512.107.668,00)	83,92	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01		PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	3.186.401.818,00	2.674.294.150,00	(512.107.668,00)	83,92	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01.0002		PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	3.186.401.818,00	2.674.294.150,00	(512.107.668,00)	83,92	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.186.401.818,00	2.674.294.150,00	(512.107.668,00)	83,92	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.960.000,00	71.694.150,00	(4.265.850,00)	94,38	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.110.441.818,00	2.602.600.000,00	(507.841.818,00)	83,67	
				JUMLAH BELANJA	11.843.888.505,00	10.766.541.340,00	(1.077.347.165,00)	90,90	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.370.058.505,00)	(6.676.095.793,00)	693.962.712,00	90,58	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.370.058.505,00)	(6.676.095.793,00)	693.962.712,00	90,58	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	4.473.830.000,00	4.090.445.547,00	(383.384.453,00)	91,43	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.473.830.000,00	4.090.445.547,00	(383.384.453,00)	91,43	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	4.473.830.000,00	3.855.750.209,00	(618.079.791,00)	86,18	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	234.695.338,00	234.695.338,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	4.473.830.000,00	4.090.445.547,00	(383.384.453,00)	91,43	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.824.865.210,00	6.282.820.605,98	(1.542.044.604,02)	80,29	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	10.787.300,00	7.292.800,00	(3.494.500,00)	67,60	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.01		PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN	1.500.000,00	1.304.700,00	(195.300,00)	86,98	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.01.0001		FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PEROLEHAN PERIZINAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	1.500.000,00	1.304.700,00	(195.300,00)	86,98	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.304.700,00	(195.300,00)	86,98	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.304.700,00	(195.300,00)	86,98	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.06		PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	9.287.300,00	5.988.100,00	(3.299.200,00)	64,47	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.06.0003		PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA TERHADAP PENGGUNA AKHIR BAHAN BERBAHAYA (PA-B2) MAUPUN PRODUSEN B2 (P-B2)	9.287.300,00	5.988.100,00	(3.299.200,00)	64,47	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.287.300,00	5.988.100,00	(3.299.200,00)	64,47	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.287.300,00	5.988.100,00	(3.299.200,00)	64,47	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	6.867.922.060,00	5.598.428.763,98	(1.269.493.296,02)	81,51	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01		PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	6.867.922.060,00	5.598.428.763,98	(1.269.493.296,02)	81,51	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001		PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.757.295.800,00	3.127.207.126,98	(630.088.673,02)	83,23	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.128.966.600,00	2.575.275.414,59	(553.691.185,41)	82,30	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.128.966.600,00	2.575.275.414,59	(553.691.185,41)	82,30	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	628.329.200,00	551.931.712,39	(76.397.487,61)	87,84	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202.329.200,00	129.266.500,00	(73.062.700,00)	63,88	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	426.000.000,00	422.665.212,39	(3.334.787,61)	99,21	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0002		FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.110.626.260,00	2.471.221.637,00	(639.404.623,00)	79,44	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.110.626.260,00	2.471.221.637,00	(639.404.623,00)	79,44	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	34.000.000,00	30.250.000,00	(3.750.000,00)	88,97	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.076.626.260,00	2.440.971.637,00	(635.654.623,00)	79,33	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	43.051.300,00	34.421.200,00	(8.630.100,00)	79,95	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02		PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	43.051.300,00	34.421.200,00	(8.630.100,00)	79,95	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0001		PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	43.051.300,00	34.421.200,00	(8.630.100,00)	79,95	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	43.051.300,00	34.421.200,00	(8.630.100,00)	79,95	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.051.300,00	34.421.200,00	(8.630.100,00)	79,95	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	59.385.850,00	38.263.500,00	(21.122.350,00)	64,43	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	59.385.850,00	38.263.500,00	(21.122.350,00)	64,43	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	59.385.850,00	38.263.500,00	(21.122.350,00)	64,43	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	59.385.850,00	38.263.500,00	(21.122.350,00)	64,43	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.385.850,00	38.263.500,00	(21.122.350,00)	64,43	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	843.718.700,00	604.414.342,00	(239.304.358,00)	71,63	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01		PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	843.718.700,00	604.414.342,00	(239.304.358,00)	71,63	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01.0005		PELAKSANAAN PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	231.455.000,00	203.048.342,00	(28.406.658,00)	87,72	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	231.455.000,00	203.048.342,00	(28.406.658,00)	87,72	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.455.000,00	203.048.342,00	(28.406.658,00)	87,72	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01.0006		PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	612.263.700,00	401.366.000,00	(210.897.700,00)	65,55	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	591.348.700,00	381.941.000,00	(209.407.700,00)	64,58	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	591.348.700,00	381.941.000,00	(209.407.700,00)	64,58	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	20.915.000,00	19.425.000,00	(1.490.000,00)	92,87	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.915.000,00	19.425.000,00	(1.490.000,00)	92,87	
				JUMLAH BELANJA	7.824.865.210,00	6.282.820.605,98	(1.542.044.604,02)	80,29	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.351.035.210,00)	(2.192.375.058,98)	1.158.660.151,02	65,42	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.351.035.210,00)	(2.192.375.058,98)	1.158.660.151,02	65,42	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	4.473.830.000,00	4.090.445.547,00	(383.384.453,00)	91,43	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.473.830.000,00	4.090.445.547,00	(383.384.453,00)	91,43	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	4.473.830.000,00	3.855.750.209,00	(618.079.791,00)	86,18	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	234.695.338,00	234.695.338,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	4.473.830.000,00	4.090.445.547,00	(383.384.453,00)	91,43	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000		5	BELANJA DAERAH	552.621.802,00	461.130.700,00	(91.491.102,00)	83,44	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	551.528.552,00	460.080.700,00	(91.447.852,00)	83,41	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01		PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	551.528.552,00	460.080.700,00	(91.447.852,00)	83,41	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	493.310.752,00	406.251.600,00	(87.059.152,00)	82,35	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	493.310.752,00	406.251.600,00	(87.059.152,00)	82,35	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	493.310.752,00	406.251.600,00	(87.059.152,00)	82,35	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	58.217.800,00	53.829.100,00	(4.388.700,00)	92,46	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	58.217.800,00	53.829.100,00	(4.388.700,00)	92,46	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.217.800,00	53.829.100,00	(4.388.700,00)	92,46	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	1.093.250,00	1.050.000,00	(43.250,00)	96,04	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.03.2.01		PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	1.093.250,00	1.050.000,00	(43.250,00)	96,04	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.03.2.01.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	1.093.250,00	1.050.000,00	(43.250,00)	96,04	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.093.250,00	1.050.000,00	(43.250,00)	96,04	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.093.250,00	1.050.000,00	(43.250,00)	96,04	
				JUMLAH BELANJA	552.621.802,00	461.130.700,00	(91.491.102,00)	83,44	
				SURPLUS / (DEFISIT)	3.921.208.198,00	3.629.314.847,00	(291.893.351,00)	92,55	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	3.921.208.198,00	3.629.314.847,00	(291.893.351,00)	92,55	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

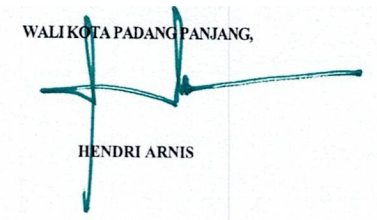
Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.19.3.26.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.250.000.000,00	1.067.842.000,00	(182.158.000,00)	85,42	
	2.19.3.26.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.250.000.000,00	1.067.842.000,00	(182.158.000,00)	85,42	
	2.19.3.26.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.250.000.000,00	1.067.842.000,00	(182.158.000,00)	85,42	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.250.000.000,00	1.067.842.000,00	(182.158.000,00)	85,42	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.971.862.245,00	7.166.112.466,36	(805.749.778,64)	89,89	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.549.537.408,00	5.106.895.985,00	(442.641.423,00)	92,02	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.965.818.499,00	3.715.988.706,00	(249.829.793,00)	93,70	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.965.818.499,00	3.715.988.706,00	(249.829.793,00)	93,70	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.965.818.499,00	3.715.988.706,00	(249.829.793,00)	93,70	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.952.868.499,00	3.703.038.706,00	(249.829.793,00)	93,67	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	136.113.640,00	121.819.165,00	(14.294.475,00)	89,49	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.920.720,00	11.214.200,00	(706.520,00)	94,07	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.920.720,00	11.214.200,00	(706.520,00)	94,07	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.920.720,00	11.214.200,00	(706.520,00)	94,07	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	28.919.470,00	27.713.300,00	(1.206.170,00)	95,82	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	28.919.470,00	27.713.300,00	(1.206.170,00)	95,82	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.919.470,00	27.713.300,00	(1.206.170,00)	95,82	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.249.450,00	15.157.600,00	(7.091.850,00)	68,12	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	22.249.450,00	15.157.600,00	(7.091.850,00)	68,12	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.249.450,00	15.157.600,00	(7.091.850,00)	68,12	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	73.024.000,00	67.734.065,00	(5.289.935,00)	92,75	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	73.024.000,00	67.734.065,00	(5.289.935,00)	92,75	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.024.000,00	67.734.065,00	(5.289.935,00)	92,75	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	28.184.300,00	24.469.100,00	(3.715.200,00)	86,81	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	4.619.100,00	4.619.100,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	4.619.100,00	4.619.100,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.619.100,00	4.619.100,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	23.565.200,00	19.850.000,00	(3.715.200,00)	84,23	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	23.565.200,00	19.850.000,00	(3.715.200,00)	84,23	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.565.200,00	19.850.000,00	(3.715.200,00)	84,23	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.225.244.169,00	1.080.474.614,00	(144.769.555,00)	88,18	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.997.400,00	1.640.000,00	(1.357.400,00)	54,71	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.997.400,00	1.640.000,00	(1.357.400,00)	54,71	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.997.400,00	1.640.000,00	(1.357.400,00)	54,71	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	114.791.746,00	89.934.368,00	(24.857.378,00)	78,34	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	114.791.746,00	89.934.368,00	(24.857.378,00)	78,34	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.791.746,00	89.934.368,00	(24.857.378,00)	78,34	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.107.455.023,00	988.900.246,00	(118.554.777,00)	89,29	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.107.455.023,00	988.900.246,00	(118.554.777,00)	89,29	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.107.455.023,00	988.900.246,00	(118.554.777,00)	89,29	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	194.176.800,00	164.144.400,00	(30.032.400,00)	84,53	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	84.464.000,00	70.356.400,00	(14.107.600,00)	83,29	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	84.464.000,00	70.356.400,00	(14.107.600,00)	83,29	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.464.000,00	70.356.400,00	(14.107.600,00)	83,29	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	32.552.800,00	20.705.000,00	(11.847.800,00)	63,60	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	32.552.800,00	20.705.000,00	(11.847.800,00)	63,60	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.552.800,00	20.705.000,00	(11.847.800,00)	63,60	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	73.160.000,00	73.083.000,00	(77.000,00)	99,89	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	73.160.000,00	73.083.000,00	(77.000,00)	99,89	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.160.000,00	73.083.000,00	(77.000,00)	99,89	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	232.512.950,00	217.688.741,00	(14.824.209,00)	93,62	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.02.2.01		PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	132.512.950,00	118.479.550,00	(14.033.400,00)	89,40	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0011		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA BAGI WIRAUSAHA PEMULA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	71.465.900,00	60.099.300,00	(11.366.600,00)	84,09	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	71.465.900,00	60.099.300,00	(11.366.600,00)	84,09	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.465.900,00	60.099.300,00	(11.366.600,00)	84,09	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0015		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA BAGI PEMUDA PELOPOR TINGKAT KABUPATEN/KOTA	61.047.050,00	58.380.250,00	(2.666.800,00)	95,63	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	61.047.050,00	58.380.250,00	(2.666.800,00)	95,63	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.047.050,00	58.380.250,00	(2.666.800,00)	95,63	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.02.2.02		PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	99.209.191,00	(790.809,00)	99,20	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	99.209.191,00	(790.809,00)	99,20	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.209.191,00	(790.809,00)	99,20	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	99.209.191,00	(790.809,00)	99,20	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.089.811.887,00	1.743.973.110,00	(345.838.777,00)	83,45	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	404.569.447,00	298.677.484,00	(105.891.963,00)	73,82	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA OLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	404.569.447,00	298.677.484,00	(105.891.963,00)	73,82	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	266.427.720,00	189.262.884,00	(77.164.836,00)	71,03	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.427.720,00	189.262.884,00	(77.164.836,00)	71,03	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	138.141.727,00	109.414.600,00	(28.727.127,00)	79,20	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	9.650.000,00	(2.350.000,00)	80,41	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	126.141.727,00	99.764.600,00	(26.377.127,00)	79,08	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.02		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	262.188.000,00	161.559.950,00	(100.628.050,00)	61,61	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	262.188.000,00	161.559.950,00	(100.628.050,00)	61,61	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	262.188.000,00	161.559.950,00	(100.628.050,00)	61,61	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.188.000,00	161.559.950,00	(100.628.050,00)	61,61	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.03		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	417.462.200,00	336.149.686,00	(81.312.514,00)	80,52	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0009		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA	417.462.200,00	336.149.686,00	(81.312.514,00)	80,52	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	417.462.200,00	336.149.686,00	(81.312.514,00)	80,52	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.962.200,00	52.273.595,00	(22.688.605,00)	69,73	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0009	5.1.05	Belanja Hibah	342.500.000,00	283.876.091,00	(58.623.909,00)	82,88	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.05		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	1.005.592.240,00	947.585.990,00	(58.006.250,00)	94,23	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0009		PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA REKREASI MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN	716.814.290,00	699.625.300,00	(17.188.990,00)	97,60	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	529.839.290,00	514.170.300,00	(15.668.990,00)	97,04	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.839.290,00	514.170.300,00	(15.668.990,00)	97,04	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0009	5.2	BELANJA MODAL	186.975.000,00	185.455.000,00	(1.520.000,00)	99,18	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	186.975.000,00	185.455.000,00	(1.520.000,00)	99,18	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0010		PEMASSALAN OLAHRAGA DAN PENYELENGGARAAN FESTIVAL OLAHRAGA REKREASI YANG BERJENJANG DAN BERKELANJUTAN PADA TINGKAT DAERAH, NASIONAL, DAN INTERNASIONAL	288.777.950,00	247.960.690,00	(40.817.260,00)	85,86	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	288.777.950,00	247.960.690,00	(40.817.260,00)	85,86	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.777.950,00	247.960.690,00	(40.817.260,00)	85,86	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100.000.000,00	97.554.630,36	(2.445.369,64)	97,55	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	100.000.000,00	97.554.630,36	(2.445.369,64)	97,55	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0002		PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	100.000.000,00	97.554.630,36	(2.445.369,64)	97,55	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	97.554.630,36	(2.445.369,64)	97,55	
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	97.554.630,36	(2.445.369,64)	97,55	
				JUMLAH BELANJA	7.971.862.245,00	7.166.112.466,36	(805.749.778,64)	89,89	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.721.862.245,00)	(6.098.270.466,36)	623.591.778,64	90,72	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.721.862.245,00)	(6.098.270.466,36)	623.591.778,64	90,72	

WALI KOTA PADANG PANJANG,



HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

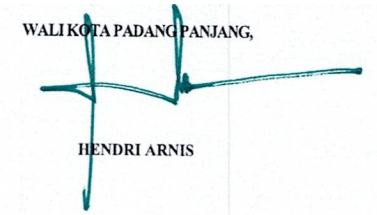
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.19.3.26.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.250.000.000,00	1.067.842.000,00	(182.158.000,00)	85,42	
	2.19.3.26.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.250.000.000,00	1.067.842.000,00	(182.158.000,00)	85,42	
	2.19.3.26.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.250.000.000,00	1.067.842.000,00	(182.158.000,00)	85,42	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.250.000.000,00	1.067.842.000,00	(182.158.000,00)	85,42	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.660.572.120,00	905.183.993,00	(755.388.127,00)	54,51	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	591.673.170,00	478.199.100,00	(113.474.070,00)	80,82	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03		PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	591.673.170,00	478.199.100,00	(113.474.070,00)	80,82	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0003		PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	117.615.150,00	112.367.000,00	(5.248.150,00)	95,53	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	117.615.150,00	112.367.000,00	(5.248.150,00)	95,53	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.615.150,00	112.367.000,00	(5.248.150,00)	95,53	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004		PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	331.520.970,00	237.557.300,00	(93.963.670,00)	71,65	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	281.520.970,00	187.829.300,00	(93.691.670,00)	66,71	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.520.970,00	187.829.300,00	(93.691.670,00)	66,71	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.728.000,00	(272.000,00)	99,45	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.728.000,00	(272.000,00)	99,45	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0006		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	63.637.450,00	55.494.300,00	(8.143.150,00)	87,20	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	63.637.450,00	55.494.300,00	(8.143.150,00)	87,20	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.637.450,00	55.494.300,00	(8.143.150,00)	87,20	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0007		PENERAPAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	78.899.600,00	72.780.500,00	(6.119.100,00)	92,24	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	78.899.600,00	72.780.500,00	(6.119.100,00)	92,24	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.899.600,00	72.780.500,00	(6.119.100,00)	92,24	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	362.508.800,00	282.659.022,00	(79.849.778,00)	77,97	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.03.2.01		PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	362.508.800,00	282.659.022,00	(79.849.778,00)	77,97	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0004		PENINGKATAN KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI	84.016.000,00	55.500.000,00	(28.516.000,00)	66,05	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	84.016.000,00	55.500.000,00	(28.516.000,00)	66,05	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.016.000,00	55.500.000,00	(28.516.000,00)	66,05	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006		FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	278.492.800,00	227.159.022,00	(51.333.778,00)	81,56	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	278.492.800,00	227.159.022,00	(51.333.778,00)	81,56	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.492.800,00	227.159.022,00	(51.333.778,00)	81,56	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	44.175.000,00	44.165.236,00	(9.764,00)	99,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.04.2.01		PENYEDIAAN PRASARANA (ZONA KREATIF/RUANG KREATIF/KOTA KREATIF) SEBAGAI RUANG BEREKSPRESI, BERPROMOSI DAN BERINTERAKSI BAGI INSAN KREATIF DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.000.000,00	29.999.986,00	(14,00)	99,99	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.04.2.01.0001		PENGEMBANGAN DAN REVITALISASI PRASARANA KOTA KREATIF	30.000.000,00	29.999.986,00	(14,00)	99,99	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.999.986,00	(14,00)	99,99	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.999.986,00	(14,00)	99,99	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.04.2.02		PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIFÂ	14.175.000,00	14.165.250,00	(9.750,00)	99,93	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.04.2.02.0022		FASILITASI PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	14.175.000,00	14.165.250,00	(9.750,00)	99,93	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.04.2.02.0022	5.1	BELANJA OPERASI	14.175.000,00	14.165.250,00	(9.750,00)	99,93	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.04.2.02.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.175.000,00	14.165.250,00	(9.750,00)	99,93	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	662.215.150,00	100.160.635,00	(562.054.515,00)	15,12	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.05.2.01		PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	635.030.200,00	83.095.635,00	(551.934.565,00)	13,08	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0005		FASILITASI PROSES KREASI, PRODUKSI, DISTRIBUSI KONSUMSI DAN KONSERVASI EKONOMI KREATIF	598.280.500,00	60.553.254,00	(537.727.246,00)	10,12	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	598.280.500,00	60.553.254,00	(537.727.246,00)	10,12	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.280.500,00	60.553.254,00	(537.727.246,00)	10,12	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006		FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	36.749.700,00	22.542.381,00	(14.207.319,00)	61,34	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	36.749.700,00	22.542.381,00	(14.207.319,00)	61,34	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.749.700,00	22.542.381,00	(14.207.319,00)	61,34	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.05.2.02		PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF	27.184.950,00	17.065.000,00	(10.119.950,00)	62,77	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.05.2.02.0001		PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF	27.184.950,00	17.065.000,00	(10.119.950,00)	62,77	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.184.950,00	17.065.000,00	(10.119.950,00)	62,77	
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.184.950,00	17.065.000,00	(10.119.950,00)	62,77	
				JUMLAH BELANJA	1.660.572.120,00	905.183.993,00	(755.388.127,00)	54,51	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(410.572.120,00)	162.658.007,00	573.230.127,00	(39,61)	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(410.572.120,00)	162.658.007,00	573.230.127,00	(39,61)	

WALI KOTA PADANG PANJANG,



HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.235.141.923,00	4.878.751.757,00	(356.390.166,00)	93,19	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.184.482.848,00	3.914.700.390,00	(269.782.458,00)	93,55	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.358.654.693,00	3.229.281.608,00	(129.373.085,00)	96,14	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.358.654.693,00	3.229.281.608,00	(129.373.085,00)	96,14	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.358.654.693,00	3.229.281.608,00	(129.373.085,00)	96,14	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.358.654.693,00	3.229.281.608,00	(129.373.085,00)	96,14	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	42.783.050,00	39.811.305,00	(2.971.745,00)	93,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.748.000,00	1.624.000,00	(124.000,00)	92,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.748.000,00	1.624.000,00	(124.000,00)	92,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.748.000,00	1.624.000,00	(124.000,00)	92,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	12.002.650,00	10.586.600,00	(1.416.050,00)	88,20	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.002.650,00	10.586.600,00	(1.416.050,00)	88,20	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.002.650,00	10.586.600,00	(1.416.050,00)	88,20	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.783.400,00	4.891.900,00	(891.500,00)	84,58	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.783.400,00	4.891.900,00	(891.500,00)	84,58	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.783.400,00	4.891.900,00	(891.500,00)	84,58	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	23.249.000,00	22.708.805,00	(540.195,00)	97,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	23.249.000,00	22.708.805,00	(540.195,00)	97,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.249.000,00	22.708.805,00	(540.195,00)	97,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	672.455.105,00	577.571.177,00	(94.883.928,00)	85,88	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	517.900,00	510.000,00	(7.900,00)	98,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	517.900,00	510.000,00	(7.900,00)	98,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	517.900,00	510.000,00	(7.900,00)	98,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	29.895.205,00	27.094.252,00	(2.800.953,00)	90,63	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.895.205,00	27.094.252,00	(2.800.953,00)	90,63	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.895.205,00	27.094.252,00	(2.800.953,00)	90,63	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	642.042.000,00	549.966.925,00	(92.075.075,00)	85,65	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	642.042.000,00	549.966.925,00	(92.075.075,00)	85,65	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	642.042.000,00	549.966.925,00	(92.075.075,00)	85,65	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	110.590.000,00	68.036.300,00	(42.553.700,00)	61,52	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	36.646.000,00	17.403.400,00	(19.242.600,00)	47,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.646.000,00	17.403.400,00	(19.242.600,00)	47,49	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.646.000,00	17.403.400,00	(19.242.600,00)	47,49	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	65.704.000,00	43.671.900,00	(22.032.100,00)	66,46	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	65.704.000,00	43.671.900,00	(22.032.100,00)	66,46	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.704.000,00	43.671.900,00	(22.032.100,00)	66,46	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.240.000,00	6.961.000,00	(1.279.000,00)	84,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.240.000,00	6.961.000,00	(1.279.000,00)	84,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.240.000,00	6.961.000,00	(1.279.000,00)	84,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	949.282.025,00	885.251.545,00	(64.030.480,00)	93,25	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01		PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	245.240.650,00	204.352.830,00	(40.887.820,00)	83,32	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0017		PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN	48.622.850,00	20.123.845,00	(28.499.005,00)	41,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	48.622.850,00	20.123.845,00	(28.499.005,00)	41,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.622.850,00	20.123.845,00	(28.499.005,00)	41,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN	28.165.900,00	26.243.100,00	(1.922.800,00)	93,17	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	28.165.900,00	26.243.100,00	(1.922.800,00)	93,17	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.165.900,00	26.243.100,00	(1.922.800,00)	93,17	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0019		PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA	158.471.900,00	149.680.885,00	(8.791.015,00)	94,45	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	158.471.900,00	149.680.885,00	(8.791.015,00)	94,45	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.471.900,00	149.680.885,00	(8.791.015,00)	94,45	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0020		PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK	9.980.000,00	8.305.000,00	(1.675.000,00)	83,21	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	9.980.000,00	8.305.000,00	(1.675.000,00)	83,21	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.980.000,00	8.305.000,00	(1.675.000,00)	83,21	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02		PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	704.041.375,00	680.898.715,00	(23.142.660,00)	96,71	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0007		PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	12.197.425,00	12.000.000,00	(197.425,00)	98,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	12.197.425,00	12.000.000,00	(197.425,00)	98,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.197.425,00	12.000.000,00	(197.425,00)	98,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0008		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN DI TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.750.000,00	38.350.000,00	(1.400.000,00)	96,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	39.750.000,00	38.350.000,00	(1.400.000,00)	96,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.750.000,00	38.350.000,00	(1.400.000,00)	96,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0009		PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	463.328.850,00	443.972.090,00	(19.356.760,00)	95,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	463.328.850,00	443.972.090,00	(19.356.760,00)	95,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	463.328.850,00	443.972.090,00	(19.356.760,00)	95,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0010		SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MASYARAKAT	188.765.100,00	186.576.625,00	(2.188.475,00)	98,84	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	188.765.100,00	186.576.625,00	(2.188.475,00)	98,84	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.765.100,00	186.576.625,00	(2.188.475,00)	98,84	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	101.377.050,00	78.799.822,00	(22.577.228,00)	77,72	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.01		PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA	101.377.050,00	78.799.822,00	(22.577.228,00)	77,72	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.01.0003		PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYIMPANAN, PERAWATAN, PELESTARIAN, DAN PENDAFTARAN NASKAH KUNO	101.377.050,00	78.799.822,00	(22.577.228,00)	77,72	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	101.377.050,00	78.799.822,00	(22.577.228,00)	77,72	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.377.050,00	78.799.822,00	(22.577.228,00)	77,72	
				JUMLAH BELANJA	5.235.141.923,00	4.878.751.757,00	(356.390.166,00)	93,19	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.235.141.923,00)	(4.878.751.757,00)	356.390.166,00	93,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.235.141.923,00)	(4.878.751.757,00)	356.390.166,00	93,19	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	15.667.850,00	13.451.050,00	(2.216.800,00)	85,85	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	15.667.850,00	13.451.050,00	(2.216.800,00)	85,85	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01		PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.667.850,00	13.451.050,00	(2.216.800,00)	85,85	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003		PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	15.667.850,00	13.451.050,00	(2.216.800,00)	85,85	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.667.850,00	13.451.050,00	(2.216.800,00)	85,85	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.667.850,00	13.451.050,00	(2.216.800,00)	85,85	
				JUMLAH BELANJA	15.667.850,00	13.451.050,00	(2.216.800,00)	85,85	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(15.667.850,00)	(13.451.050,00)	2.216.800,00	85,85	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(15.667.850,00)	(13.451.050,00)	2.216.800,00	85,85	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	4.01.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	550.000.000,00	369.368.520,00	(180.631.480,00)	67,15	
	4.01.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	550.000.000,00	369.368.520,00	(180.631.480,00)	67,15	
	4.01.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	550.000.000,00	369.228.000,00	(180.772.000,00)	67,13	
	4.01.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	140.520,00	140.520,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	550.000.000,00	369.368.520,00	(180.631.480,00)	67,15	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	47.308.703.699,00	40.538.431.604,91	(6.770.272.094,09)	85,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.708.382.469,00	30.158.240.408,00	(3.550.142.061,00)	89,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	15.293.978.346,00	14.752.765.103,00	(541.213.243,00)	96,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	15.293.978.346,00	14.752.765.103,00	(541.213.243,00)	96,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.293.978.346,00	14.752.765.103,00	(541.213.243,00)	96,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	15.196.978.346,00	14.684.485.103,00	(512.493.243,00)	96,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.000.000,00	68.280.000,00	(28.720.000,00)	70,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	4.186.433.160,00	3.804.425.628,00	(382.007.532,00)	90,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	65.000.000,00	64.897.300,00	(102.700,00)	99,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	64.897.300,00	(102.700,00)	99,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	64.897.300,00	(102.700,00)	99,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	30.000.000,00	27.227.500,00	(2.772.500,00)	90,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	27.227.500,00	(2.772.500,00)	90,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.227.500,00	(2.772.500,00)	90,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	164.977.660,00	125.089.426,00	(39.888.234,00)	75,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	164.977.660,00	125.089.426,00	(39.888.234,00)	75,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.977.660,00	125.089.426,00	(39.888.234,00)	75,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.000.000,00	14.700.250,00	(5.299.750,00)	73,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	14.700.250,00	(5.299.750,00)	73,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	14.700.250,00	(5.299.750,00)	73,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	1.260.125.000,00	959.785.856,00	(300.339.144,00)	76,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.260.125.000,00	959.785.856,00	(300.339.144,00)	76,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.260.125.000,00	959.785.856,00	(300.339.144,00)	76,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	2.646.330.500,00	2.612.725.296,00	(33.605.204,00)	98,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.646.330.500,00	2.612.725.296,00	(33.605.204,00)	98,73	

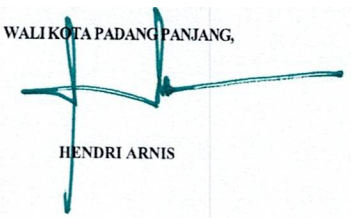
KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.646.330.500,00	2.612.725.296,00	(33.605.204,00)	98,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.461.468.800,00	2.250.821.540,00	(210.647.260,00)	91,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.823.160.000,00	1.804.250.000,00	(18.910.000,00)	98,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.160.000,00	1.750.000,00	(1.410.000,00)	55,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.160.000,00	1.750.000,00	(1.410.000,00)	55,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.820.000.000,00	1.802.500.000,00	(17.500.000,00)	99,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.820.000.000,00	1.802.500.000,00	(17.500.000,00)	99,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	3.160.100,00	0,00	(3.160.100,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.160.100,00	0,00	(3.160.100,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.160.100,00	0,00	(3.160.100,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	395.062.500,00	247.035.600,00	(148.026.900,00)	62,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	110.058.700,00	109.890.000,00	(168.700,00)	99,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.058.700,00	109.890.000,00	(168.700,00)	99,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	285.003.800,00	137.145.600,00	(147.858.200,00)	48,12	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	285.003.800,00	137.145.600,00	(147.858.200,00)	48,12	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	240.086.200,00	199.535.940,00	(40.550.260,00)	83,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	70.777.700,00	49.800.000,00	(20.977.700,00)	70,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.777.700,00	49.800.000,00	(20.977.700,00)	70,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	169.308.500,00	149.735.940,00	(19.572.560,00)	88,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.308.500,00	149.735.940,00	(19.572.560,00)	88,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.953.631.580,00	1.672.057.774,09	(281.573.805,91)	85,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	14.360.000,00	12.250.000,00	(2.110.000,00)	85,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.360.000,00	12.250.000,00	(2.110.000,00)	85,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.360.000,00	12.250.000,00	(2.110.000,00)	85,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	313.500.000,00	252.912.608,00	(60.587.392,00)	80,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	313.500.000,00	252.912.608,00	(60.587.392,00)	80,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.500.000,00	252.912.608,00	(60.587.392,00)	80,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	735.243.980,00	648.034.016,71	(87.209.963,29)	88,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	735.243.980,00	648.034.016,71	(87.209.963,29)	88,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	735.243.980,00	648.034.016,71	(87.209.963,29)	88,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	890.527.600,00	758.861.149,38	(131.666.450,62)	85,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	890.527.600,00	758.861.149,38	(131.666.450,62)	85,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	890.527.600,00	758.861.149,38	(131.666.450,62)	85,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.523.559.800,00	2.725.577.840,28	(797.981.959,72)	77,35	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	2.472.137.800,00	1.877.611.647,28	(594.526.152,72)	75,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.472.137.800,00	1.877.611.647,28	(594.526.152,72)	75,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.472.137.800,00	1.877.611.647,28	(594.526.152,72)	75,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	130.000.000,00	56.379.397,00	(73.620.603,00)	43,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	56.379.397,00	(73.620.603,00)	43,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	56.379.397,00	(73.620.603,00)	43,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	921.422.000,00	791.586.796,00	(129.835.204,00)	85,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	776.072.000,00	698.361.796,00	(77.710.204,00)	89,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	776.072.000,00	698.361.796,00	(77.710.204,00)	89,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	145.350.000,00	93.225.000,00	(52.125.000,00)	64,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145.350.000,00	93.225.000,00	(52.125.000,00)	64,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	964.904.723,00	890.293.981,00	(74.610.742,00)	92,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	180.129.723,00	149.831.650,00	(30.298.073,00)	83,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	180.129.723,00	149.831.650,00	(30.298.073,00)	83,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	180.129.723,00	149.831.650,00	(30.298.073,00)	83,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	384.775.000,00	351.176.621,00	(33.598.379,00)	91,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	384.775.000,00	351.176.621,00	(33.598.379,00)	91,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.775.000,00	351.176.621,00	(33.598.379,00)	91,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004		PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	400.000.000,00	389.285.710,00	(10.714.290,00)	97,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	389.285.710,00	(10.714.290,00)	97,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	400.000.000,00	389.285.710,00	(10.714.290,00)	97,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12		FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	4.110.511.540,00	3.043.929.313,63	(1.066.582.226,37)	74,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	2.727.964.000,00	2.104.942.266,35	(623.021.733,65)	77,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.456.071.400,00	1.918.152.265,35	(537.919.134,65)	78,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.456.071.400,00	1.918.152.265,35	(537.919.134,65)	78,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.2	BELANJA MODAL	271.892.600,00	186.790.001,00	(85.102.599,00)	68,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	271.892.600,00	186.790.001,00	(85.102.599,00)	68,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH	1.312.547.540,00	912.412.217,28	(400.135.322,72)	69,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.128.112.440,00	851.543.217,28	(276.569.222,72)	75,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.128.112.440,00	851.543.217,28	(276.569.222,72)	75,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.2	BELANJA MODAL	184.435.100,00	60.869.000,00	(123.566.100,00)	33,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.435.100,00	60.869.000,00	(123.566.100,00)	33,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	70.000.000,00	26.574.830,00	(43.425.170,00)	37,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	26.574.830,00	(43.425.170,00)	37,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	26.574.830,00	(43.425.170,00)	37,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13		PENATAAN ORGANISASI	252.227.520,00	172.124.500,00	(80.103.020,00)	68,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001		PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	22.563.900,00	8.509.110,00	(14.054.790,00)	37,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.563.900,00	8.509.110,00	(14.054.790,00)	37,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.563.900,00	8.509.110,00	(14.054.790,00)	37,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002		FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	179.663.620,00	129.197.700,00	(50.465.920,00)	71,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	158.584.220,00	109.402.700,00	(49.181.520,00)	68,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.584.220,00	109.402.700,00	(49.181.520,00)	68,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.2	BELANJA MODAL	21.079.400,00	19.795.000,00	(1.284.400,00)	93,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.079.400,00	19.795.000,00	(1.284.400,00)	93,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003		PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	50.000.000,00	34.417.690,00	(15.582.310,00)	68,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	31.450.600,00	15.967.690,00	(15.482.910,00)	50,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.450.600,00	15.967.690,00	(15.482.910,00)	50,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	5.2	BELANJA MODAL	18.549.400,00	18.450.000,00	(99.400,00)	99,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.549.400,00	18.450.000,00	(99.400,00)	99,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	961.667.000,00	846.244.728,00	(115.422.272,00)	87,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001		FASILITASI KEPROTOKOLAN	599.823.400,00	564.889.608,00	(34.933.792,00)	94,17	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	526.323.400,00	497.514.230,00	(28.809.170,00)	94,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.323.400,00	497.514.230,00	(28.809.170,00)	94,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	5.2	BELANJA MODAL	73.500.000,00	67.375.378,00	(6.124.622,00)	91,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.500.000,00	67.375.378,00	(6.124.622,00)	91,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002		FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	75.694.200,00	65.649.000,00	(10.045.200,00)	86,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	75.694.200,00	65.649.000,00	(10.045.200,00)	86,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.694.200,00	65.649.000,00	(10.045.200,00)	86,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003		PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	286.149.400,00	215.706.120,00	(70.443.280,00)	75,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	252.149.400,00	213.726.120,00	(38.423.280,00)	84,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.149.400,00	213.726.120,00	(38.423.280,00)	84,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	5.2	BELANJA MODAL	34.000.000,00	1.980.000,00	(32.020.000,00)	5,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.000.000,00	1.980.000,00	(32.020.000,00)	5,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	13.283.209.630,00	10.191.251.387,91	(3.091.958.242,09)	76,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	426.145.120,00	252.126.615,00	(174.018.505,00)	59,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001		PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	39.351.350,00	36.639.905,00	(2.711.445,00)	93,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.351.350,00	36.639.905,00	(2.711.445,00)	93,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.351.350,00	36.639.905,00	(2.711.445,00)	93,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002		PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	72.401.120,00	60.503.515,00	(11.897.605,00)	83,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.485.520,00	32.503.515,00	(8.982.005,00)	78,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.485.520,00	32.503.515,00	(8.982.005,00)	78,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	30.915.600,00	28.000.000,00	(2.915.600,00)	90,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.915.600,00	28.000.000,00	(2.915.600,00)	90,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003		FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	314.392.650,00	154.983.195,00	(159.409.455,00)	49,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	308.827.750,00	149.533.195,00	(159.294.555,00)	48,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.827.750,00	149.533.195,00	(159.294.555,00)	48,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	5.564.900,00	5.450.000,00	(114.900,00)	97,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.564.900,00	5.450.000,00	(114.900,00)	97,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02		PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.404.229.490,00	9.772.363.169,91	(2.631.866.320,09)	78,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001		FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	3.665.899.400,00	2.656.223.918,10	(1.009.675.481,90)	72,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.590.372.720,00	2.581.409.918,10	(1.008.962.801,90)	71,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.590.372.720,00	2.581.409.918,10	(1.008.962.801,90)	71,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	75.526.680,00	74.814.000,00	(712.680,00)	99,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.526.680,00	74.814.000,00	(712.680,00)	99,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	1.660.198.690,00	1.222.367.671,81	(437.831.018,19)	73,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.660.198.690,00	1.222.367.671,81	(437.831.018,19)	73,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.198.690,00	28.465.311,81	(58.733.378,19)	32,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	910.000.000,00	743.902.360,00	(166.097.640,00)	81,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	663.000.000,00	450.000.000,00	(213.000.000,00)	67,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	7.078.131.400,00	5.893.771.580,00	(1.184.359.820,00)	83,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.078.131.400,00	5.893.771.580,00	(1.184.359.820,00)	83,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.078.131.400,00	5.893.771.580,00	(1.184.359.820,00)	83,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03		FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	452.835.020,00	166.761.603,00	(286.073.417,00)	36,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	31.194.720,00	25.652.570,00	(5.542.150,00)	82,23	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.194.720,00	25.652.570,00	(5.542.150,00)	82,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.194.720,00	25.652.570,00	(5.542.150,00)	82,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002		FASILITASI BANTUAN HUKUM	410.452.800,00	130.305.816,00	(280.146.984,00)	31,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	410.452.800,00	130.305.816,00	(280.146.984,00)	31,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.452.800,00	130.305.816,00	(280.146.984,00)	31,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003		PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	11.187.500,00	10.803.217,00	(384.283,00)	96,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.187.500,00	10.803.217,00	(384.283,00)	96,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.187.500,00	10.803.217,00	(384.283,00)	96,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	317.111.600,00	188.939.809,00	(128.171.791,00)	59,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01		PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	75.924.600,00	51.312.869,00	(24.611.731,00)	67,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	20.946.600,00	9.883.601,00	(11.062.999,00)	47,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.946.600,00	9.883.601,00	(11.062.999,00)	47,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.946.600,00	9.883.601,00	(11.062.999,00)	47,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002		PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	54.978.000,00	41.429.268,00	(13.548.732,00)	75,35	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	54.978.000,00	41.429.268,00	(13.548.732,00)	75,35	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.978.000,00	41.429.268,00	(13.548.732,00)	75,35	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02		PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	131.288.860,00	71.721.700,00	(59.567.160,00)	54,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002		PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	131.288.860,00	71.721.700,00	(59.567.160,00)	54,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	131.288.860,00	71.721.700,00	(59.567.160,00)	54,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.288.860,00	71.721.700,00	(59.567.160,00)	54,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	92.408.940,00	53.197.640,00	(39.211.300,00)	57,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.313.240,00	2.503.600,00	(1.809.640,00)	58,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.313.240,00	2.503.600,00	(1.809.640,00)	58,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.313.240,00	2.503.600,00	(1.809.640,00)	58,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002		PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	27.134.000,00	4.802.000,00	(22.332.000,00)	17,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.134.000,00	4.802.000,00	(22.332.000,00)	17,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.134.000,00	4.802.000,00	(22.332.000,00)	17,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003		PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	60.961.700,00	45.892.040,00	(15.069.660,00)	75,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.977.500,00	10.292.040,00	(14.685.460,00)	41,20	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.977.500,00	10.292.040,00	(14.685.460,00)	41,20	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	35.984.200,00	35.600.000,00	(384.200,00)	98,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.984.200,00	35.600.000,00	(384.200,00)	98,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04		PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	17.489.200,00	12.707.600,00	(4.781.600,00)	72,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR	17.489.200,00	12.707.600,00	(4.781.600,00)	72,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.489.200,00	12.707.600,00	(4.781.600,00)	72,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.489.200,00	12.707.600,00	(4.781.600,00)	72,65	
				JUMLAH BELANJA	47.308.703.699,00	40.538.431.604,91	(6.770.272.094,09)	85,68	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(46.758.703.699,00)	(40.169.063.084,91)	6.589.640.614,09	85,90	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(46.758.703.699,00)	(40.169.063.084,91)	6.589.640.614,09	85,90	

WALI KOTA PADANG PANJANG,



HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	31.807.563.222,00	29.158.071.866,00	(2.649.491.356,00)	91,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.487.689.772,00	15.900.074.414,00	(1.587.615.358,00)	90,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.396.265.590,00	3.267.782.908,00	(128.482.682,00)	96,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.396.265.590,00	3.267.782.908,00	(128.482.682,00)	96,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.396.265.590,00	3.267.782.908,00	(128.482.682,00)	96,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.396.265.590,00	3.267.782.908,00	(128.482.682,00)	96,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	341.107.975,00	324.031.370,00	(17.076.605,00)	94,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.679.100,00	18.340.200,00	(2.338.900,00)	88,68	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.679.100,00	18.340.200,00	(2.338.900,00)	88,68	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.679.100,00	18.340.200,00	(2.338.900,00)	88,68	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	70.674.524,00	62.228.750,00	(8.445.774,00)	88,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	70.674.524,00	62.228.750,00	(8.445.774,00)	88,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.674.524,00	62.228.750,00	(8.445.774,00)	88,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	18.848.351,00	18.355.150,00	(493.201,00)	97,38	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.848.351,00	18.355.150,00	(493.201,00)	97,38	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.848.351,00	18.355.150,00	(493.201,00)	97,38	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	65.650.000,00	59.885.350,00	(5.764.650,00)	91,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	65.650.000,00	59.885.350,00	(5.764.650,00)	91,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.650.000,00	59.885.350,00	(5.764.650,00)	91,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	165.256.000,00	165.221.920,00	(34.080,00)	99,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	165.256.000,00	165.221.920,00	(34.080,00)	99,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.256.000,00	165.221.920,00	(34.080,00)	99,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	328.766.200,00	208.393.023,00	(120.373.177,00)	63,38	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	255.783.200,00	148.760.023,00	(107.023.177,00)	58,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.860.000,00	0,00	(4.860.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.860.000,00	0,00	(4.860.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	250.923.200,00	148.760.023,00	(102.163.177,00)	59,28	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.923.200,00	148.760.023,00	(102.163.177,00)	59,28	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	72.983.000,00	59.633.000,00	(13.350.000,00)	81,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.180.000,00	0,00	(2.180.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.180.000,00	0,00	(2.180.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	70.803.000,00	59.633.000,00	(11.170.000,00)	84,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.803.000,00	59.633.000,00	(11.170.000,00)	84,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.946.613.245,00	1.572.383.570,00	(374.229.675,00)	80,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	13.299.500,00	3.750.000,00	(9.549.500,00)	28,19	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.299.500,00	3.750.000,00	(9.549.500,00)	28,19	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.299.500,00	3.750.000,00	(9.549.500,00)	28,19	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	136.700.345,00	129.255.552,00	(7.444.793,00)	94,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	136.700.345,00	129.255.552,00	(7.444.793,00)	94,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.700.345,00	129.255.552,00	(7.444.793,00)	94,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.796.613.400,00	1.439.378.018,00	(357.235.382,00)	80,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.796.613.400,00	1.439.378.018,00	(357.235.382,00)	80,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.796.613.400,00	1.439.378.018,00	(357.235.382,00)	80,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.534.223.000,00	1.261.580.951,00	(272.642.049,00)	82,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	392.815.000,00	252.118.220,00	(140.696.780,00)	64,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	392.815.000,00	252.118.220,00	(140.696.780,00)	64,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.815.000,00	252.118.220,00	(140.696.780,00)	64,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	164.100.000,00	108.479.043,00	(55.620.957,00)	66,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	164.100.000,00	108.479.043,00	(55.620.957,00)	66,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.100.000,00	108.479.043,00	(55.620.957,00)	66,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	72.580.000,00	63.482.450,00	(9.097.550,00)	87,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	72.580.000,00	63.482.450,00	(9.097.550,00)	87,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.580.000,00	63.482.450,00	(9.097.550,00)	87,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	904.728.000,00	837.501.238,00	(67.226.762,00)	92,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	134.728.000,00	127.656.369,00	(7.071.631,00)	94,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.728.000,00	127.656.369,00	(7.071.631,00)	94,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	770.000.000,00	709.844.869,00	(60.155.131,00)	92,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	770.000.000,00	709.844.869,00	(60.155.131,00)	92,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.14		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	667.672.100,00	484.833.700,00	(182.838.400,00)	72,61	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.14.0001		FASILITASI KEPROTOKOLAN	667.672.100,00	484.833.700,00	(182.838.400,00)	72,61	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	667.672.100,00	484.833.700,00	(182.838.400,00)	72,61	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	667.672.100,00	484.833.700,00	(182.838.400,00)	72,61	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	8.233.015.606,00	7.960.654.570,00	(272.361.036,00)	96,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	7.986.840.606,00	7.733.266.800,00	(253.573.806,00)	96,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.986.840.606,00	7.733.266.800,00	(253.573.806,00)	96,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.896.840.606,00	7.733.266.800,00	(163.573.806,00)	97,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	239.430.000,00	226.225.770,00	(13.204.230,00)	94,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1	BELANJA OPERASI	239.430.000,00	226.225.770,00	(13.204.230,00)	94,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.430.000,00	226.225.770,00	(13.204.230,00)	94,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	6.745.000,00	1.162.000,00	(5.583.000,00)	17,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.745.000,00	1.162.000,00	(5.583.000,00)	17,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.745.000,00	1.162.000,00	(5.583.000,00)	17,22	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	1.040.026.056,00	820.414.322,00	(219.611.734,00)	78,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DPRD	93.983.000,00	0,00	(93.983.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0001	5.1	BELANJA OPERASI	93.983.000,00	0,00	(93.983.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.983.000,00	0,00	(93.983.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003		FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	139.337.500,00	131.323.700,00	(8.013.800,00)	94,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1	BELANJA OPERASI	139.337.500,00	131.323.700,00	(8.013.800,00)	94,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.337.500,00	131.323.700,00	(8.013.800,00)	94,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	806.705.556,00	689.090.622,00	(117.614.934,00)	85,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1	BELANJA OPERASI	806.705.556,00	689.090.622,00	(117.614.934,00)	85,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	806.705.556,00	689.090.622,00	(117.614.934,00)	85,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	14.319.873.450,00	13.257.997.452,00	(1.061.875.998,00)	92,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	236.890.400,00	10.788.750,00	(226.101.650,00)	4,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001		PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	7.078.000,00	5.229.000,00	(1.849.000,00)	73,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.078.000,00	5.229.000,00	(1.849.000,00)	73,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.078.000,00	5.229.000,00	(1.849.000,00)	73,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002		PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	158.749.900,00	5.559.750,00	(153.190.150,00)	3,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	158.749.900,00	5.559.750,00	(153.190.150,00)	3,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.749.900,00	5.559.750,00	(153.190.150,00)	3,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004		FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK	59.964.000,00	0,00	(59.964.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	59.964.000,00	0,00	(59.964.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.964.000,00	0,00	(59.964.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0005		PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD	11.098.500,00	0,00	(11.098.500,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.098.500,00	0,00	(11.098.500,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.098.500,00	0,00	(11.098.500,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	95.886.350,00	93.214.550,00	(2.671.800,00)	97,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001		PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	18.642.500,00	18.313.450,00	(329.050,00)	98,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.642.500,00	18.313.450,00	(329.050,00)	98,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.642.500,00	18.313.450,00	(329.050,00)	98,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002		PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	18.047.500,00	17.334.550,00	(712.950,00)	96,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.047.500,00	17.334.550,00	(712.950,00)	96,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.047.500,00	17.334.550,00	(712.950,00)	96,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003		PEMBAHASAN APBD	26.529.400,00	26.084.500,00	(444.900,00)	98,32	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	26.529.400,00	26.084.500,00	(444.900,00)	98,32	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.529.400,00	26.084.500,00	(444.900,00)	98,32	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004		PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	19.329.350,00	18.629.000,00	(700.350,00)	96,37	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.329.350,00	18.629.000,00	(700.350,00)	96,37	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.329.350,00	18.629.000,00	(700.350,00)	96,37	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006		PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	13.337.600,00	12.853.050,00	(484.550,00)	96,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.337.600,00	12.853.050,00	(484.550,00)	96,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.337.600,00	12.853.050,00	(484.550,00)	96,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03		PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	14.579.700,00	14.199.250,00	(380.450,00)	97,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008		PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH	14.579.700,00	14.199.250,00	(380.450,00)	97,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	14.579.700,00	14.199.250,00	(380.450,00)	97,39	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.579.700,00	14.199.250,00	(380.450,00)	97,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	3.524.864.600,00	3.076.676.795,00	(448.187.805,00)	87,28	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002		PENDALAMAN TUGAS DPRD	2.543.012.000,00	2.399.720.495,00	(143.291.505,00)	94,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.543.012.000,00	2.399.720.495,00	(143.291.505,00)	94,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.543.012.000,00	2.399.720.495,00	(143.291.505,00)	94,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005		PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	348.000.000,00	200.937.500,00	(147.062.500,00)	57,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	348.000.000,00	200.937.500,00	(147.062.500,00)	57,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.000.000,00	200.937.500,00	(147.062.500,00)	57,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006		PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	238.590.200,00	199.941.000,00	(38.649.200,00)	83,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	238.590.200,00	199.941.000,00	(38.649.200,00)	83,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.590.200,00	199.941.000,00	(38.649.200,00)	83,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008		PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD	395.262.400,00	276.077.800,00	(119.184.600,00)	69,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	395.262.400,00	276.077.800,00	(119.184.600,00)	69,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.262.400,00	276.077.800,00	(119.184.600,00)	69,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	1.548.361.400,00	1.220.958.700,00	(327.402.700,00)	78,85	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001		KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	799.738.000,00	792.667.100,00	(7.070.900,00)	99,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	799.738.000,00	792.667.100,00	(7.070.900,00)	99,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	799.738.000,00	792.667.100,00	(7.070.900,00)	99,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003		PELAKSANAAN RESES	748.623.400,00	428.291.600,00	(320.331.800,00)	57,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	748.623.400,00	428.291.600,00	(320.331.800,00)	57,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	748.623.400,00	428.291.600,00	(320.331.800,00)	57,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08		FASILITASI TUGAS DPRD	8.899.291.000,00	8.842.159.407,00	(57.131.593,00)	99,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001		KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	6.661.686.000,00	6.645.082.194,00	(16.603.806,00)	99,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.661.686.000,00	6.645.082.194,00	(16.603.806,00)	99,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.661.686.000,00	6.645.082.194,00	(16.603.806,00)	99,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0004		FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	2.237.605.000,00	2.197.077.213,00	(40.527.787,00)	98,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.237.605.000,00	2.197.077.213,00	(40.527.787,00)	98,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.237.605.000,00	2.197.077.213,00	(40.527.787,00)	98,18	
				JUMLAH BELANJA	31.807.563.222,00	29.158.071.866,00	(2.649.491.356,00)	91,67	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(31.807.563.222,00)	(29.158.071.866,00)	2.649.491.356,00	91,67	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(31.807.563.222,00)	(29.158.071.866,00)	2.649.491.356,00	91,67	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.483.067.077,00	4.955.773.206,00	(527.293.871,00)	90,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.137.671.237,00	4.741.158.046,00	(396.513.191,00)	92,28	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.497.759.252,00	4.240.072.203,00	(257.687.049,00)	94,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.497.759.252,00	4.240.072.203,00	(257.687.049,00)	94,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.497.759.252,00	4.240.072.203,00	(257.687.049,00)	94,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.487.399.252,00	4.232.302.203,00	(255.097.049,00)	94,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.360.000,00	7.770.000,00	(2.590.000,00)	75,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	266.537.785,00	240.427.183,00	(26.110.602,00)	90,20	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.091.800,00	3.091.100,00	(700,00)	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.091.800,00	3.091.100,00	(700,00)	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.091.800,00	3.091.100,00	(700,00)	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	28.833.885,00	28.176.104,00	(657.781,00)	97,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	28.833.885,00	28.176.104,00	(657.781,00)	97,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.833.885,00	28.176.104,00	(657.781,00)	97,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.215.100,00	10.358.600,00	(6.856.500,00)	60,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.215.100,00	10.358.600,00	(6.856.500,00)	60,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.215.100,00	10.358.600,00	(6.856.500,00)	60,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	217.397.000,00	198.801.379,00	(18.595.621,00)	91,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	217.397.000,00	198.801.379,00	(18.595.621,00)	91,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.397.000,00	198.801.379,00	(18.595.621,00)	91,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	187.648.600,00	168.343.980,00	(19.304.620,00)	89,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.495.800,00	1.000.000,00	(1.495.800,00)	40,06	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.495.800,00	1.000.000,00	(1.495.800,00)	40,06	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.495.800,00	1.000.000,00	(1.495.800,00)	40,06	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	185.152.800,00	167.343.980,00	(17.808.820,00)	90,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	185.152.800,00	167.343.980,00	(17.808.820,00)	90,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.152.800,00	167.343.980,00	(17.808.820,00)	90,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	185.725.600,00	92.314.680,00	(93.410.920,00)	49,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	145.755.600,00	76.689.680,00	(69.065.920,00)	52,61	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	145.755.600,00	76.689.680,00	(69.065.920,00)	52,61	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.755.600,00	76.689.680,00	(69.065.920,00)	52,61	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	39.970.000,00	15.625.000,00	(24.345.000,00)	39,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	39.970.000,00	15.625.000,00	(24.345.000,00)	39,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.970.000,00	15.625.000,00	(24.345.000,00)	39,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	283.559.890,00	191.298.460,00	(92.261.430,00)	67,46	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	274.369.700,00	186.420.160,00	(87.949.540,00)	67,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005		PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	25.649.850,00	24.182.400,00	(1.467.450,00)	94,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.649.850,00	24.182.400,00	(1.467.450,00)	94,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.649.850,00	24.182.400,00	(1.467.450,00)	94,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007		KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	248.719.850,00	162.237.760,00	(86.482.090,00)	65,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	248.719.850,00	162.237.760,00	(86.482.090,00)	65,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.719.850,00	162.237.760,00	(86.482.090,00)	65,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.190.190,00	4.878.300,00	(4.311.890,00)	53,08	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.190.190,00	4.878.300,00	(4.311.890,00)	53,08	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.190.190,00	4.878.300,00	(4.311.890,00)	53,08	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.190.190,00	4.878.300,00	(4.311.890,00)	53,08	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	61.835.950,00	23.316.700,00	(38.519.250,00)	37,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	36.634.650,00	16.466.500,00	(20.168.150,00)	44,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	14.228.650,00	6.997.000,00	(7.231.650,00)	49,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	14.228.650,00	6.997.000,00	(7.231.650,00)	49,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.228.650,00	6.997.000,00	(7.231.650,00)	49,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	22.406.000,00	9.469.500,00	(12.936.500,00)	42,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	22.406.000,00	9.469.500,00	(12.936.500,00)	42,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.406.000,00	9.469.500,00	(12.936.500,00)	42,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	13.851.300,00	4.140.675,00	(9.710.625,00)	29,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA	13.851.300,00	4.140.675,00	(9.710.625,00)	29,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	13.851.300,00	4.140.675,00	(9.710.625,00)	29,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.851.300,00	4.140.675,00	(9.710.625,00)	29,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	11.350.000,00	2.709.525,00	(8.640.475,00)	23,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	11.350.000,00	2.709.525,00	(8.640.475,00)	23,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	11.350.000,00	2.709.525,00	(8.640.475,00)	23,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.350.000,00	2.709.525,00	(8.640.475,00)	23,87	
				JUMLAH BELANJA	5.483.067.077,00	4.955.773.206,00	(527.293.871,00)	90,38	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.483.067.077,00)	(4.955.773.206,00)	527.293.871,00	90,38	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.483.067.077,00)	(4.955.773.206,00)	527.293.871,00	90,38	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	302.698.960,00	251.761.863,00	(50.937.097,00)	83,17	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	302.698.960,00	251.761.863,00	(50.937.097,00)	83,17	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	200.000.000,00	198.975.000,00	(1.025.000,00)	99,48	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03.0002		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	200.000.000,00	198.975.000,00	(1.025.000,00)	99,48	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	198.975.000,00	(1.025.000,00)	99,48	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	198.975.000,00	(1.025.000,00)	99,48	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	102.698.960,00	52.786.863,00	(49.912.097,00)	51,39	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001		PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI	102.698.960,00	52.786.863,00	(49.912.097,00)	51,39	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	102.698.960,00	52.786.863,00	(49.912.097,00)	51,39	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.698.960,00	52.786.863,00	(49.912.097,00)	51,39	
				JUMLAH BELANJA	302.698.960,00	251.761.863,00	(50.937.097,00)	83,17	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(302.698.960,00)	(251.761.863,00)	50.937.097,00	83,17	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(302.698.960,00)	(251.761.863,00)	50.937.097,00	83,17	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	506.653.331.375,00	496.096.954.745,76	(10.556.376.629,24)	97,91	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.394.476.398,00	31.522.914.095,76	(871.562.302,24)	97,30	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.01	Pajak Daerah	20.372.697.142,00	17.367.910.078,00	(3.004.787.064,00)	85,25	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	25.000.000,00	15.285.000,00	(9.715.000,00)	61,14	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.991.779.256,00	7.991.779.256,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.005.000.000,00	6.147.939.761,76	2.142.939.761,76	153,50	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	470.208.854.977,00	460.518.396.206,00	(9.690.458.771,00)	97,93	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	438.168.129.880,00	435.977.261.779,00	(2.190.868.101,00)	99,49	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.040.725.097,00	24.541.134.427,00	(7.499.590.670,00)	76,59	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.050.000.000,00	4.055.644.444,00	5.644.444,00	100,13	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.3.01	Pendapatan Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.3.02	Dana Darurat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.644.444,00	5.644.444,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	506.653.331.375,00	496.096.954.745,76	(10.556.376.629,24)	97,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	17.276.698.845,06	9.874.418.250,00	(7.402.280.595,06)	57,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.573.943.095,06	8.053.658.604,00	(520.284.491,06)	93,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.163.469.419,06	6.796.506.718,00	(366.962.701,06)	94,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.163.469.419,06	6.796.506.718,00	(366.962.701,06)	94,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.163.469.419,06	6.796.506.718,00	(366.962.701,06)	94,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.148.419.419,06	6.784.466.718,00	(363.952.701,06)	94,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.050.000,00	12.040.000,00	(3.010.000,00)	80,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	405.109.196,00	383.828.971,00	(21.280.225,00)	94,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.900.400,00	6.244.000,00	(3.656.400,00)	63,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.900.400,00	6.244.000,00	(3.656.400,00)	63,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.400,00	6.244.000,00	(3.656.400,00)	63,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	94.051.596,00	84.758.400,00	(9.293.196,00)	90,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	94.051.596,00	84.758.400,00	(9.293.196,00)	90,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.051.596,00	84.758.400,00	(9.293.196,00)	90,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	18.579.200,00	14.859.000,00	(3.720.200,00)	79,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.579.200,00	14.859.000,00	(3.720.200,00)	79,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.579.200,00	14.859.000,00	(3.720.200,00)	79,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	282.578.000,00	277.967.571,00	(4.610.429,00)	98,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	282.578.000,00	277.967.571,00	(4.610.429,00)	98,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.578.000,00	277.967.571,00	(4.610.429,00)	98,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	133.980.900,00	100.486.000,00	(33.494.900,00)	75,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	67.500.000,00	34.900.000,00	(32.600.000,00)	51,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	67.500.000,00	34.900.000,00	(32.600.000,00)	51,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	34.900.000,00	(32.600.000,00)	51,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	66.480.900,00	65.586.000,00	(894.900,00)	98,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	63.570.900,00	62.676.000,00	(894.900,00)	98,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.570.900,00	62.676.000,00	(894.900,00)	98,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	637.034.400,00	607.367.803,00	(29.666.597,00)	95,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.651.600,00	2.080.000,00	(571.600,00)	78,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.651.600,00	2.080.000,00	(571.600,00)	78,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.651.600,00	2.080.000,00	(571.600,00)	78,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	134.002.000,00	106.734.837,00	(27.267.163,00)	79,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	134.002.000,00	106.734.837,00	(27.267.163,00)	79,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.002.000,00	106.734.837,00	(27.267.163,00)	79,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	500.380.800,00	498.552.966,00	(1.827.834,00)	99,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	500.380.800,00	498.552.966,00	(1.827.834,00)	99,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.380.800,00	498.552.966,00	(1.827.834,00)	99,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	234.349.180,00	165.469.112,00	(68.880.068,00)	70,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	177.528.980,00	132.464.987,00	(45.063.993,00)	74,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	177.528.980,00	132.464.987,00	(45.063.993,00)	74,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.528.980,00	132.464.987,00	(45.063.993,00)	74,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	30.375.000,00	13.950.000,00	(16.425.000,00)	45,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	30.375.000,00	13.950.000,00	(16.425.000,00)	45,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.375.000,00	13.950.000,00	(16.425.000,00)	45,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	26.445.200,00	19.054.125,00	(7.391.075,00)	72,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	26.445.200,00	19.054.125,00	(7.391.075,00)	72,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.445.200,00	19.054.125,00	(7.391.075,00)	72,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7.594.484.750,00	1.340.785.484,00	(6.253.699.266,00)	17,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	709.382.000,00	689.303.750,00	(20.078.250,00)	97,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	105.493.250,00	105.425.900,00	(67.350,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	105.493.250,00	105.425.900,00	(67.350,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.493.250,00	105.425.900,00	(67.350,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	110.902.450,00	110.822.550,00	(79.900,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	110.902.450,00	110.822.550,00	(79.900,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.902.450,00	110.822.550,00	(79.900,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	375.254.150,00	361.656.700,00	(13.597.450,00)	96,37	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	375.254.150,00	361.656.700,00	(13.597.450,00)	96,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.254.150,00	361.656.700,00	(13.597.450,00)	96,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	117.732.150,00	111.398.600,00	(6.333.550,00)	94,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	117.732.150,00	111.398.600,00	(6.333.550,00)	94,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.732.150,00	111.398.600,00	(6.333.550,00)	94,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	11.872.000,00	3.454.500,00	(8.417.500,00)	29,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009		REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	11.872.000,00	3.454.500,00	(8.417.500,00)	29,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	11.872.000,00	3.454.500,00	(8.417.500,00)	29,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.872.000,00	3.454.500,00	(8.417.500,00)	29,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	33.314.750,00	16.763.450,00	(16.551.300,00)	50,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001		KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH	3.195.850,00	2.878.000,00	(317.850,00)	90,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.195.850,00	2.878.000,00	(317.850,00)	90,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.195.850,00	2.878.000,00	(317.850,00)	90,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004		KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	24.155.900,00	9.227.350,00	(14.928.550,00)	38,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.155.900,00	9.227.350,00	(14.928.550,00)	38,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.155.900,00	9.227.350,00	(14.928.550,00)	38,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	5.963.000,00	4.658.100,00	(1.304.900,00)	78,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.963.000,00	4.658.100,00	(1.304.900,00)	78,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.963.000,00	4.658.100,00	(1.304.900,00)	78,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04		PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.839.916.000,00	631.263.784,00	(6.208.652.216,00)	9,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008		ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009		PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	6.239.916.000,00	631.263.784,00	(5.608.652.216,00)	10,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.239.916.000,00	631.263.784,00	(5.608.652.216,00)	10,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.239.916.000,00	631.263.784,00	(5.608.652.216,00)	10,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	471.984.100,00	158.541.732,00	(313.442.368,00)	33,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01		PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	471.984.100,00	158.541.732,00	(313.442.368,00)	33,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001		PENYUSUNAN STANDAR HARGA	6.531.800,00	3.626.750,00	(2.905.050,00)	55,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.531.800,00	3.626.750,00	(2.905.050,00)	55,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.531.800,00	3.626.750,00	(2.905.050,00)	55,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	6.578.000,00	5.923.850,00	(654.150,00)	90,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.578.000,00	5.923.850,00	(654.150,00)	90,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.578.000,00	5.923.850,00	(654.150,00)	90,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	71.504.200,00	7.166.250,00	(64.337.950,00)	10,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	41.504.200,00	7.166.250,00	(34.337.950,00)	17,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.504.200,00	7.166.250,00	(34.337.950,00)	17,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	207.300.000,00	14.152.500,00	(193.147.500,00)	6,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	193.800.000,00	8.452.500,00	(185.347.500,00)	4,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.800.000,00	8.452.500,00	(185.347.500,00)	4,36	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	13.500.000,00	5.700.000,00	(7.800.000,00)	42,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.500.000,00	5.700.000,00	(7.800.000,00)	42,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010		OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	173.574.200,00	122.763.632,00	(50.810.568,00)	70,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	173.574.200,00	122.763.632,00	(50.810.568,00)	70,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.574.200,00	122.763.632,00	(50.810.568,00)	70,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011		REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	6.495.900,00	4.908.750,00	(1.587.150,00)	75,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	6.495.900,00	4.908.750,00	(1.587.150,00)	75,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.495.900,00	4.908.750,00	(1.587.150,00)	75,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	636.286.900,00	321.432.430,00	(314.854.470,00)	50,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	636.286.900,00	321.432.430,00	(314.854.470,00)	50,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002		ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	176.390.000,00	89.769.600,00	(86.620.400,00)	50,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	176.390.000,00	89.769.600,00	(86.620.400,00)	50,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.390.000,00	89.769.600,00	(86.620.400,00)	50,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005		PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	266.495.000,00	101.533.200,00	(164.961.800,00)	38,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	266.495.000,00	101.533.200,00	(164.961.800,00)	38,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.495.000,00	101.533.200,00	(164.961.800,00)	38,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007		PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	70.931.900,00	57.562.400,00	(13.369.500,00)	81,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	70.931.900,00	57.562.400,00	(13.369.500,00)	81,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.931.900,00	57.562.400,00	(13.369.500,00)	81,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013		PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	122.470.000,00	72.567.230,00	(49.902.770,00)	59,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	122.470.000,00	72.567.230,00	(49.902.770,00)	59,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.470.000,00	72.567.230,00	(49.902.770,00)	59,25	
				JUMLAH BELANJA	17.276.698.845,06	9.874.418.250,00	(7.402.280.595,06)	57,15	
				SURPLUS / (DEFISIT)	489.376.632.529,94	486.222.536.495,76	(3.154.096.034,18)	99,35	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	0,00	100,00	
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	0,00	100,00	
				PEMBIAYAAN NETTO	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	0,00	100,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	495.828.038.199,88	492.673.942.165,70	(3.154.096.034,18)	99,36	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN
Organisasi : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.701.182.993,00	7.612.346.466,00	(1.088.836.527,00)	87,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.065.450.393,00	7.068.220.384,00	(997.230.009,00)	87,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.236.820.718,00	6.353.151.139,00	(883.669.579,00)	87,78	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.236.820.718,00	6.353.151.139,00	(883.669.579,00)	87,78	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.236.820.718,00	6.353.151.139,00	(883.669.579,00)	87,78	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.223.870.718,00	6.340.201.139,00	(883.669.579,00)	87,76	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	204.440.140,00	186.580.091,00	(17.860.049,00)	91,26	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.387.700,00	4.338.000,00	(49.700,00)	98,86	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.387.700,00	4.338.000,00	(49.700,00)	98,86	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.387.700,00	4.338.000,00	(49.700,00)	98,86	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	38.833.640,00	36.536.900,00	(2.296.740,00)	94,08	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	38.833.640,00	36.536.900,00	(2.296.740,00)	94,08	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.833.640,00	36.536.900,00	(2.296.740,00)	94,08	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	21.747.800,00	9.191.800,00	(12.556.000,00)	42,26	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.747.800,00	9.191.800,00	(12.556.000,00)	42,26	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.747.800,00	9.191.800,00	(12.556.000,00)	42,26	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	139.471.000,00	136.513.391,00	(2.957.609,00)	97,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	139.471.000,00	136.513.391,00	(2.957.609,00)	97,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.471.000,00	136.513.391,00	(2.957.609,00)	97,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	112.944.200,00	108.129.995,00	(4.814.205,00)	95,73	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	27.000.000,00	24.499.995,00	(2.500.005,00)	90,74	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	27.000.000,00	24.499.995,00	(2.500.005,00)	90,74	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.000.000,00	24.499.995,00	(2.500.005,00)	90,74	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	85.944.200,00	83.630.000,00	(2.314.200,00)	97,30	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	85.264.200,00	82.950.000,00	(2.314.200,00)	97,28	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.264.200,00	82.950.000,00	(2.314.200,00)	97,28	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	253.576.335,00	222.389.872,00	(31.186.463,00)	87,70	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.615.800,00	2.580.000,00	(35.800,00)	98,63	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.615.800,00	2.580.000,00	(35.800,00)	98,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.615.800,00	2.580.000,00	(35.800,00)	98,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	89.998.935,00	85.817.812,00	(4.181.123,00)	95,35	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	89.998.935,00	85.817.812,00	(4.181.123,00)	95,35	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.998.935,00	85.817.812,00	(4.181.123,00)	95,35	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	160.961.600,00	133.992.060,00	(26.969.540,00)	83,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	160.961.600,00	133.992.060,00	(26.969.540,00)	83,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.961.600,00	133.992.060,00	(26.969.540,00)	83,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	257.669.000,00	197.969.287,00	(59.699.713,00)	76,83	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	114.485.000,00	81.380.400,00	(33.104.600,00)	71,08	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	114.485.000,00	81.380.400,00	(33.104.600,00)	71,08	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.485.000,00	81.380.400,00	(33.104.600,00)	71,08	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	39.990.000,00	14.485.000,00	(25.505.000,00)	36,22	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	39.990.000,00	14.485.000,00	(25.505.000,00)	36,22	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.990.000,00	14.485.000,00	(25.505.000,00)	36,22	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	103.194.000,00	102.103.887,00	(1.090.113,00)	98,94	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	103.194.000,00	102.103.887,00	(1.090.113,00)	98,94	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.194.000,00	102.103.887,00	(1.090.113,00)	98,94	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	635.732.600,00	544.126.082,00	(91.606.518,00)	85,59	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01		PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	114.038.100,00	96.819.736,00	(17.218.364,00)	84,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003		KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	104.747.000,00	90.089.386,00	(14.657.614,00)	86,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	104.747.000,00	90.089.386,00	(14.657.614,00)	86,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.747.000,00	90.089.386,00	(14.657.614,00)	86,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	9.291.100,00	6.730.350,00	(2.560.750,00)	72,43	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	9.291.100,00	6.730.350,00	(2.560.750,00)	72,43	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.291.100,00	6.730.350,00	(2.560.750,00)	72,43	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02		MUTASI DAN PROMOSI ASN	490.163.000,00	425.451.951,00	(64.711.049,00)	86,79	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001		PENGELOLAAN MUTASI ASN	438.381.000,00	386.765.397,00	(51.615.603,00)	88,22	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	438.381.000,00	386.765.397,00	(51.615.603,00)	88,22	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.381.000,00	386.765.397,00	(51.615.603,00)	88,22	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002		PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	51.782.000,00	38.686.554,00	(13.095.446,00)	74,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.782.000,00	38.686.554,00	(13.095.446,00)	74,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.782.000,00	38.686.554,00	(13.095.446,00)	74,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	31.531.500,00	21.854.395,00	(9.677.105,00)	69,30	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002		PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	4.200.000,00	1.522.710,00	(2.677.290,00)	36,25	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	1.522.710,00	(2.677.290,00)	36,25	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	1.522.710,00	(2.677.290,00)	36,25	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004		PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI	6.220.000,00	0,00	(6.220.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.220.000,00	0,00	(6.220.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.220.000,00	0,00	(6.220.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0007		PEMBINAAN DISIPLIN ASN	21.111.500,00	20.331.685,00	(779.815,00)	96,30	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	21.111.500,00	20.331.685,00	(779.815,00)	96,30	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.111.500,00	20.331.685,00	(779.815,00)	96,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	JUMLAH BELANJA	8.701.182.993,00	7.612.346.466,00	(1.088.836.527,00)	87,48	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.701.182.993,00)	(7.612.346.466,00)	1.088.836.527,00	87,48	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.701.182.993,00)	(7.612.346.466,00)	1.088.836.527,00	87,48	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Organisasi : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	800.414.000,00	603.860.576,00	(196.553.424,00)	75,44	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	800.414.000,00	603.860.576,00	(196.553.424,00)	75,44	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01		PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	442.588.000,00	333.223.639,00	(109.364.361,00)	75,28	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0003		PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	442.588.000,00	333.223.639,00	(109.364.361,00)	75,28	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	442.588.000,00	333.223.639,00	(109.364.361,00)	75,28	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.588.000,00	333.223.639,00	(109.364.361,00)	75,28	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02		SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	357.826.000,00	270.636.937,00	(87.189.063,00)	75,63	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007		PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	357.826.000,00	270.636.937,00	(87.189.063,00)	75,63	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	357.826.000,00	270.636.937,00	(87.189.063,00)	75,63	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.826.000,00	270.636.937,00	(87.189.063,00)	75,63	
				JUMLAH BELANJA	800.414.000,00	603.860.576,00	(196.553.424,00)	75,44	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(800.414.000,00)	(603.860.576,00)	196.553.424,00	75,44	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(800.414.000,00)	(603.860.576,00)	196.553.424,00	75,44	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : INSPEKTORAT DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.854.888.067,00	5.533.353.067,00	(321.535.000,00)	94,50	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.339.075.667,00	5.025.198.217,00	(313.877.450,00)	94,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.826.175.457,00	4.580.077.350,00	(246.098.107,00)	94,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.826.175.457,00	4.580.077.350,00	(246.098.107,00)	94,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.826.175.457,00	4.580.077.350,00	(246.098.107,00)	94,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.826.175.457,00	4.580.077.350,00	(246.098.107,00)	94,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	27.250.000,00	10.080.000,00	(17.170.000,00)	36,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	27.250.000,00	10.080.000,00	(17.170.000,00)	36,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	27.250.000,00	10.080.000,00	(17.170.000,00)	36,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.250.000,00	10.080.000,00	(17.170.000,00)	36,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	127.727.010,00	107.768.533,00	(19.958.477,00)	84,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	597.000,00	597.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	597.000,00	597.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	597.000,00	597.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	979.400,00	880.000,00	(99.400,00)	89,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	979.400,00	880.000,00	(99.400,00)	89,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	979.400,00	880.000,00	(99.400,00)	89,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	24.339.310,00	22.815.200,00	(1.524.110,00)	93,73	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.339.310,00	22.815.200,00	(1.524.110,00)	93,73	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.339.310,00	22.815.200,00	(1.524.110,00)	93,73	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.908.300,00	5.454.900,00	(1.453.400,00)	78,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.908.300,00	5.454.900,00	(1.453.400,00)	78,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.908.300,00	5.454.900,00	(1.453.400,00)	78,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	94.903.000,00	78.021.433,00	(16.881.567,00)	82,21	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	94.903.000,00	78.021.433,00	(16.881.567,00)	82,21	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.903.000,00	78.021.433,00	(16.881.567,00)	82,21	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	92.747.000,00	92.745.001,00	(1.999,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	92.747.000,00	92.745.001,00	(1.999,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	92.747.000,00	92.745.001,00	(1.999,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.747.000,00	92.745.001,00	(1.999,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	193.235.200,00	179.774.333,00	(13.460.867,00)	93,03	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	520.000,00	520.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	520.000,00	520.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.000,00	520.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.340.000,00	11.594.333,00	(745.667,00)	93,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.340.000,00	11.594.333,00	(745.667,00)	93,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.340.000,00	11.594.333,00	(745.667,00)	93,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	180.375.200,00	167.660.000,00	(12.715.200,00)	92,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	180.375.200,00	167.660.000,00	(12.715.200,00)	92,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.375.200,00	167.660.000,00	(12.715.200,00)	92,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	71.941.000,00	54.753.000,00	(17.188.000,00)	76,10	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	52.906.000,00	37.567.800,00	(15.338.200,00)	71,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	52.906.000,00	37.567.800,00	(15.338.200,00)	71,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.906.000,00	37.567.800,00	(15.338.200,00)	71,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	15.300.000,00	13.457.700,00	(1.842.300,00)	87,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.300.000,00	13.457.700,00	(1.842.300,00)	87,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	13.457.700,00	(1.842.300,00)	87,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.735.000,00	3.727.500,00	(7.500,00)	99,79	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.735.000,00	3.727.500,00	(7.500,00)	99,79	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.735.000,00	3.727.500,00	(7.500,00)	99,79	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	463.218.000,00	459.229.000,00	(3.989.000,00)	99,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	439.488.000,00	435.499.000,00	(3.989.000,00)	99,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001		PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	29.925.000,00	28.140.000,00	(1.785.000,00)	94,03	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.925.000,00	28.140.000,00	(1.785.000,00)	94,03	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.925.000,00	28.140.000,00	(1.785.000,00)	94,03	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002		PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	345.870.000,00	345.035.000,00	(835.000,00)	99,75	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	345.870.000,00	345.035.000,00	(835.000,00)	99,75	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345.870.000,00	345.035.000,00	(835.000,00)	99,75	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003		REVIU LAPORAN KINERJA	18.225.000,00	18.225.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	18.225.000,00	18.225.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.225.000,00	18.225.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004		REVIU LAPORAN KEUANGAN	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007		MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	30.508.000,00	29.139.000,00	(1.369.000,00)	95,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	30.508.000,00	29.139.000,00	(1.369.000,00)	95,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.508.000,00	29.139.000,00	(1.369.000,00)	95,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	23.730.000,00	23.730.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002		PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	23.730.000,00	23.730.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.730.000,00	23.730.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.730.000,00	23.730.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	52.594.400,00	48.925.850,00	(3.668.550,00)	93,02	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	52.594.400,00	48.925.850,00	(3.668.550,00)	93,02	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	30.970.000,00	30.970.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.970.000,00	30.970.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.970.000,00	30.970.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002		PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	5.220.000,00	4.350.000,00	(870.000,00)	83,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.220.000,00	4.350.000,00	(870.000,00)	83,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.220.000,00	4.350.000,00	(870.000,00)	83,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003		KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	16.404.400,00	13.605.850,00	(2.798.550,00)	82,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.404.400,00	13.605.850,00	(2.798.550,00)	82,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.404.400,00	13.605.850,00	(2.798.550,00)	82,94	
				JUMLAH BELANJA	5.854.888.067,00	5.533.353.067,00	(321.535.000,00)	94,50	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.854.888.067,00)	(5.533.353.067,00)	321.535.000,00	94,50	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.854.888.067,00)	(5.533.353.067,00)	321.535.000,00	94,50	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	16.711.452.140,00	15.657.645.506,00	(1.053.806.634,00)	93,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.631.087.690,00	11.208.159.851,00	(422.927.839,00)	96,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.666.621.995,00	8.542.463.146,00	(124.158.849,00)	98,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.666.621.995,00	8.542.463.146,00	(124.158.849,00)	98,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.666.621.995,00	8.542.463.146,00	(124.158.849,00)	98,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.651.571.995,00	8.527.413.146,00	(124.158.849,00)	98,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	171.338.115,00	148.160.650,00	(23.177.465,00)	86,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.175.400,00	9.882.000,00	(293.400,00)	97,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.175.400,00	9.882.000,00	(293.400,00)	97,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.175.400,00	9.882.000,00	(293.400,00)	97,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	57.150.065,00	55.767.800,00	(1.382.265,00)	97,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	57.150.065,00	55.767.800,00	(1.382.265,00)	97,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.150.065,00	55.767.800,00	(1.382.265,00)	97,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.703.650,00	9.534.800,00	(168.850,00)	98,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.703.650,00	9.534.800,00	(168.850,00)	98,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.703.650,00	9.534.800,00	(168.850,00)	98,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	94.309.000,00	72.976.050,00	(21.332.950,00)	77,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	94.309.000,00	72.976.050,00	(21.332.950,00)	77,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.309.000,00	72.976.050,00	(21.332.950,00)	77,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	11.437.700,00	9.925.000,00	(1.512.700,00)	86,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	11.437.700,00	9.925.000,00	(1.512.700,00)	86,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	11.437.700,00	9.925.000,00	(1.512.700,00)	86,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.437.700,00	9.925.000,00	(1.512.700,00)	86,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.349.980.880,00	2.119.844.405,00	(230.136.475,00)	90,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	74.896.800,00	42.933.127,00	(31.963.673,00)	57,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	74.896.800,00	42.933.127,00	(31.963.673,00)	57,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.896.800,00	42.933.127,00	(31.963.673,00)	57,32	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.274.584.080,00	2.076.411.278,00	(198.172.802,00)	91,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.274.584.080,00	2.076.411.278,00	(198.172.802,00)	91,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.274.584.080,00	2.076.411.278,00	(198.172.802,00)	91,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	431.709.000,00	387.766.650,00	(43.942.350,00)	89,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	192.865.000,00	160.117.650,00	(32.747.350,00)	83,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	192.865.000,00	160.117.650,00	(32.747.350,00)	83,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.865.000,00	160.117.650,00	(32.747.350,00)	83,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	27.380.000,00	16.450.000,00	(10.930.000,00)	60,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	27.380.000,00	16.450.000,00	(10.930.000,00)	60,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.380.000,00	16.450.000,00	(10.930.000,00)	60,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	211.464.000,00	211.199.000,00	(265.000,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	211.464.000,00	211.199.000,00	(265.000,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.464.000,00	211.199.000,00	(265.000,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.207.992.400,00	967.320.925,00	(240.671.475,00)	80,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.03		KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM	401.332.400,00	201.500.100,00	(199.832.300,00)	50,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.03.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM	401.332.400,00	201.500.100,00	(199.832.300,00)	50,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	401.332.400,00	201.500.100,00	(199.832.300,00)	50,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.332.400,00	201.500.100,00	(199.832.300,00)	50,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	806.660.000,00	765.820.825,00	(40.839.175,00)	94,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	806.660.000,00	765.820.825,00	(40.839.175,00)	94,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	806.660.000,00	765.820.825,00	(40.839.175,00)	94,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	806.660.000,00	765.820.825,00	(40.839.175,00)	94,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.768.843.050,00	3.471.744.480,00	(297.098.570,00)	92,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	1.922.023.050,00	1.638.634.480,00	(283.388.570,00)	85,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	133.430.450,00	129.447.575,00	(3.982.875,00)	97,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	133.430.450,00	129.447.575,00	(3.982.875,00)	97,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.430.450,00	129.447.575,00	(3.982.875,00)	97,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	284.570.000,00	137.761.805,00	(146.808.195,00)	48,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.970.000,00	15.939.000,00	(16.031.000,00)	49,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.970.000,00	15.939.000,00	(16.031.000,00)	49,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	252.600.000,00	121.822.805,00	(130.777.195,00)	48,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.600.000,00	1.400.000,00	(200.000,00)	87,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	251.000.000,00	120.422.805,00	(130.577.195,00)	47,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	1.504.022.600,00	1.371.425.100,00	(132.597.500,00)	91,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.504.022.600,00	1.371.425.100,00	(132.597.500,00)	91,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.504.022.600,00	1.371.425.100,00	(132.597.500,00)	91,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	1.846.820.000,00	1.833.110.000,00	(13.710.000,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03.0001		PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	1.846.820.000,00	1.833.110.000,00	(13.710.000,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.846.820.000,00	1.833.110.000,00	(13.710.000,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.846.820.000,00	1.833.110.000,00	(13.710.000,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	103.529.000,00	10.420.250,00	(93.108.750,00)	10,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	103.529.000,00	10.420.250,00	(93.108.750,00)	10,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	103.529.000,00	10.420.250,00	(93.108.750,00)	10,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	103.529.000,00	10.420.250,00	(93.108.750,00)	10,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.529.000,00	10.420.250,00	(93.108.750,00)	10,06	
				JUMLAH BELANJA	16.711.452.140,00	15.657.645.506,00	(1.053.806.634,00)	93,69	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(16.711.452.140,00)	(15.657.645.506,00)	1.053.806.634,00	93,69	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.711.452.140,00)	(15.657.645.506,00)	1.053.806.634,00	93,69	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

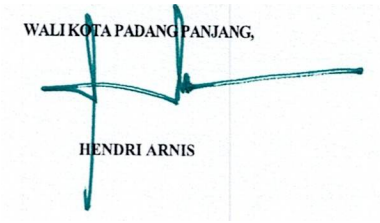
Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	17.201.483.588,00	15.623.459.865,00	(1.578.023.723,00)	90,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.183.721.329,00	10.402.342.689,00	(781.378.640,00)	93,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.954.113.278,00	7.814.931.221,00	(139.182.057,00)	98,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.954.113.278,00	7.814.931.221,00	(139.182.057,00)	98,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.954.113.278,00	7.814.931.221,00	(139.182.057,00)	98,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.939.063.278,00	7.799.881.221,00	(139.182.057,00)	98,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	341.499.767,00	195.069.357,00	(146.430.410,00)	57,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	17.914.250,00	14.231.900,00	(3.682.350,00)	79,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.914.250,00	14.231.900,00	(3.682.350,00)	79,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.914.250,00	14.231.900,00	(3.682.350,00)	79,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	83.515.017,00	65.326.505,00	(18.188.512,00)	78,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	83.515.017,00	65.326.505,00	(18.188.512,00)	78,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.515.017,00	65.326.505,00	(18.188.512,00)	78,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	27.402.500,00	11.614.550,00	(15.787.950,00)	42,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	27.402.500,00	11.614.550,00	(15.787.950,00)	42,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.402.500,00	11.614.550,00	(15.787.950,00)	42,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	212.668.000,00	103.896.402,00	(108.771.598,00)	48,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	212.668.000,00	103.896.402,00	(108.771.598,00)	48,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.668.000,00	103.896.402,00	(108.771.598,00)	48,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.368.071.284,00	1.978.981.271,00	(389.090.013,00)	83,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	920.000,00	920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	920.000,00	920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	920.000,00	920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	102.156.084,00	53.028.772,00	(49.127.312,00)	51,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	102.156.084,00	53.028.772,00	(49.127.312,00)	51,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.156.084,00	53.028.772,00	(49.127.312,00)	51,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.264.995.200,00	1.925.032.499,00	(339.962.701,00)	84,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.264.995.200,00	1.925.032.499,00	(339.962.701,00)	84,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.264.995.200,00	1.925.032.499,00	(339.962.701,00)	84,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	495.037.000,00	413.360.840,00	(81.676.160,00)	83,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	159.895.000,00	115.221.800,00	(44.673.200,00)	72,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	159.895.000,00	115.221.800,00	(44.673.200,00)	72,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.895.000,00	115.221.800,00	(44.673.200,00)	72,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	47.710.000,00	21.845.000,00	(25.865.000,00)	45,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	47.710.000,00	21.845.000,00	(25.865.000,00)	45,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.710.000,00	21.845.000,00	(25.865.000,00)	45,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	287.432.000,00	276.294.040,00	(11.137.960,00)	96,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	287.432.000,00	276.294.040,00	(11.137.960,00)	96,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.432.000,00	276.294.040,00	(11.137.960,00)	96,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.432.692.023,00	1.240.290.825,00	(192.401.198,00)	86,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.03		KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM	285.491.900,00	194.707.550,00	(90.784.350,00)	68,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.03.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM	285.491.900,00	194.707.550,00	(90.784.350,00)	68,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	285.491.900,00	194.707.550,00	(90.784.350,00)	68,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.491.900,00	194.707.550,00	(90.784.350,00)	68,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	1.147.200.123,00	1.045.583.275,00	(101.616.848,00)	91,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	1.147.200.123,00	1.045.583.275,00	(101.616.848,00)	91,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.147.200.123,00	1.045.583.275,00	(101.616.848,00)	91,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.147.200.123,00	1.045.583.275,00	(101.616.848,00)	91,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.482.202.936,00	3.975.370.326,00	(506.832.610,00)	88,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	2.175.282.936,00	1.682.230.337,00	(493.052.599,00)	77,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	173.714.850,00	132.199.115,00	(41.515.735,00)	76,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	173.714.850,00	132.199.115,00	(41.515.735,00)	76,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.714.850,00	132.199.115,00	(41.515.735,00)	76,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	293.560.200,00	76.694.700,00	(216.865.500,00)	26,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	98.391.000,00	12.861.000,00	(85.530.000,00)	13,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.391.000,00	12.861.000,00	(85.530.000,00)	13,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	195.169.200,00	63.833.700,00	(131.335.500,00)	32,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.529.200,00	63.833.700,00	(70.695.500,00)	47,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.640.000,00	0,00	(60.640.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	1.708.007.886,00	1.473.336.522,00	(234.671.364,00)	86,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.708.007.886,00	1.473.336.522,00	(234.671.364,00)	86,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.708.007.886,00	1.473.336.522,00	(234.671.364,00)	86,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	2.306.920.000,00	2.293.139.989,00	(13.780.011,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0001		PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	2.306.920.000,00	2.293.139.989,00	(13.780.011,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.306.920.000,00	2.293.139.989,00	(13.780.011,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.306.920.000,00	2.293.139.989,00	(13.780.011,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.643.800,00	1.350.000,00	(11.293.800,00)	10,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.643.800,00	1.350.000,00	(11.293.800,00)	10,67	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	12.643.800,00	1.350.000,00	(11.293.800,00)	10,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.643.800,00	1.350.000,00	(11.293.800,00)	10,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.643.800,00	1.350.000,00	(11.293.800,00)	10,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	90.223.500,00	4.106.025,00	(86.117.475,00)	4,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	90.223.500,00	4.106.025,00	(86.117.475,00)	4,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	90.223.500,00	4.106.025,00	(86.117.475,00)	4,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	90.223.500,00	4.106.025,00	(86.117.475,00)	4,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.223.500,00	4.106.025,00	(86.117.475,00)	4,55	
				JUMLAH BELANJA	17.201.483.588,00	15.623.459.865,00	(1.578.023.723,00)	90,82	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(17.201.483.588,00)	(15.623.459.865,00)	1.578.023.723,00	90,82	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(17.201.483.588,00)	(15.623.459.865,00)	1.578.023.723,00	90,82	

WALI KOTA PADANG PANJANG,



HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

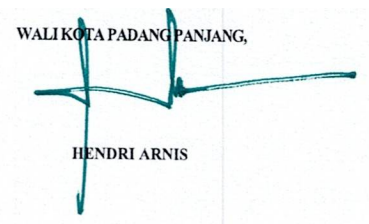
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.773.073.603,00	5.346.553.028,00	(426.520.575,00)	92,61	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.876.335.843,00	4.491.621.106,00	(384.714.737,00)	92,11	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.248.677.921,00	3.958.768.023,00	(289.909.898,00)	93,17	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.248.677.921,00	3.958.768.023,00	(289.909.898,00)	93,17	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.248.677.921,00	3.958.768.023,00	(289.909.898,00)	93,17	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.235.727.921,00	3.945.818.023,00	(289.909.898,00)	93,15	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	100,00	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	155.262.650,00	153.059.631,00	(2.203.019,00)	98,58	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.822.400,00	5.554.000,00	(268.400,00)	95,39	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.822.400,00	5.554.000,00	(268.400,00)	95,39	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.822.400,00	5.554.000,00	(268.400,00)	95,39	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	19.495.050,00	18.504.200,00	(990.850,00)	94,91	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.495.050,00	18.504.200,00	(990.850,00)	94,91	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.495.050,00	18.504.200,00	(990.850,00)	94,91	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.783.200,00	12.155.400,00	(627.800,00)	95,08	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.783.200,00	12.155.400,00	(627.800,00)	95,08	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.783.200,00	12.155.400,00	(627.800,00)	95,08	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	117.162.000,00	116.846.031,00	(315.969,00)	99,73	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	117.162.000,00	116.846.031,00	(315.969,00)	99,73	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.162.000,00	116.846.031,00	(315.969,00)	99,73	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	131.310.072,00	119.260.250,00	(12.049.822,00)	90,82	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.747.200,00	1.740.000,00	(7.200,00)	99,58	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.747.200,00	1.740.000,00	(7.200,00)	99,58	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.747.200,00	1.740.000,00	(7.200,00)	99,58	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	27.194.872,00	20.288.500,00	(6.906.372,00)	74,60	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.194.872,00	20.288.500,00	(6.906.372,00)	74,60	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.194.872,00	20.288.500,00	(6.906.372,00)	74,60	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	102.368.000,00	97.231.750,00	(5.136.250,00)	94,98	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	102.368.000,00	97.231.750,00	(5.136.250,00)	94,98	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.368.000,00	97.231.750,00	(5.136.250,00)	94,98	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	341.085.200,00	260.533.202,00	(80.551.998,00)	76,38	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	300.096.000,00	236.654.202,00	(63.441.798,00)	78,85	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	300.096.000,00	236.654.202,00	(63.441.798,00)	78,85	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.096.000,00	236.654.202,00	(63.441.798,00)	78,85	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	35.590.000,00	18.717.000,00	(16.873.000,00)	52,59	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	35.590.000,00	18.717.000,00	(16.873.000,00)	52,59	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.590.000,00	18.717.000,00	(16.873.000,00)	52,59	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	5.399.200,00	5.162.000,00	(237.200,00)	95,60	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.399.200,00	5.162.000,00	(237.200,00)	95,60	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.399.200,00	5.162.000,00	(237.200,00)	95,60	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	896.737.760,00	854.931.922,00	(41.805.838,00)	95,33	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.01		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	35.669.000,00	27.086.000,00	(8.583.000,00)	75,93	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.01.0007		SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA)	35.669.000,00	27.086.000,00	(8.583.000,00)	75,93	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	35.669.000,00	27.086.000,00	(8.583.000,00)	75,93	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.669.000,00	27.086.000,00	(8.583.000,00)	75,93	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.02		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	769.887.600,00	760.723.050,00	(9.164.550,00)	98,80	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0026		PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	769.887.600,00	760.723.050,00	(9.164.550,00)	98,80	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	769.887.600,00	760.723.050,00	(9.164.550,00)	98,80	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	769.887.600,00	760.723.050,00	(9.164.550,00)	98,80	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.03		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	68.340.000,00	46.074.180,00	(22.265.820,00)	67,41	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0002		RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA	68.340.000,00	46.074.180,00	(22.265.820,00)	67,41	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	68.340.000,00	46.074.180,00	(22.265.820,00)	67,41	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.340.000,00	46.074.180,00	(22.265.820,00)	67,41	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.04		PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	22.841.160,00	21.048.692,00	(1.792.468,00)	92,15	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0010		KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA	22.841.160,00	21.048.692,00	(1.792.468,00)	92,15	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	22.841.160,00	21.048.692,00	(1.792.468,00)	92,15	
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.841.160,00	21.048.692,00	(1.792.468,00)	92,15	
				JUMLAH BELANJA	5.773.073.603,00	5.346.553.028,00	(426.520.575,00)	92,61	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.773.073.603,00)	(5.346.553.028,00)	426.520.575,00	92,61	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.773.073.603,00)	(5.346.553.028,00)	426.520.575,00	92,61	

WALI KOTA PADANG PANJANG,



HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.196.721.466,00	2.879.772.866,37	(316.948.599,63)	90,08	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	711.840.750,00	699.349.850,00	(12.490.900,00)	98,24	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	711.840.750,00	699.349.850,00	(12.490.900,00)	98,24	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	711.840.750,00	699.349.850,00	(12.490.900,00)	98,24	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	711.840.750,00	699.349.850,00	(12.490.900,00)	98,24	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	711.840.750,00	699.349.850,00	(12.490.900,00)	98,24	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.308.064.716,00	2.004.621.602,37	(303.443.113,63)	86,85	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	2.308.064.716,00	2.004.621.602,37	(303.443.113,63)	86,85	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	796.294.916,00	792.815.216,00	(3.479.700,00)	99,56	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	796.294.916,00	792.815.216,00	(3.479.700,00)	99,56	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	720.300,00	(3.479.700,00)	17,15	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	792.094.916,00	792.094.916,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	1.511.769.800,00	1.211.806.386,37	(299.963.413,63)	80,15	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.511.769.800,00	1.211.806.386,37	(299.963.413,63)	80,15	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	799.879.800,00	504.136.050,00	(295.743.750,00)	63,02	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	711.890.000,00	707.670.336,37	(4.219.663,63)	99,40	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	75.000.000,00	74.193.400,00	(806.600,00)	98,92	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.05.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	75.000.000,00	74.193.400,00	(806.600,00)	98,92	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	75.000.000,00	74.193.400,00	(806.600,00)	98,92	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.193.400,00	(806.600,00)	98,92	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.193.400,00	(806.600,00)	98,92	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	101.816.000,00	101.608.014,00	(207.986,00)	99,79	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.06.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	101.816.000,00	101.608.014,00	(207.986,00)	99,79	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	101.816.000,00	101.608.014,00	(207.986,00)	99,79	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	101.816.000,00	101.608.014,00	(207.986,00)	99,79	
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.816.000,00	101.608.014,00	(207.986,00)	99,79	
				JUMLAH BELANJA	3.196.721.466,00	2.879.772.866,37	(316.948.599,63)	90,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.196.721.466,00)	(2.879.772.866,37)	316.948.599,63	90,08	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.196.721.466,00)	(2.879.772.866,37)	316.948.599,63	90,08	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN I.4
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAHAN KOTA PADANG PANJANG

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	294.343.279.666,88	272.035.913.202,02	55.773.486.596,00	49.212.979.888,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	98.772.267.858,00	93.282.277.815,00	13.815.799.337,00	12.565.031.568,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	98.772.267.858,00	93.282.277.815,00	13.815.799.337,00	12.565.031.568,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	74.915.160.039,00	71.991.065.923,00	149.931.800,00	83.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72.442.326.025,00	69.972.573.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72.442.326.025,00	69.972.573.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	484.330.000,00	418.860.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	484.330.000,00	418.860.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.624.238,00	275.079.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.645.900,00	12.059.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.161.138,00	67.120.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.453.200,00	25.644.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.364.000,00	170.254.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.000,00	0,00	149.931.800,00	83.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	680.000,00	0,00	66.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	49.931.800,00	49.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	34.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.028.499.776,00	819.060.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.005.800,00	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.385.976,00	78.676.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	894.108.000,00	737.913.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	628.700.000,00	505.492.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	194.288.000,00	85.689.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	25.000.000,00	10.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.740.000,00	9.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	399.672.000,00	399.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	23.857.107.819,00	21.291.211.892,00	13.665.867.537,00	12.481.189.568,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	9.380.613.364,00	8.322.922.619,00	8.453.184.436,00	7.659.560.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	172.685.000,00	119.931.975,00	3.154.557.100,00	2.729.685.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	290.000.000,00	285.935.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0,00	0,00	82.500.000,00	82.417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	305.000.000,00	304.175.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	131.423.800,00	91.952.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.856.504.000,00	2.400.690.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	532.846.900,00	317.782.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	30.000.000,00	16.011.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	4.478.222.664,00	4.355.146.857,00	1.133.527.336,00	1.114.767.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	20.000.000,00	6.918.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.000.000,00	3.338.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	93.886.000,00	92.907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	136.890.000,00	129.715.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12.000.000,00	0,00	3.792.600.000,00	3.446.754.816,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	87.725.000,00	34.351.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	333.430.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6.740.898.549,00	5.591.385.659,00	3.601.583.101,00	3.418.783.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	118.205.000,00	110.930.130,00	95.938.460,00	71.134.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	157.330.000,00	148.733.880,00	1.673.740.000,00	1.547.307.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	264.000.000,00	227.976.062,00	696.479.100,00	676.016.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.650.000,00	0,00	82.500.000,00	82.417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	300.000.000,00	291.560.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	267.990.000,00	195.991.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	194.712.500,00	128.587.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.369.418.400,00	999.146.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	227.762.800,00	98.896.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.848.574.459,00	2.749.843.336,00	1.022.925.541,00	1.011.937.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	13.965.000,00	3.591.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.000.000,00	10.549.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	115.254.000,00	115.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	452.176.390,00	391.457.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0,00	0,00	30.000.000,00	29.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK	119.860.000,00	118.881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.128.144.426,00	6.822.550.831,00	195.910.000,00	193.031.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	870.099.000,00	831.731.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	4.370.700.000,00	4.191.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	343.776.600,00	311.014.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	49.870.000,00	27.605.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.341.470.000,00	1.315.704.300,00	22.330.000,00	22.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	14.115.000,00	11.073.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15.760.000,00	14.209.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	19.944.496,00	19.944.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.420.000,00	0,00	173.580.000,00	170.701.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	79.989.330,00	79.167.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	607.451.480,00	554.352.783,00	1.415.190.000,00	1.209.814.714,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	94.466.300,00	86.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	34.651.500,00	20.382.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	12.197.800,00	93.146.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	382.698.000,00	295.498.000,00	55.202.000,00	55.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7.677.850,00	4.350.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12.143.850,00	10.870.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	10.749.900,00	0,00	1.346.000.000,00	1.140.624.714,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	52.866.280,00	43.989.355,00	13.988.000,00	13.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	146.858.280.016,88	134.265.847.212,60	18.067.158.020,00	15.506.789.052,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		DINAS KESEHATAN	77.950.561.981,00	73.937.401.047,60	3.813.858.920,00	3.560.130.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.027.775.692,00	60.191.272.393,00	29.515.800,00	26.517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	62.157.613.826,00	59.570.055.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	62.157.613.826,00	59.570.055.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.294.066,00	135.551.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.779.920,00	3.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.219.146,00	24.681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.910.000,00	11.547.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.385.000,00	95.934.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.128.300,00	0,00	29.515.800,00	26.517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.128.300,00	0,00	29.515.800,00	26.517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	451.501.900,00	371.040.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	997.900,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	25.508.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	410.504.000,00	344.542.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.237.600,00	114.624.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.905.600,00	8.652.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.962.000,00	75.666.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.370.000,00	22.217.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	8.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	13.672.677.839,00	12.726.309.712,60	3.784.343.120,00	3.533.613.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.515.757.400,00	1.435.543.128,60	3.776.577.920,00	3.533.613.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	0,00	0,00	936.000.000,00	740.595.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	1.396.317.920,00	1.374.905.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	58.650.000,00	1.750.000,00	264.260.000,00	262.542.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	500.000,00	0,00	1.180.000.000,00	1.155.570.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	103.982.400,00	103.929.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.352.625.000,00	1.329.863.540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.136.720.439,00	11.276.066.584,00	7.765.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19.998.000,00	19.980.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	20.000.100,00	19.971.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	20.000.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	19.999.700,00	19.991.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.000.000,00	34.615.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	89.490.000,00	67.781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	60.320.100,00	40.405.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	34.998.800,00	34.796.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	218.177.100,00	210.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	14.994.600,00	9.152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	67.106.800,00	63.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	41.103.800,00	8.388.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	198.480.000,00	181.359.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	67.898.400,00	64.333.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	112.800.000,00	33.954.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	117.156.000,00	104.800.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.640.000,00	14.573.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	277.428.500,00	226.418.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	9.045.649.492,00	8.665.279.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	5.380.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	54.200.000,00	42.881.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	132.272.000,00	82.208.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	10.000.100,00	9.925.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	910.926.047,00	804.932.691,00	7.765.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	267.940.900,00	264.704.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	277.760.000,00	232.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	20.200.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	20.200.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	384.083.150,00	342.140.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	10.000.300,00	6.094.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10.000.300,00	6.094.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	374.082.850,00	336.046.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	374.082.850,00	336.046.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	497.679.700,00	376.758.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	66.840.850,00	60.103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	66.840.850,00	60.103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	132.963.500,00	122.922.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	132.963.500,00	122.922.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	297.875.350,00	193.732.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	297.875.350,00	193.732.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	368.345.600,00	300.919.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	149.653.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	200.000.000,00	149.653.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	23.747.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	25.000.000,00	23.747.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	143.345.600,00	127.517.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	143.345.600,00	127.517.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		PUSKESMAS KOTO KATIK	1.734.444.440,00	1.467.698.354,00	93.237.600,00	93.062.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	836.917.240,00	773.884.895,00	93.237.600,00	93.062.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.033.395,00	117.412.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.238.195,00	27.595.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.795.200,00	89.816.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.121.445,00	39.471.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.121.445,00	39.471.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	656.762.400,00	617.000.695,00	93.237.600,00	93.062.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	656.762.400,00	617.000.695,00	93.237.600,00	93.062.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	855.351.200,00	661.837.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	855.351.200,00	661.837.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.184.000,00	28.795.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51.400.000,00	32.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	67.193.100,00	67.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.600.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.800.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	268.247.100,00	221.199.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.550.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.900.000,00	3.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	9.000.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	129.465.000,00	105.619.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	175.776.000,00	135.404.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.636.000,00	12.601.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	48.800.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	42.176.000,00	31.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	25.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.176.000,00	16.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17.176.000,00	16.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS	2.662.473.436,00	2.453.748.390,00	150.920.000,00	105.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.696.103.436,00	1.607.099.494,00	150.920.000,00	105.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.719.390,00	210.235.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.400.190,00	41.839.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.319.200,00	168.396.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.400.000,00	44.716.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.400.000,00	44.716.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.390.984.046,00	1.352.147.019,00	150.920.000,00	105.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.390.984.046,00	1.352.147.019,00	150.920.000,00	105.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	922.891.000,00	804.356.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	922.891.000,00	804.356.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	52.928.000,00	39.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.600.000,00	23.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	71.500.000,00	59.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.000.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	391.273.000,00	370.278.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.000.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.410.000,00	3.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	8.800.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	103.260.000,00	80.101.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	185.420.000,00	155.829.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.000.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	16.700.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	43.479.000,00	42.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.479.000,00	17.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	18.479.000,00	17.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN	2.222.002.611,00	2.011.813.612,00	46.090.000,00	46.089.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.283.219.041,00	1.171.835.038,00	46.090.000,00	46.089.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.122.380,00	180.095.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.997.580,00	31.073.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.124.800,00	149.022.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.042.800,00	43.275.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.042.800,00	43.275.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.029.053.861,00	948.464.094,00	46.090.000,00	46.089.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.029.053.861,00	948.464.094,00	46.090.000,00	46.089.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	917.183.570,00	818.378.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	917.183.570,00	818.378.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.800.000,00	20.598.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.050.000,00	41.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	80.555.720,00	80.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	344.063.850,00	326.096.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.020.000,00	9.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	119.402.000,00	118.557.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	220.761.000,00	160.099.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	631.000,00	581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	9.300.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		PUSKESMAS GUNUNG	1.883.994.305,00	1.713.039.558,00	170.000.000,00	146.850.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.067.623.305,00	993.534.706,00	170.000.000,00	146.850.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.688.305,00	231.169.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.073.105,00	48.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201.615.200,00	182.961.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.935.000,00	39.766.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.935.000,00	39.766.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	770.000.000,00	722.599.495,00	170.000.000,00	146.850.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	770.000.000,00	722.599.495,00	170.000.000,00	146.850.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	761.467.000,00	668.232.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	761.467.000,00	668.232.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.880.000,00	12.599.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.200.000,00	17.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	81.400.000,00	78.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.800.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.000.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	327.732.000,00	295.937.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.340.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	93.469.000,00	78.244.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	140.996.000,00	136.050.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.800.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	19.200.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	15.500.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	54.904.000,00	51.272.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.704.000,00	32.072.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	35.704.000,00	32.072.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	60.404.803.243,88	52.682.146.251,00	13.793.051.500,00	11.554.741.784,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.404.803.243,88	52.682.146.251,00	5.542.700.000,00	4.144.746.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	60.404.803.243,88	52.682.146.251,00	5.542.700.000,00	4.144.746.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	60.404.803.243,88	52.682.146.251,00	5.542.700.000,00	4.144.746.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	0,00	8.250.351.500,00	7.409.995.520,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	8.250.351.500,00	7.409.995.520,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	0,00	0,00	8.250.351.500,00	7.409.995.520,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.698.631.212,00	10.612.874.183,42	13.185.571.339,00	10.833.657.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.698.631.212,00	10.612.874.183,42	13.185.571.339,00	10.833.657.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.169.801.914,00	6.923.810.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.364.949.565,00	6.223.610.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.364.949.565,00	6.223.610.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.194.233,00	170.222.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.550.000,00	2.507.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.499.533,00	24.647.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.249.700,00	8.966.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.895.000,00	134.100.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.999.116,00	285.624.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.499.116,00	18.396.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	292.500.000,00	265.227.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.659.000,00	244.353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.196.000,00	34.072.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230.368.000,00	193.417.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.935.000,00	11.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.160.000,00	2.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	479.877.000,00	445.817.527,00	2.502.529.630,00	2.479.672.173,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	18.000.000,00	883.000.000,00	875.431.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	40.000.000,00	18.000.000,00	883.000.000,00	875.431.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	439.877.000,00	427.817.527,00	1.619.529.630,00	1.604.240.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	439.877.000,00	427.817.527,00	1.619.529.630,00	1.604.240.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	364.936.340,00	355.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	364.936.340,00	355.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	364.936.340,00	355.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	582.561.600,00	356.033.114,00	241.389.500,00	233.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	582.561.600,00	356.033.114,00	241.389.500,00	233.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0,00	0,00	209.889.500,00	208.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	300.000.000,00	288.395.000,00	31.500.000,00	25.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	282.561.600,00	67.638.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.220.986.850,00	532.619.942,00	2.589.950.000,00	2.147.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.220.986.850,00	532.619.942,00	2.589.950.000,00	2.147.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	26.644.000,00	17.408.000,00	1.539.450.000,00	1.132.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1.194.342.850,00	515.211.942,00	1.050.500.000,00	1.015.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.074.256.000,00	480.615.669,00	2.051.571.000,00	653.216.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.074.256.000,00	480.615.669,00	2.051.571.000,00	653.216.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	969.166.000,00	425.298.669,00	628.571.000,00	259.734.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	40.260.000,00	12.050.000,00	1.423.000.000,00	393.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	64.830.000,00	43.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.079.282.008,00	1.046.434.340,42	5.769.215.609,00	5.288.468.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.079.282.008,00	1.046.434.340,42	5.769.215.609,00	5.288.468.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	10.000.008,00	9.645.200,00	1.040.239.265,00	1.026.495.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	61.282.000,00	31.591.200,00	4.724.476.344,00	4.258.222.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.008.000.000,00	1.005.197.940,42	4.500.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	61.460.900,00	57.426.700,00	30.915.600,00	30.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	25.778.000,00	23.581.200,00	30.915.600,00	30.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	25.778.000,00	23.581.200,00	30.915.600,00	30.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	29.752.900,00	28.641.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	2.289.900,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	27.463.000,00	27.051.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	5.930.000,00	5.203.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	5.930.000,00	5.203.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	665.468.600,00	414.582.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	123.318.600,00	86.941.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	123.318.600,00	86.941.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	83.140.000,00	80.024.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	83.140.000,00	80.024.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	459.010.000,00	247.615.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	400.500.000,00	236.548.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	58.510.000,00	11.067.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.495.848.864,00	9.620.194.679,00	8.100.380.500,00	7.818.971.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	10.294.283.711,00	9.436.042.895,00	8.100.380.500,00	7.818.971.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.964.011.726,00	6.571.328.690,00	89.939.100,00	85.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.126.705.670,00	5.968.040.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.126.705.670,00	5.968.040.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.417.156,00	174.788.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.006.300,00	3.784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.762.006,00	27.243.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.645.850,00	9.881.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.003.000,00	133.880.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.180.000,00	0,00	89.939.100,00	85.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.180.000,00	0,00	89.939.100,00	85.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.752.900,00	350.868.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.222.500,00	16.232.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.530.400,00	334.636.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.956.000,00	77.630.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.690.000,00	17.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.480.000,00	49.324.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.330.000,00	6.786.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.456.000,00	4.199.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	374.760.230,00	292.922.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	51.723.450,00	51.336.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	51.723.450,00	51.336.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	46.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	46.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	276.548.780,00	241.586.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	276.548.780,00	241.586.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.514.285.960,00	2.313.008.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.514.285.960,00	2.313.008.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.514.285.960,00	2.313.008.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	441.225.795,00	258.782.640,00	8.010.441.400,00	7.733.071.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	441.225.795,00	258.782.640,00	8.010.441.400,00	7.733.071.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	441.225.795,00	258.782.640,00	8.010.441.400,00	7.733.071.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	201.565.153,00	184.151.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	201.565.153,00	184.151.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.154.453,00	20.969.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.456.900,00	1.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.004.153,00	6.180.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	458.400,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.235.000,00	13.157.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.367.700,00	102.236.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.532.500,00	29.085.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.835.200,00	73.150.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.043.000,00	60.945.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.045.000,00	27.994.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.990.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.11.0.00.01.0001	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.008.000,00	29.951.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17.108.162.026,00	16.298.335.481,00	2.391.562.100,00	2.281.173.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11.335.088.423,00	10.951.782.453,00	2.391.562.100,00	2.281.173.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.872.149.523,00	6.691.629.053,00	65.850.800,00	61.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.091.187.405,00	5.990.561.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.091.187.405,00	5.990.561.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.668.578,00	154.801.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.287.300,00	4.273.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.828.940,00	22.661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.767.898,00	12.529.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.784.440,00	115.336.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	65.850.800,00	61.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	65.850.800,00	61.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.102.140,00	116.780.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.843.700,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.867.240,00	17.957.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.391.200,00	97.283.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	503.191.400,00	429.485.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	436.339.000,00	369.994.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.508.400,00	9.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.344.000,00	49.492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.782.430.900,00	3.624.460.550,00	72.535.600,00	67.876.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.643.226.400,00	3.524.750.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	3.639.726.400,00	3.524.750.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	139.204.500,00	99.709.750,00	72.535.600,00	67.876.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	139.204.500,00	99.709.750,00	72.535.600,00	67.876.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	680.508.000,00	635.692.850,00	2.253.175.700,00	2.151.497.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	675.249.000,00	633.979.250,00	2.214.175.700,00	2.113.313.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	497.749.000,00	464.837.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	177.500.000,00	169.142.000,00	2.214.175.700,00	2.113.313.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	5.259.000,00	1.713.600,00	39.000.000,00	38.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	5.259.000,00	1.713.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	0,00	0,00	39.000.000,00	38.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	5.773.073.603,00	5.346.553.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.876.335.843,00	4.491.621.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.248.677.921,00	3.958.768.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.248.677.921,00	3.958.768.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.262.650,00	153.059.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.822.400,00	5.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.495.050,00	18.504.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.783.200,00	12.155.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.162.000,00	116.846.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.310.072,00	119.260.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.747.200,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.194.872,00	20.288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.368.000,00	97.231.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.085.200,00	260.533.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.096.000,00	236.654.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.590.000,00	18.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.399.200,00	5.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	896.737.760,00	854.931.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	35.669.000,00	27.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	35.669.000,00	27.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	769.887.600,00	760.723.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	769.887.600,00	760.723.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	68.340.000,00	46.074.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	68.340.000,00	46.074.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	22.841.160,00	21.048.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	8.01.1.05.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	22.841.160,00	21.048.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.410.089.690,00	7.956.383.831,00	213.015.300,00	207.355.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.410.089.690,00	7.956.383.831,00	213.015.300,00	207.355.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.073.411.166,00	5.755.982.849,00	16.988.000,00	13.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.964.648.537,00	4.756.313.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.964.648.537,00	4.756.313.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.906.819,00	155.433.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.391.700,00	5.030.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.789.970,00	37.849.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.461.149,00	12.457.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.264.000,00	100.095.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	16.988.000,00	13.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	16.988.000,00	13.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	688.157.810,00	632.274.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.237.810,00	26.675.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	644.920.000,00	605.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.698.000,00	211.961.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.830.000,00	98.733.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.200.000,00	57.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.800.000,00	7.699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.868.000,00	47.597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	878.732.700,00	853.962.061,00	189.337.300,00	186.685.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	878.732.700,00	853.962.061,00	189.337.300,00	186.685.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	273.420.300,00	270.185.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	511.918.800,00	496.359.263,00	189.337.300,00	186.685.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	90.543.600,00	84.566.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.106.400.584,00	1.027.505.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	752.042.450,00	718.794.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	543.868.450,00	532.952.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	133.615.000,00	123.134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	35.186.000,00	33.390.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	28.974.000,00	20.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	10.399.000,00	8.821.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	354.358.134,00	308.711.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	47.300.000,00	46.107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	44.000.000,00	42.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	7.500.000,00	6.686.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	166.756.330,00	144.224.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	88.801.804,00	69.564.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	70.905.900,00	62.327.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	70.905.900,00	62.327.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7.438.300,00	5.047.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	63.467.600,00	57.280.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	172.971.840,00	171.658.250,00	6.690.000,00	6.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	103.293.000,00	102.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	101.850.000,00	101.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.443.000,00	1.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	69.678.840,00	68.691.250,00	6.690.000,00	6.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	69.678.840,00	68.691.250,00	6.690.000,00	6.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	107.667.500,00	84.947.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	107.667.500,00	84.947.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	107.667.500,00	84.947.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	73.338.901.026,00	66.742.872.694,36	2.888.785.579,00	1.211.523.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.274.915.662,00	4.574.604.015,00	202.683.450,00	188.251.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.274.915.662,00	4.574.604.015,00	202.683.450,00	188.251.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.804.737.462,00	3.638.035.246,00	202.683.450,00	188.251.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.057.274.148,00	2.983.970.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.057.274.148,00	2.983.970.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.278.914,00	140.994.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.768.700,00	1.732.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.203.214,00	13.495.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.151.100,00	10.871.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.817.000,00	110.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.338.900,00	4.212.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	202.683.450,00	188.251.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	202.683.450,00	188.251.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.638.400,00	427.460.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.403.700,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	254.263.500,00	227.818.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.971.200,00	199.142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.546.000,00	85.609.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.404.000,00	43.763.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.930.000,00	21.682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.212.000,00	20.163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	640.769.000,00	418.713.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	640.769.000,00	418.713.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	333.239.000,00	298.530.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	307.530.000,00	120.183.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	226.222.000,00	31.831.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	226.222.000,00	31.831.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	226.222.000,00	31.831.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	603.187.200,00	486.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	603.187.200,00	486.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	603.187.200,00	486.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	797.339.090,00	598.685.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	797.339.090,00	598.685.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	254.165.440,00	196.914.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	23.598.100,00	18.060.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	23.598.100,00	18.060.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	230.567.340,00	178.854.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	230.567.340,00	178.854.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	147.632.000,00	94.048.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	46.755.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	46.755.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	68.587.000,00	21.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	68.587.000,00	21.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.045.000,00	25.572.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	29.045.000,00	25.572.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	79.570.950,00	65.537.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	26.310.400,00	24.543.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	26.310.400,00	24.543.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	53.260.550,00	40.994.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.260.550,00	40.994.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	315.970.700,00	242.185.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	103.224.800,00	84.959.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	57.000.000,00	50.163.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	46.224.800,00	34.795.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	172.770.900,00	123.345.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.630.900,00	2.561.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	170.140.000,00	120.784.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.975.000,00	33.880.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	39.975.000,00	33.880.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	8.351.984.816,00	7.833.097.921,00	10.000.000,00	8.621.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	8.351.984.816,00	7.833.097.921,00	10.000.000,00	8.621.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.237.103.916,00	7.721.943.671,00	10.000.000,00	8.621.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.449.314.772,00	6.141.547.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.449.314.772,00	6.141.547.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.369.090,00	154.271.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.570.200,00	9.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.138.390,00	32.149.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.596.500,00	8.462.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.064.000,00	104.314.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	10.000.000,00	8.621.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	10.000.000,00	8.621.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.240.731.234,00	1.111.536.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.535.800,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.999.034,00	116.725.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.037.196.400,00	991.810.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.688.820,00	314.588.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	264.844.920,00	218.604.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.791.900,00	31.382.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.052.000,00	64.601.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	114.880.900,00	111.154.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	86.175.000,00	83.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	86.175.000,00	83.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	28.705.900,00	28.022.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	2.09.3.25.3.27.01.0000	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	28.705.900,00	28.022.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	81.149.700,00	29.345.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	81.149.700,00	29.345.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	81.149.700,00	29.345.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	81.149.700,00	29.345.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	81.149.700,00	29.345.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	8.763.624.740,00	7.851.087.144,00	1.998.770.802,00	391.177.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	8.425.794.340,00	7.647.291.501,00	1.966.503.802,00	359.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	171.067.200,00	145.110.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	171.067.200,00	145.110.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	171.067.200,00	145.110.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	41.781.100,00	38.895.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	8.824.000,00	8.259.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	8.824.000,00	8.259.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	32.957.100,00	30.636.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	32.957.100,00	30.636.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.842.699.370,00	1.783.636.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.842.699.370,00	1.783.636.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.842.699.370,00	1.783.636.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	28.218.360,00	25.587.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	11.415.560,00	10.022.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	11.415.560,00	10.022.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.802.800,00	15.565.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	16.802.800,00	15.565.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	17.987.420,00	14.831.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.987.420,00	14.831.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	17.987.420,00	14.831.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	117.395.900,00	84.998.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	117.395.900,00	84.998.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	117.395.900,00	84.998.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	78.454.650,00	37.101.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.454.650,00	37.101.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	78.454.650,00	37.101.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	8.536.700,00	751.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	8.536.700,00	751.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	8.536.700,00	751.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.119.653.640,00	5.516.377.644,00	1.966.503.802,00	359.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	6.119.653.640,00	5.516.377.644,00	1.966.503.802,00	359.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	44.347.500,00	9.907.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.406.304.000,00	1.921.448.324,00	1.966.503.802,00	359.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	3.669.002.140,00	3.585.021.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	337.830.400,00	203.795.643,00	32.267.000,00	31.284.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	337.830.400,00	203.795.643,00	32.267.000,00	31.284.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	337.830.400,00	203.795.643,00	32.267.000,00	31.284.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	1.04.2.11.0.00.01.0001	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	337.830.400,00	203.795.643,00	32.267.000,00	31.284.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.171.469.342,00	2.853.346.906,00	51.129.800,00	47.041.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.171.469.342,00	2.853.346.906,00	51.129.800,00	47.041.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.815.117.582,00	2.553.399.784,00	5.564.900,00	3.607.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.290.358.353,00	2.206.675.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.290.358.353,00	2.206.675.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.395.705,00	78.076.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.114.200,00	1.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.991.305,00	12.310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.167.700,00	3.378.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.122.500,00	60.754.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	5.564.900,00	3.607.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	5.564.900,00	3.607.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.521.524,00	152.451.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.461.524,00	25.222.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.060.000,00	127.229.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.842.000,00	116.196.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	146.540.000,00	78.498.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.360.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.942.000,00	32.697.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	149.513.940,00	139.356.202,00	45.564.900,00	43.434.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15.773.720,00	13.064.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	761.720,00	705.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15.012.000,00	12.359.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	102.190.020,00	97.465.002,00	45.564.900,00	43.434.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00	5.564.900,00	3.607.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	102.190.020,00	97.465.002,00	40.000.000,00	39.826.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	31.550.200,00	28.826.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	31.550.200,00	28.826.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	98.276.970,00	79.554.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	98.276.970,00	79.554.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	98.276.970,00	79.554.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	98.579.850,00	73.371.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	98.579.850,00	73.371.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.717.000,00	8.700.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	9.336.000,00	3.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	68.526.850,00	61.135.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	9.981.000,00	7.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	9.981.000,00	7.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	9.981.000,00	7.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.299.785.065,00	1.882.793.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.299.785.065,00	1.882.793.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	73.344.600,00	65.076.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	7.358.800,00	6.141.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	7.358.800,00	6.141.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	65.985.800,00	58.934.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	19.200.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	24.000.000,00	19.635.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	22.785.800,00	21.598.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.005.030.465,00	694.835.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	428.975.465,00	310.693.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	60.000.000,00	46.532.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	97.997.465,00	67.538.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	40.000.000,00	38.567.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000,00	116.119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	105.978.000,00	41.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	344.000.000,00	248.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	128.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	216.000.000,00	215.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	127.940.000,00	52.600.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	7.184.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	103.659.000,00	41.671.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17.097.000,00	8.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	104.115.000,00	82.792.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	14.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	13.300.000,00	12.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	76.300.000,00	70.497.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.221.410.000,00	1.122.880.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	762.168.000,00	734.470.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	73.990.000,00	72.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	9.598.000,00	9.111.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000,00	117.749.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	548.580.000,00	535.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	459.242.000,00	388.410.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	185.662.000,00	120.155.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	9.580.000,00	8.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	120.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	144.000.000,00	141.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	11.584.619.229,00	10.878.455.939,00	152.423.700,00	148.638.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERHUBUNGAN	11.584.619.229,00	10.878.455.939,00	152.423.700,00	148.638.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.314.765.373,00	8.087.737.011,00	7.523.700,00	7.199.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.282.559.952,00	6.180.648.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.282.559.952,00	6.180.648.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.774.551,00	177.818.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.940.580,00	5.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.163.476,00	28.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.177.095,00	31.223.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.493.400,00	112.256.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	7.523.700,00	7.199.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	7.523.700,00	7.199.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.463.024.120,00	1.417.312.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.999.700,00	50.558.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.403.024.420,00	1.366.753.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	378.406.750,00	311.958.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.790.000,00	59.541.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.210.000,00	118.797.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	125.234.850,00	100.117.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.771.300,00	22.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.400.600,00	10.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.269.853.856,00	2.790.718.928,00	144.900.000,00	141.438.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.391.942.036,00	2.309.742.093,00	144.900.000,00	141.438.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.306.858.036,00	2.232.948.914,00	142.400.000,00	141.438.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	85.084.000,00	76.793.179,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.955.200,00	1.417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	2.955.200,00	1.417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	11.799.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	11.799.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	84.000.000,00	83.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	84.000.000,00	83.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	277.780.714,00	264.186.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	116.765.984,00	111.154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	19.583.500,00	18.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	72.971.830,00	71.510.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	68.459.400,00	63.221.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	501.376.906,00	129.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	501.376.906,00	129.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.651.063.886,00	7.164.817.553,00	18.338.800,00	16.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.651.063.886,00	7.164.817.553,00	18.338.800,00	16.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.091.845.486,00	4.722.548.225,00	13.306.800,00	12.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.595.998.294,00	3.421.202.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.595.998.294,00	3.421.202.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.480.944,00	132.195.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.551.700,00	2.550.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.893.119,00	19.714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.638.625,00	3.631.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.397.500,00	106.299.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	13.306.800,00	12.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	13.306.800,00	12.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.235.209.048,00	1.057.694.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.960.000,00	58.870.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.170.249.048,00	998.824.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.157.200,00	111.455.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.127.200,00	75.599.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.980.000,00	16.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.050.000,00	19.343.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.199.691.400,00	1.149.612.150,00	5.032.000,00	4.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.199.691.400,00	1.149.612.150,00	5.032.000,00	4.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	1.127.515.500,00	1.103.086.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	3.552.000,00	1.821.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	68.623.900,00	44.703.500,00	5.032.000,00	4.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.359.527.000,00	1.292.657.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.359.527.000,00	1.292.657.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	14.685.000,00	11.790.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1.344.842.000,00	1.280.866.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	11.755.738.505,00	10.688.962.340,00	88.150.000,00	77.579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	11.755.738.505,00	10.688.962.340,00	88.150.000,00	77.579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.924.860.003,00	7.501.900.448,00	88.150.000,00	77.579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.463.046.289,00	6.188.619.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.463.046.289,00	6.188.619.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.435.137,00	307.865.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.733.200,00	10.733.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.304.331,00	48.034.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.674.606,00	3.281.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.723.000,00	245.816.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	88.150.000,00	77.579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	83.650.000,00	74.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	4.500.000,00	3.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	630.549.130,00	562.276.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.998.500,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.629.830,00	42.403.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	574.920.800,00	518.383.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	496.829.447,00	443.137.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.144.000,00	93.149.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.630.000,00	69.210.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	35.000.000,00	24.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.337.200,00	20.635.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	235.718.247,00	235.678.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	111.200.000,00	101.219.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	111.200.000,00	101.219.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	111.200.000,00	101.219.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	531.666.684,00	409.938.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	531.666.684,00	409.938.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	355.166.684,00	245.200.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	176.500.000,00	164.738.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.186.401.818,00	2.674.294.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3.186.401.818,00	2.674.294.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	3.186.401.818,00	2.674.294.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	98.761.000,00	54.452.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	98.761.000,00	54.452.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	55.991.000,00	52.109.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	55.991.000,00	52.109.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	55.991.000,00	52.109.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	42.270.000,00	1.842.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	42.270.000,00	1.842.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	42.270.000,00	1.842.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.07.2.18.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.618.561.218,00	6.846.773.766,36	353.301.027,00	319.338.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	7.618.561.218,00	6.846.773.766,36	353.301.027,00	319.338.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.521.353.108,00	5.082.426.885,00	28.184.300,00	24.469.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.965.818.499,00	3.715.988.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.965.818.499,00	3.715.988.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.113.640,00	121.819.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.920.720,00	11.214.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.919.470,00	27.713.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.249.450,00	15.157.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.024.000,00	67.734.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	28.184.300,00	24.469.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	4.619.100,00	4.619.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	23.565.200,00	19.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.225.244.169,00	1.080.474.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.997.400,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.791.746,00	89.934.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.107.455.023,00	988.900.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.176.800,00	164.144.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.464.000,00	70.356.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.552.800,00	20.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.160.000,00	73.083.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	232.512.950,00	217.688.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	132.512.950,00	118.479.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	71.465.900,00	60.099.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	61.047.050,00	58.380.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.209.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	100.000.000,00	99.209.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.764.695.160,00	1.449.103.510,00	325.116.727,00	294.869.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	266.427.720,00	189.262.884,00	138.141.727,00	109.414.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	266.427.720,00	189.262.884,00	138.141.727,00	109.414.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	262.188.000,00	161.559.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	262.188.000,00	161.559.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	417.462.200,00	336.149.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	417.462.200,00	336.149.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	818.617.240,00	762.130.990,00	186.975.000,00	185.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	529.839.290,00	514.170.300,00	186.975.000,00	185.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	288.777.950,00	247.960.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100.000.000,00	97.554.630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100.000.000,00	97.554.630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	100.000.000,00	97.554.630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	5.505.000,00	4.376.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.505.000,00	4.376.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	5.505.000,00	4.376.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	5.505.000,00	4.376.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	5.505.000,00	4.376.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	3.850.000,00	2.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.850.000,00	2.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	3.850.000,00	2.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.850.000,00	2.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3.850.000,00	2.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	629.724.000,00	586.976.100,00	13.988.000,00	13.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	629.724.000,00	586.976.100,00	13.988.000,00	13.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	629.724.000,00	586.976.100,00	13.988.000,00	13.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	383.919.000,00	352.475.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	383.919.000,00	352.475.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	74.781.000,00	73.284.325,00	13.988.000,00	13.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	26.621.000,00	26.440.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	48.160.000,00	46.843.825,00	13.988.000,00	13.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	171.024.000,00	161.216.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	151.524.000,00	141.776.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	19.500.000,00	19.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.235.141.923,00	4.878.751.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.235.141.923,00	4.878.751.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.184.482.848,00	3.914.700.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.358.654.693,00	3.229.281.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.358.654.693,00	3.229.281.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.783.050,00	39.811.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.748.000,00	1.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.002.650,00	10.586.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.783.400,00	4.891.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.249.000,00	22.708.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	672.455.105,00	577.571.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	517.900,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.895.205,00	27.094.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	642.042.000,00	549.966.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.590.000,00	68.036.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.646.000,00	17.403.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.704.000,00	43.671.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.240.000,00	6.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	949.282.025,00	885.251.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	245.240.650,00	204.352.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	48.622.850,00	20.123.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	28.165.900,00	26.243.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	158.471.900,00	149.680.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	9.980.000,00	8.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	704.041.375,00	680.898.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	12.197.425,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	39.750.000,00	38.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	463.328.850,00	443.972.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	188.765.100,00	186.576.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	101.377.050,00	78.799.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	101.377.050,00	78.799.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	101.377.050,00	78.799.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	15.667.850,00	13.451.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	15.667.850,00	13.451.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	15.667.850,00	13.451.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	15.667.850,00	13.451.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	15.667.850,00	13.451.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11.739.038.992,00	9.140.958.213,59	724.244.200,00	621.084.712,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	272.764.400,00	225.728.750,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	272.764.400,00	225.728.750,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	260.489.500,00	216.082.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	260.489.500,00	216.082.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	235.489.500,00	204.957.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	11.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	12.274.900,00	9.646.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	12.274.900,00	9.646.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	12.274.900,00	9.646.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.610.572.120,00	855.455.993,00	50.000.000,00	49.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1.610.572.120,00	855.455.993,00	50.000.000,00	49.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	541.673.170,00	428.471.100,00	50.000.000,00	49.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	541.673.170,00	428.471.100,00	50.000.000,00	49.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	117.615.150,00	112.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	281.520.970,00	187.829.300,00	50.000.000,00	49.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	63.637.450,00	55.494.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	78.899.600,00	72.780.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	362.508.800,00	282.659.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	362.508.800,00	282.659.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	84.016.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	278.492.800,00	227.159.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	44.175.000,00	44.165.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.999.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	30.000.000,00	29.999.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	14.175.000,00	14.165.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	14.175.000,00	14.165.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	662.215.150,00	100.160.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	635.030.200,00	83.095.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	598.280.500,00	60.553.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	36.749.700,00	22.542.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	27.184.950,00	17.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	27.184.950,00	17.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	2.127.459.660,00	1.887.178.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	2.127.459.660,00	1.887.178.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.720.137.280,00	1.566.498.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	373.895.000,00	360.241.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	373.895.000,00	360.241.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	97.875.000,00	86.441.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	97.875.000,00	86.441.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	192.777.130,00	152.569.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	192.777.130,00	152.569.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.055.590.150,00	967.246.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.055.590.150,00	967.246.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	69.549.780,00	39.732.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	47.473.600,00	26.376.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	19.073.600,00	19.073.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	8.400.000,00	7.302.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	22.076.180,00	13.356.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	22.076.180,00	13.356.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	105.143.200,00	98.167.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	96.944.200,00	91.065.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	1.975.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	94.968.400,00	91.065.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	8.199.000,00	7.102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	8.199.000,00	7.102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	225.029.400,00	182.779.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	225.029.400,00	182.779.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	22.087.400,00	17.065.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	143.662.000,00	106.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.25.3.27.01.0000	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	59.280.000,00	59.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7.175.621.010,00	5.711.463.893,59	649.244.200,00	571.356.712,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	7.175.621.010,00	5.711.463.893,59	649.244.200,00	571.356.712,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	10.787.300,00	7.292.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	1.500.000,00	1.304.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.500.000,00	1.304.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	9.287.300,00	5.988.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	9.287.300,00	5.988.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	6.239.592.860,00	5.046.497.051,59	628.329.200,00	551.931.712,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.239.592.860,00	5.046.497.051,59	628.329.200,00	551.931.712,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.128.966.600,00	2.575.275.414,59	628.329.200,00	551.931.712,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.110.626.260,00	2.471.221.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	43.051.300,00	34.421.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	43.051.300,00	34.421.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	43.051.300,00	34.421.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	59.385.850,00	38.263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	59.385.850,00	38.263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	59.385.850,00	38.263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	822.803.700,00	584.989.342,00	20.915.000,00	19.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	822.803.700,00	584.989.342,00	20.915.000,00	19.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	231.455.000,00	203.048.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	591.348.700,00	381.941.000,00	20.915.000,00	19.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	552.621.802,00	461.130.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	552.621.802,00	461.130.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	551.528.552,00	460.080.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	551.528.552,00	460.080.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	493.310.752,00	406.251.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	58.217.800,00	53.829.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	1.093.250,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.093.250,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	1.093.250,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	74.853.430.541,00	66.096.535.659,91	4.262.836.380,00	3.599.967.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	44.137.593.519,00	37.856.701.685,91	3.171.110.180,00	2.681.729.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DAERAH	44.137.593.519,00	37.856.701.685,91	3.171.110.180,00	2.681.729.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.685.263.669,00	27.620.374.489,00	3.023.118.800,00	2.537.865.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.293.978.346,00	14.752.765.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.293.978.346,00	14.752.765.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.186.433.160,00	3.804.425.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.000.000,00	64.897.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00	27.227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	164.977.660,00	125.089.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	14.700.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.260.125.000,00	959.785.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.646.330.500,00	2.612.725.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	187.156.500,00	161.440.000,00	2.274.312.300,00	2.089.381.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.160.000,00	1.750.000,00	1.820.000.000,00	1.802.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.160.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	110.058.700,00	109.890.000,00	285.003.800,00	137.145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.777.700,00	49.800.000,00	169.308.500,00	149.735.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.953.631.580,00	1.672.057.774,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.360.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	313.500.000,00	252.912.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	735.243.980,00	648.034.016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	890.527.600,00	758.861.149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.378.209.800,00	2.632.352.840,28	145.350.000,00	93.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.472.137.800,00	1.877.611.647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.000.000,00	56.379.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	776.072.000,00	698.361.796,00	145.350.000,00	93.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	964.904.723,00	890.293.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	180.129.723,00	149.831.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	384.775.000,00	351.176.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	389.285.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.654.183.840,00	2.796.270.312,63	456.327.700,00	247.659.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.456.071.400,00	1.918.152.265,35	271.892.600,00	186.790.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.128.112.440,00	851.543.217,28	184.435.100,00	60.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	70.000.000,00	26.574.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	212.598.720,00	133.879.500,00	39.628.800,00	38.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	22.563.900,00	8.509.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	158.584.220,00	109.402.700,00	21.079.400,00	19.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	31.450.600,00	15.967.690,00	18.549.400,00	18.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	854.167.000,00	776.889.350,00	107.500.000,00	69.355.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	526.323.400,00	497.514.230,00	73.500.000,00	67.375.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	75.694.200,00	65.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	252.149.400,00	213.726.120,00	34.000.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	13.171.202.450,00	10.082.987.387,91	112.007.180,00	108.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	389.664.620,00	218.676.615,00	36.480.500,00	33.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	39.351.350,00	36.639.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	41.485.520,00	32.503.515,00	30.915.600,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	308.827.750,00	149.533.195,00	5.564.900,00	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	12.328.702.810,00	9.697.549.169,91	75.526.680,00	74.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.590.372.720,00	2.581.409.918,10	75.526.680,00	74.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1.660.198.690,00	1.222.367.671,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	7.078.131.400,00	5.893.771.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	452.835.020,00	166.761.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	31.194.720,00	25.652.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	410.452.800,00	130.305.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	11.187.500,00	10.803.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	281.127.400,00	153.339.809,00	35.984.200,00	35.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	75.924.600,00	51.312.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	20.946.600,00	9.883.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	54.978.000,00	41.429.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	131.288.860,00	71.721.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	131.288.860,00	71.721.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	56.424.740,00	17.597.640,00	35.984.200,00	35.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.313.240,00	2.503.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	27.134.000,00	4.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	24.977.500,00	10.292.040,00	35.984.200,00	35.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	17.489.200,00	12.707.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	17.489.200,00	12.707.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	30.715.837.022,00	28.239.833.974,00	1.091.726.200,00	918.237.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DPRD	30.715.837.022,00	28.239.833.974,00	1.091.726.200,00	918.237.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.395.963.572,00	14.981.836.522,00	1.091.726.200,00	918.237.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.396.265.590,00	3.267.782.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.396.265.590,00	3.267.782.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	341.107.975,00	324.031.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.679.100,00	18.340.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.674.524,00	62.228.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.848.351,00	18.355.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.650.000,00	59.885.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.256.000,00	165.221.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.040.000,00	0,00	321.726.200,00	208.393.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	4.860.000,00	0,00	250.923.200,00	148.760.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.180.000,00	0,00	70.803.000,00	59.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.946.613.245,00	1.572.383.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.299.500,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.700.345,00	129.255.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.796.613.400,00	1.439.378.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	764.223.000,00	551.736.082,00	770.000.000,00	709.844.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	392.815.000,00	252.118.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.100.000,00	108.479.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.580.000,00	63.482.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	134.728.000,00	127.656.369,00	770.000.000,00	709.844.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	667.672.100,00	484.833.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	667.672.100,00	484.833.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	8.233.015.606,00	7.960.654.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	7.986.840.606,00	7.733.266.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	239.430.000,00	226.225.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	6.745.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.040.026.056,00	820.414.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	93.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	139.337.500,00	131.323.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	806.705.556,00	689.090.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	14.319.873.450,00	13.257.997.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	236.890.400,00	10.788.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	7.078.000,00	5.229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	158.749.900,00	5.559.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	59.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	11.098.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	95.886.350,00	93.214.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	18.642.500,00	18.313.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	18.047.500,00	17.334.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	26.529.400,00	26.084.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	19.329.350,00	18.629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	13.337.600,00	12.853.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	14.579.700,00	14.199.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	14.579.700,00	14.199.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.524.864.600,00	3.076.676.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.543.012.000,00	2.399.720.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	348.000.000,00	200.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	238.590.200,00	199.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	395.262.400,00	276.077.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.548.361.400,00	1.220.958.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	799.738.000,00	792.667.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	748.623.400,00	428.291.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	8.899.291.000,00	8.842.159.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.661.686.000,00	6.645.082.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.237.605.000,00	2.197.077.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	25.504.810.775,06	22.491.070.582,00	219.335.100,00	175.825.995,00	6.239.916.000,00	631.263.784,00	600.000.000,00	0,00
5.01			PERENCANAAN	5.483.067.077,00	4.955.773.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.483.067.077,00	4.955.773.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.137.671.237,00	4.741.158.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.497.759.252,00	4.240.072.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.497.759.252,00	4.240.072.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.537.785,00	240.427.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.091.800,00	3.091.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.833.885,00	28.176.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.215.100,00	10.358.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.397.000,00	198.801.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.648.600,00	168.343.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.495.800,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.152.800,00	167.343.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.725.600,00	92.314.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	145.755.600,00	76.689.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.970.000,00	15.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	283.559.890,00	191.298.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	274.369.700,00	186.420.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	25.649.850,00	24.182.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	248.719.850,00	162.237.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	9.190.190,00	4.878.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	9.190.190,00	4.878.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	61.835.950,00	23.316.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	36.634.650,00	16.466.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.228.650,00	6.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	22.406.000,00	9.469.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	13.851.300,00	4.140.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	13.851.300,00	4.140.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	11.350.000,00	2.709.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	11.350.000,00	2.709.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02			KEUANGAN	10.329.711.945,06	9.174.778.466,00	107.070.900,00	68.376.000,00	6.239.916.000,00	631.263.784,00	600.000.000,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	10.329.711.945,06	9.174.778.466,00	107.070.900,00	68.376.000,00	6.239.916.000,00	631.263.784,00	600.000.000,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.510.372.195,06	7.990.982.604,00	63.570.900,00	62.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.163.469.419,06	6.796.506.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.163.469.419,06	6.796.506.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	405.109.196,00	383.828.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.900.400,00	6.244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.051.596,00	84.758.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.579.200,00	14.859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282.578.000,00	277.967.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.410.000,00	37.810.000,00	63.570.900,00	62.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.500.000,00	34.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.910.000,00	2.910.000,00	63.570.900,00	62.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	637.034.400,00	607.367.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.651.600,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.002.000,00	106.734.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	500.380.800,00	498.552.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.349.180,00	165.469.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	177.528.980,00	132.464.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.375.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.445.200,00	19.054.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	754.568.750,00	709.521.700,00	0,00	0,00	6.239.916.000,00	631.263.784,00	600.000.000,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	709.382.000,00	689.303.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	105.493.250,00	105.425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	110.902.450,00	110.822.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	375.254.150,00	361.656.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	117.732.150,00	111.398.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	11.872.000,00	3.454.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	11.872.000,00	3.454.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	33.314.750,00	16.763.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	3.195.850,00	2.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	24.155.900,00	9.227.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5.963.000,00	4.658.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239.916.000,00	631.263.784,00	600.000.000,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239.916.000,00	631.263.784,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	428.484.100,00	152.841.732,00	43.500.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	428.484.100,00	152.841.732,00	43.500.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	6.531.800,00	3.626.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	6.578.000,00	5.923.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	41.504.200,00	7.166.250,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	193.800.000,00	8.452.500,00	13.500.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	173.574.200,00	122.763.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6.495.900,00	4.908.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	636.286.900,00	321.432.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	636.286.900,00	321.432.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	176.390.000,00	89.769.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	266.495.000,00	101.533.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	70.931.900,00	57.562.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	122.470.000,00	72.567.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03			KEPEGAWAIAN	8.588.918.793,00	7.504.896.471,00	112.264.200,00	107.449.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.588.918.793,00	7.504.896.471,00	112.264.200,00	107.449.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.953.186.193,00	6.960.770.389,00	112.264.200,00	107.449.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.236.820.718,00	6.353.151.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.236.820.718,00	6.353.151.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.440.140,00	186.580.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.387.700,00	4.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.833.640,00	36.536.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.747.800,00	9.191.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.471.000,00	136.513.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.000,00	680.000,00	112.264.200,00	107.449.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	27.000.000,00	24.499.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	680.000,00	680.000,00	85.264.200,00	82.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.576.335,00	222.389.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.615.800,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.998.935,00	85.817.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.961.600,00	133.992.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.669.000,00	197.969.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.485.000,00	81.380.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.990.000,00	14.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103.194.000,00	102.103.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	635.732.600,00	544.126.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	114.038.100,00	96.819.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	104.747.000,00	90.089.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	9.291.100,00	6.730.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	490.163.000,00	425.451.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	438.381.000,00	386.765.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	51.782.000,00	38.686.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	31.531.500,00	21.854.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4.200.000,00	1.522.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	6.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	21.111.500,00	20.331.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	800.414.000,00	603.860.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	800.414.000,00	603.860.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	800.414.000,00	603.860.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	442.588.000,00	333.223.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	442.588.000,00	333.223.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	357.826.000,00	270.636.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	357.826.000,00	270.636.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	302.698.960,00	251.761.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	302.698.960,00	251.761.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	302.698.960,00	251.761.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	200.000.000,00	198.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000,00	198.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	102.698.960,00	52.786.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	102.698.960,00	52.786.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	5.762.141.067,00	5.440.608.066,00	92.747.000,00	92.745.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	5.762.141.067,00	5.440.608.066,00	92.747.000,00	92.745.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		INSPEKTORAT DAERAH	5.762.141.067,00	5.440.608.066,00	92.747.000,00	92.745.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.246.328.667,00	4.932.453.216,00	92.747.000,00	92.745.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.826.175.457,00	4.580.077.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.826.175.457,00	4.580.077.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.250.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.250.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.727.010,00	107.768.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	597.000,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	979.400,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.339.310,00	22.815.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.908.300,00	5.454.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.903.000,00	78.021.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	92.747.000,00	92.745.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	92.747.000,00	92.745.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.235.200,00	179.774.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.340.000,00	11.594.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.375.200,00	167.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.941.000,00	54.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.906.000,00	37.567.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.300.000,00	13.457.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.735.000,00	3.727.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	463.218.000,00	459.229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	439.488.000,00	435.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	29.925.000,00	28.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	345.870.000,00	345.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	18.225.000,00	18.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	30.508.000,00	29.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	23.730.000,00	23.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	23.730.000,00	23.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	52.594.400,00	48.925.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	52.594.400,00	48.925.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30.970.000,00	30.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5.220.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	16.404.400,00	13.605.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	33.428.728.828,00	31.085.523.866,00	484.206.900,00	195.581.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01			KECAMATAN	33.428.728.828,00	31.085.523.866,00	484.206.900,00	195.581.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	16.447.414.440,00	15.525.897.701,00	264.037.700,00	131.747.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.619.649.990,00	11.198.234.851,00	11.437.700,00	9.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.666.621.995,00	8.542.463.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.666.621.995,00	8.542.463.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.338.115,00	148.160.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.175.400,00	9.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.150.065,00	55.767.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.703.650,00	9.534.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.309.000,00	72.976.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	11.437.700,00	9.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	11.437.700,00	9.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.349.980.880,00	2.119.844.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.896.800,00	42.933.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.274.584.080,00	2.076.411.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.709.000,00	387.766.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	192.865.000,00	160.117.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.380.000,00	16.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211.464.000,00	211.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.207.992.400,00	967.320.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	401.332.400,00	201.500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	401.332.400,00	201.500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	806.660.000,00	765.820.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	806.660.000,00	765.820.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.516.243.050,00	3.349.921.675,00	252.600.000,00	121.822.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.669.423.050,00	1.516.811.675,00	252.600.000,00	121.822.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	133.430.450,00	129.447.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	31.970.000,00	15.939.000,00	252.600.000,00	121.822.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.504.022.600,00	1.371.425.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.846.820.000,00	1.833.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.846.820.000,00	1.833.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	103.529.000,00	10.420.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	103.529.000,00	10.420.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	103.529.000,00	10.420.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	16.981.314.388,00	15.559.626.165,00	220.169.200,00	63.833.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.158.721.329,00	10.402.342.689,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.954.113.278,00	7.814.931.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.954.113.278,00	7.814.931.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	341.499.767,00	195.069.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.914.250,00	14.231.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.515.017,00	65.326.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.402.500,00	11.614.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.668.000,00	103.896.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.368.071.284,00	1.978.981.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.156.084,00	53.028.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.264.995.200,00	1.925.032.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.037.000,00	413.360.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159.895.000,00	115.221.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.710.000,00	21.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	287.432.000,00	276.294.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.432.692.023,00	1.240.290.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	285.491.900,00	194.707.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	285.491.900,00	194.707.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.147.200.123,00	1.045.583.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.147.200.123,00	1.045.583.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.287.033.736,00	3.911.536.626,00	195.169.200,00	63.833.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.980.113.736,00	1.618.396.637,00	195.169.200,00	63.833.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	173.714.850,00	132.199.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	98.391.000,00	12.861.000,00	195.169.200,00	63.833.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.708.007.886,00	1.473.336.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.306.920.000,00	2.293.139.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.306.920.000,00	2.293.139.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.643.800,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.643.800,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.643.800,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	90.223.500,00	4.106.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	90.223.500,00	4.106.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	90.223.500,00	4.106.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3.196.721.466,00	2.879.772.866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.196.721.466,00	2.879.772.866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	3.196.721.466,00	2.879.772.866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	711.840.750,00	699.349.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	711.840.750,00	699.349.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	711.840.750,00	699.349.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.308.064.716,00	2.004.621.602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.308.064.716,00	2.004.621.602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	796.294.916,00	792.815.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.511.769.800,00	1.211.806.386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	75.000.000,00	74.193.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	75.000.000,00	74.193.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	75.000.000,00	74.193.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	101.816.000,00	101.608.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	101.816.000,00	101.608.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.1.05.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	101.816.000,00	101.608.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah	**522.167.052.361,94**	**475.913.255.150,25**	**64.445.641.755,00**	**55.109.708.175,56**	**6.239.916.000,00**	**631.263.784,00**	**600.000.000,00**	**0,00**

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Padang Panjang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2025	2024
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.a.	6.451.405.669,94	48.615.812.049,66
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.b.	6.451.405.669,94	48.615.812.049,66
3.	Sub Total (1 - 2)		-	-
4.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.2.c.	39.797.269.317,89	6.451.405.669,94
5.	Sub Total (3 + 4)		39.797.269.317,89	6.451.405.669,94
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.d.	-	-
7.	Lain-Lain		-	-
8.	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)**	5.2.e.	**39.797.269.317,89**	**6.451.405.669,94**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

WALI KOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional Pemerintah Kota Padang Panjang untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref.	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN /PENURUNAN	%
I.	**PENDAPATAN-LO**	**5.4.1)**	**572.016.739.614,68**	**607.376.612.232,51**	**(35.359.872.617,83)**	**(5,82)**
	a. PENDAPATAN ASLI DAERAH	**5.4.1).a.**	**103.128.648.837,68**	**104.839.221.586,01**	**(1.710.572.748,33)**	**(1,63)**
	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1).a.1.	17.627.052.105,25	9.907.103.893,00	7.719.948.212,25	77,92
	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1).a.2.	66.207.101.582,00	75.175.901.380,00	(8.968.799.798,00)	(11,93)
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1).a.3.	7.991.779.256,00	7.922.888.824,00	68.890.432,00	0,87
	Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1).a.4.	11.302.715.894,43	11.833.327.489,01	(530.611.594,58)	(4,48)
	b. PENDAPATAN TRANSFER	**5.4.1).b.**	**461.862.466.373,00**	**487.511.117.676,00**	**(25.648.651.303,00)**	**(5,26)**
	1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	**5.4.2).b.1.**	**438.080.711.779,00**	**435.052.957.157,00**	**3.027.754.622,00**	**0,70**
	Dana Bagi Hasil	5.4.2).b.1(1)	10.855.740.000,00	7.592.104.260,00	3.263.635.740,00	42,99
	Dana Alokasi Umum	5.4.2).b.1(2)	386.609.800.112,00	375.917.415.308,00	10.692.384.804,00	2,84
	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.4.2).b.1(3)	5.115.348.945,00	15.722.870.984,00	(10.607.522.039,00)	(67,47)
	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.4.2).b.1(4)	35.499.822.722,00	35.820.566.605,00	(320.743.883,00)	(0,90)
	2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	**5.4.2).b.2.**	**-**	**21.772.057.000,00**	**(21.772.057.000,00)**	**(100,00)**
	Dana Insentif Daerah	5.4.2).b.2.	-	21.772.057.000,00	(21.772.057.000)	(100,00)
	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
	Dana Keistimewaan		-	-	-	-
	3. TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	**5.4.2).b.3.**	**23.781.754.594,00**	**30.686.103.519,00**	**(6.904.348.925,00)**	**(22,50)**
	Pendapatan Bagi Hasil	5.4.2).b.3.(1)	22.371.754.594,00	29.550.730.519,00	(7.178.975.925)	(24,29)
	Bantuan Keuangan	5.4.2).b.3.(2)	1.410.000.000,00	1.135.373.000,00	274.627.000	24,19
	c. LAIN LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	**5.4.1).c.**	**7.025.624.404,00**	**15.026.272.970,50**	**(8.000.648.566,50)**	**(53,24)**
	Pendapatan Hibah	5.4.1).c.1.	3.019.979.960,00	14.965.885.386,50	(11.945.905.426,50)	(79,82)
	Pendapatan Dana Darurat		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00	-
	Lain-Lain Pendapatan	5.4.1).c.2.	5.644.444,00	60.387.584,00	(54.743.140,00)	(90,65)
II.	**BEBAN**	**5.4.2)**	**537.932.998.376,11**	**620.133.972.330,05**	**(82.200.973.953,94)**	**(13,26)**
	a. BEBAN OPERASI	**5.4.2).a**	**489.131.919.854,11**	**568.415.826.555,05**	**(79.283.906.700,94)**	**(13,95)**
	Beban Pegawai	5.4.2).a.1.	280.692.965.418,36	303.794.887.831,64	(23.101.922.413,28)	(7,60)
	Beban Barang dan Jasa	5.4.2).a.2.	191.803.589.036,20	221.950.115.288,81	(30.146.526.252,61)	(13,58)
	Beban Bunga		-	-	-	-
	Beban Subsidi	5.4.2).a.3.	60.700.008,00	4.456.800,00	56.243.208,00	1.261,96
	Beban Hibah	5.4.2).a.4.	7.100.765.108,73	17.174.049.136,00	(10.073.284.027,27)	(58,65)
	Beban Bantuan Sosial	5.4.2).a.5.	7.044.965.000,00	10.784.726.000,00	(3.739.761.000)	(34,68)
	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2).a.6.	2.428.935.282,82	14.707.591.498,60	(12.278.656.215,78)	(83,49)
	b. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	**5.4.2).b.**	**48.169.814.738,00**	**51.497.739.587,00**	**(3.327.924.849,00)**	**(6,46)**
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		14.576.645.571,00	14.369.837.318,00	206.808.253,00	1,44
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		13.200.641.817,00	15.336.126.756,00	(2.135.484.939,00)	(13,92)
	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		19.931.687.460,00	21.299.049.318,00	(1.367.361.858,00)	(6,42)
	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-		-	-
	Beban Penyusutan Aset Lainnya		-		-	-
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		416.924.128,00	492.726.195,00	(75.802.067,00)	(15,38)
	Beban Penyusutan Properti dan Investasi		43.915.762,00	-	43.915.762,00	-
	c. BEBAN TRANSFER		**-**	**-**	**-**	**-**
	Beban Bagi Hasil		-	-	-	-
	Beban Bantuan Keuangan		-	-	-	-
	d. BEBAN TAK TERDUGA		**631.263.784,00**	**220.406.188,00**	**410.857.596,00**	186,41
	Beban Tak Terduga		631.263.784,00	220.406.188,00	410.857.596,00	186,41
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL	**5.4.3)**	**34.083.741.238,57**	**(12.757.360.097,54)**	**46.841.101.336,11**	**(367,17)**
III.	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**	**5.4.4)**				
	a. SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.4).a	**-**	**246.278.500,00**	**(246.278.500,00)**	**(100,00)**
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		-	246.278.500,00	(246.278.500,00)	(100,00)
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-		-	-
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-		-	-
	b. DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.4).b	**-**	**-**	**-**	**-**
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		-		-	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-		-	-
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-		-	-
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**-**	**246.278.500,00**	**(246.278.500,00)**	**(100,00)**
	SURPLUS/ (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	**5.4.5)**	**34.083.741.238,57**	**(12.511.081.597,54)**	**46.594.822.836,11**	**(372,43)**

NO.	URAIAN	Ref.	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN /PENURUNAN	%
IV.	**POS LUAR BIASA**	**5.4.6)**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT - LO	**5.4.7)**	**34.083.741.238,57**	**(12.511.081.597,54)**	**46.594.822.836,11**	**(372,43)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

WALI KOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Padang Panjang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam rupiah)

URAIAN	Ref	TAHUN 2025	TAHUN 2024
EKUITAS AWAL	5.6.a	**1.366.938.989.052,48**	**1.376.559.148.907,40**
SURPLUS / DEFISIT - LO	5.6.b	**34.083.741.238,57**	**(12.511.081.597,54)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.6.c	**1.423.010.226,46**	**2.890.921.742,62**
A. KOREKSI NILAI TGR		-	-
B. KOREKSI PENYISIHAN PIUTANG	5.6.c.1)	1.087.304.807,96	8.878.817.016,11
C. KOREKSI ASET TETAP	5.6.c.2)	25.311.900,00	(6.315.288.228,00)
D. KOREKSI ASET LAINNYA	5.6.c.3)	56.457.092,00	(63.208.184,00)
E. KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET TETAP/ASET LAINNYA	5.6.c.4)	1.325.382.407,00	330.945.157,00
F. KOREKSI SETARA KAS		-	-
G. KOREKSI PIUTANG	5.6.c.5)	(1.121.126.223,00)	-
H. KOREKSI UTANG	5.6.c.6)	792.162.574,00	-
I. KOREKSI KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		-	-
J. KOREKSI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		-	-
K. KOREKSI PERSEDIAAN	5.6.c.7)	60.651.152,34	108.416.250,00
L. KOREKSI ASET EKSTRAKOMPATABEL		-	-
M. KOREKSI INVESTASI/PENYERTAAN MODAL	5.6.c.8)	(803.133.483,84)	(48.760.268,49)
N. KOREKSI KESALAHAN TAHUN SEBELUMNYA		-	-
EKUITAS AKHIR	**5.6.d**	**1.402.445.740.517,51**	**1.366.938.989.052,48**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

WALI KOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

V. NERACA

Neraca Pemerintah Kota Padang Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
NERACA KOMPARATIF
PER 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

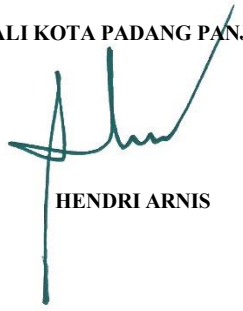
URAIAN	Ref.	2025	2024
A S E T			
ASET LANCAR	**5.3.a**		
Kas dan Setara Kas		39.797.269.317,89	6.451.405.669,94
Kas Di Kas Daerah	*5.3.a.1)*	*38.053.573.214,01*	*5.231.959.422,06*
Kas di Bendahara Pengeluaran	*5.3.a.2)*	*38.500.000,00*	-
Kas di Bendahara Penerimaan	*5.3.a.3)*	-	*74.200,00*
Kas di BLUD	*5.3.a.4)*	*1.046.925.015,88*	*333.726.527,88*
Kas Lainnya	*5.3.a.5)*	*39.313.100,00*	-
Kas Dana BOK Puskesmas	*5.3.a.6)*	*401.986.851,00*	*633.371.651,00*
Setara Kas	*5.3.a.7)*	-	-
Kas Dana BOSP	*5.3.a.8)*	*216.971.137,00*	*252.273.869,00*
Investasi Jangka Pendek		-	-
Piutang Pajak Daerah	5.3.a.9)	3.628.337.094,00	3.324.190.208,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.a.10)	28.640.280.233,00	27.407.187.488,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.a.11)	183.550.103,70	183.550.103,70
Piutang lain-lain PAD yang sah	5.3.a.12)	3.051.275.050,00	3.073.370.732,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.a.13)	7.614.345.848,00	8.373.725.681,00
Piutang Lainnya		-	-
Penyisihan Piutang	5.3.a.14)	(22.417.537.210,55)	(21.075.906.735,69)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.a.15)	90.510.834,00	118.885.000,00
Persediaan	5.3.a.16)	9.490.614.340,39	11.345.285.120,73
Jumlah Aset Lancar		**70.078.645.610,43**	**39.201.693.267,68**
INVESTASI JANGKA PANJANG	**5.3.b**		
Investasi Non Permanen	5.3.b.1)		
Investasi Kepada BUMN		-	-
Investasi Kepada BUMD		-	-
Investasi Dalam Obligasi		-	-
Investasi Dalam Proyek Pembangunan		-	-
Dana Bergulir	5.3.b.1)	-	
Jumlah Investasi Non Permanen		**-**	**-**

URAIAN	Ref.	2025	2024
Investasi Permanen	5.3.b.2)		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.b.2)	53.268.304.715,23	54.071.438.199,07
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Jumlah Investasi Permanen		**53.268.304.715,23**	**54.071.438.199,07**
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**53.268.304.715,23**	**54.071.438.199,07**
ASET TETAP	**5.3.c**		
Tanah	5.3.a.1)	422.654.124.475,00	422.654.124.475,00
Peralatan dan Mesin	5.3.a.2)	344.550.939.793,43	332.270.509.070,43
Gedung dan Bangunan	5.3.a.3)	749.206.750.883,30	724.089.386.626,32
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.a.4)	576.754.869.299,78	555.752.670.791,41
Aset Tetap Lainnya	5.3.a.5)	11.198.181.208,73	10.400.762.083,73
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.a.6)	10.050.094.318,20	13.775.496.815,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.a.7)	(859.722.692.173,00)	(813.030.124.462,00)
Jumlah Aset Tetap		**1.254.692.267.805,44**	**1.245.912.825.399,89**
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		-	-
ASET LAINNYA	**5.3.d**		
Tagihan Jangka Panjang		23.349.000,00	23.349.000,00
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	*5.3.d.1)*	*23.349.000,00*	*23.349.000,00*
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.d.2)	21.995.412.000,00	21.995.412.000,00
Aset Tak Berwujud	5.3.d.3)	2.347.478.363,00	5.364.309.956,00
Aset Lain Lain	5.3.d.4)	67.967.532.685,31	66.514.271.911,31
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.d.5)	(2.078.990.197,00)	(4.600.404.117,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.d.6)	(49.762.123.399,81)	(49.241.141.208,81)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.d.7)	3.627.848.000,00	679.525.000,00
Jumlah Aset Lainnya		**44.120.506.451,50**	**40.735.322.541,50**
PROPERTI INVESTASI	**5.3.e**		
Properti Investasi Bangunan Gedung		2.547.218.745,00	2.547.218.745,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung		(1.024.790.231,00)	(980.874.469,00)
Jumlah Properti nvsetasi		**1.522.428.514,00**	**1.566.344.276,00**
JUMLAH ASET		**1.423.682.153.096,60**	**1.381.487.623.684,14**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5.3.f**		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.f.1)	-	0,00
Utang Bunga		-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek		-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.f.2)	423.118.792,08	489.447.350,00
Utang Belanja	5.3.f.3)	18.504.832.787,01	12.595.599.281,66
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.f.4)	2.308.461.000,00	1.463.588.000,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**21.236.412.579,09**	**14.548.634.631,66**

URAIAN	Ref.	2025	2024
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri		-	
Utang Jangka Panjang Lainnya		-	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban		**21.236.412.579,09**	**14.548.634.631,66**
EKUITAS	**5.3.g**		
Ekuitas	5.3.g	1.402.445.740.517,51	1.366.938.989.052,48
Jumlah Ekuitas		**1.402.445.740.517,51**	**1.366.938.989.052,48**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**1.423.682.153.096,60**	**1.381.487.623.684,14**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS

VI. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Padang Panjang untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

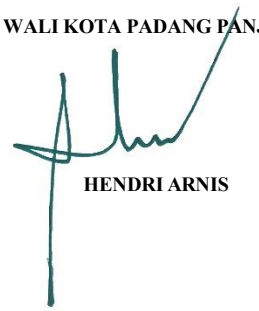
(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Ref	2025	2024
I.	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	**5.5.a**		
	a. Arus Masuk Kas			
	Penerimaan Pajak Daerah		17.367.910.078,00	9.688.742.631,00
	Penerimaan Retribusi Daerah		63.852.882.614,00	64.086.171.794,00
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		7.991.779.256,00	7.922.888.824,00
	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah`		10.596.351.559,76	12.427.485.057,88
	Penerimaan Dana Transfer Umum-DBH		8.752.290.000,00	9.855.955.000,00
	Penerimaan Dana Alokasi Umum		386.609.800.112,00	375.917.415.308,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik		5.115.348.945,00	15.722.870.984,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik		35.499.822.722,00	35.820.566.605,00
	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
	Penerimaan Dana Insentif Daerah		-	21.772.057.000,00
	Penerimaan Bagi Hasil		23.131.134.427,00	28.546.475.247,00
	Penerimaan Bantuan Keuangan		1.410.000.000,00	1.135.373.000,00
	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		5.644.444,00	60.387.584,00
	Penerimaan Dana Darurat		4.000.000.000,00	-
	Penerimaan Hibah		50.000.000,00	
	Penerimaan Lainnya		-	-
	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas		**564.382.964.157,76**	**582.956.389.034,88**
	b. Arus Keluar Kas			
	Pembayaran Pegawai		278.088.171.575,00	311.212.828.135,00
	Pembayaran Barang dan Jasa		183.618.653.458,52	214.426.378.424,14
	Pembayaran Bunga		-	-
	Pembayaran Subsidi		60.700.008,00	4.456.800,00
	Pembayaran Hibah		7.100.765.108,73	17.174.049.136,00
	Pembayaran Bantuan Sosial		7.044.965.000,00	10.415.226.000,00
	Pembayaran Bantuan Keuangan		-	-
	Pembayaran Tak Terduga		631.263.784,00	769.005.193,00
	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		-	-
	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		-	-
	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas		**476.544.518.934,25**	**554.001.943.688,14**
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**87.838.445.223,51**	**28.954.445.346,74**
II.	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**	**5.5.b**		
	a. Arus Masuk Kas			
	Pencairan Dana Cadangan		-	-
	Penjualan atas Tanah		-	-
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		615.926.600,00	228.578.500,00
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		1.200.000,00	17.700.000,00
	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
	Penjualan Aset Tetap		-	-
	Penjualan Aset Lainnya		-	-
	Penerimaan dari Divestasi		-	1.386.758.189,00
	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas		**617.126.600,00**	**1.633.036.689,00**
	b. Arus Keluar Kas			
	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
	Perolehan Tanah		-	9.421.400,00
	Perolehan Peralatan dan Mesin		14.811.794.052,00	14.731.124.143,00
	Perolehan Gedung dan Bangunan		20.311.104.559,19	39.342.022.232,00
	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		18.910.651.808,37	16.570.946.513,46
	Perolehan Aset Tetap Lainnya		911.322.756,00	1.004.874.127,00
	Perolehan Aset Lainnya		164.835.000,00	93.500.000,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	1.000.000.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan Investasi Non Permanen		-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas		**55.109.708.175,56**	**72.751.888.415,46**
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(54.492.581.575,56)**	**(71.118.851.726,46)**
III.	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**	**5.5.c**		
	a. Arus Masuk Kas			
	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		-	-
	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		-	-

No.	URAIAN	Ref	2025	2024
	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		-	-
	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		-	-
	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
	b. Arus Keluar Kas			
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		-	-
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
IV.	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**	**5.5.d**		
	a. Arus Masuk Kas			
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		6.765.725.172,00	19.000.124.546,00
	Penerimaan setoran UYHD dari Bendahara Penerimaan		74.200,00	11.050.950,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		**6.765.799.372,00**	**19.011.175.496,00**
	b. Arus Keluar Kas			
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		6.765.725.172,00	19.000.124.546,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		**6.765.725.172,00**	**19.000.124.546,00**
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**74.200,00**	**11.050.950,00**
V.	**Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode**	**5.5.e**	**33.345.937.847,95**	**(42.153.355.429,72)**
VI.	**Saldo Awal Kas BUD:**	**5.5.f**	**6.451.331.469,94**	**48.604.761.099,66**
	Kas di BUD		5.231.959.422,06	41.753.245.474,44
	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
	Kas Lainnya			
	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
	Kas di BLUD		333.726.527,88	5.712.173.357,22
	Kas di BOSP		252.273.869,00	345.142.085,00
	Kas Dana BOK Puskesmas		633.371.651,00	794.200.183,00
VII.	**Saldo Akhir Kas BUD (V+VI):**		**39.797.269.317,89**	**6.451.405.669,94**
	Kas di BUD		38.053.573.214,01	5.231.959.422,06
	Kas di Bendahara Pengeluaran		38.500.000,00	-
	Kas Lainnya		39.313.100,00	
	Kas di Bendahara Penerimaan			74.200,00
	Kas di BLUD		1.046.925.015,88	333.726.527,88
	Kas di BOSP		216.971.137,00	252.273.869,00
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP			-
	Kas Dana BOK Puskesmas		401.986.851,00	633.371.651,00
VIII.	**Kas Lain di Bendahara Pengeluaran**		-	-
	SALDO AKHIR KAS (VII+VIII)	**5.5.g**	**39.797.269.317,89**	**6.451.405.669,94**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS

KATA PENGANTAR

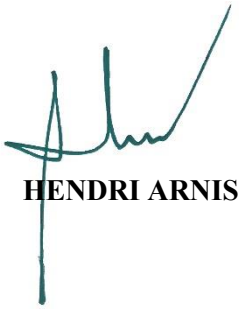
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas antara lain menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik *(good governance)* dan untuk kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat.

Padang Panjang, 22 Mei 2026

WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS

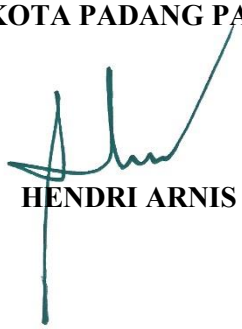
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang, yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang Panjang, 22 Mei 2026

WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR LAMPIRAN x
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1
LAPORAN PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH 3
NERACA 4
LAPORAN OPERASIONAL 7
LAPORAN ARUS KAS 9
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 11
BAB I PENDAHULUAN 12
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 12
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 13
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 14
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 16
2.1 Ekonomi Makro 16
2.2 Kebijakan Keuangan Daerah 23
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 34
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 40
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 40
3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan 41
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 42
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 42
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 43
4.3 Dasar Pengakuan dan Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 44
4.4 Kesesuaian Penerapan Kebijakan Akuntansi Dengan SAP 53
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 54
5.1 Laporan Realisasi Anggaran 54
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 79
5.3 Neraca 81
5.4 Laporan Operasional 156
5.5 Laporan Arus Kas 186
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas 190
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 193
BAB VII PENUTUP 196

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. 1 : Capaian Kinerja Makro Kota Padang Panjang Tahun 2024 16
Tabel 2. 2 : Perbandingan LPE Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, ...20
Tabel 2. 3 : Perbandingan PDRB per Kapita Kota Padang Panjang dan 21
Tabel 2. 4 : Perkembangan Indeks Gini Kota Padang Panjang dan.....22
Tabel 2. 5 : Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 26
Tabel 2. 6 : Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025.....28
Tabel 2. 7 : Proyeksi Rincian Perubahan Anggaran dan Pergeseran Anggaran Tahun 2025 31
Tabel 2. 8 : Capaian Mandatory Spending Bidang Kesehatan Tahun 2025 32
Tabel 2. 9 : Capaian Mandatory Spending Urusan Pendidikan Tahun 2025 33
Tabel 2.10 : Capaian Mandatory Spending Urusan Infrastruktur Tahun 2025.....33
Tabel 2.11 : Capaian Mandatory Spending Bidang Pengawasan Tahun 2025 34
Tabel 2.12 : Capaian Mandatory Spending Bidang Pengembangan sumber daya Manusia.....34
Tabel 2.13 : Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025.....35
Tabel 2.14 : Prioritas Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun 2025 36
Tabel 2.15 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 38
Tabel 2.16 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 38
Tabel 2.17 : Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2025 39
Tabel 3. 1 : Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA Per SKPD Tahun 2025.....40
Tabel 3. 2 : Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA Per SKPD Tahun 2025.....40
Tabel 5.1 : Daftar Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024 55
Tabel 5.2 : Target dan Realisasi Retribusi Daerah per Objek Tahun 2025.....56
Tabel 5.3 : Rincian Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025.....56
Tabel 5.4 : Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 57
Tabel 5. 5 : Target dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 58
Tabel 5. 6 : Daftar Realisasi Laba Dari Penyertaan Modal Tahun 2025 dan 2024.....59
Tabel 5.7 : Daftar Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024.....59
Tabel 5.8 : Daftar Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024.....60
Tabel 5.9 : Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2025 60
Tabel 5.10 : Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025 61
Tabel 5.11 : Rincian Anggaran dan Realisasi DAU Tahun 2025 61
Tabel 5.12 : Rincian Realisasi DAK Fisik Tahun 2025 dan 2024.....62
Tabel 5.13 : Rincian DAK non Fisik Tahun 2025 dan Tahun 2024 62
Tabel 5.14 : Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan 2024 63

Tabel 5.15 : Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 dan 2023 64
Tabel 5.16 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024.....65
Tabel 5.17 : Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024 65
Tabel 5.18 : Target dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024 66
Tabel 5.19 : Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024.....67
Tabel 5.20 : Target dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024.....68
Tabel 5.21 : Daftar Realisasi Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 69
Tabel 5. 22 : Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024.....69
Tabel 5.23 : Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024 71
Tabel 5.24 : Daftar Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024.....71
Tabel 5.25 : Daftar Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024.....73
Tabel 5. 26 : Daftar Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 202473
Tabel 5. 27 : Daftar Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024.....74
Tabel 5.28 : Rincian Pembiayaan Netto Tahun 2025 dan 2024.....77
Tabel 5. 29 : Daftar Saldo Kas Dana BOK Puskesmas.....85
Tabel 5.30 : Daftar Piutang Pajak Tahun 2025 dan 2024 88
Tabel 5. 31 : Rincian Piutang Pajak Tahun 2025.....88
Tabel 5. 32 : Rincian Piutang Restoran.....88
Tabel 5.33 : Rincian Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2025 90
Tabel 5.34 : Rincian Saldo Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2025 90
Tabel 5.35 : Rincian Piutang Retribusi Tahun 2025 92
Tabel 5.36 : Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 95
Tabel 5.37 : Rincian Kualitas Piutang Pajak Tahun 2025 97
Tabel 5.38 : Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih.....98
Tabel 5.39 : Rincian Kualitas Piutang Retribusi Tahun 2025.....99
Tabel 5. 40 : Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih 99
Tabel 5.41 : Rincian Kualitas Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 100
Tabel 5. 42 : Daftar Kualitas Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 100
Tabel 5. 43 : Daftar Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 100
Tabel 5. 44 : Rincian Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025.....101
Tabel 5. 45 : Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 102
Tabel 5.46 : Rincian Persediaan Menurut Jenis 103
Tabel 5.47 : Komposisi Penyertaan Modal pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi 109
Tabel 5.48 : Penyertaan Modal pada PDAM Tahun 2025 dan 2024 109
Tabel 5.49 : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya 110
Tabel 5. 50 : Pendapatan Deviden dari Bank Nagari 112
Tabel 5.51 : Rincian Aset Tetap.....114

Tabel 5. 52 : Daftar Belanja Modal Peralatan dan Mesin 115
Tabel 5. 53 : Belanja Alat – alat Besar 116
Tabel 5. 54 : Rincian Belanja Modal Alat Angkutan.....116
Tabel 5. 55 : Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur.....116
Tabel 5.56 : Rincian Belanja Modal Alat Pertanian 117
Tabel 5. 57 : Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga.....117
Tabel 5. 58 : Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi 117
Tabel 5. 59 : Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan.....117
Tabel 5.60 : Belanja Modal Alat Laboratorium.....118
Tabel 5.61 : Belanja Modal Komputer.....118
Tabel 5. 62 : Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 118
Tabel 5.63 : Mutasi Tambah 118
Tabel 5.64 : Mutasi Kurang 125
Tabel 5.65 : Daftar Aset Yang Dipinjam Pakai Pihak Lain.....133
Tabel 5. 66 : Daftar Belanja Modal Gedung dan Bangunan 133
Tabel 5.67 : Daftar Belanja Modal Bangunan Gedung.....134
Tabel 5.68 : Mutasi Koreksi Tambah.....134
Tabel 5.69 : Mutasi Koreksi Kurang.....135
Tabel 5.70 : Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.....136
Tabel 5.71 : Belanja Modal Jalan dan Jembatan.....137
Tabel 5.72 : Belanja Modal Bangunan Air 137
Tabel 5.73 : Belanja Modal Instalasi 137
Tabel 5.74 : Belanja Modal Jaringan 137
Tabel 5.75 : Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 138
Tabel 5.76 : Modal Buku perpustakaan 138
Tabel 5.77 : Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 140
Tabel 5. 78 : Tuntutan Ganti Rugi 142
Tabel 5. 79 : Belanja Modal Aset Tak Berwujud.....143
Tabel 5. 80 : Daftar Modal Aset Tak Berwujud 144
Tabel 5. 81 : Aset Tak Berwujud 146
Tabel 5. 82 : Tabel : Rincian Akumulasi Amortisasi Tak Berwujud.....146
Tabel 5.83 : Rincian Aset – Aset Lain 148
Tabel 5.84 : Rincian Penyusutan Aset Lainnya 148
Tabel 5. 85 : Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 150
Tabel 5.86 : Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025.....150
Tabel 5.87 : Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024.....157
Tabel 5.88 : Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 157

Tabel 5.89 : Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah-LO dan LRA Tahun 2025 158
Tabel 5.90 : Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 160
Tabel 5. 91 : Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan LRA Tahun 2025 160
Tabel 5.92 : Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024 163
Tabel 5.93 : Perbandingan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dan LRA Tahun 163
Tabel 5.94 : Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan 2024 165
Tabel 5.95 : Perbandingan Pendapatan Transfer-LO dan LRA Tahun 2025 166
Tabel 5.96 : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO 166
Tabel 5.97 : Dana Alokasi Khusus-Fisik Tahun 2025 dan 2024 167
Tabel 5.98 : Dana Alokasi Khusus-Non Fisik Tahun 2025 dan 2024 168
Tabel 5.99 : Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2025 dan 2024.....169
Tabel 5.100 : Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO dan LRA Tahun 2025.....169
Tabel 5.101 : Rincian Beban Tahun 2025 dan 2024.....172
Tabel 5.102 : Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 172
Tabel 5.103 : Perbandingan Saldo Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2025 173
Tabel 5.104 : Rincian Beban Barang Tahun 2025 dan 2024 174
Tabel 5.105 : Perbandingan Saldo Beban Barang - Belanja Barang Tahun 2025 174
Tabel 5.106: Rincian Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024 175
Tabel 5.107 : Perbandingan Beban Jasa - Belanja Jasa Tahun 2025 176
Tabel 5.108 : Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 177
Tabel 5.109 : Perbandingan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2025.....177
Tabel 5.110 : Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024.....178
Tabel 5.111 : Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas dan 178
Tabel 5.112 : Rincian Beban Uang dan/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 178
Tabel 5.113 : Perbandingan Beban Uang dan/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masayarakat dan Belanja Tahun 2025 179
Tabel 5.114 : Perbandingan Beban Barang dan Jasa BOSP 179
Tabel 5.115 : Perbandingan Beban Barang dan Jasa BOSP dengan.....180
Tabel 5.116 : Rincian Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 181
Tabel 5.117 : Perbandingan Belanja Hibah dan Beban Hibah Tahun 2025.....181
Tabel 5.118 : Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024.....182
Tabel 5. 119 : Perbandingan Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial 182
Tabel 5.120 : Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 183
Tabel 5.121 : Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024.....183
Tabel 5.122 : Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 186
Tabel 5.123 : Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024.....187

Tabel 5.124 : Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024 188
Tabel 5. 125: Penerimaan dan Pengeluaran PFK Tahun 2025.....188
Tabel 5. 126: Penurunan Bersih Kas Tahun 2025 dan 2024.....189
Tabel 5. 127 : Wilayah Kecamatan, Kelurahan, dan Luas Wilayah 193
Tabel 5. 128 : Rekapitulasi Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.....194

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar. 1 : IPM Kota Padang Panjang Tahun 2021-2025.....17
Gambar. 2 : Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Padang Panjang Tahun 2021-2025 17
Gambar. 3 : Perkembangan Tingkat Pngangguran Terbuka Kota Padang Panjang.....18
Gambar. 4 : Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kota Padang PanjangProvinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....19
Gambar. 5 : Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita dan PDRB ADHB per Kapita 21
Gambar. 6 : Perbandingan Indeks Gini Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.....23
Gambar. 7 : Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2025 37
Gambar. 8 : Perbandingan Penerimaan Daerah Tahun 2025 dan 2024 37
Gambar. 9 : Perbandingan Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga 39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Tabel Masa Manfaat Aset Tetap

Lampiran 2 : Daftar Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025

Lampiran 3 : Rincian Belanja Pegawai Tahun 2025

Lampiran 4 : Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

Lampiran 5 : Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga Tahun 2025

Lampiran 6 : Daftar Belanja Hibah Tahun 2025

Lampiran 7 : Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025

Lampiran 8 : Daftar Saldo Rekening Dana BOS per 31 Desember 2025

Lampiran 9 : Rincian Piutang Pajak Restoran Tahun 2014 dan 2015

Lampiran 10 : Rincian Piutang Pajak Reklame

Lampiran 11 : Rincian Piutang Pajak Air Tanah

Lampiran 12 : Rincian Piutang Penjualan Produksi Usaha Daerah

Lampiran 13 : Daftar Persediaan Tahun 2025

Lampiran 14 : Laporan Keuangan PDAM Tahun 2025

Lampiran 15 : Rincian Pajak Reklame Diterima Dimuka

Lampiran 16 : Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2025

Lampiran 17 : Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

Lampiran 17 a : Daftar Persediaan Bantuan Masyarakat

Lampiran 18 : Daftar Kapitalisir Aset Tetap

Lampiran 18.a : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Gabungan

Lampiran 18.b : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Sekretariat DPRD

Lampiran 18.c : Daftar Kapitalisir Aset Tetap BKPSDM

Lampiran 18.d : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Pangan dan Pertanian

Lampiran 18.e : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Kecamatan Padang Panjang Barat

Lampiran 18.f : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Perdagkop UKM

Lampiran 18.g : Daftar Kapitalisir Aset Tetap BPBD Kesbangpol

Lampiran 18.h : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Sekretariat Daerah

Lampiran 18.i : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Bappeda

Lampiran 18.j : Daftar Kapitalisir Aset Tetap BPKD

Lampiran 18.k : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Inspektorat Daerah

Lampiran 18.l : Daftar Kapitalisir Aset Tetap DPMPTSP

Lampiran 18.m : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Komisnfo

Lampiran 18.n : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Perhubungan

Lampiran 18.o : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran 18.p : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Sosial P2KBP3A
Lampiran 18.q : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Satpol PP Damkar
Lampiran 18.r : Daftar Kapitalisir Aset Dinas Perkim LH
Lampiran 18.s : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas PUPR
Lampiran 18.t : Daftar Kapitalisir Aset Tetap RSUD
Lampiran 18.u : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Kesehatan
Lampiran 18.v : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Lampiran 18.w : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Kecamatan Padang Panjang Timur
Lampiran 18.x : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Porapar
Lampiran 18.y : Daftar Kapitalisir Aset Tetap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Padang Panjang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP Basis Akrual.

Pada dasarnya LKPD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders,* antara lain masyarakat, DPRD, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa dan Pemerintah Pusat mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Padang Panjang serta hasil yang dicapai;
d. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
e. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Padang Panjang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pemungutan pajak dan tunjangan; dan
f. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Apnggaran 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

d. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);

g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

n. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

o. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025;

p. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

q. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 64 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.

r. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

s. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan ini, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca dan juga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan maka dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan dengan tujuan:

a. Laporan Keuangan mudah dipahami;
b. Menghindari kesalahpahaman;
c. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting;
d. Mampu menjawab sebagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas;dan
e. Pengungkapan paripurna (*full disclosure*).

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi makro
- 2.2 Kebijakan keuangan daerah
- 2.3 Pencapaian target kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
- 3.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Dasar pengakuan dan pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Kesesuaian kebijakan akuntansi dengan PSAP

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan akun-akun Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan akun-akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Penjelasan akun-akun Neraca
- 5.4 Penjelasan akun-akun Laporan Operasional
- 5.5 Penjelasan akun-akun Laporan Arus Kas
- 5.6 Penjelasan akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

BAB VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Kondisi ekonomi makro digambarkan dalam bentuk capaian kinerja makro yang menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Kota Padang Panjang, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Kota Padang Panjang. Capaian kinerja makro Kota Padang Panjang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 :Capaian Kinerja Makro Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	79,02	80,27	80,60	100,41
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,24	4,64	5,31	87,38
3	Tingkat Pengangguran	%	4,60	4,80	4,94	97,17
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,20	5,20	4,52	86,92
5	PDRB ADHK per Kapita	Juta	50,87	50,87	50,62	99,51
6	PDRB ADHB per Kapita	Juta	75,58	77,31	80,01	103,49
7	Gini Rasio	Indeks	0,292	0,271	0,266	101,88

Penjelasan atas capaian kinerja makro Kota Padang Panjang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

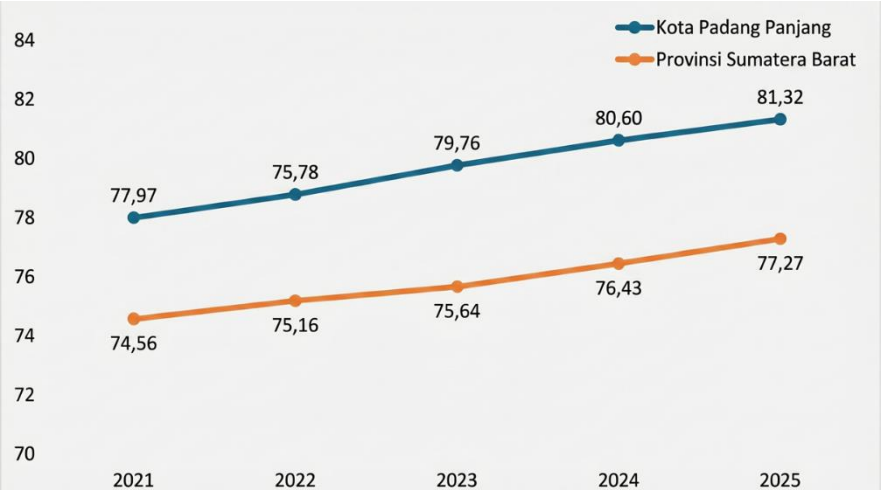
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pendidikan, dan standar hidup layak. Semakin tinggi nilai IPM, maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Perkembangan IPM Kota Padang Panjang selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2021, IPM tercatat sebesar 77,97, kemudian meningkat menjadi 78,78 pada tahun 2022 dan kembali naik menjadi 79,76 pada tahun 2023. Peningkatan berlanjut pada tahun 2024 menjadi 80,60, hingga mencapai 81,32 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang konsisten dalam kualitas pembangunan manusia di Kota Padang Panjang.

Jika dibandingkan dengan tingkat provinsi, IPM Kota Padang Panjang pada tahun 2025 berada pada angka 81,32 jauh di atas IPM Provinsi Sumatera Barat sebesar 77,27. Meskipun tren IPM Provinsi Sumatera Barat menunjukkan konsistensi kearah pembangunan manusia yang lebih baik, namun capaian pembangunan manusia di Kota Padang Panjang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata capaian provinsi. Perkembangan IPM Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat melalui gambar berikut:

:

Gambar. 1: IPM Kota Padang Panjang Tahun 2021-2025



Pada dasarnya terdapat tiga dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu:

1) Dimensi pertama pembentuk IPM adalah umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. UHH saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir.
2) Dimensi kedua adalah pengetahuan yang diukur dengan pendidikan, dalam hal ini indikator yang digunakan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. LHS didefinisikan sebagai rata-rata (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan penduduk sejak umur tertentu.
3) Dimensi ketiga adalah standar hidup layak yang diukur dengan indikator per kapita yang disesuaikan. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

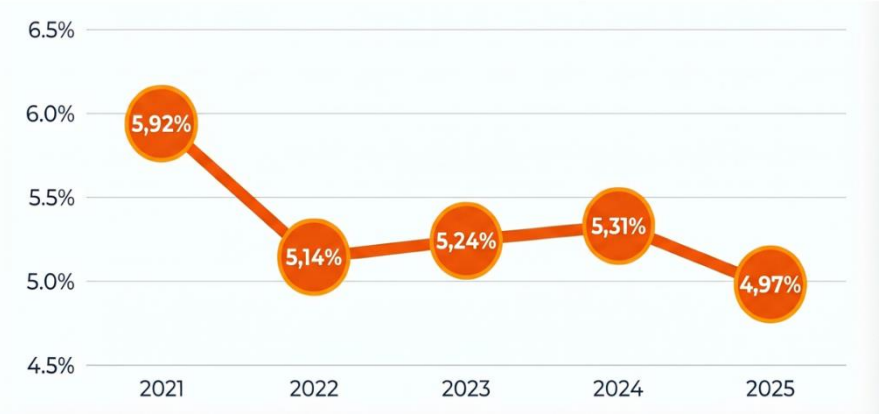
b. Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kota Padang Panjang pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,97 persen, menurun dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 5,31 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya.

Selama periode lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan Kota Padang Panjang menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan sebesar 5,92 persen, kemudian menurun cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 5,14 persen. Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi sedikit peningkatan masing-masing menjadi 5,24 persen dan 5,31 persen.

Penurunan kembali pada tahun 2025 menjadi 4,97 persen, yang menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan mulai menunjukkan hasil yang positif. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami kenaikan pada periode 2023–2024, tren tingkat kemiskinan dalam jangka menengah masih menunjukkan arah penurunan sebagaimana yang disajikan dalam gambar berikut:

Gambar. 2 : Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Padang Panjang Tahun 2021-2025



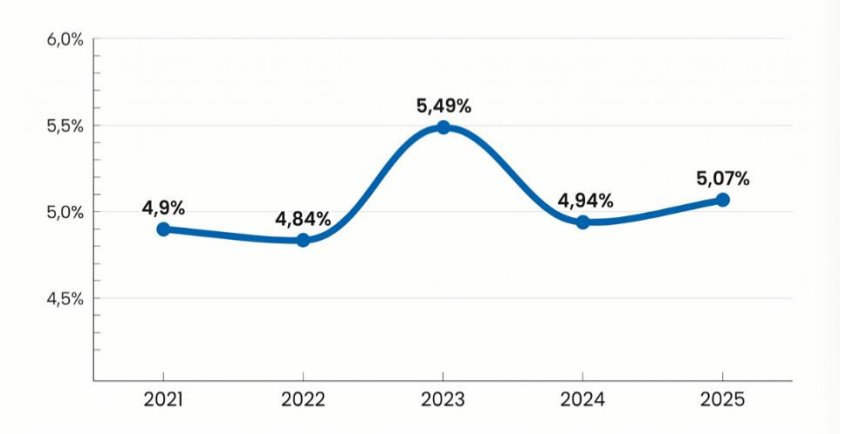
c. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja, yang juga merupakan salah satu indikator makroekonomi paling kritikal dalam mengukur kesehatan fundamental dan daya serap pasar tenaga kerja di suatu daerah. Angkatan kerja itu sendiri adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi seperti penduduk bekerja, atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Padang Panjang selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang dinamis dengan angka pengangguran berada pada kisaran 4,8 persen hingga 5,5 persen. Pada tahun 2022, TPT Kota Padang Panjang mencapai performa penyerapan tenaga kerja terbaik dengan titik terendah yaitu sebesar 4,84 persen. Namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 5,49 persen, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kenaikan ini menunjukkan adanya tekanan pada pasar tenaga kerja pada periode tersebut.

Di tahun 2024, lonjakan angka pengangguran di Kota Padang Panjang tersebut dapat terkoreksi secara efektif ketika angka pengangguran berhasil ditekan kembali ke posisi 4,94 persen. Meskipun di tahun 2025 TPT meningkat tipis ke angka 5,07 persen, namun fluktuasi angka ini masih berada pada tingkat yang relatif terkendali dan menunjukkan kondisi pasar kerja yang cukup stabil dan mencerminkan terjadinya stagnasi momentum pemulihan pasca-pandemi. Gambaran perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Padang Panjang dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar. 3 :
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang, Tahun 2021-2025

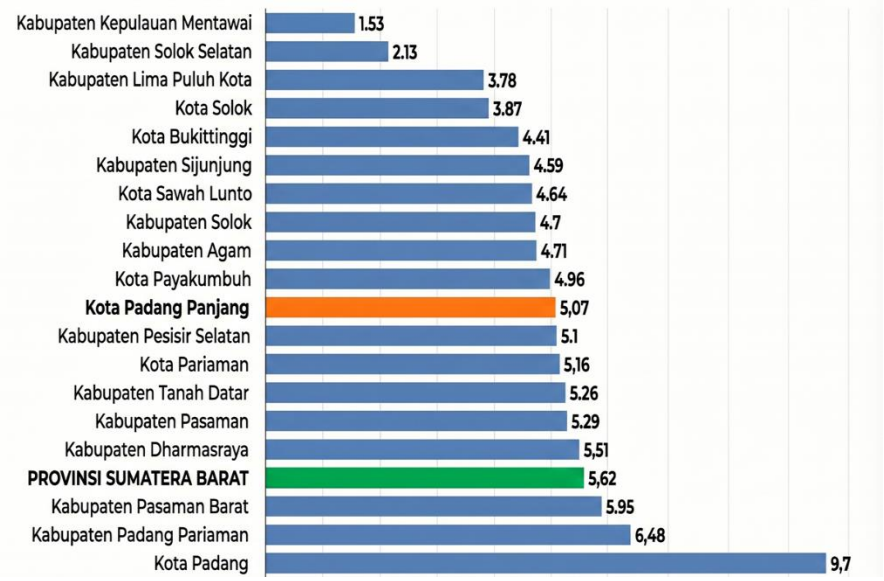


Dalam konteks regional, di tahun 2025 TPT Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 5,62 persen. Dengan pencapaian TPT Kota Padang Panjang di angka 5,07 persen pada tahun 2025, menunjukkan bahwa TPT Kota Padang Panjang masih berada di bawah rata-rata provinsi. Secara relatif, hal ini menunjukkan bahwa daya tahan ekonomi kota terhadap tekanan pengangguran masih lebih baik dibandingkan agregat provinsi secara keseluruhan.

Jika dilihat dari TPT Tahun 2025 kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, Kota Padang Panjang berada di kategori menengah atas. Ketimpangan angka pengangguran terlihat sangat mencolok ketika dibandingkan dengan kabupaten Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan yang memiliki TPT jauh lebih rendah, yaitu sebesar 1, 53 persen dan 2,13 persen. Namun TPT yang sangat rendah di wilayah kabupaten tersebut cenderung merefleksikan struktur ekonomi berbasis pertanian subsistem yang seringkali menutupi isu *underemployment* (setengah pengangguran). Sebaliknya, angka 5,07% di Padang Panjang adalah fenomena pengangguran terbuka yang khas bagi pusat layanan urban dengan tuntutan kualifikasi tenaga kerja yang lebih formal dan kompleks.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi terutama pada tahun 2023, kondisi ketenagakerjaan di Kota Padang Panjang tetap menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja di Kota Padang Panjang masih mampu menyerap tenaga kerja dengan cukup baik. Perbandingan TPT Kota Padang Panjang dengan TPT Provinsi dan Kabupaten/Kota lain dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar. 4 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



d. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang menunjukan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu, yang ditunjukan oleh nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dari tahun ke tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang pada tahun 2024 mencapai 4,52%, sedikit menurun sebesar 0,32 poin dari tahun 2023 yang mencapai 4,84%. Jika dibandingkan dengan perkembangan ekonomi di tingkat provinsi dan nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang masih lebih baik daripada rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai 4,36%, dengan selisih sebesar 0,16 poin. Namun, jika dibandingkan dengan nasional yang mencapai 5,03%, angka pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang masih lebih rendah sebesar 0,51 poin. Dalam peringkat kabupaten/kota di Sumatera Barat, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang menempati posisi ke-5 tertinggi di provinsi, sejajar dengan Kota Bukittinggi yang juga memiliki angka pertumbuhan sebesar 4,52%. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 : Perbandingan LPE Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025

Tahun	Padang Panjang	Sumatera Barat
2021	3,46	3,29
2022	4,39	4,36
2023	4,84	4,62
2024	4,52	4,36
2025	3,61	3,37

Turunnya LPE Kota Padang Panjang di tahun 2025 merupakan akibat struktur ekonomi Kota Padang Panjang yang belum bertransformasi secara mendasar. Selain itu terjadinya bencana alam yang menyebabkan terputusnya akses jalan nasional yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi, juga mempengaruhi rendahnya hilirisasi pertanian, produktivitas sektor jasa yang moderat, serta ketergantungan pada sektor basis yang belum kuat, sejalan dengan tren perlambatan ekonomi Sumatera Barat.

e. Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata pendapatan penduduk di suatu wilayah, yang diperoleh dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat serta membandingkan kinerja ekonomi antar daerah. Perhitungan PDRB per kapita dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

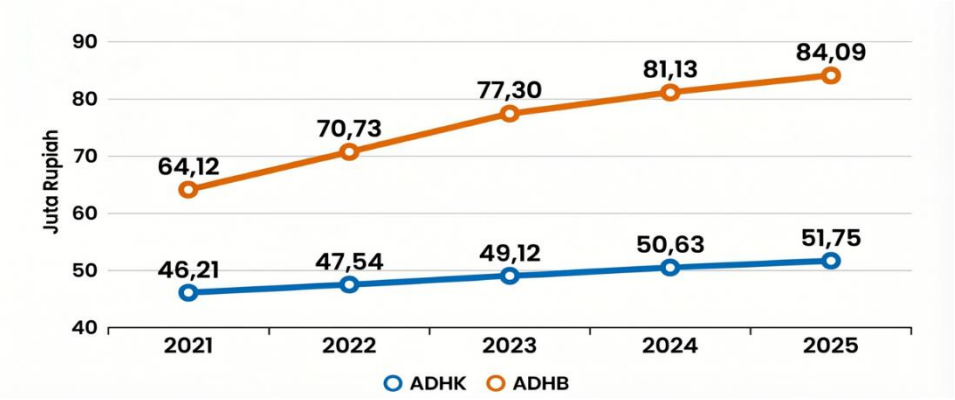
PDRB per kapita Kota Padang Panjang pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB per kapita ADHK pada tahun 2025 tercatat sebesar 51,75 juta rupiah, meningkat dari 50,63 juta rupiah pada tahun 2024. Sejalan dengan itu, PDRB per kapita ADHB juga mengalami peningkatan dari 81,13 juta rupiah pada tahun 2024 menjadi 84,09 juta rupiah pada tahun 2025.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, PDRB per kapita Kota Padang Panjang baik atas dasar harga konstan (ADHK) maupun atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan tren yang terus meningkat. PDRB per kapita ADHK meningkat secara bertahap dari 46,21 juta rupiah pada tahun 2021 menjadi 51,75 juta rupiah pada tahun 2025. Sementara itu, PDRB per kapita ADHB juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 64,12 juta rupiah pada tahun 2021 menjadi 84,09 juta rupiah pada tahun 2025.

Peningkatan PDRB per kapita ADHB yang lebih tinggi dibandingkan ADHK menunjukkan adanya pengaruh kenaikan harga (inflasi) selain pertumbuhan ekonomi riil. Meskipun demikian, kenaikan PDRB per kapita ADHK mengindikasikan bahwa secara riil pendapatan masyarakat Kota Padang Panjang juga mengalami peningkatan.

Secara umum, kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang dalam lima tahun terakhir. Perkembangan PDRB per kapita Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar. 5 : Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita dan PDRB ADHB per Kapita Kota Padang Panjang Tahun 2021-2025



PDRB per Kapita Kota Padang Panjang tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan PDRB per Kapita Provinsi Sumatera Barat, dimana PDRB ADHB per Kapita Provinsi Sumatera Barat mencapai Rp.59,55 juta.

Data perkembangan PDRB per Kapita Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.3 : Perbandingan PDRB per Kapita Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 (ribu)

Tahun	Padang Panjang		Sumatera Barat	
	PDRB ADHK per Kapita	PDRB ADHB per Kapita	PDRB ADHK per Kapita	PDRB ADHB per Kapita
2021	46.214	64.124	31.264	45.218
2022	47.543	70.732	32.166	50.263
2023	49.121	76.314	33.188	54.326
2024	50.627	80.012	34.167	57.047
2025	51.749	84.091		59.550

f. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Indeks gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran masyarakat. Nilai Gini Ratio berada pada rentang 0 hingga 1, di mana secara teoritis, angka yang mendekati 0 mengindikasikan distribusi pengeluaran yang lebih inklusif dan merata, sementara angka yang mendekati 1 mencerminkan ketimpangan struktural yang tajam.

Perkembangan Gini Ratio Kota Padang Panjang selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang relatif menurun dengan sedikit fluktuasi. Dari tahun 2021

hingga 2024 terjadi penurunan Gini Ratio yang konsisten. Pada tahun 2021, Gini Ratio tercatat sebesar 0,306, kemudian menurun menjadi 0,296 pada tahun 2022 dan kembali turun cukup signifikan menjadi 0,273 pada tahun 2023. Tren penurunan berlanjut hingga mencapai 0,266 pada tahun 2024 yang merupakan titik terendah dalam periode tersebut. Pencapaian ini mengindikasikan adanya keberhasilan dalam program jaring pengaman sosial dan penguatan ekonomi akar rumput.

Namun pada tahun 2025, gini ratio Kota Padang Panjang mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,275. Meskipun demikian, secara umum kondisi ketimpangan di Kota Padang Panjang masih lebih baik dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran masyarakat cenderung semakin merata dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan gini ratio atau indeks gini di Kota Padang Panjang dapat dilihat melalui gambar berikut:

Tabel 2. 4 : Perkembangan Indeks Gini Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025



Dalam skala regional, Gini Ratio Kota Padang Panjang pada tahun 2025 yang tercatat di angka 0,275 masih lebih rendah dibandingkan Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat yang berada di angka 0,280. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan di Kota Padang Panjang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi.

Dibandingkan dengan angka gini ratio kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tahun 2025, Kota Padang Panjang berada pada kelompok menengah dengan tingkat ketimpangan yang relatif moderat. Nilai Gini Ratio Kota Padang Panjang lebih rendah dibandingkan beberapa daerah dengan ketimpangan tinggi seperti Kota Padang (0,348), Kota Pariaman (0,302), dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (0,291). Namun demikian, gini ratio Kota Padang Panjang masih lebih tinggi dibandingkan daerah dengan ketimpangan yang lebih rendah seperti Kabupaten Pasaman (0,207), Kabupaten Lima Puluh Kota (0,218) dan Kabupaten Tanah Datar (0,218).

Secara keseluruhan, perkembangan Gini Ratio Kota Padang Panjang menunjukkan kondisi ketimpangan yang relatif terkendali. Meskipun terdapat sedikit peningkatan pada tahun 2025, tingkat ketimpangan masih berada di bawah rata-rata provinsi dan berada pada kategori sedang jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Hal ini mencerminkan bahwa distribusi pengeluaran masyarakat di Kota Padang Panjang cenderung cukup merata.

Perbandingan Indeks Gini Kota Padang Panjang dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar. 6 : Perbandingan Indeks Gini Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2025



2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 bahwa Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Secara umum komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah bersumber dari pendapatan hasil penjualan/pemanfaatan BMD, hasil kerja sama daerah, hasil jasa giro, pendapatan bunga pendapatan pengembalian serta pendapatan BLUD.

Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengamanatkan bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak serta tarif pajak dan retribusi ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah, maka Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Padang Panjang.

Untuk lebih mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah:

1) Bekerjasama dengan Bank Nagari dalam meningkatkan pengawasan pemungutan pajak melalui *system monitoring online*;
2) Melanjutkan kerjasama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi dalam pengoptimalan penerimaan pajak, dana bagi hasil pajak, retribusi daerah dan layanan perizinan melalui *Joint Analysis, Joint Audit, Secondment* sekaligus pemanfaatan data dan informasi perpajakan dan retribusi, juga pemanfaatan bersama fasilitas, sarana/prasarana, teknologi informasi dalam bidang layanan perpajakan dan retribusi;
3) Melakukan kegiatan yang inovatif untuk menumbuhkan animo dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak melalui Mobil Pajak Daerah, transfer bank dan aplikasi QRIS;
4) Melakukan peningkatan sistem informasi pada proses pemungutan pajak dan retribusi daerah;

5) Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan meningkatkan standar prosedur pelayanan;

6) Melakukan pemutakhiran data objek pajak dan wajib pajak daerah melalui pemantauan ke lapangan secara berkala, dengan *updating* peta dan dokumen lain bagi objek pajak baru dan menerbitkan NPWPD bagi wajib pajak baru yang ditetapkan;

7) Melakukan tindakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran dalam penerapan pajak daerah dan retribusi daerah;

8) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;

9) Meningkatkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (deviden) dengan menambah nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Padang Panjang pada Bank Nagari;

10) Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari kelompok dana perimbangan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam hal pemenuhan penyampaian data-data keuangan secara rutin secara tepat waktu sebagai salah satu prasyarat pencairan dana perimbangan;

2) Meningkatkan akurasi data sebagai dasar perhitungan alokasi dana perimbangan;

3) Berupaya untuk memperoleh tambahan insentif fiskal melalui peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan melakukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

4) Mengoptimalkan data pendukung perhitungan potensi bagi hasil Provinsi.

Dalam hal peningkatan pendapatan dari kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dilakukan upaya sebagai berikut:

1) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah baik yang berupa tanah, barang milik daerah dan bangunan gedung melalui perjanjian sewa ataupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga; dan
2) Mengoptimalkan pengelolaan BLUD.

Adapun gambaran umum perubahan pendapatan daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 seperti terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 5 : Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025

Rek.	Uraian	Sebelum Perubahan (Perwako No. 12 Tahun 2025) (Rp.)	Setelah Perubahan (Perwako No. 23 Tahun 2025) (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
4.	**PENDAPATAN**	**572.715.798.317,00**	**587.001.204.447,00**	**14.285.406.130,00**	**2,490**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**112.737.235.317,00**	**112.742.349.470,00**	**5.114.153,00**	**0,005**
4.1.01.	Pajak Daerah	20.372.697.142,00	20.372.697.142,00	0,00	0,000
4.1.02.	Retribusi Daerah	76.740.473.872,00	75.740.473.872,00	(1.000.000.000,00)	(1,303)
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000,00	7.991.779.256,00	(8.220.744,00)	(0,103)
4.1.04.	Lain-lain PAD Yang Sah	7.624.064.303,00	8.637.399.200,00	1.013.334.897,00	13,291
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**459.978.563.000,00**	**470.208.854.977,00**	**10.230.291.977,00**	**2,224**
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	439.787.517.000,00	438.168.129.880,00	(1.619.387.120,00)	(0,368)
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.191.046.000,00	32.040.725.097,00	11.849.679.097,00	58,688
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**4.050.000.000,00**	**4.050.000.000,00**	**-**
4.3.01.	Pendapatan Hibah	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-
4.3.02.	Dana Darurat	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-

b. Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali oleh daerah.

Kebijakan belanja daerah disusun dengan mempertimbangkan potensi pendapatan yang akan diterima daerah ditambah dengan pembiayaan *netto*. Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Memperhatikan serta mempertimbangkan terhadap perubahan pendapatan daerah, maka dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dimana memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Untuk rencana belanja operasi merupakan pengeluaran untuk kegiatan sehari hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, selama satu tahun anggaran dengan rincian:

a. Belanja pegawai yang memuat gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja pegawai BLUD;

b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD Kota Padang Panjang serta pemenuhan kebutuhan SKPD.

c. Belanja Subsidi

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang menganggarkan belanja subsidi yang digunakan untuk pelaksanaan program subsidi bunga untuk pelaku usaha mikro.

d. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat, yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Anggaran belanja hibah pada Tahun 2025 terdiri dari belanja hibah kepada Pemerintah Pusat/instansi vertikal, hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, belanja hibah dana BOSP yang merupakan penggunaan dana hibah oleh SMP dan SMA swasta di Kota Padang Panjang serta belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;

e. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif bertujuan untuk melindungi diri dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2) Belanja modal

Alokasi belanja modal di Tahun 2025 digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya serta belanja modal aset lainnya.

3) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan guna pencapaian target RPJMD dan penanganan kegiatan yang sifatnya mendesak guna penanganan dampak bencana alam/non alam dan kenaikan inflasi.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang

menganggarkan belanja bantuan keuangan khusus ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk lebih jelasnya gambaran kebijakan belanja sebelum dan setelah perubahan APBD dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini:

Tabel 2.6 : Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025

Rek.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)	%
		Perwako No. 12 Tahun 2025 (Rp)	Perwako No. 23 Tahun 2025 (Rp)		
5.	**BELANJA**	**597.715.798.317,00**	**593.452.610.116,94**	**(4.263.188.200,06)**	**(0,71)**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**526.346.276.217,06**	**522.167.052.361,94**	**(4.179.223.855,12)**	**(0,79)**
5.1.01	Belanja Pegawai	305.209.608.015,38	295.830.460.825,06	(9.379.147.190,32)	(3,07)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.139.620.024,10	210.570.338.118,88	5.430.718.094,78	2,65
5.1.04	Belanja Subsidi	268.494.099,00	134.546.684,00	(133.947.415,00)	(49,89)
5.1.05	Belanja Hibah	7.206.554.916,00	7.432.184.916,00	225.630.000,00	3,13
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.521.999.162,58	8.199.521.818,00	(322.477.344,58)	(3,78)
5.2.	**BELANJA MODAL**	**50.721.555.722,00**	**64.445.641.755,00**	**13.724.086.033,00**	**27,06**
5.2.01	B. Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	B. Modal Peralatan dan Mesin	15.786.562.385,00	17.474.130.304,00	1.687.567.919,00	10,70
5.2.03	B. Modal Gedung dan Bangunan	18.293.062.900,00	24.016.356.885,00	5.723.293.985,00	31,29
5.2.04	B. Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.988.258.864,00	21.826.707.861,00	5.838.448.997,00	36,51
5.2.05	B. Modal Aset Tetap Lainnya	653.671.573,00	933.446.705,00	279.775.132,00	42,80
5.2.06	B. Modal Aset Lainnya	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	-
5.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**20.647.966.377,94**	**6.239.916.000,00**	**(14.408.050.377,94)**	**(69,78)**
5.4.	**BELANJA TRANSFER**	**0,00**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**-**

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk dan atau berfungsi menutupi defisit dan untuk memanfaatkan surplus pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2025 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(18.548.594.330,06) dari Rp25.000.000.000,00 pada APBD awal menjadi Rp6.451.405.669,94 pada APBD Perubahan.

2) Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan. Berbeda dengan Tahun 2024 dimana terdapat

pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah Pemerintah Kota Padang Panjang pada Bank Nagari sebesar Rp1.000.000.000,00.

d. Perubahan Kebijakan *Refocusing* Anggaran

Selama Tahun 2025 APBD Kota Padang Panjang mengalami beberapa kali *refocussing* dan realokasi anggaran dari APBD murni yaitu sebanyak 2 (dua) kali pergeseran sebelum dilaksanakannya Perubahan APBD dan sebanyak 3 (tiga) kali anggaran setelah ditetapkannya APBD Perubahan guna memenuhi tuntutan kebutuhan dan untuk mengakomodir beberapa aturan dengan penjelasan sebagai berikut :

Pergeseran Anggaran Sebelum Perubahan APBD:

- **Pergeseran I (pertama),** ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 15 April 2025 seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalm pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan telah ditetapkannya petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

  Pergeseran anggaran tersebut terdiri dari penambahan anggaran pada kelompok pendapatan transfer pemerintah pusat DAK non fisik berupa bantuan operasional penyuluh pertanian sebesar Rp59.280.000,00. Pada anggaran belanja terdapat pengurangan pada kelompok belanja operasi sebesar Rp24.907.744.333,94, penambahan pada kelompok belanja modal sebesar Rp5.199.057.956,00 dan penambahan anggaran pada kelompok belanja tidak terduga sebesar Rp19.767.966.377,94.

- **Pergeseran II (kedua),** ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2025 tanggal 9 Juni 2025 dalam rangka penyesuaian program dan kegiatan guna mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030 serta penyesuaian atas penambahan pendapatan transfer pemerintah pusat

  Pergeseran anggaran berupa penambahan anggaran pada kelompok belanja operasi sebesar Rp130.000.000,00, pengurangan belanja modal sebesar Rp10.000.000,00 dan pengurangan belanja tidak terduga sebesar Rp120.000.000,00.

Pergeseran Anggaran Setelah Ditetapkannya APBD Perubahan:

- **Pergeseran I (pertama) APBD Perubahan Tahun 2025,** ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2025 tanggal 17 Oktober 2025 dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat dan kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian.

  Pergeseran anggaran berupa penambahan belanja operasional sebesar Rp50.000.000,00 yang berasal dari pengurangan belanja tidak terduga.

- **Pergeseran II (kedua) APBD Perubahan Tahun 2025,** ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2025 tanggal 26 November 2025 dalam rangka mengakomodir usulan dari beberapa SKPD.

Pergeseran anggaran berupa pergeseran antar rekening pada kelompok belanja operasi.

- **Pergeseran III (ketiga) APBD Perubahan Tahun 2025,** ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2025 tanggal 29 Desember 2025 dalam rangka menindaklanjuti alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus untuk penanggulangan bencana alam kepada Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 900.1/941/Sekrt/BPKAD/2025 tentang Bantuan Keuangan Khusus Penanggulangan Bencana Alam kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/9772/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah serta Pergeseran Anggaran dalam APBD pada Daerah Bencana.

  Pergeseran anggaran berupa penambahan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provisnsi Sumatera Barat sebesar Rp3.155.394.000,00 serta penambahan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat sebesar Rp4.050.000.000,00. Terhadap penambahan pendapatan tersebut dilakukan penyesuaian berupa penambahan belanja operasi sebesar Rp1.519.478.000 dan penambahan belanja tidak terduga sebesar Rp5.289.916.000,00.

Rincian pergeseran anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7 : Proyeksi Rincian Perubahan Anggaran dan Pergeseran Anggaran Tahun 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	APBD 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	APBD Perubahan 2025	Pergeseran I APBD Perubahan	Pergeseran II APBD Perubahan	Pergeseran III APBD Perubahan
	Perda No. 5 Tahun 2024 Perwako No. 49 Tahun 2024	Perwako No. 9 Tahun 2025	Perwako No. 12 Tahun 2025	Perda No. 3 Tahun 2025 Perwako No. 17 Tahun 2025	Perwako No. 20 Tahun 2025	Perwako No. 22 Tahun 2025	Perwako No. 23 Tahun 2024
Pendapatan	**572.656.518.317,00**	**572.715.798.317,00**	**572.715.798.317,00**	**579.795.810.447,00**	**579.795.810.447,00**	**579.795.810.447,00**	**587.001.204.447,00**
Pendapatan Asli Daerah	112.737.235.317,00	112.737.235.317,00	112.737.235.317,00	112.742.349.470,00	112.742.349.470,00	112.742.349.470,00	112.742.349.470,00
Pendapatan Transfer	459.919.283.000,00	459.978.563.000,00	459.978.563.000,00	467.053.460.977,00	467.053.460.977,00	467.053.460.977,00	470.208.854.977,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000.000,00
Belanja	**597.656.518.317,00**	**597.715.798.317,00**	**597.715.798.317,00**	**586.247.216.116,94**	**586.247.216.116,94**	**586.247.216.116,94**	**593.452.610.116,94**
Belanja Operasi	551.124.020.551,00	526.216.276.217,06	526.346.276.217,06	520.201.574.361,94	520.251.574.361,94	520.251.574.361,94	522.167.052.361,94
Belanja Modal	45.532.497.766,00	50.731.555.722,00	50.721.555.722,00	64.445.641.755,00	64.445.641.755,00	64.445.641.755,00	64.445.641.755,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	20.767.966.377,94	20.647.966.377,94	1.000.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	6.239.916.000,00
Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
Surplus/(Defisit)	**(25.000.000.000,00)**	**(25.000.000.000,00)**	**(25.000.000.000,00)**	**(6.451.405.669,94)**	**(6.451.405.669,94)**	**(6.451.405.669,94)**	**(6.451.405.669,94)**
Pembiayaan	**25.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**	**6.451.405.669,94**	**6.451.405.669,94**	**6.451.405.669,94**	**6.451.405.669,94**
Penerimaan Pembiayaan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SILPA Tahun Berjalan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

e. Mandatory Spending

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1) Bidang Kesehatan

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, besaran alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kota Padang Panjang.

Adapun capaian dari *mandatory spending* bidang kesehatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 : Capaian *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	**Anggaran Kesehatan**	**164.925.438.037**	**149.772.636.265**	**90,81**
	Belanja Operasi	146.858.280.017	134.265.847.213	**91,43**
	a. Belanja Pegawai	92.888.816.318	82.749.465.622	**89,08**
	b. Belanja Barang dan Jasa	53.869.463.699	51.416.381.591	**95,45**
	c. Belanja Hibah	100.000.000	100.000.000	**100,00**
	Belanja Modal	18.067.158.020	15.506.789.053	**85,83**
3.	**Total Belanja Daerah**	**593.452.610.117**	**531.654.227.110**	**89,59**
4.	**Gaji dan Tunjangan ASN**	**153.635.073.890**	**149.175.877.796**	**97,10**
5.	**Belanja Daerah Diluar Gaji dan Tunjangan ASN**	**439.817.536.227**	**382.478.349.314**	**86,96**
6.	**Rasio Anggaran Kesehatan**	**37,50%**	**39,16%**	**1,66%**

Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diatas, *mandatory spending* bidang kesehatan pada Tahun 2025 sudah tercapai dengan alokasi anggaran sebesar 37,50%

2) Bidang Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kota Padang Panjang.

Adapun capaian dari *mandatory spending* bidang pendidikan di Kota Padang Panjang adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.9 : Capaian *Mandatory Spending* Urusan Pendidikan Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	**Anggaran Fungsi Pendidikan**	**112.588.067.195**	**105.847.309.383**	**94,01**
	a. Urusan Bidang Pendidikan	643.712.000	600.964.100	93,36
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	5.235.141.923	4.878.751.757	93,19
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	7.971.862.245	7.166.112.466	89,89
	d. Urusan Bidang Kepemudayaandan Olahraga	5.879.449.750	4.889.664.850	83,17
	e. Urusan Lainnya yang Menunjang Kebutuhan Masyarakat di Bidang Pendidikan	593.452.610.117	531.654.227.110	89,59
2.	**Total Belanja Daerah**	**593.452.610.117**	**531.654.227.110**	**89,59**
3.	**Rasio Anggaran Pendidikan**	**22,30%**	**23,21%**	**0,91%**

Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diatas, *mandatory spending* bidang pendidikan pada Tahun 2025 sudah tercapai dengan alokasi anggaran sebesar 22,30%

3) Bidang Infrastruktur

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di Kota Padang Panjang adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.10: Capaian *Mandatory Spending* Urusan Infrastruktur Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	**Total Belanja Daerah**	**593.452.610.117**	**531.654.227.110**	**89,59**
2.	**Belanja Bagi hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah**	**9.751.473.000**	**10.162.290.000**	**104**
3.	a Belanja Bagi hasil;	8.341.473.000	8.752.290.000	105
	b Bantuan Keuangan	1.410.000.000	1.410.000.000	100
3.	**Selisih (1-2)**	**583.701.137.117**	**521.491.937.110**	**89**
4.	**Minimal Belanja Insfrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)**	**233.480.454.847**	**208.596.774.844**	**89**

No.	Anggaran	Anggaran	Realisasi	%
1.	**Belanja Modal:**	**64.445.641.755**	**55.109.708.176**	**86**
	a. tanah	-	-	-
	b. peralatan dan mesin;	17.474.130.304	14.811.794.052	85
	c. bangunan dan gedung;	24.016.356.885	20.311.104.559	85
	d. jalan, jaringan, dan irigasi;	21.826.707.861	18.910.651.808	87
	e. aset tetap lainnya;	933.446.705	911.322.756	98
	f. aset lainnya.	195.000.000	164.835.000	85
2.	**Belanja Pemeliharaan**	**17.144.353.000**	**16.501.773.045**	**96**
	Jumlah	**81.589.994.755**	**71.611.481.221**	**88**
3.	Belanja Hibah;	7.432.184.916	7.100.765.109	96
	Belanja Bantuan Sosial;	8.199.521.818	7.044.965.000	86
	Belanja Bantuan Keuangan.	-	-	-
	Jumlah	**15.631.706.734**	**14.145.730.109**	**90**
3.	**Jumlah Belanja Insfrastruktur Daerah**	**97.221.701.489**	**85.757.211.329**	**88**

Dari informasi pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran infrastruktur pada APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp97.221.701.489 dan jika dibandingkan dengan jumlah minimal belanja infrastruktur sebesar Rp233.480.454.847,00 maka *mandatory spending* bidang infrastruktur Tahun 2025 belum terpenuhi. Keterbatasan anggaran menjadi penyebab kurangnya alokasi dana untuk belanja modal infrastruktur, sehingga pada Tahun 2025 alokasi anggaran belanja lebih difokuskan pada belanja operasional urusan wajib dan belanja pegawai.

4) Bidang Pengawasan

Capaian dari *mandatory spending* bidang pengawasan Kota Padang Panjang adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.11 : Capaian Mandatory Spending Bidang Pengawasan Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	**Anggaran Fungsi Pengawasan**	**112.588.067.195**	**105.847.309.383**	**94,01**
	a. Ptogram Penyelenggaraan Pengawasan	643.712.000	600.964.100	93,36
	b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	5.235.141.923	4.878.751.757	93,19
	c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan	7.971.862.245	7.166.112.466	89,89
2.	**Total Belanja Daerah**	**593.452.610.117**	**531.654.227.110**	**89,59**
3.	**Rasio Anggaran APIP**	**1%**	**1,04%**	

Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diatas, *mandatory spending* bidang pengawasan pada Tahun 2025 sudah tercapai dengan alokasi anggaran sebesar 1%

5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Adapun capaian dari *mandatory spending* bidang pengembangan sumber daya manusia Kota Padang Panjang adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.12 : Capaian *Mandatory Spending* Bidang Pengembangan sumber daya Manusia Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	**Belanja Bidang Pngembangan SDM**	**2.340.784.650**	**1.6985.062.863**	**77,54**
	a. Belanja Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.139.037.800	748.075.637	65,68
	b. Belanja Pada Dinas Kesehatan	374.082.850	336.046.650	89,83
	c. Belanja Pada BKPSDM	800.414.000	603.860.576	75,44
	d. Belanja Pada Inspektorat	27.250.000	10.080.000	36,99
2.	**Total Belanja Daerah**	**593.452.610.117**	**531.654.227.110**	**89,59**
3.	**Rasio Anggaran APIP**	**0,39**	**0,32**	

Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diatas, *mandatory spending* bidang pendidikan pada Tahun 2025 sudah tercapai dengan alokasi anggaran sebesar 0,39%

2.3 INDIKATOR *PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD*

Secara umum target kinerja APBD mengacu pada target dan tujuan pembangunan daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Oleh sebab itu untuk mencapai taget kinerja pembangunan dan APBD dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025. RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 juga merupakan tahapan pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024.

Berikut dijelaskan penjabaran tujuan, sasaran dan indikator rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang di Tahun 2025.

Tabel 2.13 : Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025

No.	TUJUAN	INDIKATOR
1.	Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2.	Terwujudnya pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing dan inklusif, serta ketahanan pangan daerah yang kuat	a. Laju pertumbuhan ekonomi b. Tingkat kemiskinan c. Tingkat pengangguran terbuka d. Indeks ketahanan pangan e. Tingkat inflasi
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, inovatif, responsif dan melayani	Indeks reformasi birokrasi
4.	Terwujudnya keamanan dan perlindungan sosial msyarakat berdasarkan nilai agama serta budaya	Indeks rasa aman
5.	Meningkatkan pemerataan dan kualitasinfrastruktur tangguh bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan	a. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Selanjutnya untuk dapat mewujudkan prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan penyelarasan klasifikasi, kodefikasi nomenklatur dalam daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah, maka ditetapkanlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan rencana aksi yang lebih konkrit yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kota Padang Panjang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 27 Agustus 2025 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2025 tanggal 27 Agustus 2025 dan telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2025.

Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 ditetapkan target pendapatan sebesar Rp587.001.204.447,00, belanja sebesar Rp593.452.610.116,94 dan pembiayaan *netto* sebesar Rp6.451.405.669,94. Secara ringkas realisasi target kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

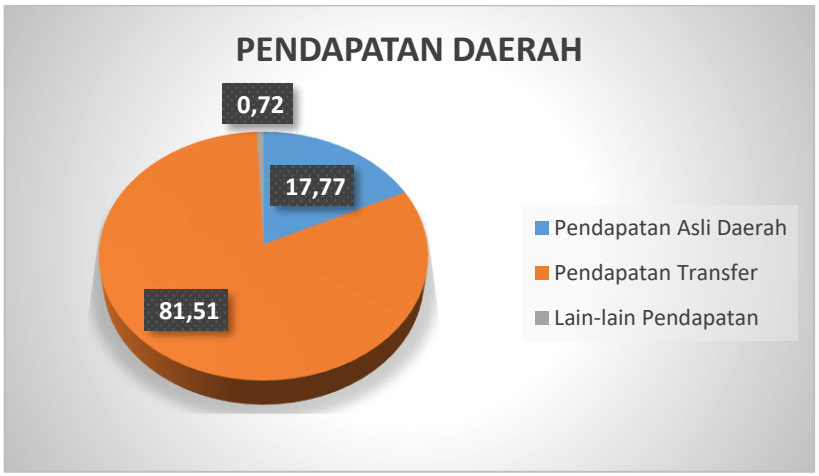
Tabel 2.14 : Prioritas Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	**587.001.204.447,00**	**565.000.090.757,76**	**96,25**
Pendapatan Asli Daerah	112.742.349.470,00	100.426.050.107,76	89,08
Pendapatan Transfer	470.208.854.977,00	460.518.396.206,00	97,93
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.050.000.000,00	4.055.644.444,00	100,13
Belanja	**593.452.610.116,94**	**531.654.227.109,81**	**89,59**
Belanja Operasi	522.167.052.361,94	475.913.255.150,25	91,14
Belanja Modal	64.445.641.755,00	55.109.708.175,56	85,51
Belanja Tidak Terduga	6.239.916.000,00	631.263.784,00	10,11
Belanja Transfer	600.000.000,00	0,00	0,00
Surplus/(Defisit)	**(6.451.405.669,94)**	**33.306.550.547,95**	**(516,26)**
Pembiayaan Daerah	**6.451.405.669,94**	**6.451.405.669,94**	**100**
Penerimaan Pembiayaan	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	100
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	
SiLPA	**0,00**	**39.797.269.317,89**	

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp565.000.090.757,76 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp587.001.204.447,00 atau 96,25% dari anggaran. Pencapaian pendapatan tersebut meliputi:

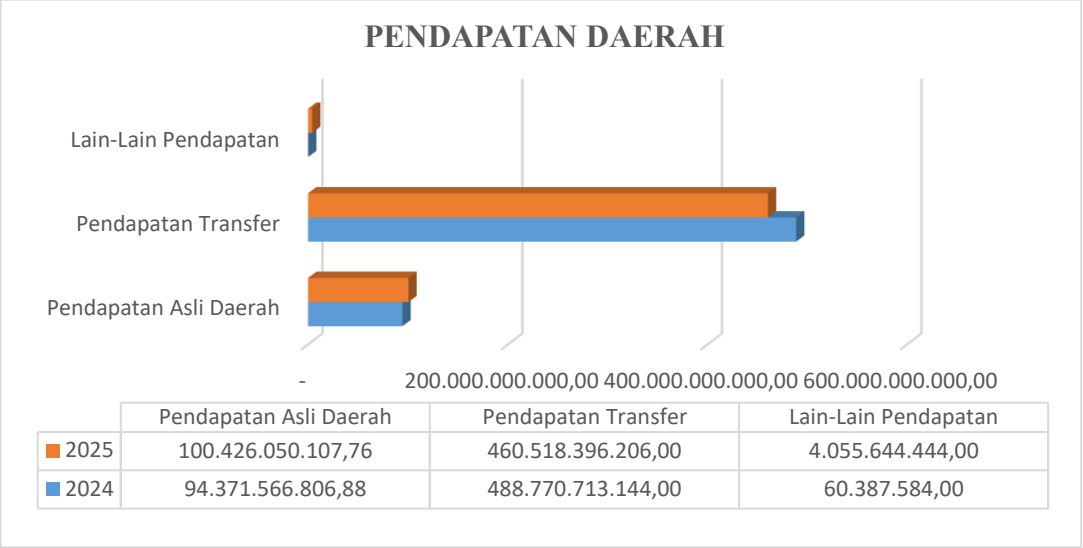
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp100.426.050.107,76 dari target yang ditetapkan sebesar Rp112.742.349.470,00 atau 89,08% dari anggaran yang ditetapkan.
2) Pendapatan transfer dengan realisasi mencapai sebesar Rp460.518.396.206,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp470.208.854.977,00 atau 97,93% dari anggaran yang telah ditetapkan.
3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi sebesar Rp4.055.644.444,00 atau sebesar 100,13% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp4.050.000.000,00.

Gambar. 7 : Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2025



Gambar diatas menunjukkan bahwa sumber pendapatan Pemerintah Kota Padang Panjang masih bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat yaitu 81,51% dari total penerimaan APBD. Sementara sumbangan PAD terhadap total penerimaan APBD adalah 17,77%. Sedangkan sumbangan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap penerimaan APBD adalah 0,72%. Selanjutnya gambar berikut menunjukkan perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 dan 2024.

Gambar. 8 : Perbandingan Penerimaan Daerah Tahun 2025 dan 2024



	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan
2025	100.426.050.107,76	460.518.396.206,00	4.055.644.444,00
2024	94.371.566.806,88	488.770.713.144,00	60.387.584,00

Seperti dapat dilihat pada gambar di atas, untuk kelompok PAD, penerimaan Tahun 2025 sebesar Rp100.42 milyar mengalami kenaikan sebesar Rp6.05 milyar atau 6,42% jika dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp94,37 milyar.

Pada kelompok pendapatan transfer dimana penerimaan Tahun 2025 sebesar Rp460,51 milyar, sementara penerimaan Tahun 2024 adalah Rp488,77 milyar, sehingga untuk pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar Rp28,26 milyar atau 5,79%. Pendapatan transfer merupakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya untuk jenis penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang menerima sebesar Rp4.05 milyar, sementara penerimaan Tahun 2024 yakni Rp60,38 juta, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp3.99 milyar atau 66,16%.

Pendapatan daerah tersebut digunakan untuk membiayai belanja daerah yang ada pada Tahun 2025 sebesar Rp593.452.610.116,94, dengan realisasi sebesar Rp531.654.227.109,81 atau 89,58%. Dari jumlah anggaran belanja daerah tersebut dialokasikan sebesar Rp522.167.052.361,94 untuk belanja operasi dengan realisasi sebesar Rp475.913.255.150,25 atau 91,14%. Secara ringkas penyerapan anggaran belanja operasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025

No	URAIAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa Anggaran (Rp.)
1	Belanja Pegawai	295.830.460.825,06	278.088.171.575,00	94,00	311.212.828.135,00
2	Belanja Barang dan Jasa	210.570.338.118,88	183.618.653.458,52	87,20	214.426.378.424,14
3	Belanja Subsidi	134.546.684,00	60.700.008,00	45,11	4.456.800,00
4	Belanja Hibah	7.432.184.916,00	7.100.765.108,73	95,54	17.174.049.136,00
5	Belanja Bantuan Sosial	8.199.521.818,00	7.044.965.000,00	85,91	10.415.226.000,00
	Jumlah	**522.167.052.361,94**	**475.913.255.150,25**	**91,14**	**553.232.938.495,14**

Selain untuk belanja operasi, juga digunakan untuk belanja modal dengan jumlah anggaran sebesar Rp64.445.641.755,00 dengan realisasi sebesar Rp55.109.708.175,56 atau 85,51%. Berikut ini adalah rincian dari anggaran belanja modal Tahun 2025.

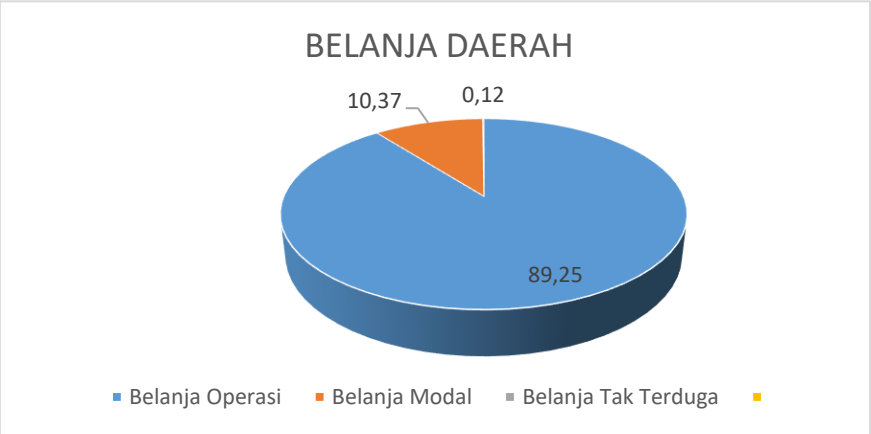
Tabel 2.16 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

No	URAIAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa Anggaran (Rp.)
1.	BM Tanah	0,00	0,00	0,00	9.421.400,00
2.	BM Peralatan dan Mesin	17.474.130.304,00	14.811.794.052,00	84,76	14.731.124.143,00
3.	BM Gedung dan Bangunan	24.016.356.885,00	20.311.104.559,19	84,57	39.342.022.232,00
4.	BM Jalan, Jaringan dan Irigasi	21.826.707.861,00	18.910.651.808,37	86,63	16.570.946.513,46
5.	BM Aset Tetap Lainnya	933.446.705,00	911.322.756,00	97,62	1.004.874.127,00
6.	BM Aset Lainnya	195.000.000,00	164.835.000,00	84,53	93.500.000,00
	Jumlah	**64.445.641.755,00**	**55.109.708.175,56**	**85,51**	**71.751.888.415,46**

Sementara sisanya digunakan untuk belanja tidak terduga sebesar Rp6.239.916.000,00 dengan realisasi sebesar Rp631.263.784,00 atau 10,11%. Dana Tidak Terduga ini selain bersumber dari APBD juga dari Bantuan Presiden untuk Penaggulangan Bencana sebesar Rp. 4.000.000.000,00 dan Bantuan Keuangan Khusus dari Propinsi sebesar Rp. 1.410.000.000,00.

Perbandingan komposisi antara realisasi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar. 9 : Perbandingan Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2025



Seperti terlihat pada Gambar di atas bahwa 89,25% dari total belanja Tahun 2025 digunakan untuk membiayai belanja operasi dan sisanya 10,37% digunakan untuk belanja modal dan 0,12% digunakan untuk belanja tidak terduga.

Dengan jumlah APBD sebagaimana diuraikan di atas terjadi defisit anggaran sebesar Rp6.451.405.669,94 yang ditutupi dengan pembiayaan daerah. Anggaran pembiayaan daerah berupa penerimaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024. Berikut ini adalah rincian dari pembiayaan daerah Tahun 2025:

Tabel 2.17 : Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2025

Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Surplus/(Defisit)	(6.451.405.669,94)	33.345.863.647,95
Penerimaan Pembiayaan	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
SILPA	**0,00**	**39.797.269.317,89**

Berdasarkan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah, defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp6.451.405.669,94 dengan realisasi defisit sebesar sebesar Rp33.306.550.547,95. Dengan jumlah realisasi pembiayaan *netto* sebesar Rp6.451.405.669,94, maka APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025, menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp39.797.269.317,89.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Secara umum kegiatan yang sudah diprogram dan disusun pada Tahun 2025 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Capaian realisasi kinerja pendapatan untuk Tahun 2025 sebesar Rp565.000.090.757,76 dari jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp587.001.204.447,00 atau 96,25%. Adapun rincian realisasi pendapatan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1: Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA Per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Dinas Kesehatan	70.213.334.897,00	61.572.219.094,00	87,69
2.	Dinas PUPR	635.000.000,00	178.945.851,00	28,18
3.	Dinas Perkim LH	1.765.969.175,00	693.426.000,00	39,27
4.	Dinas Pangan dan Pertanian	409.739.000,00	273.182.000,00	66,67
5.	Dinas Perhubungan	850.000.000,00	656.107.000,00	77,19
6.	Dinas Kominfo	200.000.000,00	1.600.000,00	0,80
7.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.250.000.000,00	1.067.842.000,00	85,43
8.	Dinas Perdagkop UKM	4.473.830.000,00	4.090.445.547,00	91,43
9.	BPKD	506.653.331.375,00	496.096.954.745,76	97,91
10.	Sekretariat Daerah	550.000.000,00	369.368.520,00	67,16
	Jumlah	**587.001.204.447,00**	**565.000.090.757,76**	**96,25**

Realisasi belanja Pemerintah Kota Padang Panjang untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp531.654.227.109,81 dari jumlah anggaran sebesar Rp593.452.610.116,94 atau 89,58%. Adapun rincian realisasi belanja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA Per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	113.231.779.195,00	106.448.273.483,08	94,01
2.	Dinas Kesehatan	164.925.438.036,88	149.772.636.265,32	90,81
3.	Dinas PUPR	25.965.352.251,00	21.475.877.304,79	82,71
4.	Dinas Perkim LH	29.358.624.906,00	25.681.430.914,00	87,47
5.	Satpol PP dan Damkar	13.726.650.523,00	13.232.956.393,00	96,40
6.	Dinas Sosial P2KBP3A	11.720.229.145,00	10.645.218.527,00	90,83
7.	Dinas Pangan dan Pertanian	10.787.208.876,00	9.954.627.048,00	92,28
8.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.222.599.142,00	2.900.388.706,00	90,00
9.	Dinas Perhubungan	11.737.042.929,00	11.027.094.193,00	93,95
10.	Dinas Kominfo	7.678.757.686,00	7.188.976.478,00	93,62
11.	Dinas Penanaman Modal PTSP	5.576.360.112,00	4.817.307.721,00	86,39

No.	SKPD	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.250.809.773,00	4.892.202.807,00	93,17
13.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	9.632.434.365,00	8.071.296.459,36	83,79
14.	Dinas Perdagkop UKM	20.221.375.517,00	17.510.492.645,98	86,59
15.	Inspektorat Daerah	5.854.888.067,00	5.533.353.067,00	94,51
16.	Bappeda	5.785.766.037,00	5.207.535.069,00	90,01
17.	BKPSDM	9.501.596.993,00	8.216.207.042,00	86,47
18.	BPKD	17.276.698.845,06	9.874.418.250,00	57,15
19.	Sekretariat Daerah	47.308.703.699,00	40.538.431.604,91	85,69
20.	Sekretariat DPRD	31.807.563.222,00	29.158.071.866,00	91,67
21.	BPBD Kesbangpol	8.969.795.069,00	8.226.325.894,37	91,71
22.	Kec. Padang Panjang Timur	16.711.452.140,00	15.657.645.506,00	93,69
23.	Kec. Padang Panjang Barat	17.201.483.588,00	15.623.459.865,00	90,83
	Jumlah	**593.452.610.116,94**	**531.654.227.109,81**	**89,58**

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Secara umum capaian kinerja APBD Pemerintah Kota Padang Panjang sudah berjalan dengan baik dari sisi pencapaian target penerimaan maupun realisasi/serapan belanja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun 2025 antara lain :

1. Penerimaan Daerah

a. Terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; dan
c. Alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

2. Belanja Daerah

Secara umum realisasi/serapan belanja Pemerintah Daerah pada Tahun 2025 sudah sesuai dengan target, hal ini tergambar dari realisasi belanja sebesar Rp531.654.227.109,81 dari target anggaran sebesar Rp593.452.610.116,94 atau sebesar 89,58%.

Dari 4 (empat) kelompok belanja yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga dan belanja tranfer, realisasi dari kelompok belanja tidak terduga dan belanja transfer masih tergolong rendah. Belanja tidak terduga hanya terealisasi sebesar10,11%, Hal ini disebabkan Bantuan Presiden dan Bantuan Keuangan Khusus dari Propinsi untuk penanggulangan bencana baru diterima pada akhir tahun dan belum adanya petunjuk teknis penggunaan bantuan tersebut. Untuk belanja transfer tidak terealisasi disebabkan belanja yang direncanakan untuk membantu biaya kominte bagi siswa SMA yang ada di Kota Padang Panjang yang menjadi kewenangan Propinsi disaat pencairannya pihak propinsi tidak dapat menyediakan dokumen pendukung sebagai syarat pencairan dana.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran/Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya dan ditujukan kepada entitas pelaporan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran di masing-masing SKPD.

Dalam rangka penataan perangkat daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada tahun 2025 entitas akuntansi pengelola anggaran Pemerintah Kota Padang Panjang terdiri dari 23 entitas yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
7. Dinas Pangan dan Pertanian
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
14. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
15. Inspektorat Daerah
16. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
17. Badan Pengelola Keuangan Daerah
18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kesbangpol
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Kecamatan Padang Panjang Timur

23. Kecamatan Padang Panjang Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD.

PPKD juga berfungsi sebagai entitas pelaporan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode pelaporan/satu tahun anggaran.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

Basis akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menyusun laporan keuangan adalah basis akrual, yaitu pengakuan pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual digunakan dalam menyusun Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Sementara basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran dimana pengakuan pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Selain basis akuntansi yang digunakan, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang juga menggunakan karakteristik kualitatif sebagai prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu:

a. Relevan
   Laporan keuangan memuat informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini;

b. Andal
   Laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi;

c. Dapat Dibandingkan
   Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lainnya;

d. Dapat Dipahami
   Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna;

4.3 DASAR PENGAKUAN DAN PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur-unsur dalam laporan keuangan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos (akun) dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos (akun) dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia.

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria :

1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan
2) Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun yang masih berupa piutang (*realizable*)

Pengukuran pendapatan-LO dilakukan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah *netto*nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

c. Kebijakan Akuntansi Belanja

Pengakuan belanja adalah sebagai berikut:

1) Belanja melalui SP2D-LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
2) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4) Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban diakui dengan kriteria:

1) Saat timbulnya kewajiban
2) Saat terjadinya konsumsi aset
3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Pemerintah Kota Padang Panjang menerapkan pengakuan beban yang dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas untuk periode berjalan dan dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan. Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup:

- Kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD); dan
- Kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

f. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang seperti doposito berjangka 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek, saham yang diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal neraca dan reksa dana.

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah.
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (*reliable*).

Pengukuran investasi jangka pendek berbeda-beda sesuai dengan jenis investasi, yaitu:

- Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, seperti saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

g. Piutang

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan atau ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas. Piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) karena piutang mempunyai kemungkinan tidak tertagih.

Secara umum piutang dicatat dan diukur sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net reliazable value*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo/umur piutang dan upaya penagihan. Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban penyisihan piutang.

Penyisihan piutang dapat dikelompokkan menjadi penyisihan piutang pajak dan penyisihan retribusi.

- **Penyisihan Piutang Pajak**
  Penyisihan terhadap piutang pajak yang tidak tertagih dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
     a) Umur piutang kurang dari 1 Tahun

b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo
c) Wajib pajak koperatif
d) Wajib pajak likuid
e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding

Untuk piutang pajak dengan kualitas ***lancar*** dilakukan penyisihan sebesar ***0,5 %.***

2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
   a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun
   b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan
   c) Wajib pajak kurang koperatif dalam pemeriksaan
   d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding

   Untuk piutang pajak dengan kualitas ***kurang lancar*** dilakukan penyisihan sebesar ***10%.***

3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
   a) Umur Piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun
   b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan
   c) Wajib pajak tidak kooperatif
   d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas

   Untuk piutang pajak dengan kualitas ***diragukan*** dilakukan penyisihan sebesar ***50%*** setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
   a) Umur piutang lebih dari 5 tahun
   b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan
   c) Wajib Pajak diketahui keberadaannya
   d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia
   e) Wajib Pajak mengalami musibah

   Untuk piutang pajak dengan kualitas ***macet*** dilakukan penyisihan sebesar ***100%*** setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

- **Penyisihan Piutang Retribusi**

  Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

  1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
     a) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan
     b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan

     Untuk piutang retribusi dengan kualitas ***lancar*** dilakukan penyisihan sebesar ***0,5%.***

  2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
     a) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan
     b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

     Untuk piutang retribusi dengan kualitas ***kurang lancar*** dilakukan penyisihan sebesar ***10%.***

3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
   a) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan
   b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

   Untuk piutang retribusi dengan kualitas ***diragukan*** dilakukan penyisihan sebesar ***50%*** setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
   a) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan
   b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara

   Untuk piutang retribusi dengan kualitas ***macet*** dilakukan penyisihan sebesar ***100%*** setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

- **Penyisihan terhadap piutang selain pajak dan retribusi**

  Penyisihan terhadap piutang selain pajak dan retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

  1) Kualitas Lancar

     Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dan dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 0,5%.

  2) Kualitas Kurang Lancar

     Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan dan dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10%.

  3) Kualitas Diragukan

     Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan dan dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 50% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

  4) Kualitas Macet:

     Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara dan dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih 100% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

h. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban sedangkan pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/dibayarkan.

i. Persediaan

Persediaan merupakan aset yang berupa :

- Barang atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- Bahan atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam proses produksi;
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan diakui pada saat:

1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

Pencatatan persediaan dilakukan dengan metode periodik. Dengan metode ini pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan dan jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) pada akhir periode.

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
3) Nilai wajar.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan *(use of goods)* dan penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

j. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan maksud berinvestasi, investasi jangka panjang dapat dibagi menjadi investasi permanen dan investasi non permanen.

Investasi permanen meliputi :

1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat.

Investasi non permanen meliputi :

1) Obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
4) Investasi non permanen lainnya.

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan
2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai *(reliable)*.

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Sedangkan investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net Realizable Value)*

k. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat umum.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Berwujud;
2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
6) Memenuhi nilai satuan minimal kapitalisasi.

Nilai kapitalisasi aset tetap mengacu kepada Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1) Alat angkutan dan alat besar sebesar Rp10.000.000,00;
2) Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat besar sebesar Rp750.000,00;
3) Gedung dan bangunan dengan nilai perolehan Rp10.000.000,00;
4) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp300.000,00;
5) Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp50.000,00; dan
6) Ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak berlaku untuk tanah dan jalan, jaringan dan irigasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

l. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Tuntutan Perbendaharan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan aset lain-lain.

Aset tidak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tidak berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai masa manfaatnya.

Yang termasuk aset lain-lain antara lain aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintah daerah. Aset tetap yang sudah dipindahkan ke aset lain-lain tidak disusutkan lagi.

m. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:

1) Gedung dan Bangunan;
2) Peralatan dan Mesin;
3) Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
4) Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap Renovasi.

Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset menganggur disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

1) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan
2) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.

Penyusutan aset tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Penyusutan aset tetap diakumulasikan setiap tahun dan disajikan dalam akun akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan merupakan pengurang pos aset tetap dan merupakan penambah beban penyusutan aset tetap.

Penetapan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok aset tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kodefikasi Barang Milik Negara (BMN).

Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap sebagaimana yang terdapat pada ***Lampiran 1*.**

n. Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek
   Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah, utang kepada pegawai, bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang;

2) Kewajiban Jangka Panjang
   Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
   - Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   - Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
   - Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

o. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Dalam basis akrual, Pemerintah Daerah hanya menyajikan satu pos ekuitas.

Saldo ekuitas diperoleh dari ekuitas awal ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.

Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4 KESESUAIAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DENGAN SAP

Kebijakan Akuntansi Kota Padang Panjang diatur di dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan baik dalam hal kebijakan akuntansi pelaporan maupun kebijakan akuntansi akun.

Untuk kebijakan akuntansi pelaporan, Pemerintah Kota Padang Panjang juga menggunakan aturan perundangan lainnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

5.1 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024. Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun 2024 telah beberapa kali mengalami pergeseran dalam rangka *refocusing,* efisiensi dan realokasi anggaran sehubungan dengan terbitnya beberapa aturan penggunaan anggaran belanja, dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta guna pengendalian inflasi dan mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangandan stabilitas perekonomian di Kota Padang Panjang.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 27 Agustus 2025 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2025 tanggal 27 Agustus 2025 dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2025.

Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 ditetapkan target pendapatan sebesar Rp587.001.204.447,00; belanja sebesar Rp593.452.610.116,94; dan defisit sebesar Rp6.451.405.669,94. Defisit anggaran Tahun 2025 ini ditutup dengan pembiayaan berupa penerimaan pembiayaan sebesar Rp6.451.405.669,94 yang berasal dari SiLPA Tahun 2024.

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	565.000.090.757,76	583.202.667.534,88

Pada Tahun Anggaran 2025, target pendapatan daerah Pemerintah Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp587.001.204.447,00 dan telah terealisasikan sebesar Rp565.000.090.757,76 atau sebesar 96,25%. Pendapatan daerah Tahun 2025 berupa:

1) Pendapatan Asli Daerah;
2) Pendapatan Transfer; dan
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan beberapa Kepmendagri tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perbaikan redaksi dan penyederhanaan jumlah jenis akun pada akun Pendapatan Daerah. Penjelasan terhadap target dan realisasi pendapatan daerah Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp112.742.349.470,00 dengan realisasi sebesar Rp100.426.050.107,76 atau 89,07%. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2024 sebesar Rp94.371.566.806,88 maka realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.054.483.300,88 atau 6,42%. Perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Daerah

Untuk Tahun Anggaran 2025, penerimaan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp20.372.697.142,00 dengan realisasi sebesar Rp17.367.910.078,00 atau 85,25%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2024 sebesar Rp9.688.742.631,00 maka realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.679.167.447,00 atau 79,25%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1 : Daftar Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	365.009.139,00
2.	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	937.040.608,00
3.	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	135.234.900,00
4.	Pajak Reklame	350.000.000,00	231.749.137,00	66,21	181.763.452,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	3.415.707.650,00
6.	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	934.400,00
7.	Pajak Air Tanah	11.500.000,00	14.974.800,00	130,21	14.893.800,00
8.	PBB Pedesaan dan Perkotaan	1.500.000.000,00	1.219.003.598,00	81,26	1.184.436.182,00
9.	BPHTB	4.000.000.000,00	3.345.179.650,00	83,62	3.453.722.500,00
10.	PBJT - Makanan dan/atau Minuman	1.400.000.000,00	1.028.849.930,00	73,48	0,00
11.	PBJT - Tenaga Listrik	3.805.197.142,00	3.270.681.691,00	85,95	0,00
12.	PBJT - Jasa Perhotelan	900.000.000,00	437.922.172,00	48,65	0,00
13.	PBJT - Jasa Parkir	6.000.000,00	962.200,00	16,03	0,00
14.	PBJT - Kesenian dan Hiburan	600.000.000,00	185.554.000,00	30,92	0,00
15.	Opsen PKB	5.600.000.000,00	5.765.943.600,00	102,96	0,00
16.	Opsen BBNKB	2.200.000.000,00	1.867.089.300,00	84,86	0,00
	JUMLAH	**20.372.697.142,00**	**17.367.910.078,00**	**85,25**	**9.688.742.631,00**

Dalam APBD Tahun 2025 terdapat penyesuaian terhadap beberapa rekening anggaran pendapatan pajak daerah, antara lain pendapatan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir dialihkan ke rekening Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT).

Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Tahun 2025 mulai diberlakukan penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sesuai definisi, Opsen adalah pungutan tambahan

pajak menurut persentase tertentu. Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada dasarnya merupakan mekanisme pengganti atas bagi hasil pajak Provinsi (PKB dan BBNKB) kepada Kabupaten/Kota. Penyaluran Opsen Pajak Daerah dilakukan langsung melalui setoran yang dipisahkan *(split payment)*, dimana bagian Provinsi langsung ke RKUD Provinsi dan bagian Kabupaten/Kota langsung ke RKUD Kabupaten/Kota.

Dari rincian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah Tahun 2025 terjadi kenaikan dari realisasi Tahun 2024, hal ini merupakan dari hasil upaya intensifikasi dan program Operasi Taat Pajak yang melibatkan 40 orang petugas pajak yang turun ke lapangan, namun untuk jenis pajak BPHTB dan yang realisasinya yang tidak memenuhi target yang ditetapkan

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Target Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp75.740.473.872,00 dengan realisasi sebesar Rp63.852.882.614,00 atau 84,30%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp64.086.171.794,00 maka realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp233.289.180,00 atau 0,36%.

Anggaran dan realisasi retribusi daerah Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.2 : Target dan Realisasi Retribusi Daerah per Objek Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Retribusi Jasa Umum	68.952.602.872,00	59.008.332.554,00	85,58	60.149.576.255,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	6.187.871.000,00	4.718.284.209,00	76,25	3.836.566.068,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	600.000.000,00	126.585.851,00	21,09	100.029.471,00
	JUMLAH	**75.740.473.872,00**	**63.853.202.614,00**	**84,30**	**64.086.171.794,00**

Dari tabel diatas terlihat meskipun terdapat penurunan di beberapa sektor, secara umum pendapatan retribusi tahun 2025 tetap menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mengindikasikan keberhasilan dalam perbaikan sistem pemungutan serta efektivitas kebijakan fiscal.

Adapun rincian dari kelompok retribusi diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3 : Rincian Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	65.599.756.697,00	56.780.775.554,00	86,55	58.337.801.741,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.765.969.175,00	727.854.000,00	41,21	417.194.500,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00	627.982.000,00	83,73	620.026.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	801.877.000,00	819.041.000,00	102,14	732.024.014,00
5.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	35.000.000,00	52.360.000,00	149,60	42.530.000,00
	JUMLAH	**68.952.602.872,00**	**59.008.012.554,00**	**85,57**	**60.149.576.255,00**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa diinformasikan beberapa hal sebagai berikut:

- Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan mengalami sedikit penurunan, hal ini disebabkan oleh kendala administratif berupa keterlambatan klaim pembayaran oleh BPJS, sehingga penerimaan yang tercatat dalam tahun berjalan hanya mencakup periode hingga Oktober 2025.
- Realisasi retribusi pelayanan persampahan dan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2024 dimana hal ini disebabkan meningkatnya pola penagihan yang diterapkan sehingga tunggakan tahun-tahun sebelum nya dapat tertagih.

Tabel 5.4 : Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.100.100.000,00	886.052.000,00	80,54	976.688.945,00
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.581.953.000,00	2.910.123.209,00	81,24	1.984.375.258,00
3.	Retribusi Terminal			0,00	0,00
4.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	120.000.000,00	105.192.000,00	87,66	92.288.000,00
5.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	15.000.000,00	15.240.000,00	101,60	34.100.000,00
6.	Retribusi Rumah Potong Hewan	180.000.000,00	189.570.000,00	105,32	166.875.000,00
7.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.000.500.000,00	572.909.000,00	57,26	461.416.515,00
8.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	190.318.000,00	39.198.000,00	20,60	120.822.350,00
	JUMLAH	**6.187.871.000,00**	**4.718.284.209,00**	**76,25**	**3.836.566.068,00**

Berdasarkan informasi pada tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Realisasi pendapatan retribusi pasar grosir jika dibandingkan dengan tahun 2024 mangalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp925.747.951,00 atau 46,65% , hal di sebabkan dengan peningkatan pola penagihan yang dilakukan oleh Dinas Perdagang, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan merupakan implikasi dari penyesuaian tarif berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024, yang diperkuat dengan kebijakan stimulus melalui Perwako Nomor 4 Tahun 2025. Kebijakan pemberian pengurangan pokok retribusi sebesar 50% terbukti efektif mendorong minat pedagang dalam

menyelesaikan kewajiban retribusinya, sehingga berdampak positif pada total capaian pendapatan daerah.

- Realisasi Pendapatan dari retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila (Mess BBI) juga mengalami penurunan yang cukup tajam. Hal ini merupakan dampak langsung dari perubahan kebijakan kurikulum terkait durasi magang siswa dan mahasiswa. Sebagai perbandingan pada tahun 2024 penerimaan mencapai Rp34.100.000 karena akumulasi durasi magang yang panjang (6 bulan) serta adanya lonjakan peserta dari dua angkatan mahasiswa UNRI yang masuk secara bersamaan. Namun pada tahun 2025, durasi magang dipangkas menjadi hanya 3 bulan. Selain faktor kurikulum, dampak pascabencana alam di Padang Panjang pada akhir 2024 juga menurunkan minat serta menyebabkan pembatalan rencana magang dari beberapa sekolah mitra demi alasan keamanan dan operasional. Namun secara pencapaitan target pendapatan pada tahun 2025 retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila melebihi target yang telah ditetapkan pada APBD tahun 2025.

- Penurunan serupa juga terjadi pada sektor Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang dikelola oleh Dinas Pangan dan Pertanian. Kondisi ini dipicu oleh perbedaan signifikan pada komponen sumber penerimaan antar tahun. Pada tahun 2024, realisasi pendapatan melonjak tinggi karena adanya pelepasan aset Pemerintah Daerah berupa ternak sapi melalui mekanisme lelang resmi di KPKNL, ditambah dengan pembayaran piutang peternak dalam program *rearing unit*. Sebaliknya, pada tahun 2025, Dinas tidak lagi melakukan penjualan atau lelang aset sapi milik daerah, sehingga sumber pendapatan sepenuhnya hanya bergantung pada pembayaran kewajiban peternak.

Tabel 5. 5 : Target dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	600.000.000,00	126.585.851,00	21,10	100.029.471,00
	JUMLAH	**600.000.000,00**	**126.585.851,00**	**21,10**	**100.029.471,00**

Rendahnya angka realisasi penerimaan retribusi persetujuan bangunan gedung Tahun 2024 disebabkan adanya penurunan tarif yang cukup signifikan akibat pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp7.991.779.256,00 dan terealisasi sebesar Rp7.991.779.256,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp7.922.888.824,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp68.890.432,00 atau 0,86%.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 berasal dari bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota

Padang Panjang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari).

Tabel 5. 6 : Daftar Realisasi Laba Dari Penyertaan Modal Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1	Pendapatan Deviden PDAM	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Deviden PT. Bank Nagari	7.991.779.256,00	7.991.779.256,00	100,00	7.922.888.824,00
3	Pendapatan Deviden PT. Balairung	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**7.991.779.256,00**	**7.991.779.256,00**	**100,00**	**7.922.888.824,00**

4. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp8.637.399.200,00 dengan realisasi Rp11.213.478.159,76 atau 129,82%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp12.673.763.557,88 maka terdapat penurunan sebesar Rp1.460.285.398,12 atau 11,52%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7 : Daftar Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	455.000.000,00	617.126.600,00	135,63	246.278.500,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	48.821.000,00	92.569.000,00	189,61	149.338.950,00
3.	Hasil Kerja Sama Daerah	720.000.000,00	268.351.293,00	37,27	207.133.939,00
4.	Jasa Giro	1.200.000.000,00	1.115.370.125,00	92,95	1.117.181.863,00
5.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	16.285.000,00	0,00	42.775.000,00
6.	Pendapatan Bunga	0,00	786.348,00	0,00	294.366.761,00
7.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	7.800.000,00	0,00	8.500.000,00
8.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.023.079.056,00	0,00	3.973.284.382,87
9.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	142.305.307,00	0,00	70.254.365,00
10.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	181.525.858,00	0,00	44.711.871,00
11.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	15.000.000,00	0,00	874.508.333,71
12.	Pendapatan dari Pengembalian	1.600.000.000,00	1.941.836.032,76	121,36	4.625.287.475,80
13.	Pendapatan BLUD	4.613.578.200,00	4.791.443.540,00	103,85	1.014.664.616,50
14.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir			0,00	5.477.500,00
	JUMLAH	**8.637.399.200,00**	**11.213.478.159,76**	**129,82**	**12.673.763.557,88**

Berdasarkan informasi pada tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Realisasi pendapatan hasil kerja sama daerah Tahun 2024 adalah sebesar 37,27%. Komponen utama pendapatan hasil kerja sama daerah berasal dari kontribusi tidak tetap hasil kerja sama dengan pengelola komplek wisata Minang Fantasi. Rendahnya angka realisasi karena tingkat kunjungan yang menurun terutama pada Semester I yang disebabkan oleh

putusnya jalan di kawasan lembah anai akibat banjir bandang yang menghambat akses masyarakat menuju Kota Padang Panjang.

Adapun uraian sub rincian objek dari rekening lain-lain PAD yang sah diatas dapat dilihat pada ***Lampiran 2.***

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang pada Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp470.208.854.977,00 dan terealisasi sebesar Rp460.518.396.206,00 atau 97,94%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp488.770.713.144,00, maka realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp28.252.316.938,00 atau 5,78%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.8 : Daftar Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	438.168.129.880,00	435.977.261.779,00	99,50	459.088.864.897,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.040.725.097,00	24.541.134.427,00	76,59	29.681.848.247,00
JUMLAH		**470.208.854.977,00**	**460.518.396.206,00**	**97,94**	**488.770.713.144,00**

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp438.168.129.880,00 dengan realisasi sebesar Rp435.977.261.779,00 atau 99,50%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 realisasi sebesar Rp437.316.807.897,00, realisasi pendapatan transfer-dana perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp1.339.546.118,00 atau 0,31% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9 : Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.341.473.000,00	8.752.290.000,00	104,92	9.855.955.000,00
2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	386.662.201.880,00	386.609.800.112,00	99,99	375.917.415.308,00
3.	Dana Alokasi Khusus-Fisik	5.633.448.000,00	5.115.348.945,00	90,80	15.722.870.984,00
4.	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	37.531.007.000,00	35.499.822.722,00	94,59	35.820.566.605,00
JUMLAH		**438.168.129.880,00**	**435.977.261.779,00**	**99,50**	**437.316.807.897,00**

Adapun rincian rencana dan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan adalah sebagai berikut :

(1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp8.341.473.000,00 dengan realisasi Rp8.752.290.000,00 atau sebesar 104,92%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2024 sebesar Rp9.855.955.000,00 maka realisasi Tahun 2025 turun sebesar Rp1.103.665.000,00atau 11,20%.

Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10 : Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.023.331.000,00	1.234.771.000,00	120,66	795.683.000,00
2.	DBH PPh Pasal 21	4.807.852.000,00	4.944.384.000,00	102,84	4.373.899.000,00
3.	DBH PPh Pasal 25/WPOPDN	234.030.000,00	256.272.000,00	109,50	164.738.000,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	45.778.000,00	47.670.000,00	104,13	40.376.000,00
5.	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	206.581.000,00	215.233.000,00	104,19	249.158.000,00
6.	DBH SDA Minerba-Royalty	456.069.000,00	470.430.000,00	103,15	1.399.675.000,00
7.	DBH SDA Kehutanan-PSDH	30.344.000,00	46.042.000,00	151,73	51.521.000,00
8.	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	100,00	1.120.498.000,00
9.	DBH Sawit	703.683.000,00	703.683.000,00	100,00	1.660.407.000,00
	JUMLAH	**8.341.473.000,00**	**8.752.290.000,00**	**104,92**	**9.855.955.000,00**

(2) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Tahun 2025 dianggarkan Rp386.662.201.880,00 dengan realisasi Rp386.609.800.112,00 atau 99,99%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2024 sebesar Rp375.917.415.308,00, maka realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.692.384.804,00 atau 2,84%.

Pada APBD Tahun 2025, penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya. Adapun rincian anggaran realisasi DAU Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.11 : Rincian Anggaran dan Realisasi DAU Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	338.902.767.880,00	338.850.366.112,00	99,98	345.468.526.000,00
2.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya				
	a.. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	100,00	3.200.000.000,00
	b. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Penggajian PPPK	1.319.542.000,00	1.319.542.000,00	100,00	1.384.068.308,00
	c. DAU yang Ditentukan Bidang Pendidikan	28.805.149.000,00	28.805.149.000,00	100,00	14.146.553.000,00
	d. DAU yang Ditentukan Bidang Kesehatan	14.434.743.000,00	14.434.743.000,00	100,00	6.676.349.000,00
	e. DAU yang Ditentukan Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	5.041.919.000,00
	JUMLAH	**386.662.201.880,00**	**386.609.800.112,00**	**99,98**	**375.917.415.308,00**

(3) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Tahun 2025 dianggarkan Rp5.633.448.000,00 dengan realisasi Rp5.115.348.945,00 atau 90,80%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 sebesar Rp15.722.870.984,00, maka realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.458.773.415,00 atau 55,80%.

Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12 : Rincian Realisasi DAK Fisik Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Bidang Pendidikan - PAUD Reguler	572.099.000,00	571.830.765,00	99,95	468.802.360,00
2.	Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	5.061.349.000,00	4.543.518.180,00	89,76	11.105.320.000,00
	JUMLAH	**5.633.448.000,00**	**5.115.348.945,00**	**90,80**	**11.574.122.360,00**

(4) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp37.531.007.000,00 dan terealisasi sebesar Rp35.499.822.722,00 atau 94,58%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2024 sebesar Rp35.820.566.605,00, maka realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp320.743.883,00 atau 0,90%.

Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 5.13 : Rincian DAK non Fisik Tahun 2025 dan Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	160.712.982,00	40,11	242.880.211,00
2.	Dana BOSP-BOS Reguler	9.097.500.000,00	8.811.549.600,00	96,85	8.761.512.474,00
3.	Dana BOSP-BOS Kinerja	385.750.000,00	385.750.000,00	100,00	395.000.000,00
4.	Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.348.800.000,00	1.321.841.108,00	98,00	1.417.783.756,00
5.	Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
6.	Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	392.900.000,00	392.336.000,00	99,85	0,00
7.	Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	569.547.000,00
8.	Dana BOK Dinas-BOK Kota	1.723.622.000,00	1.160.391.251,00	67,32	2.579.677.431,00
9.	Dana BOK-Pengawasan Obat dan Makanan	390.069.000,00	390.069.000,00	100,00	333.513.500,00
10.	Dana BOK-Akreditasi Puskesmas	2.461.305.000,00	1.778.282.349,00	72,24	1.841.009.817,00
11.	Tunjangan Profesi Guru	18.831.541.000,00	19.105.792.500,00	101,45	17.920.269.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
12.	Tambahan Penghasilan Guru	165.000.000,00		0,00	240.250.000,00
13.	Dana bantuan Operasiobal KB	1.214.580.000,00	873.817.932,00	71,94	966.046.580,00
14.	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
15.	Dana Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	59.280.000,00	59.280.000,00	100,00	0,00
16.	Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	553.076.836,00
	JUMLAH	**37.531.007.000,00**	**35.499.822.722,00**	**94,58**	**35.820.566.605,00**

2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Untuk Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang tidak mendapatkan alokasi anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya. Sedangkan pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Padang Panjang menerima pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya berupa insentif fiskal sebesar Rp21.772.057.000,00.

Dana Insentif Fiskal yang diterima pada Tahun 2024 terdiri dari Dana Insentif Fiskal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 sebesar Rp16.324.056.000,00 dan Dana Insentif Fiskal Kinerja Pengendaloan Inflasi sebesar Rp5.448.001.000,00.

3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

- **Pendapatan Bagi Hasil**

  Untuk Tahun 2025, Pemerintah Kota Padang Panjang merencanakan Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp30.630.725.097,00 dengan realisasi sebesar Rp23.131.134.427,00 atau 75,52%. Dibandingkan dengan tahun lalu, dimana realisasi Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp28.546.475.247,00, maka realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.415.340.820,00 atau 18,97%.

  Pendapatan bagi hasil Tahun 2025 yang diterima Pemerintah Kota Padang Panjang berupa pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.14 : Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.968.639.806,00	1.963.119.743,00	66,13	6.935.701.436,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	890.738.275,00	733.569.204,00	82,36	3.300.507.008,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.213.837.411,00	10.357.422.793,00	63,88	8.454.128.570,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	202.020.061,00	61.461.075,00	30,42	100.786.282,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.355.489.544,00	10.015.561.612,00	96,72	9.755.351.951,00
	JUMLAH	**30.630.725.097,00**	**23.131.134.427,00**	**75,52**	**28.546.475.247,00**

- **Bantuan Keuangan**

  Selain pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang juga menerima pendapatan transfer antar daerah berupa bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp1.410.000.000,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.410.000.000,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp1.135.373.000,00, bantuan keuangan yang diterima Pemerintah Kota Padang Panjang mengalami kenaikan sebesar Rp274.27.000,00 atau 24,19%.

  Bantuan keuangan khusus tersebut merupakan alokasi anggaran untuk penanganan dampak bencana alam hidrometeorologi yang terjadi di Kota Padang Panjang pada akhir Tahun 2025. Adapun dana bantuan keuangan tersebut disalurkan dalam (tiga) tahap yaitu tahap I tanggal 9 Desember 2025 sebesar Rp250.000.000,00, tahap II tanggal 22 Desember 2025 sebesar Rp250.000.000,00 dan tahap III tanggal 30 Desember 2025 sebesar Rp910.000.000,00.

c. Lain –Lain Pendapatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan peundang-undangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp4.050.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.055.644,444,00 atau 100,13%. Dibandingkan dengan tahun lalu, maka realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.995.256.860,00.

Pendapatan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan peundang-undangan Tahun 2025 yang diterima Pemerintah Kota Padang Panjang berupa pendapatan hibah yang berasal dari sumbangan bencana dari Pemprov Kalimatan Selatan sebesar Rp50.000.000,00, dana darurat dari bantuan presiden sebesar Rp4.000.000.000,00 dan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan peundang-undangan sebesar Rp5.644.444,00 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.15 : Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Pendapatan Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
2.	Dana Darurat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
3.	Lain-lain Pendapatan	0,00	5.644.444,00	0,00	60.387.584,00
	JUMLAH	4.050.000.000,00	4.055.644.444,00	100,14	60.387.584,00

2) Belanja	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	531.654.227.109,81	625.753.832.103,60

Pada Tahun 2025 belanja yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang sebesar Rp593.452.610.116,94 dan sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp531.654.227.109,81 atau 89,58%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp625.753.832.103,60 maka realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp94.099.604.993,79 atau 15,04%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.16 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Belanja Operasi	522.167.052.361,94	475.913.255.150,25	91,14	553.232.938.495,14
2.	Belanja Modal	64.445.641.755,00	55.109.708.175,56	85,51	71.751.888.415,46
3.	Belanja Tidak Terduga	6.239.916.000,00	631.263.784,00	10,12	769.005.193,00
4.	Belanja Transfer	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**593.452.610.116,94**	**531.654.227.109,81**	**89,59**	**625.753.832.103,60**

Penjelasan dari masing-masing kelompok belanja diatas adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan rutin pemerintah daerah yang memberi manfaat atau akan terpakai habis dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan selama tahun berjalan. Belanja operasi Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp522.167.052.361,94 dan terealisasi sebesar Rp475.913.255.150,25 atau 91,14%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp553.232.938.495,14, pada Tahun 2025 realisasi belanja operasi mengalami penurunan sebesar Rp77.319.683.344,89 atau 19,89%.

Realisasi belanja operasi Tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.17 : Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	295.830.460.825,06	278.088.171.575,00	94,00	311.212.828.135,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	210.570.338.118,88	183.618.653.458,52	87,20	214.426.378.424,14
3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Subsidi	134.546.684,00	60.700.008,00	45,11	4.456.800,00
5.	Belanja Hibah	7.432.184.916,00	7.100.765.108,73	95,54	17.174.049.136,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	8.199.521.818,00	7.044.965.000,00	85,92	10.415.226.000,00
	JUMLAH	**522.167.052.361,94**	**475.913.255.150,25**	**91,14**	**553.232.938.495,14**

Rencana dan realisasi belanja operasi tahun anggaran 2025 terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp295.830.460.825,06 dan terealisasi sebesar Rp278.088.171.575,00 atau 94,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp311.212.828.135,00, belanja pegawai Tahun 2025 mengalami penurunan

sebesar Rp33.124.656.560,00 atau 10,64%. Pengurangan persentase pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai menjadi faktor menurunnya realisasi belanja pegawai Kota Padang Panjang pada Tahun 2025.

Belanja pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objetif lainnya ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dan belanja pegawai BLUD. Adapun rincian belanja pegawai terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.18 : Target dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	153.635.073.890,06	149.175.877.796,00	97,10	147.354.794.965,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	102.688.877.659,00	97.247.074.188,00	94,70	109.780.221.034,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	19.525.827.282,75
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.776.840.606,00	7.622.512.800,00	98,02	7.676.645.018,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	478.466.178,00	363.256.738,00	75,92	209.513.404,25
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	520.000.000,00	500.039.710,00	96,16	499.702.996,00
7.	Belanja Pegawai BLUD	30.731.202.492,00	23.179.410.343,00	75,43	26.166.123.435,00
	JUMLAH	**295.830.460.825,06**	**278.088.171.575,00**	**94,00**	**311.212.828.135,00**

Rincian dari komponen belanja pegawai diatas dapat dilihat pada ***Lampiran 3***.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/ jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, belanja barang dan jasa BOSP dan belanja barang dan jasa BLUD.

Belanja barang dan jasa pada Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp210.570.338.118,88 dan telah terealisasi sebesar Rp183.618.653.458,52 atau 87,20%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp214.426.378.424,14, belanja barang dan jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp30.807.724.965,62 atau 14,37%. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2024 dapat dilihat pada ***Lampiran 4***.

Tabel 5.19 : Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Belanja Barang	30.697.010.901,00	24.655.816.835,00	80,32	27.300.369.250,13
2.	Belanja Jasa	91.447.518.226,00	78.164.011.624,50	85,47	87.348.682.617,01
3.	Belanja Pemeliharaan	15.082.998.662,00	11.620.447.135,42	77,04	14.582.099.039,00
4.	Belana Perjalanan Dinas	22.225.639.148,00	20.500.987.143,00	92,23	34.922.657.882,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.642.551.000,00	8.146.959.686,00	84,51	9.255.396.142,00
6.	Belanja Barang dan Jasa BOSP	5.542.265.123,00	5.377.816.674,00	97,03	5.630.398.948,00
7.	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	2.411.954.000,00	2.009.667.149,00	83,32	
8.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	33.520.401.058,88	33.142.947.211,00	98,87	35.386.774.546,00
	JUMLAH	**210.570.338.118,88**	**183.618.653.457,92**	**87,20**	**214.426.378.424,14**

Rincian dari belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dapat dilihat pada ***Lampiran 5.***

3. Belanja Bunga

Pada Tahun 2025 tidak tedapat anggaran dan realisasi belanja bunga, demikian juga dengan Tahun 2024.

4. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp134.546.684,00 dan telah terealisasi sebesar Rp60.700.008,00 atau sebesar 45,11%. Belanja subsidi digunakan untuk pelaksanaan Program Subsidi Bunga Untuk Pelaku Usaha Mikro sebagai pengganti Program Pengelolaan Dana Bergulir yang telah dihentikan operasionalnya pada Tahun 2025.

Sistem penyaluran kredit dengan subsidi bunga ini mengikuti mekanisme penyaluran kredit perbankan. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala dalam persetujuan pencairan kredit yang diajukan pelaku usaha antara lain catatan kredit di SLIK OJK (BI *Checking*) dan ketidakmampuan pelaku usaha untuk memberikan jaminan/agunan yang sebanding dengan besaran kredit yang diajukan.

5. Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp7.432.184.916,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.100.765.108,73 atau 95,54%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.20 : Target dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	10.183.700.000,00
2.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	511.890.000,00	507.670.336,37	99,18	636.315.784,00
3.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	715.000.000,00	548.902.360,00	76,77	527.700.000,00
4.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.704.500.000,00	1.627.371.677,36	95,48	1.382.505.030,00
5.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	130.015.000,00
6.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	1.446.422.631,00
7.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	0,00	0,00	524.257.552,00
8.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	792.094.916,00	792.094.916,00	100,00	699.852.380,00
9.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	1.997.000.000,00	1.938.754.719,00	97,08	0,00
10.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.256.400.000,00	1.230.671.100,00	97,95	1.317.583.759,00
11.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	255.300.000,00	255.300.000,00	100,00	325.697.000,00
	JUMLAH	**7.432.184.916,00**	**7.100.765.108,73**	**95,54**	**17.174.049.136,00**

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp17.174.049.136,00, realisasi belanja hibah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.073.284.027,27 atau 58,65% Hal ini disebabkan bahwa belanja hibah uang kepada pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 tidak dianggarkan lagi pada tahun 2025. Adapun rincian dari komponen belanja hibah Tahun 2025 diatas dapat dilihat pada ***Lampiran 6.***

Diinformasikan bahwa di Tahun 2025 penggunaan dana BOS SD dan SMP swasta dianggarkan pada rekening belanja hibah dana BOSP-BOS dengan anggaran sebesar Rp1.997.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.938.754.719,00 sedangkan pada tahun 2024 penggunaan dana BOS SD dan SMP swasta dianggarkan pada kelompok rekening belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas swasta dan kelompok rekening belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen swasta.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025, Pemerintah Kota Padang Panjang menganggarkan sebesar Rp792.094.916,00 dan terealisasi sebesar Rp792.094.916,00 atau 100,00%.

Besaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tertuang dalam Keputusan Walikota No 50 Tahun 2025 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemenang Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21 : Daftar Realisasi Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025

No.	Partai Politik	Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Partai Keadilan Sejahtera	99.164.788	99.164.788	100,00	68.791.895,00
2.	Partai Demokrat	70.438.760	70.438.760	100,00	131.519.338,00
3.	Partai Golkar	81.849.181	81.849.181	100,00	83.166.672,00
4.	Partai Nasdem	196.988.557	196.988.557	100,00	64.353.203,00
5.	Partai Amanat Nasional	146.994.447	146.994.447	100,00	84.891.959,00
6.	Partai Bulan Bintang	47.759.079	47.759.079	100,00	122.385.582,00
7.	Partai Kebangkitan Bangsa	35.407.593	35.407.593	100,00	106.920.736,00
8.	Partai Gerindra	113.492.511	113.492.511	100,00	37.822.995,00
	JUMLAH	**792.094.916,00**	**792.094.916,00**	**100,00**	**699.852.380,00**

6. Belanja Bantuan Sosial

Untuk Tahun 2025, Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp8.199.521.818,00 dan telah terealisasi sebesar Rp7.044.965.000,00 atau 85,91%. Belanja bantuan sosial terdiri dari :

Tabel 5. 22 : Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.774.521.818,00	4.824.965.000,00	83,56	7.535.226.000,00
2.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.425.000.000,00	2.220.000.000,00	91,55	2.880.000.000,00
	JUMLAH	**8.199.521.818,00**	**7.044.965.000,00**	**85,92**	**10.415.226.000,00**

Adapun rincian belanja bantuan sosial per SKPD adalah sebagai berikut:

1) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu
   - Sekretariat Daerah

     Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu pada Sekretariat Daerah berupa dana bantuan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa yang berasal dari Kota Padang Panjang sebesar Rp450.000.000,00.

- Dinas Pangan dan Pertanian
  Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu pada Dinas Pangan dan Pertanian untuk pembelian sarana pertanian petani sebesar Rp1.295.865.000,00.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp476.555.000,00 berupa penyediaan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu di PAUD sebesar Rp1.000.000,00, Sekolah Dasar sebesar Rp280.000.000,00 dan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp195.500.000,00.
- Dinas Perdakop UKM
  Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu pada Dinas Perdagkop UKM untuk pembelian peralatan/bahan dagangan/bahan baku/isi warung modal usaha sebesar Rp2.602.600.000,00.

2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga
   Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sebesar Rp2.220.000.000,00 berupa bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada Dinas Perkim LH sebanyak 111 keluarga @ Rp20.000.000,00.

Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp10.415.226.000,00, maka realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.370.261.000,00 atau 32,36%. Penurunan belanja bantuan sosial ini disebabkan tidak adanya bantuan sosial untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrim yang tahun sebelumnya di anggarkan oleh Dinas Sosial P2KBP3A. Program bantuan di Tahun Anggaran 2025 berupa pembelian bibit ternak pada Dinas Pangan dan Pertanian, program bantuan pembelian peralatan/bahan dagangan/bahan baku/isi warung pada Dinas Perdagkop UKM dan program perbaikan rumah tidak layak huni pada Dinas Perkim LHR. Rincian Belanja Sosial Tahun 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 7***.

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp64.445.641.755,00 dan direalisasikan sebesar Rp55.109.708.175,56 atau 85,51%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp71.751.888.415,46 maka belanja modal Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp16.642.180.239,90 atau 23,19%. Belanja modal terdiri atas empat kelompok utama seperti tabel berikut ini :

Tabel 5.23 : Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	9.421.400,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.474.130.304,00	14.811.794.052,00	84,76	14.731.124.143,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.016.356.885,00	20.311.104.559,19	84,57	39.342.022.232,00
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.826.707.861,00	18.910.651.808,37	86,64	16.570.946.513,46
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	933.446.705,00	911.322.756,00	97,63	1.004.874.127,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	195.000.000,00	164.835.000,00	84,53	93.500.000,00
	JUMLAH	**64.445.641.755,00**	**55.109.708.175,56**	**85,51**	**71.751.888.415,46**

Berikut adalah penjelasan masing-masing kelompok belanja modal.

1. Belanja Modal Tanah

Pada Tahun 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal tanah. Sedangkan pada Tahun 2024 terdapat realisasi belanja modal tanah sebesar Rp9.421.400,00 berupa belanja konsultan perencanaan pembangunan Puskesmas Pembantu Guguk Malintang.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp17.474.130.304,00 dengan realisasi sebesar Rp14.811.794.052,00 atau 84,76%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp14.731.124.143,00, maka realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp80.669.909,00 atau 0,55%.

Kenaikan realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada Tahun 2025 antara lain disebabkan oleh adanya pengadaan alat kesehaan umum pada dinas kesehatan, pembelian mebel untuk pada beberapa sekolah serta pengadaan peralatan dan mesin pada BLUD RSUD. Berikut realisasi belanja modal peralatan dan mesin per objek belanja:

Tabel 5.24 : Daftar Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Belanja Modal Alat Bantu	321.707.600,00	242.216.500,00	75,29	974.383.700,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.623.000.000,00	4.573.353.140,00	98,93	3.741.320.800,00
3.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	5.000.000,00	3.350.000,00	67,00	6.396.690,00
4.	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	18.268.000,00
5.	Belanja Modal Alat Kantor	544.934.850,00	428.643.678,00	78,66	520.961.004,00
6.	Belanaj Modal alat Rumah Tangga	2.270.142.902,00	1.658.674.498,00	73,06	1.834.838.098,00
7.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	519.759.800,00	268.042.418,00	51,57	649.155.000,00
8.	Belanja Modal Alat studio	78.700.000,00	45.130.000,00	57,34	314.662.000,00
9.	Belanja Modal Alat Komunikasi	88.532.000,00	87.962.000,00	99,36	0,00
10.	Belanja Modal Peralatan Pemacar	32.797.000,00	31.942.500,00	97,39	0,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
11.	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	579.900.000,00
12.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.180.000.000,00	1.155.570.500,00	1,00	44.200.000,00
13.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	243.026.200,00
14.	Belanja Modal Komputer Unit	1.023.485.980,00	992.742.311,00	97,00	2.842.850.850,00
15.	Belanja Modal Peralatan Komputer	172.384.400,00	144.477.498,00	83,81	124.425.000,00
16.	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	23.900.000,00
17.	Belanja Modal Alat Pelindung	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00
19.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	43.800.000,00
20.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	-	1.082.756.422,00
21.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	1.253.208.172,00	1.245.584.191,00	99,39	30.881.000,00
22.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	12.330.000,00	12.330.000,00	100,00	14.810.000,00
23.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	39.041.500,00
24.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.302.947.600,00	3.886.774.818,00	73,29	1.581.747.879,00
	JUMLAH	**17.474.130.304,00**	**14.811.794.052,00**	**84,76**	**14.731.124.143,00**

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp24.016.356.885,00 dengan realisasi Rp20.311.104.559,19 atau 84,57%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp39.342.022.232,00, realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp19.030.917.672,81 atau 48,37%. Penurunan realisasi belanja modal gedung dan bangunan di Tahun 2024 disebabkan oleh seiring dengan selesainya pembangunan gedung sarana olahraga *Sport Center* dan kurangnya realisasi belanja modal bangunan gedung pada BLUD RSUD karena Pekerjaan IDT belum selesai pelaksanaannya.

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk pengadaan/konstruksi/pembelian bangunan/gedung pemerintah termasuk rehabilitasi bangunan/gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas maupun bangunan lainnya yang dikuasai oleh pemerintah. Berikut realisasi belanja modal gedung dan bangunan per objek belanja:

Tabel 5.25 : Daftar Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	23.291.856.885,00	19.655.516.325,19	84,39	39.241.807.342,45
2.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	24.500.000,00	5.700.000,00	23,27	88.614.889,55
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	700.000.000,00	649.888.234,00	92,84	11.600.000,00
JUMLAH		**24.016.356.885,00**	**20.311.104.559,19**	**84,57**	**39.342.022.232,00**

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp21.826.707.861,00 dengan realisasi sebesar Rp18.910.651.808,37 atau 86,63%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp16.570.946.513,46, maka realisasi belanja modal Tahun 202 mengalami kenaikan sebesar Rp2.339.705.294,91 atau 14,12%.

Kenaikan realisasi belanja modal jalan, pembangunan dam untuk mengantasi bencana longsor serta rehab saluran irigasi dan drainase pada Dinas PUPR dan Dinas Perkim LH serta belanja modal instalasi air kotor pada RSUD Kota Padang Panjang .

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk pengadaan ataupun kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan, jaringan air, saluran drainase/gorong-gorong/riol, instalasi listrik dan jaringan listrik. Berikut realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi:

Tabel 5. 26 : Daftar Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Belanja Modal Jalan	8.754.317.609,00	8.226.025.566,00	93,97	6.584.821.185,81
2.	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00	79.200.000,00
3.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.918.135.034,00	3.861.479.124,37	98,55	4.634.687.124,65
4.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.609.733.996,00	3.413.707.062,00	94,57	2.625.044.761,00
5.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.541.950.000,00	2.103.638.000,00	82,76	2.301.843.400,00
6.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	79.960.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	967.707.420,00	958.420.001,00	99,04	93.122.000,00
8.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	1.812.503.802,00	205.943.800,00	11,36	99.400.000,00
9.	Belanja Modal Jaringan Listrik	142.400.000,00	141.438.255,00	99,32	152.828.042,00
JUMLAH		**21.826.707.861,00**	**18.910.651.808,37**	**86,63**	**16.570.946.513,46**

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp933.446.705,00 dengan realisasi sebesar Rp911.322.756,00 atau 97,63%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.004.874.127,00

maka realisasi belanja modal aset tetap lainnya pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp93.551.371,00 atau 9,31%. Berikut daftar realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun 2025:

Tabel 5. 27 : Daftar Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	76.455.000,00
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	107.500.000,00
3.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	817.912.927,00
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	903.244.705,00	881.120.756,00	97,55	3.006.200,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
6.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	20.202.000,00	20.202.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**933.446.705,00**	**911.322.756,00**	**97,63**	**1.004.874.127,00**

Belanja modal aset tetap lainnya BOS adalah belanja modal untuk pembelian buku teks untuk siswa SD dan SMP.

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp195.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp164.835.000,00 atau 84,53%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal asset lainnya Tahun 2024 sebesar Rp93.500.000,00 maka realisasi belanja modal asset lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp71.335.000,00 atau 76,29%.

Belanja modal Tahun 2025 digunakan untuk pembayaran pembuatan aplikasi e-Guru SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp164.835.000,00.

c. Belanja Tidak Terduga

Akun belanja ini diperuntukkan bagi keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang. Anggaran belanja tidak terduga pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp6.239.916.000,00 dan terealisasi sebesar Rp631.263.784,00 atau 10,11%.

Dibandingkan dengan belanja tidak terduga Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp769.005.193,00, maka belanja tak terduga Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp137.741.409,00 atau 17,91%.

Belanja tidak terduga Tahun 2025 digunakan untuk penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kota Padang Panjang yang disalurkan ke beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Sosial, P2KB P3A
   Penggunaan dana BTT pada Dinas Sosial P2KB P3A dengan jumlah Rp200.842.700,00 adalah untuk biaya operasional dapur umum bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi.

2. BPBD Kesbangpol
   Penggunaan dana BTT pada BPBD Kesbangpol digunakan untuk penanganan kondisi tanggap darurat bencana hidrometeorologi sebesar Rp411.186.200,00.

3. Dinas Kesehatan
   Penggunaan dana BTT pada Dinas Kesehatan adalah untuk pemenuhan kebutuhan obat dan BMHP bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi sebesar Rp19.234.884,00.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang menganggarkan belanja bantuan keuangan khusus ke Provinsi sebesar Rp600.000.000,00. Anggaran belanja bantuan keuangan tersebut direncanakan untuk membantu uang komite bagi siswa SMA yang ada di Kota Padang Panjang yang berada di bawah kewenangan Propinsi. Namun saat akan dilakukan pencairan pihak propinsi tidak dapat melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang menjadi persyaratan pencairan dana tersebut sehingga sampai akhir tahun belanja transfer ini tidak terealisasi.

3) Surplus/(Defisit)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	33.345.863.647,95	**(42.551.164.568,72)**

Surplus/defisit merupakan selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Pada Tahun 2025 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang direncanakan mengalami defisit sebesar Rp6.451.405.669,94. Defisit tersebut akan ditutupi dengan pembiayaan netto berupa penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun 2024.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 mengalami surplus sebesar Rp33.345.863.647,95. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Pemerintah Kota Padang Panjang lebih besar dari belanja yang dibayarkan.

Adapun rincian surplus/(defisit) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah	Rp 565.000.090.757,76
2.	Belanja Daerah	Rp 531.654.227.109,81
3.	**Surplus/(Defisit)**	**Rp 33.345.863.647,95**

4) Pembiayaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	6.451.405.669,94	49.002.570.238,66

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp6.451.405.669,94 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024.

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp6.451.405.669,94 atau 100%. Jika dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan Tahun 2024 sebesar Rp50.002.570.238,66 maka realisasi penerimaan pembiayaan di Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp43.551.164.568,72 atau 87,10%.

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2025 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Saldo Kas Daerah	Rp.	5.231.959.422,06
2.	Kas di Rekening BLUD RSUD	Rp.	35.050.759,88
3.	Kas di Rekening BLUD Puskesmas Kebun Sikolos	Rp.	138.512.494,00
4.	Kas di Rekening BLUD Puskesmas Bukit Surungan	Rp.	81.531.334,00
5.	Kas di Rekening BLUD Puskesmas Koto Katik	Rp.	7.560.026,00
6.	Kas di Rekening BLUD Puskesmas Gunung	Rp.	71.071.914,00
7.	Kas di Rekening Dana BOK	Rp.	633.371.651,00
8	Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	Rp.	0,00
9.	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	Rp.	74.200,00
7.	Kas di Rekening Dana BOS	Rp.	249.679.850,00
8	Kas di Rekening Dana BOP PAUD	Rp.	1.229.992,00
9.	Kas di Rekening Dana BOP Kesetaraan	Rp.	1.364.027,00
	JUMLAH	**Rp**	**6.451.405.669,94**

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan, sedangkan pada Tahun 2024 terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) sebesar Rp1.000.000.000,00.

c. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp6.451.405.669,94 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28 : Rincian Pembiayaan Netto Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%	Realisasi 2024 (Rp.)
1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**6.451.405.669,94**	**6.451.405.669,94**	**100,00**	**50.002.570.238,66**
	- SILPA Tahun Sebelumnya	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	100,00	48.615.812.049,66
	- Divestasi Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00	0,00	1.386.758.189,00
2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**
	- Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
3.	**PEMBIAYAAN NETTO**	**6.451.405.669,94**	**6.451.405.669,94**	**100,00**	**49.002.570.238,66**

5)	**SiLPA**	**Tahun 2025 (Rp)**	**Tahun 2024 (Rp)**
		39.797.269.317,89	**6.451.405.669,94**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. SiLPA per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp39.797.269.317,89. Dibandingkan dengan SiLPA tahun 2024 dimana SiLPA tercatat berjumlah Rp6.451.405.669,94, maka SiLPA Tahun 2025 naik sebesar Rp33.345.863.647,95atau 516,88%. Rincian SiLPA Tahun 2025 terdiri dari:

1.	Saldo Kas Daerah (Bank Nagari rek 0900.0101.00203.3)			Rp.	38.053.573.214,01
2.	Saldo Kas Transitoris (Bank Nagari rek 0900.0101.00629-3)			Rp.	39.313.100,00
3.	Kas Bendahara Pengeluaran			Rp.	38.500.000,00
4.	Kas di Bendahara BLUD			Rp.	1.046.925.015,88
	- RSUD	Rp.	290.585.069,88		
	- Puskesmas Kebun Sikolos	Rp.	287.516.355,00		
	- Puskesmas Bukit Surungan	Rp.	338.544.354,00		
	- Puskesmas Koto Katik	Rp.	41.941.253,00		
	- Puskesmas Gunung	Rp.	88.337.984,00		
5.	Kas BOK Puskesmas			Rp.	401.986.851,00
	Puskesmas Kebun Sikolos	Rp.	41.902.226,00		
	Puskesmas Bukit Surungan	Rp.	94.415.244,00		
	Puskesmas Koto Katik	Rp.	179.393.741,00		
	Puskesmas Gunung	Rp.	86.275.640,00		
6.	Kas BOSP			Rp.	216.971.137,00
	- Kas BOS	Rp.	215.284.310,00		
	- Kas BOP PAUD	Rp.	36.800,00		
	- Kas BOP Kesetaraan	Rp.	1.650.027,00		
7.	**Jumlah**			**Rp**	**39.797.269.317,89**
8.	**SiLPA**			**Rp.**	**39.797.269.317,89**
9.	**Selisih Kas dan SiLPA**			**Rp.**	**0,00**

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp38.053.573.214,01 terdiri dari:

A.	**DAK FISIK REGULER**			**Rp.**	**709.517.853,62**
	1. DAK Bidang Pendidikan	Rp.	25.729.899,62		
	2. DAK Bidang Kesehatan dan KB	Rp.	549.092.579,00		
	3. DAK Sanitasi	Rp.	1.357.075,00		
	4. DAK Pariwisata	Rp.	436,00		
	8. DAK Bidang Jalan	Rp.	55.759.723,00		
	9. DAK Air Minum	Rp.	18.402.340,00		
	10. DAK Irigasi	Rp.	1,00		
	11. DAK LH dan Kelautan	Rp.	59.175.800,00		
B.	**DAK NON FISIK**			**Rp.**	**1.135.245.940,00**
	1. DAK Non Fisik TPG	Rp.	376.507.820,00		
	2. DAK Non Fisik Tamsil Guru	Rp.	22.250.000,00		
	3. DAK Non Fisik BOK	Rp.	187.561.536,00		
	4. DAK Non Fisik BOKB	Rp.	318.918.813,00		
	5. DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp.	108.209.710,00		
	6. DAK Non Fisik Perpustakaan	Rp.	87.774.660,00		
	7. DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	34.023.401,00		
C.	**DBH**			**Rp.**	**267.194.945,19**
	1. DBH Sawit	Rp.	265.302.945,19		
	2. DBH CHT	Rp.	1.892.000,00		
D.	**DAU Ditentukan Peruntukan**			**Rp.**	**9.784.498.947,00**
	1. Dukungan Sarpras, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp.	409.081.960,00		
	2. Dukungan Bidang Pendidikan	Rp.	2.975.630.175,00		
	3. Dukungan Bidang Kesehatan	Rp.	1.055.583.992,00		
	4. Sisa bantuan keuangan dari Presiden	Rp.	4.000.000.000,00		
	5. Sisa Bantuan Keuangan Khusus dari Provonsi	Rp.	1.294.202.820,00		
	6. Sisa Bantuan Keuangan dari Prov. Kaltim	Rp.	50.000.000,00		
F.	**SiLPA Kegiatan**			**Rp.**	**26.157.115.528,20**
	Jumlah			**Rp.**	**38.053.573.214,01**

5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan Saldo Anggaran Lebih, sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Rincian atas masing-masing akun pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo anggaran lebih awal untuk Tahun 2025 sebesar Rp6.451.405.669,94 adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024.

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 yang menjadi penerimaan pembiayaan pada Tahun 2025. Dan seluruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp6.451.405.669,94 menjadi penerimaan pembiayaan dan digunakan untuk menutupi defisit anggaran pada Tahun 2025.

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp39.797.269.317,89 berasal dari surplus realisasi anggaran sebesar Rp33.345.863.647,95 ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp6.451.405.669,94.

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan bisa berpengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan tersebut tidak bisa diandalkan lagi. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan Saldo Anggaran Lebih dan saldo ekuitas. Pada Tahun 2025 tidak ditemui adanya kesalahan yang mengharuskan dilakukannya koreksi terhadap laporan-laporan periode sebelumnya.

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan nilai Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran dikurangi Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya. Pada Tahun 2025 nilai saldo anggaran lebih akhir adalah sebesar Rp39.797.269.317,89 yang terdiri dari SiLPA Tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut :

1	Realisasi Pendapatan	Rp.	565.000.090.757,76
2	Realisasi Belanja Daerah	Rp.	(531.654.227.109,81)
3	Surplus/(Defisit) (1-2)	Rp.	33.345.863.647,95
4	Pembiayaan Netto	Rp.	6.451.405.669,94
5	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 3+4**	Rp.	**39.797.269.317,89**

Saldo anggaran lebih Tahun 2025 tersebut diatas terdiri dari:

1.	Saldo Kas Daerah (Bank Nagari rek 0900.0101.00203.3)			Rp.	38.053.573.214,01
2.	Saldo Kas Transitoris (Bank Nagari rek 0900.0101.00629-3)			Rp.	39.313.100,00
3.	Kas Bendahara Pengeluaran			Rp.	38.500.000,00
4.	Kas di Bendahara BLUD			Rp.	1.046.925.015,88
	- RSUD	Rp.	290.585.069,88		
	- Puskesmas Kebun Sikolos	Rp.	287.516.355,00		
	- Puskesmas Bukit Surungan	Rp.	338.544.354,00		
	- Puskesmas Koto Katik	Rp.	41.941.253,00		
	- Puskesmas Gunung	Rp.	88.337.984,00		
5.	Kas BOK Puskesmas			Rp.	401.986.851,00
	Puskesmas Kebun Sikolos	Rp.	41.902.226,00		
	Puskesmas Bukit Surungan	Rp.	94.415.244,00		
	Puskesmas Koto Katik	Rp.	179.393.741,00		
	Puskesmas Gunung	Rp.	86.275.640,00		
6.	Kas BOSP			Rp.	216.971.137,00
	- Kas BOS	Rp.	215.284.310,00		
	- Kas BOP PAUD	Rp.	36.800,00		
	- Kas BOP Kesetaraan	Rp.	1.650.027,00		
7.	**Jumlah**			**Rp**	**39.797.269.317,89**
8.	**SiLPA**			**Rp.**	**39.797.269.317,89**
9.	**Selisih Kas dan SiLPA**			**Rp.**	**0,00**

5.3 PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

Neraca Pemerintah Kota Padang Panjang menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2025 dengan nilai Aset sebesar Rp1.423.682.153.096,00 dan Rp1.381.487.623.684,14 untuk nilai aset Tahun 2024. Kewajiban Tahun 2025 sebesar Rp21.236.412.579,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp14.548.634.631,66 serta Ekuitas sebesar Rp1.402.445.740.517,51 dan Rp1.366.938.989.052,48 di Tahun 2024. Rincian:

A. Aset Lancar	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	70.078.645.610,43	39.201.693.267,68

Aset Lancar adalah Kas dan Setara Kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, ppdipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Aset lancar Pemerintah Kota Padang Panjang per 31 Desember 2025 berjumlah Rp70.078.645.610,43. Jika dibandingkan dengan jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.201.693.267,68 maka jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp30.876.952.342,75 atau 78,76%. Aset Lancar per 31 Desember 2025 terdiri dari:

1) Kas di Kas Daerah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	38.053.573.214,01	5.231.959.422,06

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp38.053.573.214,01. Jika dibandingkan dengan saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.231.959.422,06 maka saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp32.821.613.791,95 atau 627,33%.

Adapun rincian Kas di Kas Daerah sebesar Rp38.053.573.214,01 adalah sebagai berikut:

A.	**DAK FISIK REGULER**			**Rp.**	**709.517.853,62**
	1.	DAK Bidang Pendidikan	Rp. 25.729.899,62		
	2.	DAK Bidang Kesehatan dan KB	Rp. 549.092.579,00		
	3.	DAK Perumahan dan Pemukiman	Rp. 1.357.075,00		
	4.	DAK Pariwisata	Rp. 436,00		
	5.	DAK Bidang Jalan	Rp. 55.759.723,00		
	6.	DAK Air Minum	Rp. 18.402.340,00		
	7.	DAK Irigasi	Rp. 1,00		
	8.	DAK LH dan Kelautan	Rp. 59.175.800,00		
B.	**DAK NON FISIK**			**Rp.**	**1.135.245.940,00**
	1.	DAK Non Fisik TPG	Rp. 376.507.820,00		
	2.	DAK Non Fisik Tamsil Guru	Rp. 22.250.000,00		
	3.	DAK Non Fisik BOK	Rp. 187.561.536,00		
	4.	DAK Non Fisik BOKB	Rp. 318.918.813,00		
	5.	DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp. 108.209.710,00		
	6.	DAK Non Fisik Perpustakaan	Rp. 87.774.660,00		
	8.	DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan	Rp. 34.023.401,00		

C.	**DBH**			**Rp.**	**267.194.945,19**
	1. DBH Sawit	Rp.	265.302.945,19		
	2. DBH CHT	Rp.	1.892.000,00		
D.	**DAU Ditentukan Peruntukan**			**Rp.**	**9.784.498.947,00**
	1. Dukungan Sarpras, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp.	409.081.960,00		
	2. Dukungan Bidang Pendidikan	Rp.	2.975.630.175,00		
	3. Dukungan Bidang Kesehatan	Rp.	1.055.583.992,00		
	4. Sisa bantuan keuangan dari Presiden	Rp.	4.000.000.000,00		
	5. Sisa Bantuan Keuangan Khusus dari Provonsi	Rp.	1.294.202.820,00		
	6. Sisa Bantuan Keuangan dari Prov. Kaltim	Rp.	50.000.000,00		
F.	**SiLPA Kegiatan**			**Rp.**	**26.157.115.528,20**
	Jumlah			**Rp.**	**38.053.573.214,01**

Dalam hal manajemen kas, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan *Single Treasury Account*, yaitu Bank Nagari Cabang Padang Panjang dengan nomor rekening 0900.0101.00203.3 sebagai Rekening Kas Umum Daerah. Rekening ini berfungsi sebagai penerima transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi dan rekening penerimaan PAD.

Disamping itu, Pemerintah Kota Padang Panjang juga menetapkan satu buah rekening pada Bank Nagari Cabang Padang Panjang (Rekening Nomor 0900.0101.00204.6) sebagai penampung seluruh penerimaan potongan pihak ketiga (PFK) dan membayar seluruh pengeluaran terhadap pihak ketiga dengan saldo per 31 Desember 2025 adalah Rp.0,00.

Penetapan rekening Pemerintah Kota Padang Panjang adalah dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: 900/5/WAKO-PP/2015 tanggal 16 Januari 2016 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang pada Bank Nagari Cabang Padang Panjang.

Selain dua rekening tersebut diatas, juga terdapat rekening penampung penerimaan pendapatan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari Pemerintah provinsi Sumatera Barat sebelum dipindahkan ke RKUD. Rekening tersebut terdapat pada Bank Nagari Cab. Padang Panjang dengan nomor rekening 0900.0101.00629-3

2) Kas di Bendahara Pengeluaran	**31 Desember 2025 (Rp)**	**31 Desember 2024 (Rp)**
	38.500.000,00	**0,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah Rp38.500.000,-. Akun ini merupakan saldo kas yang masih berada pada pemegang kas di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa sisa uang persediaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai tanggal 31 Desember 2025.

Jika dibandingkan dengan saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 maka saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp38.500.00,00.

a) Saldo Uang Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	38.500.000,00	**0,00**

Saldo Uang Persediaan yang masih ada di kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp38.500.000,00. Saldo tersebut merupakan sisa UYHD pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang belum sepenuhnya disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Saldo uang persediaan ini secara fisik tidak berada pada kas bendahara pengeluaran namun berada pada pihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan.

Terhadap saldo Uang Persediaan tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 22 Januari 2026.

3) Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	**74.200,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo kas di bendahara penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp.0,00.

4) Kas di BLUD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	1.046.925.015,88	**333.726.527,88**

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.046.925.015,88. Saldo ini merupakan saldo kas pada BLUD RSUD dan BLUD UPTD Puskesmas yang mencakup kas di rekening giro dan saldo kas di bendahara.

a) BLUD RSUD

BLUD RSUD dibentuk pada tanggal 17 Desember 2012 yang dikelola langsung oleh Direktur RSUD. BLUD RSUD merupakan salah satu program dari APBD dan menjadi bagian dari SKPD Dinas Kesehatan. Pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD ini berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Daerah Kota Padang Panjang. Saldo kas pada bendahara BLUD RSUD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.	Saldo Awal Kas BLUD RSUD	Rp.	35.050.759,88
2.	Penerimaan BLUD RSUD Tahun 2025	Rp	57.082.426.825,00
3.	Belanja BLUD RSUD Tahun 2025	Rp	(56.826.892.515,00)
	Saldo kas per 31 Desember 2025	**Rp**	**290.585.069,88**

Saldo kas BLUD RSUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp290.585.069,88 mengalami kenaikan sebesar Rp255.534.310,00 atau 729,04% jika dibandingkan dengan saldo kas Tahun 2024 sebesar Rp35.050.759,88.

Saldo kas BLUD RSUD sebesar Rp290.585.069,88 tersebut terdiri dari:

1.	Kas di Rekening Giro	Rp.	290.585.069,88
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
	Saldo kas per 31 Desember 2025	**Rp**	**290.585.069,88**

Pada tanggal 31 Desember 2025 Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00

b) BLUD UPTD Puskesmas

Pada akhir Tahun 2023, 4 (empat) FKTP Puskesmas yaitu Puskesmas Gunung, Puskesmas Bukit Surungan, Puskesmas Kebun Sikolos dan Puskesmas Koto Katik beralih status menjadi BLUD yang mulai diterapkan pada Tahun Anggaran 2024.

Penerapan status BLUD pada keempat UPTD Puskesmas tersebut berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 147 Tahun 2023 Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Gunung, Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 148 Tahun 2023 Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Bukit Surungan, Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 149 Tahun 2023 Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kebun Sikolos dan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 150 Tahun 2023 Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Koto Katik.

Saldo Kas BLUD Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp756.339.946,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1.	Saldo awal	Rp.	298.675.768,00
2.	Penerimaan	Rp.	4.489.792.269.00
3.	Belanja	Rp.	(4.032.128.091,00)
	Saldo Kas per 31 Desember 2025	**Rp.**	**756.339.946,00**

Adapun rincian saldo kas BLUD UPTD Puskesmas per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1.	Puskesmas Gunung	Rp.	88.337.984,00
2.	Puskesmas Bukit Surungan	Rp.	338.544.354,00
3.	Puskesmas Kebun Sikolos	Rp.	287.516.355,00
4.	Puskesmas Koto Katik	Rp.	41.941.253,00
	Jumlah	**Rp.**	**756.339.946,00**

5) Kas Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	39.313.100,00	0,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp39.313.100,00. Saldo kas lainnya timbul karena penerimaan Opsen Pajak yang diterima tanggal 31 pada Desember 2025 dan masih berada di Kas Transitoris.

Tanggal 31 Desember 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat saldo kas sebesar Rp1.391.534.468,00 yang tertampung dalam Nomor Rekening 0900.0101.0065.4-0 an Dana Bantuan Sosial TDB. Pembukaan rekening dilakukan pada tahun 2024 karena terjadinya banjir bandang dan lahar dingin. Rekening tersebut digunakan untuk menampung dana bantuan dari Pemerintah, Lembaga dan Masyarakat yang terdampak bencana Hidrometeorologi .

6) Kas Dana BOK Puskesmas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	401.986.851,00	633.371.651,00

Saldo Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp401.986.851,00. Jika dibandingkan dengan saldo Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp633.371.651,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp231.384.800,00 atau 36,53%.

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas merupakan sisa penggunaan dana kegiatan akreditasi Puskesmas yang dianggarkan dan dibiayai melalui DAK non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas. Sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK non fisik bidang kesehatan, penyaluran BOK Akreditasi Puskesmas dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening yang khusus Dana BOK Akreditasi pada masing-masing Puskesmas.

Adapun saldo kas dana BOK Akreditasi Puskesmas per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 29 : Daftar Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Saldo (Rp.)
1	Puskesmas Bukit Surungan	41.902.226,00
2	Puskesmas Koto Katiak	179.393.741,00
3	Puskesmas Kebun Sikolos	94.415.244,00
4	Puskesmas Gunung	86.275.640,00
	JUMLAH	**401.986.851,00**

Saldo kas dana BOK tersebut terdapat di rekening giro masing-masing Puskesmas yang berada pada Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Padang Panjang. Rincian perhitungan saldo saldo Dana BOK Akreditasi Puskesmas adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp.	633.371.651,00
Penerimaan Tahun 2025	Rp.	1.778.282.349,00
Belanja Tahun 2025	Rp.	(2.009.667.149,00)
Saldo per 31 Desember 2025	**Rp.**	**401.986.851,00**

7) Setara Kas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Pada Tahun 2025 tidak terdapat penempatan dana Pemerintah Kota Padang Panjang dalam bentuk setara kas/deposito jangka pendek.

8) Kas Dana BOSP

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
216.971.137,00	252.273.869,00

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp216.971.137,00 dan saldo per 31 Desember 2024 adalah Rp252.273.869,00.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, saldo pengelolaan dana BOSP (BOS, BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan) disajikan pada rekening Kas Dana BOSP.

Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp216.971.137,00 terdiri dari saldo dana BOS sebesar Rp215.284.310,00, saldo dana BOP PAUD sebesar Rp36.800,00 dan saldo BOP Kesetaraan sebesar Rp1.650.027,00.

a) Dana BOS

Saldo Dana BOS per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp215.284.310,00 terdiri dari saldo di rekening giro SD Negeri dan SMP Negeri se-Kota Padang Panjang.

Rincian perhitungan saldo dana BOS per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal			Rp.	249.679.850,00
Penerimaan Tahun 2025			Rp.	9.197.299.600,00
1. BOS Reguler	Rp.	8.811.549.600,00		
2. BOS Kinerja	Rp.	385.750.000,00		

Belanja Tahun 2025			Rp.	(9.231.695.140,00)
1. BOS Reguler	Rp.	(8.862.641.170,00)		
2. BOS Kinerja	Rp.	(369.053.970,00)		
Saldo per 31 Desember 2025			**Rp.**	**215.284.310,00**
1. BOS Reguler	Rp.	173.488.932,00		
2. BOS Kinerja	Rp.	41.795.378,00		
Saldo rekening BOS per 31 Desember 2025			**Rp.**	**215.284.310,00**
Selisih			**Rp.**	**(0,00)**

Adapun rincian saldo dana BOS per sekolah SD dan SMP Negeri se-Kota Padang Panjang dapat dilihat pada ***Lampiran 8.***

b) Dana BOP PAUD

Rincian saldo Dana BOP PAUD per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal			Rp.	1.229.992,00
Penerimaan Tahun 2025	Rp.	1.336.841.108.,00		
Belanja Tahun 2025	Rp.	(1.338.034.300,00)		
Kenaikan Saldo Tahun 2025			Rp.	(1.193.192,00)
Saldo per 31 Desember 2025			**Rp.**	**36.800,00**

Saldo dana BOP PAUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp36.800,00 merupakan saldo rekening giro pada Sekolah Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kota Padang Panjang.

c) Dana BOP Pendidikan Kesetaraan

Rincian saldo Dana BOP Pendidikan Kesetaraan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal			Rp.	1.364..027,00
Penerimaan Tahun 2025	Rp.	437.336.000,00		
Belanja Tahun 2025	Rp.	(437.050.000,00)		
Penurunan Saldo Tahun 2025			Rp.	286.000,00
Saldo per 31 Desember 2025			**Rp.**	**1.650.027,00**

Saldo dana BOP Pendidikan Kesetaraan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.650.027,00 merupakan saldo rekening giro pada SPNF SKB Kota Padang Panjang.

9) Piutang Pajak Daerah	**31 Desember 2025 (Rp)**	**31 Desember 2024 (Rp)**
	3.628.337.094,00	**3.324.190.208,00**

Saldo Piutang Pajak Daerah Kota Padang Panjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.628.337.094,00. Jika dibandingkan dengan saldo piutang pajak daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp3.324.190.208,00, maka saldo piutang pada Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp304.146.886,00 atau 9,15%. Piutang Pajak Tahun 2025 sebesar Rp3.628.337.094,00 terdiri atas:

Tabel 5.30 : Daftar Piutang Pajak Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
1.	Piutang Pajak Restoran	20.111.200,00	20.111.200,00
2.	Piutang Pajak Reklame	11.463.200,00	8.511.200,00
3.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	302.786.463,00	286.973.603,00
4.	Piutang Pajak Air Tanah	4.737.000,00	4.677.000,00
5.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.201.098.131,00	3.003.917.205,00
6.	Pajak PBHTB	46.975.000,00	-
7.	Pajak Opsen PKB	39.212.500,00	-
8.	Pajak Opsen BBNKB	1.953.600,00	-
	JUMLAH	**3.628.337.094,00**	**3.324.190.208,00**

Saldo piutang pajak tahun 2025 sebesar Rp3.628.337.094,00 dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Tabel 5. 31 : Rincian Piutang Pajak Tahun 2025

No.	Uraian	Piutang 2024(Audited)	Koreksi	Jumlah Setelah Koreksi	Penerimaan Piutang <2024 di Tahun 2025	Sisa Piutang <2024	Piutang 2025	Total Piutang s/d 31 Desember 2025
1.	Pajak Restoran	20.111.200,00	0,0	20.111.200,00	0,0	20.111.200,00	0,0	20.111.200,00
2.	Pajak Reklame	8.511.200,00	0,0	8.511.200,00	0,0	8.511.200,00	2.952.000,00	11.463.200,00
3.	Pajak Penerangan Jalan	286.973.603,00	0,0	286.973.603,00	286.973.603,00	0,0	302.786.463,00	302.786.463,00
4.	Pajak Air Tanah	4.677.000,00	0,0	4.677.000,00	0,0	4.677.000,00	60.000,00	4.737.000,00
5.	PBBP2	3.003.917.205,00	0,0	3.003.917.205,00	306.501.146,00	2.697.416.059,00	503.682.072,00	3.201.098.131,00
6.	Pajak Opsen PKB						39.212.500,00	39.212.500,00
7.	Pajak Opsen BBNKB						1.953.600,00	1.953.600,00
8.	BPHTB						46.975.000,00	46.975.000,00
	JUMLAH	**3.324.190.208,00**	**0,00**	**3.324.190.208,00**	**593.474.749,00**	**2.730.715.459,00**	**897.621.635,00**	**3.628.337.094,00**

Masing-masing jenis piutang pajak akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

a) Piutang Pajak Restoran

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
20.111.200,00	**20.111.200,00**

Saldo Piutang Pajak Restoran Tahun 2025 adalah sebesar Rp20.111.200,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp20.111.200,00, maka saldo Tahun 2025 tetap.

Tabel 5. 32 : Rincian Piutang Restoran

Tahun	Saldo Piutang	Penerimaan Piutang	Saldo Piutang per 31 Desember 2025
2014	9.576.200,00	0,00	9.576.200,00
2015	10.535.000,00	0,00	10.535.000,00
Total	**20.111.200,00**	0,00	**20.111.200,00**

Tidak adanya pengakuan piutang pajak restoran yang berasal dari Tahun 2025 karena pendapatan pajak restoran diakui saat kas diterima di kas daerah (ini terkait dengan metode *self-asessment* yang diterapkan untuk penghitungan pajak restoran). Piutang bisa muncul pada pajak yang memakai metode *self-assessment* ketika diterbitkan Surat Keputusan Kurang Bayar. Namun, hal ini belum dilaksanakan pada Tahun 2025. Saldo piutang pajak restoran yang berasal dari Tahun 2014 sebesar Rp9.576.200,00 dan Tahun 2015 sebesar Rp10.535.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Tahun 2014 dan Tahun 2015, dikeluarkan ketetapan pajak untuk 12 bulan. Namun, penarikan pajak restoran yang dilakukan hanya untuk 11 bulan. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, selama Bulan Ramadhan, tidak dilakukan pemungutan pajak restoran. Pada pemeriksaan BPK RI Tahun 2015 dan Tahun 2016, BPK meminta supaya ketetapan pajak restoran yang jatuhnya pada bulan Ramadhan Tahun 2014 dan 2015 (Juni-Juli 2014 serta Juni-Juli 2015) tetap dijadikan piutang. Namun, belum ada upaya penagihan yang dilakukan terhadap sisa piutang Tahun 2014 dan Tahun 2015 ini selama Tahun 2025.

Rincian sisa piutang pajak restoran yang berasal dari Tahun 2014 sebesar Rp9.576.200,00 dan Tahun 2015 sebesar Rp10.535.000,00 dapat dilihat pada ***Lampiran 9***.

b) Piutang Pajak Reklame	**31 Desember 2025 (Rp)**	**31 Desember 2024 (Rp)**
	11.463.200,00	**8.511.200,00**

Saldo Piutang Pajak Reklame Tahun 2025 sebesar Rp11.463.200,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp8.511.200,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.952.000,00. Rincian perhitungan piutang pajak reklame Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp.	8.511.200,00
Penerimaan Piutang Tahun Lalu	Rp.	0,00
Penambahan Piutang Tahun 2025	Rp.	2.952.000,00
Saldo per 31 Desember 2025	**Rp.**	**11.463.200,00**

Rincian sisa piutang pajak reklame Tahun 2025 dapat dilihat *pada* ***Lampiran 10***.

c) Piutang Pajak Penerangan Jalan	**31 Desember 2025 (Rp)**	**31 Desember 2024 (Rp)**
	302.786.463,00	**286.973.603,00**

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2025 adalah sebesar Rp302.786.463,00. Piutang pajak penerangan jalan Tahun 2025 tersebut telah diterima di kas daerah Kota Padang Panjang pada tanggal 19 Januari 2026.

Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PT. PLN (Persero), dimana berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor 0030.Pj/ HKM.02.01/ B09010000/2020 dan Nomor 11/ PJJ-PP/2020 tanggal 18 November 2020 antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT.PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat UP3 Bukittinggi, pihak PT. PLN (Persero) melakukan

penyetoran hasil pemungutan pajak penerangan jalan ke rekening Kas Umum Daerah Kota Padang Panjang setiap bulannya paling lambat tanggal 15 pada bulan N+1.

d) Piutang Pajak Air Tanah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	4.737.000,00	4.677.000,00

Saldo Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2025 sebesar Rp4.737.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp4.677.000,00, saldo piutang pajak air tanah Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp60.000,00. Saldo pajak air tanah sebesar Rp4.737.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.33 : Rincian Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2025

Tahun	Saldo Piutang	Koreksi	Piutang Seharusnya	Penerimaan Piutang pada Tahun 2025	Saldo Akhir
2014	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
2015	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
2021	762.000,00	0,00	762.000,00	0,00	762.000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Jumlah	**4.737.000,00**	**0,00**	**4.737.000,00**	**0,00**	**4.737.000,00**

Adapun rincian saldo piutang pajak air tanah per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 11.***

e) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	3.201.098.131,00	3.003.917.205,00

Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.201.098.131,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp3.003.917.205,00 maka saldo piutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp197.180.926,00 atau 6,56%.

Tabel 5.34 : Rincian Saldo Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2025

Tahun	Saldo Piutang	Koreksi	Saldo Setelah Koreksi	Penerimaan Piutang pada Tahun 2025	Saldo Akhir
<2018	926.758.866,00	0,00	926.758.866,00	44.712.959,00	882.045.907,00
2019	264.206.264,00	0,00	264.206.264,00	17.884.723,00	246.321.541,00
2020	273.313.652,00	0,00	273.313.652,00	17.487.556,00	255.826.096,00

Tahun	Saldo Piutang	Koreksi	Saldo Setelah Koreksi	Penerimaan Piutang pada Tahun 2025	Saldo Akhir
2021	279.058.471,00	0,00	279.058.471,00	20.490.422,00	258.568.049,00
2022	331.739.284,00	0,00	331.739.284,00	34.947.751,00	296.791.533,00
2023	433.686.830,00	0,00	433.686.830,00	64.373.079,00	369.313.751,00
2024	495.153.838,00	0,00	495.153.838,00	106.604.656,00	388.549.182,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	503.682.072,00
Jumlah	**3.003.917.205,00**	**0,00**	**3.003.917.205,00**	**306.501.146,00**	**3.201.098.131,00**

Penambahan piutang yang berasal dari Tahun 2025 sebesar Rp503.682.072,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Penetapan tahun 2025	Rp	1.416.184.524,00
Penerimaan dari penetapan tahun 2025	Rp	912.502.452,00
Piutang tahun 2025	**Rp**	**503.682.072,00**

f) Piutang BPHTB

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
46.975.000,00	**0,00**

Saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp46.975.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp0,00 maka saldo piutang BPHTB Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp46.975.000,00 atau 100%.

g) Piutang Opsen PKB

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
39.212.500,00	**0,00**

Piutang Opsen PKB per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp39.212.500,00. Opsen PKB adalah pungutan tambahan pajak atas pokok PKB yang dikenakan oleh kabupaten/kota yang diberlakukan mulai 5 Januari 2025 bertujuan untuk meningkatkan pendapatan secara langsung dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

h) Piutang Opsen BBNKB

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.953.600,00	**0,00**

Piutang Opsen BBNKB per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.953.000,00. Opsen BBNKB adalah pungutan tamabahan pajak atas pokok PKB yang dikenakan oleh kabupaten/kota yang diberlakukan mulai 5 Januari 2025 bertujuan untuk meningkatkan pendapatan secara langsung dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

10) Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
28.640.280.233,00	**27.407.187.488,00**

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp28.640.280.233,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp27.407.187.488,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.233.092.745,00 atau 4,50%. Rincian piutang retribusi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.35 : Rincian Piutang Retribusi Tahun 2025

No.	Uraian	SKPD	Nilai
	Piutang Retribusi Jasa Umum		**13.453.900.546,00**
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	Dinas Kesehatan	10.857.347.024,00
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	Perdagkop UKM	839.719.500,00
		Dinas Perkim LH	226.796.250,00
3.	Piutang retribusi Los	Perdagkop UKM	1.530.037.772,00
	Piutang Retribusi Jasa Usaha		**15.186.379.687,00**
1.	Piutang Retribusi Pemakaian Alat	BPKD	3.600.000,00
2.	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar / Pertokoan yang Dikontrakan	Perdagkop UKM	15.070.179.687,00
3.	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit Ternak	Dinas Pangan dan Pertanian	112.600.000,00
	Total		**28.640.280.233,00**

Masing-masing jenis piutang retribusi daerah akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

a)	**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan**	**31 Desember 2025 (Rp)**	**31 Desember 2024 (Rp)**
		10.857.347.024,00	**11.412.022.574,00**

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp10.857.347.024,00 sedangkan saldo Tahun 2024 adalah sebesar Rp11.412.022.574,00. Piutang retribusi pelayanan kesehatan tersebut merupakan piutang pendapatan jasa pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Kota Padang Panjang atas tagihan klaim jasa layanan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi kesehatan.

Terdapat perubahan saldo awal tahun 2025 pada Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan karena adanya koreksi piutang. Hal ini disebabkan oleh terlambatnya BAP klaim BPJS.

Saldo piutang retribusi pelayanan kesehatan Tahun 2025 terdiri dari piutang jasa pendapatan layanan kesehatan pada BPJS Kesehatan sebesar Rp10.806.293.988,00 pada PT. Jasa Raharja sebesar Rp50.703.036,00 dan pada Labor PA sebesar Rp350.000,00. Adapun perhitungan piutang retribusi pelayanan kesehatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Piutang 2024	Rp	11.412.022.574,00
Koreksi Piutang 2024	Rp	1.121.126.223,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	**Rp**	**10.290.896.351,00**

Piutang < 2024 yang dibayar pada tahun 2025	Rp	(10.216.727.351,00)
Sisa piutang 2024	Rp	**74.169.000,00**
Piutang yang timbul pada tahun 2025	Rp	10.783.178.024,00
Total saldo piutang per 31 Desember 2025	**Rp**	**10.857.347.024,00**

b)	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		1.066.515.750,00	949.658.750,00

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.066.515.750,00. Jika dibanding dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp949.658.750,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp116.857.000,00 atau 12,31%. Rincian piutang retribusi pelayanan persampahan ini dapat dilihat sebagai berikut:

Saldo Piutang 2024 *(Audited)*	Rp	949.658.750,00
Piutang < 2024 yang dibayar pada tahun 2025	Rp	(88.739.000,00)
Sisa piutang 2024	Rp	**860.919.750,00**
Piutang yang timbul pada tahun 2025	Rp	205.596.000,00
Total saldo piutang per 31 Desember 2025	**Rp**	**1.066.515.750,00**

Piutang yang timbul Tahun 2025 sebesar Rp205.596.000,00 merupakan penambahan piutang pada Dinas Perkim LH.

c)	Piutang Retribusi Los	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		1.530.037.772,00	1.387.532.772,00

Saldo Piutang Retribusi Los Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.530.037.772,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp1.387.532.772,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp142.505.000,00 atau 10,27%.

Rincian piutang Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Saldo piutang tahun 2024 *(Audited)*	Rp.	1.387.532.772,00
Piutang < 2024 yang dibayar pada tahun 2025	Rp.	(62.641.500,00)
Sisa piutang tahun 2024	**Rp.**	**1.324.891.272,00**
Piutang tahun 2025	Rp.	205.146.500,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp.	**1.530.037.772,00**

d)	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		0,00	1.008.000,00

Saldo Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp1.008.000,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1.008.000,00 atau 100%. Piutang retribusi penyewaan tanah dan bangunan

merupakan piutang retribusi penyewaan rumah dinas pada Sekretariat Daerah. Rincian dari piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah ini dapat dilihat di bawah ini:

Saldo Piutang tahun 2024 *(Audited)*	Rp.	1.008.000,00
Piutang <2024 yang dibayar pada tahun 2025	Rp.	(1.008.000,00)
Saldo awal setelah reklas	**Rp.**	**0,00**
Piutang tahun 2025	Rp.	0,00
Saldo Akhir Piutang per 31 Desember 2025	**Rp.**	**0,00**

e)	Piutang Retribusi Pemakaian Alat	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		3.600.000,00	3.600.000,00

Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Alat Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.600.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp3.600.000,00, maka saldo Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan.

Piutang retribusi pemakaian alat Tahun 2025 berupa piutang retribusi pemakaian tiang-tiang untuk baliho/spanduk milik Pemerintah Kota Padang Panjang pada BPKD.

f)	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		15.070.179.687,00	13.536.765.392,00

Saldo Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang Dikontrakkan Tahun 2025 adalah sebesar Rp15.070.179.687,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp13.536.765.392,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.533.414.295,00 atau 11,33%. Rincian piutang retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan dapat dilihat sebagai berikut:

Saldo piutang Tahun 2024 *(Audited)*	Rp.	13.536.765.392,00
Piutang tahun ≤ 2024 yang diterima pada tahun 2025	Rp.	(1.293.498.125,00)
Sisa piutang Tahun 2024	**Rp.**	**12.243.267.267,00**
Piutang Tahun 2025	Rp.	2.826.912.420,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp.	**15.070.179.687,00**

g)	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit Ternak	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		112.600.000,00	116.600.000,00

Saldo Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp112.600.000,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp116.600.000,00, maka piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.000.000,00.

Piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp112.600.000,00 ini berasal dari Dinas Pangan dan Pertanian berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dengan Peternak Pemelihara Sapi Perah. Menurut perjanjian kerja sama tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian dalam hal ini Bidang Peternakan bertindak sebagai pihak yang memelihara sapi perah milik peternak sapi. Atas jasa pemeliharaan sapi-sapi perah milik peternak tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian berhak mendapat pembayaran dari peternak sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerja sama. Adapun rincian piutang sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 12.***

11)	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		183.550.103,70	**183.550.103,70**

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 sebesar Rp183.550.103,70. Bila dibandingkan dengan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2024 sebesar Rp183.550.103,70, maka saldo piutang dimaksud adalah tetap. Piutang sebesar Rp183.550.103,70 ini berasal dari sisa laba PDAM dari Tahun 2007 s/d 2012 yang belum disetorkan ke kas daerah.

12)	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		3.051.275.050,00	**3.073.370.732,00**

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah untuk Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.051.275.050,00. Bila dibandingkan dengan saldo piutang lain-lain PAD yang sah Tahun 2024 sebesar Rp3.073.370.732,00 maka piutang lain-lain PAD yang sah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp22.095.682,00 atau 0,72%. Berikut rincian piutang lain-lain PAD yang sah sebagai berikut:

Tabel 5.36 : Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025

Uraian		Piutang (Rp)
a.	Piutang Hasil Sewa BMD (Dinas Perhubungan)	3.502.500,00
b.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (BPKD)	3.032.302.550,00
c.	Piutang Pendapatan BLUD RSUD	15.470.000,00
	Total Piutang	**3.051.275.050,00**

a)	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		3.032.302.550,00	**3.048.587.550,00**

Adapun rincian perhitungan piutang hasil pengelolaan dana bergulir adalah sebagai berikut:

Saldo Piutang 30 Desember 2024	Rp.	3.048.587.550,00
Penerimaan piutang s.d 31 Desember 2025	Rp.	(16.285.000,00)
Saldo Akhir Piutang per 31 Desember 2025	**Rp.**	**3.032.302.550,00**

b) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	14.048.182,00

Saldo Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2025 sebesar 0,00. Dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp14.048.182,00, maka piutang Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.048.182,00 atau 100%.

c) Piutang Pendapatan BLUD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	15.470.000,00	10.735.000,00

Saldo Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2025 adalah saldo piutang pada BLUD RSUD sebesar Rp15.470.000,00. Dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp10.735.000,00, maka piutang pendapatan BLUD mengalami kenaikan sebesar Rp4.735.000,00 atau 44,11%.

Saldo piutang pendapatan BLUD Tahun 2024 adalah piutang pendapatan pada BLUD RSUD Kota Padang Panjang berupa piutang usaha (sewa lahan parkir di area RSUD) sebesar Rp10.735.000,00 untuk bulan Desember yang diterima pada bulan berikutnya (Januari 2025).

Adapun perhitungan piutang pendapatan BLUD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Piutang 2024 *(Audited)*	Rp	10.735.000,00
Piutang < 2024 yang dibayar pada tahun 2025	Rp	(10.735.000,00)
Sisa Piutang 2024	**Rp**	**0,00**
Piutang yang timbul pada tahun 2025	Rp	15.470.000,00
Sisa piutang per 31 Desember 2025	Rp	**15.470.000,00**

13) Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	7.614.345.848,00	8.373.725.681,00

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp7.614.345.848,00. Saldo tersebut merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang belum disalurkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

14) Penyisihan Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	(22.417.537.210,55)	(21.075.906.735,69)

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan di setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan *(Net Realizable Value)*.

Saldo penyisihan piutang Tahun 2025 sebesar Rp22.417.537.210,55. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp21.075.906.735,69, nilai penyisihan piutang mengalami kenaikan sebesar Rp1.341.630.474,86 atau 6,37%. Adapun rincian penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

a. Penyisihan Piutang Pajak	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	(1.650.594.833,48)	(1.443.790.224,11)

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang Panjang, kualitas piutang pajak dan perhitungan penyisihan piutang pajak tak tertagih digolongkan menjadi empat kategori:

a) Lancar (untuk piutang yang diperkirakan dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan), dengan penyisihan 0.5%;
b) Kurang lancar (untuk piutang yang diperkirakan dapat ditagih dalam jangka waktu 1-2 tahun) dengan penyisihan 10%;
c) Diragukan (untuk piutang yang diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu 2-5 tahun) dengan penyisihan 50%; dan
d) Macet (untuk piutang yang masih belum dapat ditagih setelah lebih dari 5 tahun) dengan penyisihan 100%.

Saldo penyisihan piutang pajak Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.650.594.833,48. Jika dibandingkan dengan saldo penyisihan piutang pajak Tahun 2024 sebesar Rp1.443.790.224,11, maka saldo penyisihan piutang pajak Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp206.804.609,37 atau 14,32%.

Tabel berikut menunjukkan kategori piutang pajak berdasarkan tingkat likuiditasnya, persentase serta nilai penyisihan piutang tak tertagih pada masing-masing kategori piutang (lancar, kurang lancar, diragukan dan macet).

Tabel 5.37 : Rincian Kualitas Piutang Pajak Tahun 2025

No.	Jenis Piutang Pajak	Kualitas Piutang				
		Lancar (<1 Th)	Kurang Lancar (1-2 Th)	Diragukan (>2-5 Th)	Macet (>5 Th)	Jumlah
1.	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pajak Reklame	2.952.000,00	543.200,00	854.000,00	7.114.000,00	11.463.200,00
3.	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	20.111.200,00	20.111.200,00
4.	Pajak Air Tanah	60.000,00	0,00	972.000,00	3.705.000,00	4.737.000,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	302.786.463,00	0,00	0,00	0,00	302.786.463,00
6.	PBB P2	503.682.072,00	757.862.933,00	811.185.678,00	1.128.367.448,00	3.201.098.131,00
7.	Pajak Opsen PKB	39.212.500,00	0,00	0,00	0,00	39.212.500,00
8.	Pajak Opsen BBNKB	1.953.600,00	0,00	0,00	0,00	1.953.600,00
9.	BPHTB	0,00	46.975.000,00	0,00	0,00	46.975.000,00
	JUMLAH (a)	**850.646.635,00**	**805.381.133,00**	**813.011.678,00**	**1.159.297.648,00**	**3.628.337.094,00**

Tabel 5.38 : Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

No.	Jenis Piutang Pajak	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				Jumlah
		0,5%	10%	50%	100%	
1.	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pajak Reklame	14.760,00	54.320,00	427.000,00	7.114.000,00	7.610.080,00
3.	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	20.111.200,00	20.111.200,00
4.	Pajak Air Tanah	300,00	0,00	486.000,00	3.705.000,00	4.191.300,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	1.513.932,32	0,00	0,00	0,00	1.513.932,32
6.	PBB P2	2.518.410.36	75.786.293,30	405.592.839,00.	1.128.367.448,00	1.612.264.990,66
7.	Pajak Opsen PKB	196.062,50	0,00	0,00	0,00	196.062,50
8.	Pajak Opsen BBNKB	9.768,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00
9.	BPHTB	0,00	4.697.500,00	0,00	0,00	4.697.500,00
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG (b)		**4.253.233,18**	**80.538.113,30**	**406.505.839,00**	**1.159.297.648,00**	**1.650.594.833,48**
PIUTANG NETTO (a-b)		**846.393.401,82**	**724.843.019,70**	**406.505.839,00**	**0,00**	**1.977.742.260,52**

Dari tabel di atas, terlihat bahwa proporsi kategori piutang pajak yang terbesar adalah pada kategori macet, yakni sebesar Rp1.159.297.648,00 atau 212,98% dari keseluruhan nilai piutang pajak.

b.	Penyisihan Piutang Retribusi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
		(17.549.525.210,87)	(16.385.887.700,88)

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang Panjang, kualitas piutang retribusi dan perhitungan penyisihan piutang retribusi tak tertagih digolongkan menjadi empat kategori:

a) Lancar (untuk piutang yang diperkirakan dapat ditagih dalam jangka waktu 1 bulan), dengan penyisihan 0.5%;
b) Kurang lancar (untuk piutang yang diperkirakan dapat ditagih dalam jangka waktu 1-3 bulan) dengan penyisihan 10%;
c) Diragukan (untuk piutang yang diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu 3-12 bulan) dengan penyisihan 50%; dan
d) Macet (untuk piutang yang masih belum dapat ditagih setelah lebih dari 1 tahun atau 12 bulan) dengan penyisihan 100%.

Penyisihan piutang retribusi tak tertagih Tahun 2025 adalah sebesar Rp17.549.525.210,87. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp16.385.887.700,88, maka penyisihan piutang retribusi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.163.637.509,99 atau 7,10%.

Tabel berikut menunjukkan kategori piutang retribusi berdasarkan tingkat likuiditasnya, persentase serta nilai penyisihan piutang tak tertagih pada masing-masing kategori piutang (lancar, kurang lancar, diragukan dan macet).

Tabel 5.39 : Rincian Kualitas Piutang Retribusi Tahun 2025

No.	Jenis Piutang Retribusi	Kualitas Piutang				Jumlah
		Lancar (<1 Bln)	Kurang Lancar (1-3 Bln)	Diragukan (3-12 Bln)	Macet (>12 Bln)	
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.783.178.024,00	0,00	0,00	74.169.000,00	10.857.347.024,00
2.	Piutang retribusi hasil penjualan produksi usaha daerah berupa bibit ternak	0,00	0,00	0,00	112.600.000,00	112.600.000,00
3.	Piutang retribusi pelayanan persampahan	84.875.500,00	73.533.500,00	47.187.000,00	860.919.750,00	1.066.515.750,00
4.	Piutang retribusi los	71.250,00	0,00	38.328.750,00	1.491.637.772,00	1.530.037.772,00
5.	Piutang retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan	4.260.400,00	14.649.285,00	297.618.785,00	14.753.651.217,00	15.070.179.687,00
6.	Piutang retribusi pemakaian alat	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
JUMLAH (a)		**10.872.385.174,00**	**88.182.785,00**	**386.734.535,00**	**17.292.977.739,00**	**28.640.280.233,00**

Dari tabel di atas, terlihat bahwa proporsi kategori piutang retribusi yang terbesar adalah pada kategori macet, yakni sebesar Rp17.292.977.739,00 atau 67,20% dari keseluruhan nilai piutang retribusi.

Tabel 5. 40 : Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih

No.	Jenis Piutang Retribusi	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				Jumlah
		0,5%	10%	50%	100%	
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	53.915.890,12	0,00	0,00	74.169.000,00	128.084.890,12
2.	Piutang retribusi hasil penjualan produksi usaha daerah berupa bibit ternak	0,00	0,00	0,00	112.600.000,00	112.600.000,00
3.	Piutang retribusi pelayanan persampahan	424.377,50	7.353.350,00	23.593.500,00	860.919.750,00	892.290.977,50
4.	Piutang retribusi los	356,25	0,00	19.164.375,00	1.491.637.772,00	1.510.802.503,25
5.	Piutang retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan	21.302,00	1.464.928,50	148.809.392,50	14.753.651.217,00	14.903.946.840,00
6.	Piutang retribusi pemakaian alat	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG (b)		**54.361.925,87**	**8.818.278,50**	**193.367.267,50**	**17.292.977.739,00**	**17.549.525.210,87**
PIUTANG NETTO (a-b)		**10.818.023.248,13**	**79.364.506,50**	**193.367.267,50**	**0,00**	**11.090.755.022,13**

c.	**Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**31 Desember 2025 (Rp) (183.550.103,70)**	**31 Desember 2024 (Rp) (183.550.103,70)**

Saldo Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 sebesar Rp183.550.103,70. Bila dibandingkan dengan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2024 sebesar Rp183.550.103,70, maka saldo penyisihan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2025, tetap.

Tabel 5.41 : Rincian Kualitas Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Tahun 2025

Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Nilai Piutang	0,00	0,00	0,00	183.550.103,70	183.550.103,70
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	(183.550.103,70)	(183.550.103,70)
Piutang Netto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

d. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	(3.033.867.062,50)	**(3.062.678.707,00)**

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.033.867.062,50. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp3.062.678.707,00, maka penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah tak tertagih tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp28.811.644,50 atau 0,94%.

Tabel 5. 42 : Daftar Kualitas Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025

No.	Jenis Piutang	Kualitas Piutang				Jumlah
		Lancar (<1 Bln)	Kurang Lancar (1-3 Bln)	Diragukan (3-12 Bln)	Macet (>12 Bln)	
1.	Piutang Hasil Sewa BMD	3.502.500,00	0,00	0,00	0,00	3.502.500,00
2.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	3.032.302.550,00	3.032.302.550,00
3.	Piutang pendapatan denda retribusi pelayanan persampahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Piutang pendapatan denda retribusi pasar grosir/pertokoan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Piutang pendapatan BLUD	0,00	15.470.000,00	0,00	0,00	15.470.000,00
JUMLAH		**3.502.500,00**	**15.470.000,00**	**0,00**	**3.032.302.550,00**	**3.051.275.050,00**

Tabel 5. 43 : Daftar Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025

No.	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				Jumlah
		0,5%	10%	50%	100%	
1.	Piutang Hasil Sewa BMD	17.512,50	0,00	0,00	0,00	17.512,50
2.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	3.032.302.550,00	3.032.302.550,00
3.	Piutang pendapatan denda retribusi pelayanan persampahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				Jumlah
		0,5%	10%	50%	100%	
5.	Piutang pendapatan denda retribusi pasar grosir/pertokoan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Piutang pendapatan BLUD	0,00	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG (b)	**17.512,50**	**1.547.000,00**	**0,00**	**3.032.302.550,00**	**3.033.867.062,50**
	PIUTANG NETTO (a-b)	**3.484.987,50**	**13.923.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.407.987,50**

15) Beban Dibayar di Muka

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
90.510.834,00	**118.885.000,00**

Beban dibayar dimuka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk satu periode yang melebihi periode akuntansi. Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp90.510.834,00. Bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp118.885.000,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp28.374.166,00 atau 23,87%.

Adapun saldo beban dibayar di muka Tahun 2025 sebesar Rp90.510.834,00 merupakan sewa tanah PT. KAI yang digunakan untuk perkantoran Pemerintah Kota Padang Panjang dan sewa kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 44 : Rincian Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025

No.	OPD	Uraian	Nilai Kontrak (Rp.)	Jangka Waktu Kontrak	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp.)	Ket.
1.	Dinas PUPR	Sewa tanah PT KAI untuk bangunan gedung kantor	2.730.000,00	1 (satu) tahun (1 Agustus 2025 s/d 31 Juli 2026)	1.592.500,00	7(tujuh) Bulan
2.	Satpol PP Damkar	Sewa tanah PT KAI untuk bangunan gedung kantor	24.220.000,00	1 (satu) tahun (1 Juli 2025 s/d 30 Juni 2026)	12.110.000,00	6 (enam) bulan
3.	Setdako	Sewa kendaraan dinas roda empat eselon II	63.000.000,00	6 (enam) tbulan (21 Agustus 2025 s/d 20 Februari 2026)	21.000.000,00	2 (dua) bulan
		Sewa kendaraan dinas roda empat eselon III	32.500.000,00	5 (lima) bulan 21 Agustus 2025 s/d 20 Januari 2026)	6.500.000,00	1 (satu) bulan
4.	Dinas Perdagkop UKM	Sewa tanah PT KAI untuk bangunan gedung kantor	75.700.000,00	1 (satu) tahun (01 Februari 2025 s/d 31 Januari 2026)	6.308.333,00	1 (satu) bulan
		Sewa kendaraan dinas roda empat	78.000.000,00	1 (satu) tahun (05 Februari 2025 s/d 04 Februari 2026	13.000.000,00	10 (sepuluh) bulan
		Sewa kendaraan dinas roda empat	52.500.002,00	7 (tujuh) bulan (03 September 2025 s/d 02 April 2026)	30.000.001,00	2 (dua) bulan
	Jumlah				**90.510.834,00**	

16) Persediaan	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
	9.490.614.340,39	11.345.285.120,73

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pencatatan yang dipakai untuk perhitungan persediaan adalah Metode Periodik dimana jumlah persediaan akhir diperoleh dengan melakukan stock opname pada akhir periode. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir. *Stock opname* persediaan Tahun 2025 telah dilakukan sendiri oleh SKPD pada akhir Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Saldo persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.490.614.340,39 Jika dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.345.285.120,73, maka saldo persediaan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.854.670.780,34 atau 16,35%. Adapun rincian persediaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 45 : Rincian Persediaan per 31 Desember 2025

NO	NAMA OPD	JUMLAH
1	Sekretariat DPRD	24.861.000,00
2	Sekretariat Daerah	29.000.400,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	392.566.800,00
4	Dinas Perhubungan	157.547.003,00
5	Dinas Kesehatan	5.726.733.411,00
6	Dinas Pendidikan	349.431.568,00
7	Dinas Perpustakaan dan Arsip	34.467.510,00
8	Dinas Sosial	182.549.985,00
9	Dinas Kependudukan dan Capil	290.921.842,00
10	Dinas Pangan dan Pertanian	689.237.486,39
11	Dinas Koperindag	58.199.660,00
12	Badan Pengelola Keuangan Daerah	38.283.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	39.692.300,00
14	Inspektorat Daerah	22.147.000,00
15	Bappeda	1.570.500,00
16	Dinas Perkim LH	59.131.050,00
17	Dinas Pariwisata	107.743.450,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.226.599.110,00
19	Dinas Satpol.PP	16.122.700,00
20	Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia	28.183.410,00
21	Dinas Kominfo	3.040.200,00
22	Kecamatan Padang Panjang Timur	9.737.179,00
23	Kecamatan Padang Panjang Barat	2.847.776,00
	Jumlah	**9.490.614.340,39**

Tabel 5.46 : Rincian Persediaan Menurut Jenis

No.	Nama Persediaan	Nilai
1.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00
2.	Bahan Kimia	81.507.194,00
3.	Bahan Bakar dan Pelumas	166.829.300,00
4.	Bahan / Bibit Tanaman	36.158.650,00
5.	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.605.000,00
6.	Isi Tabung Gas	1.280.000,00
7.	Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	25.032.000,00
8.	Bahan Lainnya	993.151.736,00
9.	Suku Cadang Alat Kedokteran	1.228.787.864,00
10.	Suku Cadang Alat Pertanian	531.000,00
11.	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00
12.	Suku Cadang Lainnya	9.975.000,00
13.	Alat Tulis Kantor	231.362.311,00
14.	Kertas dan Cover	75.828.199,00
15.	Bahan Cetak	333.645.440,00
16.	Benda Pos	22.050.000,00
17.	Bahan Komputer	200.168.312,00
18.	Perabot Kantor	31.458.018,00
19.	Alat Listrik	193.149.595,00
20.	Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	425.230.584,00
21.	Souvenir/Cendera Mata	32.955.540,00
22.	Obat	2.840.286.968,00
23.	Obat - Obatan Lainnya	411.798.654,05
24.	Persediaan untuk Dijual / Diserahkan Kepada Masyarakat	529.872.985,00
25.	Persediaan untuk Tujuan Strategis / Berjaga-Jaga	1.258.350.460,00
26.	Persediaan untuk Tujuan Strategis / Berjaga-Jaga Lainnya	220.105.885,34
27.	Natura	50.771.945,00
28.	Natura dan Pakan Lainnya	86.927.500,00
29.	Persediaan Penelitian Biologi	840.000,00
30.	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00
31.	Pesediaan Penelitian Lainnya	520.000,00
32.	Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00
33.	Persediaan Komponen Rambu-Rambu	434.200,00
	Jumlah	**9.490.614.340,39**

Adapun rincian persediaan per SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 13***.

Nilai persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan ini hanya mencakup persediaan yang berasal dari rutin dan tidak memperhitungkan persediaan yang berasal dari kegiatan. Khusus untuk persediaan obat-obatan yang dimiliki oleh

RSUD, Dinas Kesehatan, kebijakan akuntansi menyatakan bahwa pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual.

Berikut penjelasan lebih lanjut dari masing-masing jenis persediaan Tahun 2025 adalah:

a) Persediaan Bahan Bagunan dan Konstruksi
Saldo persediaan bahan bangunan dan konstruksi Tahun 2025 sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp7.435.800,00 maka saldo tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp7.435.800,00 atau 100%.

b) Persediaan Bahan Kimia
Saldo persediaan bahan kimia tahun 2025 adalah sebesar Rp81.507.194,00. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp249.397.995,55 maka saldo tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp167.890.801.95,00 atau 67,32%.

c) Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas.
Saldo persediaan bahan bakar dan pelumas Tahun 2025 adalah sebesar Rp166.829.300,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp200.870.800,00 maka saldo tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp34.041.500,00 atau 16,95%.

d) Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
Saldo persediaan bahan/bibit tanaman Tahun 2025 adalah sebesar Rp36.158.650,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp24.414.400,00 maka saldo tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp11.744.250,00 atau 48,10%.

e) Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran
Saldo persediaan isi tabung pemadam kebakaran Tahun 2025 sebesar Rp1.605.000. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp3.855.000,00 maka saldo tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.250.000,00 atau 58,37%.

f) Persediaan Isi Tabung Gas
Saldo persediaan isi tabung gas Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.280.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp2.104.200,00, maka saldo tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp824.200,00 atau 39,17%.

g) Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
Saldo persediaan bahan/bibit ternak/bibit ikan Tahun 2025 adalah sebesar Rp25.032.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo persediaan Tahun 2024 sebesar Rp109.340.000,00, maka saldo tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp84.308.000,00 atau 77,11%.

h) Bahan Lainnya
Saldo persediaan bahan lainnya Tahun 2025 adalah sebesar Rp993.151.736,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp929.912.265,21 maka saldo tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp63.239.470,79 atau 6,80%.

i) Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran.
Saldo persediaan suku cadang alat kedokteran Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.228.787.864,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar

Rp1.458.645.364,31, maka saldo persediaan suku cadang alat kedokteran tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp229.857.500,31,00 atau 15,76%.

j) Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian.
Saldo persediaan suku cadang alat pertanian Tahun 2025 adalah sebesar Rp531.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp830.600,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp299.600,00 atau 36,07%.

k) Persediaan Suku Cadang Lainnya
Saldo persediaan suku cadang lainnya tahun 2025 adalah sebesar Rp9.975.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp76.680.000,00 maka Saldo persediaan suku cadang lainnya tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp66.705.000,00 atau 86,99%.

l) Persediaan Alat Tulis Kantor
Saldo persediaan alat tulis kantor Tahun 2025 adalah sebesar Rp231.362.311,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp225.422.573,00, maka saldo tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.939.738,00 atau 2,63%.

m) Persediaan Kertas dan Cover
Saldo persediaan kertas dan cover Tahun 2025 adalah sebesar Rp75.828.199,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp111.411.450,00, maka saldo tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp35.583.251,00 atau 31,94%.

n) Persediaan Bahan Cetak
Saldo persediaan bahan cetak Tahun 2025 adalah sebesar Rp333.645.440,00 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp298.261.725,00 maka saldo tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp35.383.715,00 atau 11,86%.

o) Persediaan Benda Pos
Saldo persediaan benda pos Tahun 2025 adalah sebesar Rp22.050.000,00 Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp16.609.000,00. maka saldo tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.441.000,00 atau 32,76%.

p) Persediaan Bahan Komputer
Persediaan bahan komputer pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp200.168.312,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp122.206.800,00, maka saldo tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp77.961.512,00 atau 63,79%.

q) Persediaan Perabot Kantor
Saldo persediaan perabot kantor Tahun 2025 adalah sebesar Rp31.458.018,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp46.214.410,00 maka saldo tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.756.392,00 atau 31,93%.

r) Persediaan Alat Listrik
Saldo persediaan alat listrik Tahun 2025 adalah sebesar Rp193.149.595,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp263.569.468,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp70.419.873,00 atau 26,72%.

s) Suvenir/Cendera Mata
Saldo persediaan souvenir Tahun 2025 adalah sebesar Rp32.955.540,00.

t) Suku Cadang Alat Bengkel
Saldo persediaan suku cadang alat bengkel Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp750.600,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp750.600,00 atau 100%.

u) Persediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya.
Persediaan alat/bahan kegiatan kantor lainnya merupakan alat kebersihan kantor yang berada pada SKPD. Saldo Tahun 2025 adalah sebesar Rp425.230.584,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp487.343.815,00 maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp62.113.231,00 atau 12,75%.

v) Persediaan Obat
Saldo persediaan obat 2025 adalah sebesar Rp2.840.286.968,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp3.773.051.091,16 maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp932.764.123,16 atau 24,72%.

w) Persediaan Obat-Obatan Lainnya
Saldo persediaan obat-obatan lainnya Tahun 2025 adalah Rp411.798.654,05. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp415.261.785,50 maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.463.130.95 atau 48,66%.

x) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
Saldo persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat tahun 2025 adalah sebesar Rp529.872.985,00. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp259.557.358,00 maka saldo tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp270.315.627,00 atau 104,14%.

Adapun rincian dari persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- Persedian pada Dinas PUPR terdiri dari :
  - Pembuatan MCK Individual Kemiskinan Ekstrim Rp139.676.000,00
  - Pembuatan MCK Jl. Ahmad Karim RT 11 Kelurahan Koto Panjang Rp98.959.000,00
  - Pembuatan SR Jaringan Air Limbah (Belakang Mushalla Nursa'adah) RT 20 Kelurahan Guguk Malintang Rp76.018.000,00
- Persediaan logistik bencana sebesar Rp159.223.985,00 pada Dinas Sosial P2KBP3A.
- Persediaan sarana pertanian sebesar Rp7.200.000,00 pada Dinas Pangan dan Pertanian.
- Persediaan pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp49.696.000,-

y) Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
Saldo persediaan untuk tujuan strategis / berjaga-jaga Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.258.350.460,00. Jika dibandingkan dengan saldo 2024 sebesar Rp1.766.639.100,00 maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp508.288.640,00 atau 28,77%.
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga berupa barang logistik kebencanaan pada BPBD Kesbangpol, persediaan sepatu boot pada Dinas Perkim LH dan persediaan bahan habis pakai pada Dinas Kesehatan (RSUD).

z) Persediaan untuk Tujuan Strategi/Berjaga-jaga Lainnya
Saldo Persediaan untuk Tujuan Strategi/Berjaga-jaga Lainnya tahun 2025 adalah sebesar Rp220.105.885,34. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp192.776.976,00 maka saldo tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp27.328.909,34 atau 14,18%. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya berupa persediaan logistik beras pada Dinas Pangan dan Pertanian

aa) Natura
Saldo Natura Tahun 2025 adalah sebesar Rp50.771.945,00. Jika bandingkan dengan saldo 2024 sebesar Rp260.381.687,00 maka saldo tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp209.609.742,00. Persediaan natura berupa persediaan susu dan roti untuk Balita pada Dinas Kesehatan.

bb) Persediaan Natura dan Pakan Lainnya.
Saldo persediaan natura dan pakan lainnya Tahun 2025 adalah sebesar Rp86.927.500,00. Jika dibandingkan dengan saldo 2024 sebesar Rp12.316.000,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp74.611.500,00 atau 605,81%.

Persediaan natura dan pakan lainnya berupa persediaan obat-obatan untuk hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian dan persediaan untuk makanan bayi pada Dinas Kesehatan.

cc) Persediaan Penelitian Biologi
Saldo persediaan penelitian biologi Tahun 2025 adalah sebesar Rp840.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo 2024 sebesar Rp1.104.000,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp264.000,00 atau 23,91%

dd) Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
Saldo persediaan penelitian biologi Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00 Jika dibandingkan dengan saldo 2024 sebesar Rp50.000,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp50.000,00.

ee) Persediaan Penelitian Lainnya.
Saldo persediaan penelitian lainnya Tahun 2025 adalah sebesar Rp520,000,00 Jika dibandingkan dengan saldo 2024 sebesar Rp1.040.000,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp520.000,00 atau 50%.

ff) Persediaan Dalam Proses Lainnya
Saldo persediaan dalam proses lainnya tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00. Jika bandingkan dengan saldo 2024 sebesar Rp27.397.257,00 maka saldo tahun 2025 mengalami penurunan 100%.

hh) Komponen Rambu-Rambu
Saldo persediaan komponen rambu-rambu tahun 2025 adalah sebesar Rp434.200,00. Jika bandingkan dengan saldo 2024 sebesar Rp434.200,00 maka saldo tahun 2025 tidak mengalami perubahan.

B. Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	53.268.304.715,23	54.071.438.199,07

Saldo Investasi Jangka Panjang Tahun 2025 adalah sebesar Rp.53.268.304.715,23. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp54.071.438.199,07, maka saldo Tahun 2025 turun sebesar Rp803.133.483,44 atau 1,49%. Rincian investasi jangka panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Investasi Permanen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	53.268.304.715,23	54.071.438.199,07

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Padang Panjang dan Badan Usaha milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Saldo investasi permanen Tahun 2025 adalah sebesar Rp53.268.304.715,23. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp54.071.438.199,07, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp803.133.483,84 atau 1,49%.

Penurunan nilai investasi permanen sebesar Rp803.133.483,84 tersebut berasal dari rugi tahun berjalan Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Rincian investasi permanen Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a) Penyertaan Modal pada BUMD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	10.044.802.968,84	10.847.936.452,68

Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki satu BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Serambi yang sebelumnya bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang Panjang. Perubahan status PDAM menjadi Perumda. Air Minum Tirta Serambi tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang.

Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi PDAM Tahun 2025 adalah sebesar Rp10.044.802.968,84. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp10.847.936.452,68, saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp803.133.483,84 atau 7,40%.

Terdapat selisih penurunan penyertaan Modal Pemerintahan Daerah dengan perhitungan kerugian tahun berjalan PDAM sebesar (Rp1,71) hal tersebut disebabkan oleh :

Koreksi Laba (rugi) ditahan	(Rp.	0,86)
Koreksi Cadangan Umum	(Rp.	0,85)
	(Rp.	1,71)

Pencatatan dan pelaporan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi menggunakan

Metode Ekuitas. Dengan menggunakan Metode Ekuitas, Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan.

Komposisi investasi/penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi adalah 85,21% dan sebesar 14,79% masih dimiliki oleh Pemerintah Pusat dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.47 : Komposisi Penyertaan Modal pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang Sudah Ditetapkan Statusnya	16.932.575.216,00	85,21
2.	Modal Hibah	3.697.200,00	
3.	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	2.938.528.089,00	14,79
	JUMLAH	**19.874.800.505,00**	**100,00**

Rincian penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.48 : Penyertaan Modal pada PDAM Tahun 2025 dan 2024

No.	Penyertaan Modal	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Penyertaan Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan statusnya	16.932.575.216,00	16.932.575.216,00
2.	Modal Hibah	3.697.200,00	3.697.200,00
3.	Cadangan Umum	153.784.767,83	153.784.766,98
4.	Laba (rugi) Ditahan	(6.242.120.729,44)	(6.339.398.986,81)
5.	Koreksi laba (rugi) tahun lalu	0,00	0,00
6.	Laba (rugi) Tahun Berjalan	(803.133.485,55)	97.278.256,51
	JUMLAH	**10.044.802.968,84**	**10.847.936.452,68**

Keterangan Laba/Rugi 2025		
Laba/Rugi Tahun 2025	(Rp	799.987.658,46)
Koreksi Laba Tahun 2025	(Rp	3.145.827,09)
Laba/Rugi Tahun 2025	**(Rp**	**803.133.485,55)**

Rincian dari penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang Sudah Ditetapkan Statusnya

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	**Penyertaan modal Pemda saat pendirian**	**54.828.000,00**
2.	**Pekerjaan jaringan (proyek) serta gaji PNS diperbantukan :**	**10.916.747.216,00**
	- Penyerahan aset saat pendirian (tahun 1982)	193.444.285,00
	- Penyerahan pipa dan aksesorisnya (tahun 1985)	2.800.900,00
	- Gaji pegawai Pemda yang diperbantukan (tahun 1991 s/d 2002)	468.492.786,00
		22.967.047,00
	- Penyerahan pipa dan aksesorisnya (tahun 1993)	6.242.648,00

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
	- Penyerahan pipa dan aksesorisnya (tahun 1995)	900.000,00
	- Penyerahan 1 (satu) unit WM 1,5" (tahun 1996)	77.885.000,00
	- Penyerahan 2 (dua) unit mobil tangki	249.821.000,00
	- Penyerahan proyek Inpres Dati II TA 1997/1998	2.631.248.550,00
	- Penyerahan proyek APBD tahun 2000 s/d 2005	3.417.978.000,00
	- Penyerahan proyek APBD tahun 2006 s/d 2009	794.787.000,00
	- Pemasangan pipa distribusi (tahun 2007)	1.840.745.000,00
	- Rehabilitasi sarana air minum (tahun 2009)	544.198.000,00
	- Pemasangan pipa distribusi (tahun 2010)	665.237.000,00
	- Pemasangan pipa distribusi (tahun 2011)	
3.	**Penyertaan modal berupa dana kas**	**5.961.000.000,00**
	- Tahun 2004	461.000.000,00
	- Tahun 2008	1.000.000.000,00
	- Tahun 2010	1.000.000.000,00
	- Tahun 2012	3.500.000.000,00
	JUMLAH	**16.932.575.216,00**

Dapat diinformasikan bahwa terdapat penyertaan modal Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp9.710.341.870,39. Hal ini disebabkan oleh belum adanya Peraturan Daerah untuk penambahan penyertaan modal pada Perumda. Air Minum Tirta Serambi. Adapun rincian penyertaan modal Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan statusnya tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.49 : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya

No.	Uraian Pekerjaan	No. Kontrak	Tahun	Jumlah (Rp.)
1.	Pembangunan Sarana Air Minum Sungai Andok	5/PPK-APBD/PU-CK/PSAMSA/8-2015	2015	2.597.095.000,00
2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (Peningkatan SPAM Kel. Silaing Bawah)	5/PPK-APBD/PU-CK/PIPA.SB/9-2016	2016	246.583.000,00
3.	Pengembangan Jaringan Pipa Air Minum Kawasan Kota Padang Panjang	5/PPK-APBD/PU-CK/PIPA,KPP/9-2016	2016	2.050.671.000,00
4.	Pembangunan Sarana dan Prasarana SPAM Kota Padang Panjang	04/PPK-APBD/PUPR-CK/SPAMKPP/7-2017	2017	783.421.000,00
5.	Pembangunan SPAM Lubuk Mato Kucing	04/PPK-APBD/PUPR-CK/SPAMLMK/7-2017	2017	1.665.550.000,00
6.	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Kec. P. Panjang Barat	05/PPK-APBD/PUPR-CK/PJPSPPB/7-2018	2018	2.367.021.870,00
	JUMLAH			**9.710.341.870,00**

2. Modal Hibah

Jumlah sebesar Rp3.697.200,00 tersebut merupakan saldo modal hibah Pemerintah Daerah kepada Perumda. Air Minum Tirta Serambi yaitu berupa penyerahan pipa terpasang di komplek perumahan Kubu Cubadak pada Tahun 1983.

3. Cadangan Umum

Jumlah tersebut merupakan saldo cadangan umum yang diambil sebesar 15% dari bagian laba Perumda. Air Minum Tirta Serambi dengan rincian sebagai berikut :

-	Laba s/d Tahun 1986	Rp 12.769.147,00
-	Laba Tahun 1987 s/d 1989	Rp 17.199.974,00
-	Laba Tahun 1990	Rp 9.619.073,00
-	Laba Tahun 1991	Rp 14.905.084,00
-	Laba Tahun 2005	Rp 18.785.684,00
-	Laba Tahun 2006	Rp 16.230.199,00
-	Laba Tahun 2012	Rp 90.968.210,00
	Jumlah	**Rp 180.477.371,00**

Dari jumlah tersebut, penyertaan modal Permintah Daerah yang berasal dari cadangan umum adalah sebesar Rp153.784.767,83 (85,21% x Rp180.477.371,00).

4. Laba (Rugi) Ditahan

Penyertaan modal Pemerirntah Daerah yang berasal dari laba (rugi) ditahan dengan rincian sebagai berikut :

-	Saldo Laba (Rugi) s/d Tahun 2023	(Rp 6.339.398.986,81)
-	Koreksi kesalahan pencatatan saldo laba(rugi) sd tahun 2023	(Rp 0,86)
		(Rp 6.339.398.985,95)
-	Laba Tahun 2024	Rp 97.278.256,51
	Jumlah	**Rp (6.242.120.729,44)**

5. Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang berasal dari laba (rugi) tahun berjalan adalah sebagai berikut :

Laba (Rugi) Tahun 2025	(Rp. 938.842.458,00)
Bagian Laba Pemerintah Daerah *(85,21% x Rp938.842.458,00)*	(Rp. 799.987.658,46)

Laporan Keuangan Perumda. Air Minum Tirta Serambi Tahun 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 14***.

b) Penyertaan Modal pada PT. Bank Nagari	**31 Desember 2025 (Rp)**	**31 Desember 2024 (Rp)**
	40.398.602.746,39	**40.398.602.746,39**

Nilai investasi jangka panjang yang ditempatkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada PT. Bank Nagari dalam bentuk penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp40.398.602.746,39. Adapun persentase kepemilikan berdasarkan Laporan Keuangan Bank Nagari Tahun 2024 (*Audited*) adalah sebesar 2,12%.

Metode pencatatan yang digunakan untuk penyertaan modal pada PT. Bank Nagari adalah metode biaya *(Cost Method),* dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Penyertaan modal pada PT. Bank Nagari telah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang dalam bentuk setoran

laba/deviden tunai. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang memperoleh pendapatan deviden atas penyertaan modal pada Bank Nagari sebesar Rp7.911.779.256,00. Pendapatan deviden selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 50 : Pendapatan Deviden dari Bank Nagari

No.	Tahun	Jumlah (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	2021	5.356.882.481,00	(956.344.811,00)	(15,15)
2.	2022	6.565.068.670,00	1.208.186.189,00	22,55
3.	2023	7.345.866.623,00	780.797.953,00	11,89
4.	2024	7.922.888.824,00	577.022.201,00	7,86
5.	2025	7.991.779.256,00	68.890.432,00	0,87
	JUMLAH	**35.182.485.854,00**		

Investasi pada Bank Nagari terdiri dari kepemilikan 40.398 lembar saham seri A dengan uraian sebagai berikut:

- Sertifikat nomor A.000019 sejumlah 6.392 lembar @1.000.000,00 nomor seri 318.311 s.d 324.702 tanggal 20 September 2007	6.392.000.000,00
- Sertifikat nomor A.000039 sejumlah 629 lembar @1.000.000,00 nomor seri 366.857 s.d 367.487 tanggal 3 September 2009	629.000.000,00
- Sertifikat nomor A.000058 sejumlah 870 lembar @1.000.000,00 nomor seri 425.144 s.d 426.013 tanggal 6 September 2010	870.000.000,00
- Sertifikat nomor A.000067 sejumlah 1.500 lembar @1.000.000,00 nomor seri 439.842 s.d 441.341 tanggal 18 April 2011	1.500.000.000,00
- Sertifikat nomor A.000136 sejumlah 10.007 lembar @1.000.000,00 nomor seri 776.812 s.d 786.818 tanggal 22 Januari 2014	10.007.000.000,00
- Sertifikat nomor A.000108 sejumlah 4.200 lembar @1.000.000,00 nomor seri 616.216 s.d 620.415 tanggal 10 Januari 2013	4.200.000.000,00
- Sertifikat nomor A.000182 sejumlah 15.800 lembar @1.000.000,00 nomor seri 1.163.264 s.d 1.179.063 tanggal 2 Februari 2016	15.800.000.000,00
- Sertifikat nomor A.000292 sejumlah 1.000 lembar @1.000.000,00 nomor seri 1.898.574 s.d 1.899.573 tanggal 29 Oktober 2024	1.000.000.000,00
Jumlah	**40.398.000.000,00**

Terdapat perbedaan antara kepemilikan saham dengan penyertaan modal sebesar Rp602.746,39 karena belum cukupnya setoran modal untuk menjadi 1(satu) lembar saham seri A dimana per lembar sahamnya adalah sebesar Rp1.000.000,00. Atas penyertaan modal sejumlah Rp602.746,39 masih berada di rekening antara Bank Nagari.

c)	Penyertaan Modal pada PT. Balairung Citra Jaya	31 Desember 2025 (Rp) 2.824.899.000,00	31 Desember 2024 (Rp) 2.824.899.000,00

Nilai investasi jangka panjang yang ditempatkan pada PT. Balairung Citra Jaya per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp2.824.899.000,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar. Penyertaan modal tersebut telah memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015 sebesar Rp21.808.588,00, Tahun 2016 sebesar Rp13.830.503,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp13.777.812,00. Adapun rincian penyertaan modal pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar sebagai berikut:

1. Setoran modal tahun 2010	1.000.000.000,00
2. Tambahan setoran modal tahun 2011	824.899.000.00
3. Tambahan setoran modal tahun 2012	1.000.000.000,00
JUMLAH	**2.824.899.000,00**

Kepemilikan saham Pemerintah Kota Padang Panjang pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar terdiri dari saham dengan rincian sebagai berikut :

1. Saham seri A (1.694 lembar @Rp1.000.000,00)	1.694.000.000,00
2. Saham seri B (1.130.899 lembar @Rp1.000,00)	1.130.899.000,00
J U M L A H	**2.824.899.000,00**

Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Balairung Citra Jaya Tahun 2025, Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki kepemilikan saham sebesar 1,72% dari total modal saham yaitu senilai Rp164.025.990.000,00. Jika dibandingkan dengan penyertaan modal Tahun 2024 sebesar Rp2.824.899.000,00, maka penyertaan modal pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun 2024 tidak mengalami perubahan.

C.	Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp) 1.254.692.267.805,44	31 Desember 2024 (Rp) 1.245.912.825.399,89

Nilai aset tetap per 31 Desember 2025 sebelum penyusutan adalah sebesar Rp2.114.414.959.978,44 sedangkan nilai bersih aset tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp1.254.692.267.805,44. Nilai aset tetap tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.245.912.825.399,89 mengalami peningkatan sebesar Rp8.779.442.405,55 atau sebesar 0,70%.

Adapun rincian dari aset tetap sebesar Rp1.254.692.267.805,44 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.51 : Rincian Aset Tetap

Jenis Aset	Saldo Awal 2025	Nilai Aset Tetap			Saldo Akhir 2025
		Mutasi			
		BM Dikapitalisir 2025	KOREKSI (+)	KOREKSI (-)	
Tanah	422,654,124,475.00	0,00	124,400,000.00	124,400,000.00	422,654,124,475.00
Peralatan Mesin	332,270,509,070.43	12,327,475,974.00	7,300,314,564.00	7.347.359.815,00	344.550.939.793,43
Gedung dan Bangunan	724,089,386,626.32	19,864,054,955.99	7.902.511.924,99	2,649,202,624.00	749.206.750.883,30
Jalan, Irigasi dan Jaringan	555,752,670,791.41	21,002,198,508.37	0,00	0,00	576,754,869,299.78
Aset Tetap Lainnya	10,400,762,083.73	797,419,125.00	0,00	0,00	11,198,181,208.73
Konstruksi Dalam Pengerjaan	13,775,496,815.00	150,000,000.00	2.122.195.003,20	5,997,597,500.00	8,041,023,127.00
Akumulasi Penyusutan	(813,030,124,462.00)	0,00	(46.692.567.711,00)		(859.722.692.173,00)
Jumlah	1,245,912,825,399.89	54,141,148,563.36	(29.243.146.218,81)	16.118.559.939,00	1,254.692.267.805,44

Rincian kapitalisasi asset tetap Tahun 2025 dapat dilihat pada ***Lampiran 18.a s.d 18w.*** Penjelasan terkait masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah	**31 Desember 2025 (Rp)**	**31 Desember 2024 (Rp)**
	422.654.124.475,00	**422.654.124.475,00**

Saldo aset tetap tanah Tahun 2025 adalah sebesar Rp422.654.124.475,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp422.654.124.475,00 maka saldo Tahun 2024 tidak mengalami mengalami kenaikan atau penurunan.

✓ Realisasi belanja modal yang dikapitalisir	Rp	0,00
✓ Koreksi mutasi tambah sebesar		Rp124.400.000,00
✓ Koreksi kurang sebesar		(Rp124.400.000,00)
	Rp	0,00

Adapun rincian dari tanah sebagai berikut :

- Penyesuaian penambahan yang berasal dari Mutasi tambah sebesar Rp124.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

  - Penambahan mutasi aset pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp124.400.000,00 yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan BA Nomor : 000.2.3.2/07/BA-BMD/PP/V-2025 tanggal 20 Mei 2025.

- Penyesuaian pengurangan yang berasal dari Mutasi sebesar Rp124.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - Pengurangan aset pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp124.400.000,00 dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/07/BA-BMD/PP/V-2025 tanggal 20 Mei 2025.

Per tanggal 31 Desember 2024 ada Aset Pemerintah Kota Padang Panjang berupa tanah yang dipinjam pakaikan kepada Yayasan Thawalib Gunung Kota Padang Panjang yakni tanah TK Thawalib Gunung yang beralamat di Kacang Kayu

Kelurahan Sigando dengan luas 1.812 m2 dengan nilai perolehan sebesar Rp271.800.000,00. Adapun Berita Acara Perjanjian pinjam pakainya adalah Nomor: 900/09/DPPKAD-ASET/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015.

2) Peralatan dan Mesin	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	344.550.939.793,43	332.270.509.070,43

Saldo peralatan dan mesin Tahun 2025 adalah sebesar Rp344.550.939.793,43 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp332.270.509.070,43**.** Saldo Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp12.280.430.723,00 atau 3,70%. Perubahan nilai aset tetap peralatan mesin berasal dari :

✓ Realisasi belanja modal yang dikapitalisir	Rp12.327.475.974,00
✓ Koreksi mutasi tambah sebesar	Rp 7.300.314.564,00
✓ Koreksi mutasi kurang sebesar	(Rp 7.347.359.815,00)
	Rp12.280.430.723,00

Adapun rincian peralatan mesin sebagai berikut :

a. Penambahan dari Belanja Modal Peralatan Mesin tahun anggaran 2025 senilai Rp12.327.475.974,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 52 : Daftar Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jenis Aset	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Peralatan Mesin			
Alat Besar	71,944,470.00	0,00	71,944,470.00
Alat Angkutan	4,573,353,140.00	0,00	4,573,353,140.00
Alat Bengkel dan Ukur	17,522,600.00	0,00	17,522,600.00
Alat Pertanian	3,000,000.00	0,00	3,000,000.00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	3,618,994,738.00	509,748,838.00	3,109,245,900.00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	358,869,125.00	3,500,000.00	355,369,125.00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	1,246,247,510.00	4,329,000.00	1,241,918,510.00
Alat Laboratorium	681,762,140.00	20,385,000.00	661,377,140.00
Alat Persenjataan	0,00	0,00	0,00
Komputer	2,304,187,589.00	14,842,500.00	2,289,345,089.00
Alat Keselamatan Kerja	4,400,000.00	0,00	4,400,000.00
Jumlah	12,880,281,312.00	552,805,338.00	12,327,475,974.00

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Modal Peralatan Mesin tahun 2025 adalah sebesar Rp14.811.794.052,00 terjadi perbedaan bila dibandingkan dengan daftar Belanja Modal pada daftar kapitalisasi aset sebesar Rp1.931.512.740,00. Perbedaan ini diakibatkan adanya reklas aset tetap dari peralatan mesin ke Gedung Bangunan dan Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan rincian sebagai berikut :

- Koreksi kurang dari Belanja Modal Peralatan Mesin ke Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp2.150.666.700,00. Hal ini merupakan kegiatan fisik pengelolaan air kotor yakni pengadaan IPAL dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan IPAL sebesar Rp1.998.000.000,00 dengan SPK No.03/PPK/IPAL/RSUD.PP/IX-2025.
- Biaya konsultan pengawasan sebesar Rp73.507.900,00 degan SPK No. 07/PPK-KONS/PENGAWASIPAL/RSUD.PP/XII/2025.
- Biaya konsultan perencanaan sebesar Rp74.258.800,00 dengan SPK No. 03/PPK-PERENCANAANIPAL/RSUD/VII-2025.
- Biaya honorarium direksi teknis sebesar Rp4.900.000,00

- Koreksi tambah dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Peralatan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp219.153.960,00. Hal ini adalah merupakan kegiatan pengadaan mebel pada sekolah dengan rincian sebagai berikut :
  - Pengadaan mebel sebesar Rp93.873.810,00 pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan Surat Pesanan (SP) No. EP.01KA89R96CCDFYGXPNP9Z512PF
  - Pengadaan mebel sebesar Rp125.280.150,00 pada SDN 10 Padang Panjang Timur dengan Surat Pesanan (SP) No. EP.01KA7VACW83ENNYXZPN2855BG.

Rincian Belanja Modal Alat-Alat Besar sebesar Rp71.944.470,00 sebagai berikut :

Tabel 5. 53 : Belanja Alat – alat Besar

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Koperindag	9,000,000.00		9,000,000.00
DPRD	2,800,000.00		2,800,000.00
Pendidikan	1,807,970.00		1,807,970.00
Pertanian	8,621,500.00		8,621,500.00
PUPR	31,005,000.00		31,005,000.00
Camat Barat	18,710,000.00		18,710,000.00
Jumlah	71.944.470,00		71.944.470,00

Rincian Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp4.573.353,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 54 : Rincian Belanja Modal Alat Angkutan

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Setdako	1,802,500,000.00	0,00	1,802,500,000.00
Kesehatan	649,905,000.00	0,00	649,905,000.00
Perkim LH	153,949,200.00	0,00	153,949,200.00
Satpol.PP dan Damkar	1,927,998,940.00	0,00	1,927,998,940.00
Camat Barat	39,000,000.00	0,00	39,000,000.00
Jumlah	4,573,353,140.00	0,00	4,573,353,140.00

Rincian Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur sebesar Rp17.522.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 55 : Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
PUPR	5,150,000.00	0,00	5,150,000.00
Pendidikan	1,900,000.00	0,00	1,900,000.00
RSUD	1,498,900.00	0,00	1,498,900.00
Koperindag	3,350,000.00	0,00	3,350,000.00
Camat Barat	4,223,700.00	0,00	4,223,700.00
Camat Timur	1,400,000.00	0,00	1,400,000.00
Jumlah	17,522,600.00	0,00	17,522,600.00

Rincian Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp3.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.56 : Rincian Belanja Modal Alat Pertanian

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
PUPR	3,000,000.00	0,00	3,000,000.00
Jumlah	3,000,000.00	0,00	3,000,000.00

Rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp3.109.245.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 57 : Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Setdako	550,603,919.00	0,00	550,603,919.00
DPRD	173,460,023.00	0,00	173,460,023.00
BKPSDM	65,369,995.00	0,00	65,369,995.00
Kesehatan	233,766,408.00	42,664,988.00	191,101,420.00
Pendidikan	1,790,740,023.00	456,283,850.00	1,334,456,173.00
RSUD	132,604,920.00	0,00	132,604,920.00
Pariwisata	63,997,100.00	0,00	63,997,100.00
PUPR	5,200,000.00	0,00	5,200,000.00
DPMPTSP	27,464,000.00	0,00	27,464,000.00
Koperindag	130,595,500.00	0,00	130,595,500.00
Perkim LH	7,984,900.00	0,00	7,984,900.00
Satpol.PP dan Damkar	256,549,500.00	10,800,000.00	245,749,500.00
Sosial	164,208,450.00	0,00	164,208,450.00
Kominfo	6,000,000.00	0,00	6,000,000.00
Camat Barat	1,900,000.00	0,00	1,900,000.00
Camat Timur	8,550,000.00	0,00	8,550,000.00
Jumlah	3,618,994,738.00	509,748,838.00	3,109,245,900.00

Rincian Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp355.369.125,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 58 : Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Setdako	140,577,000.00	3,500,000.00	137,077,000.00
DPRD	22,533,000.00	0,00	22,533,000.00
Kesehatan	3,330,000.00	0,00	3,330,000.00
Pendidikan	118,237,625.00	0,00	118,237,625.00
RSUD	24,170,000.00	0,00	24,170,000.00
DPMPTSP	13,818,000.00	0,00	13,818,000.00
Satpol.PP dan Damkar	23,476,500.00	0,00	23,476,500.00
Sosial	6,690,000.00	0,00	6,690,000.00
Kominfo	4,662,000.00	0,00	4,662,000.00
Camat Timur	1,375,000.00	0,00	1,375,000.00
Jumlah	358,869,125.00	3,500,000.00	355,369,125.00

Rincian Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp1.241.918.510,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 59 : Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Kesehatan	727,817,280.00	0,00	727,817,280.00
RSUD	518,430,230.00	4,329,000.00	514,101,230.00
Jumlah	1,246,247,510.00	4,329,000.00	1,241,918,510.00

Rincian Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp661.377.140,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.60 : Belanja Modal Alat Laboratorium

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Kesehatan	432,690,500.00	0,00	432,690,500.00
Pendidikan	129,276,140.00	20,385,000.00	108,891,140.00
RSUD	119,795,500.00	0,00	119,795,500.00
Jumlah	681,762,140.00	20,385,000.00	661,377,140.00

Rincian Belanja Modal Komputer sebesar Rp2.289.345.089,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.61 : Belanja Modal Komputer

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Setdako	188,049,000.00	0,00	188,049,000.00
DPRD	9,600,000.00	0,00	9,600,000.00
Inspektorat	92,745,001.00	0,00	92,745,001.00
BKPSDM	42,080,000.00	0,00	42,080,000.00
BKPD	62,676,000.00	0,00	62,676,000.00
Kesehatan	176,400,100.00	0,00	176,400,100.00
Pendidikan	624,640,300.00	14,037,500.00	610,602,800.00
RSUD	547,691,780.00	0,00	547,691,780.00
Capil	47,041,800.00	0,00	47,041,800.00
Pariwisata	19,850,000.00	0,00	19,850,000.00
PUPR	30,888,000.00	0,00	30,888,000.00
DPMPTSP	146,969,349.00	0,00	146,969,349.00
Koperindag	83,325,000.00	0,00	83,325,000.00
Perhubungan	7,199,999.00	0,00	7,199,999.00
Perkim LH	109,199,760.00	0,00	109,199,760.00
Satpol.PP dan Damkar	73,149,000.00	0,00	73,149,000.00
Sosial	36,457,500.00	0,00	36,457,500.00
Kominfo	6,225,000.00	805,000.00	5,420,000.00
Jumlah	2,304,187,589.00	14,842,500.00	2,289,345,089.00

Rincian Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp4.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 62 : Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Pendidikan	4,400,000.00	0,00	4,400,000.00
Jumlah	4,400,000.00	0,00	4,400,000.00

b. Penjelasan Mutasi Tambah

Tabel 5.63 : Mutasi Tambah

Jenis Aset	KOREKSI (+)				JUMLAH
	Mutasi OPD	Belanja Barang dan Jasa	Hibah	Lain - Lain	
Alat Angkutan	5,879,998,140.00	0,00	917,899,999.00	0,00	6,797,898,139.00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	135,640,025.00	10,932,000.00	0,00	2,910,000.00	149,482,025.00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	17,450,000.00	0,00	0,00	0,00	17,450,000.00

Jenis Aset	KOREKSI (+)				JUMLAH
	Mutasi OPD	Belanja Barang dan Jasa	Hibah	Lain - Lain	
Alat Laboratorium	6,600,000.00	0,00	0,00	0,00	6,600,000.00
Alat Persenjataan	0,00	0,00	237,456,000.00	0,00	237,456,000.00
Komputer	91,428,400.00	0,00	0,00	0,00	91,428,400.00
Jumlah	6,131,116,565.00	10,932,000.00	1,155,355,999.00	2,910,000.00	7,300,314,564.00

- Penyesuaian penambahan yang berasal dari Mutasi OPD sebesar Rp6.131.116.565,00 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Penambahan mutasi aset alat angkutan senilai Rp5.879.998.140,00 dengan rincian sebagai berikut :
     a. Penambahan mutasi aset pada Dinas Perkim LH senilai Rp354.462.576,00 dengan rincian :
        - Penambahan mutasi aset sebesar Rp44.522.066,00 yang berasal dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.0/33/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
        - Penambahan mutasi aset sebesar Rp17.113.100 yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/12/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
        - Penambahan mutasi aset sebesar Rp30.007.000 yang berasal dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/15/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
        - Penambahan mutasi aset sebesar Rp16.922.750 yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Berita Acara Nomor : 002.2.3.2/23/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
        - Penambahan mutasi aset sebesar Rp212.106.660 yang berasal dari BPKD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/11/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
        - Penambahan mutasi aset sebesar Rp14.137.000 yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/19/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
        - Penambahan mutasi aset sebesar Rp19.654.000 yang berasal dari Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3/43/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
     b. Penambahan mutasi aset pada Dinas Camat Padang Panjang Barat senilai Rp142.061.400,00 dengan rincian :
        - Penambahan mutasi aset sebesar Rp13.545.000 yang berasal dari BPKD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/02/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 18 Februari 2025.
        - Penambahan mutasi aset sebesar Rp7.200.000 yang berasal dari BPKD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/02/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 18 Februari 2025.

- Penambahan mutasi aset sebesar Rp13.005.000 yang berasal dari BPKD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/02/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 18 Februari 2025.
- Penambahan mutasi aset sebesar Rp12.217.000 yang berasal dari BPKD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/02/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 18 Februari 2025.
- Penambahan mutasi aset sebesar Rp96.094.400 yang berasal dari Dinas Pangan Pertanian dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/30/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

c. Penambahan mutasi aset pada Dinas Camat Padang Panjang Timur senilai Rp14.668.500,00 dengan rincian :
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp14.668.500 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/22/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

d. Penambahan mutasi aset pada Sekretariat Daerah senilai Rp2.311.299.000,00 dengan rincian :
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp492.254.700 yang berasal dari Sekretaris DPRD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/31/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp628.000.000 yang berasal dari Sekretaris DPRD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/32/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp12.821.800 yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/13/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp185.000.000 yang berasal dari Sekretaris DPRD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/04/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 18 Februari 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp188.300.000 yang berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/03/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 18 Februari 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp16.876.500 yang berasal dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Menengah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/45/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp349.931.000 yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/46/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp120.000.000 yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/49/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp289.120.000 yang berasal dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/50/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

- Penambahan mutasi aset sebesar Rp14.858.000 yang berasal dari Dinas Pangan Pertanian dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/55/BA-BMD/PP/VII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- Penambahan mutasi aset sebesar Rp14.137.000 yang berasal dari Kecamatan Padang Panjang Barat dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/55/BA-BMD/PP/VII-2025 tanggal 13 Agustus 2025

e. Penambahan mutasi aset pada BPKD senilai Rp236.376.175,00 dengan rincian :
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp165.979.000 yang berasal dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Menengah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/17/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 28 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp14.668.500 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/20/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp16.420.675 yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/24/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp19.654,000 yang berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/41/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp19.654,000 yang berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/42/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025
f. Penambahan mutasi aset pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Menengah senilai Rp164.850.000,00 dengan rincian :
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp164.850.000 yang berasal dari Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/28/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
g. Penambahan mutasi aset pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata senilai Rp42.365.000,00 dengan rincian :
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp12.358.000 yang berasal dari Camat Padang Panjang Barat dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/37/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp30.007.000 yang berasal dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/14/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
h. Penambahan mutasi aset pada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp189.150.000,00 dengan rincian :
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp189.150.000,00 yang berasal dari BPKD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/81/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 24 Februari 2025.
i. Penambahan mutasi aset pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan senilai Rp200.291.005,00 dengan rincian :

- Penambahan mutasi aset sebesar Rp170.300.000,00 yang berasal dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Menengah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/16/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- Penambahan mutasi aset sebesar Rp14.987.505,00 yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/36/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- Penambahan mutasi aset sebesar Rp15.003.500,00 yang berasal dari Rumah Sakit Umum dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/25/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

j. Penambahan mutasi aset pada Dinas Perhubungan senilai Rp192.664.667,00 dengan rincian :
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp14.126.467,00 yang berasal dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/34/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp14.137.000,00 yang berasal dari Camat Padang Panjang Barat dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/27/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp14.137.000,00 yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/18/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp14.668.500,00 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/21/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp15.012.000,00 yang berasal dari Inspektur Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/29/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp16.876.500,00 yang berasal dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Berita Acara Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/51/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp15.207.200 yang berasal dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Berita Acara Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/62/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp88.500.000,00 yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/64/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025

k. Penambahan mutasi aset pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp255.250.000,00 dengan rincian :
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp210.250.000 yang berasal dari BPKD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/10/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp45.000.000 yang berasal dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Menengah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/05/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 19 Februari 2025.

l. Penambahan mutasi aset pada Sekretariat DPRD senilai Rp307.434.500,00 dengan rincian :
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp14.987.500 yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/35/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp16.876.500 yang berasal dari Dinas Pangan Pertanian dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/39/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp275.570.500,00 yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/38/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

m. Penambahan mutasi aset pada Badan Perencanaan, Peneletian dan Pengembangan Daerah senilai Rp135.600.000,00 dengan rincian :
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp135.600.000,00 yang berasal dari Camat Padang Panjang Timur dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/26/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

n. Penambahan mutasi aset pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp150.000.000,00 dengan rincian:
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp150.000.000 yang berasal dari Sekretariat DPRD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/63/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

o. Penambahan mutasi aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp62.770.567,00 dengan rincian :
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp15.385.000 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/10/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp32.382.067 yang berasal dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/11/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp15.003.500,00 yang berasal dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/52/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

p. Penambahan mutasi aset pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp527.714.750,00 dengan rincian :
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp513.014.750 yang berasal dari Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/60/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 6 Oktober 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp7.200.000 yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/54/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp7.500.000 yang berasal dari Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/56/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

q. Penambahan mutasi aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp593.040.000,00 dengan rincian :
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp417.640.000,00 yang berasal dari Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/38/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp15.011.000 yang berasal dari Inspektur Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/18/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp147.000.000,00 yang berasal dari Sekretariat DPRD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/53/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Penambahan mutasi aset sebesar Rp13.139.000,00 yang berasal dari Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/18/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

2. Penambahan mutasi aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp135.640.025,00 dengan rincian sebagai berikut :
   - Penambahan mutasi aset pada Dinas Sekretariat Daerah sebesar Rp77.550.000,00 yang berasal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/57/BA/BMD/PP/X-2025 tanggal 6 Oktober 2025.
   - Penambahan mutasi aset Kecamatan Padang Panjang Barat sebesar Rp3.600.000,00 yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/02/BA/BMD/PP/II-2025 tanggal 8 Februari 2025.
   - enambahan mutasi aset pada Dinas Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp54.490.025,00 yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. Penambahan mutasi aset Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp17.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
   - Penambahan mutasi aset pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang sebesar Rp1.850.000,00 dari Dinas Penanaman Modal 000.2.3.2/08/BA-BMD/PP/V-2025 tanggal 20 Mei 2025.
   - Penambahan mutasi aset pada Setdako sebesar Rp15.600.000,00 yang berasal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/57/BA/BMD/PP/X-2025 tanggal 6 Oktober 2025.

4. Penambahan mutasi asset Alat Laboratorium pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp6.600.000,00 yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/52/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

5. Penambahan mutasi asset Komputer sebesar Rp91.428.400,00 dengan rincian sebagai berikut :
   - Penambahan mutasi aset pada Sekretariat Daerah sebesar Rp29.000.000,00 yang berasal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang

dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/57/BA/BMD/PP/IX-2025 tanggal 6 Oktober 2025.

- Penambahan mutasi aset pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp22.196.500,00 yang berasal dari Inspektorat Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/61/BA/BMD/PP/X-2025 tanggal 8 Oktober 2025
- Penambahan mutasi aset pada Dinas Perkim LH sebesar Rp40.231.900,00 yang berasal dari Inspektorat dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/61/BA/BMD/PP/X-2025 tanggal 8 Oktober 2025.

- Penyesuaian penambahan yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp13.842.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa pada Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp13.842.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
     - Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa berupa Honorarium Pejabat Pengadaan sebesar Rp680.000,00 pada Bada Pengembangan Sumber Daya Manusia.
     - Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa berupa Reklas dari biaya pemeliharan sebesar Rp4.480.000,00 pada Dinas Pendidikan.
     - Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa berupa Reklas dari biaya pemeliharan sebesar Rp5.772.000,00 pada Dinas Sosial.
     - Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa berupa Reklas dari biaya pemeliharan sebesar Rp2.910.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
- Penyesuaian penambahan yang berasal dari Hibah sebesar Rp1.155.355.999,00 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Penambahan hibah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp319.899.999,00 yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa 1 unit kendaraan pick up dengan Berita Acara Nomor : 25/BNPB/OJLP/LP.02.03/12/2025 tanggal 28 Desember 2025.
  2. Penambahan hibah pada Dinas Perhubungan sebesar Rp598.000.000,00 yang berasal dari Kementerian Dinas Perhubungan berupa 1 (satu) unit bus sekolah dengan Berita Acara Nomor : BA.DRJ 615 Tahun 2025 tanggal 28 Mei 2025.
  3. Penambahan hibah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp237.456.000,00 yang berasal dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayaan Kementerian Dalam Negeri berupa 10 buah pakaian penyelamatan dengan Berita Acara Nomor : No.000.3.3.2/344/BAK tanggal 9 September 2025.

a. Penjelasan Mutasi Kurang

Tabel 5.64 : Mutasi Kurang

Jenis Aset	KOREKSI (-)				JUMLAH
	Mutasi OPD	Penghapusan	Hibah	Lain-Lain	
Peralatan Mesin					`
Alat Angkutan	5.879.998.140,00	850.998.250,00		340.420.000,00	7.071.416.390,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	135.640.025,00	-	24.825.000,00		160.465.025,00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	17.450.000,00	-		-	17.450.000,00
Alat Laboratorium	6.600.000,00	-		-	6.600.000,00

Jenis Aset	KOREKSI (-)				JUMLAH
	Mutasi OPD	Penghapusan	Hibah	Lain-Lain	
Komputer	91.428.400,00	-		-	91.428.400,00
Jumlah	6.131.116.565,00	850.998.250,00	24.825.000,00	340.420.000,00	7.347.359.815,00

- Penyesuaian pengurangan aset yang berasal dari Mutasi OPD sebesar Rp6.131.116.565,00 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pengurangan mutasi aset Alat Angkutan senilai Rp5.879.998.140,00 dengan rincian sebagai berikut :
     a. Pengurangan aset pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.116.143.750,00 dengan rincian sebagai berikut :
        - Pengurangan aset sebesar Rp513.014.750,00 ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/60/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 6 Oktober 2025.
        - Pengurangan aset sebesar Rp164.850.000,00 ke Dinas Koperindag dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/28/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
        - Pengurangan aset sebesar Rp417.640.000,00 ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/38/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
        - Pengurangan aset sebesar Rp13.139.000,00 ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/18/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
        - Pengurangan aset sebesar Rp7.500.000,00 ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/56/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
     b. Pengurangan asset pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.602.504.700,00 dengan rincian sebagai berikut :
        - Pengurangan aset sebesar Rp185.000.000,00 ke Sekretariat DPRD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/04/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 18 Februari 2025
        - Pengurangan aset sebesar Rp628.000.000,00 ke Sekretariat DPRD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/32/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
        - Pengurangan aset sebesar Rp492.254.700,00 ke Sekretariat DPRD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/31/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
        - Pengurangan aset sebesar Rp150.000.000,00 ke DPMPTSP dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/63/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
        - Pengurangan aset sebesar Rp147.250.000,00 ke Dinas PUPR dengan Berita Acara Nomor : Nomor : 000.2.3.2/53/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
     c. Pengurangan asset pada Inspektorat sebesar Rp30.023.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pengurangan aset sebesar Rp15.011.000,00 ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/39/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- Pengurangan aset sebesar Rp15.012.000,00 ke Dinas Perhubungan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/29/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

d. Pengurangan aset pada Dinas Perkim LH sebesar Rp289.120.000,00 yang mutasi ke Sekretariat Daerah Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/50/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

e. Pengurangan asset pada Dinas Kominfo sebesar Rp188.300.000,00 yang mutasi ke Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/81/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 24 Februari 2025

f. Pengurangan aset pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp58.962.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
   - Pengurangan aset sebesar Rp19.654.000,00 ke Dinas Perkim LH dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3/43/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025
   - Pengurangan aset sebesar Rp19.654.000,00 ke Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/41/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Pengurangan aset sebesar Rp19.654.000,00 ke Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/42/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025

g. Pengurangan aset pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp91.030.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
   - Pengurangan aset sebesar Rp14.126.466 ke Dinas Perkim LH dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/33/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Pengurangan aset sebesar Rp12.140.000,00 ke Dinas Perkim LH dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/33/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025
   - Pengurangan aset sebesar Rp18.255.600,00 ke Dinas Perkim LH dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/33/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025
   - Pengurangan aset sebesar Rp14.126.467,00 ke Dinas Perhubungan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/34/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Pengurangan aset sebesar Rp18.255.600,00 ke Dinas Pendidikan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/11/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Pengurangan aset sebesar Rp14.126.467,00 ke Dinas Pendidikan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/11/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025

h. Pengurangan aset pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp1.113.017.760,00 dengan rincian sebagai berikut :
   - Pengurangan aset sebesar Rp189.150.000,00 ke Dinas Kominfo dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/81/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 24 Februari 2025.

- Pengurangan aset sebesar Rp212.106.660,00 ke Dinas Perkim LH dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/11/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- Pegurangan aset sebesar Rp210.250.000,00 ke Dinas Capil dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/10/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- Pengurangan aset sebesar Rp349.931.000,00 ke Setdako dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/46/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- Pengurangan aset sebesar Rp88.500.000,00 ke Dinas Perhubungan dengan Berita Acara Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/64/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- Pengurangan aset sebesar Rp13.545.000,00 ke Camat Barat dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/02/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 18 Februari 2025.
- Pengurangan aset sebesar Rp7.200.000,00 ke Camat Barat dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/02/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 18 Februari 2025.
- Pengurangan aset sebesar Rp13.005.000,00 ke Camat Barat dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/02/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 18 Februari 2025.
- Pengurangan aset sebesar Rp12.217.000,00 ke Camat Barat dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/02/BA-BMD/PP/II-2025 tanggal 18 Februari 2025.
- Pengurang aset sebesar Rp17.113.100,00 ke Dinas Perkim LH dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/12/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

i. Pengurangan aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp37.175.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
   - Pengurangan aset sebesar Rp14.987.500,00 ke Sekretariat DPRD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/35/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025
   - Pengurangan aset sebesar Rp14.987.505,00 ke Dinas Arsip Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/35/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Pengurangan aset sebesar Rp7.200.000,00 ke Satpol.PP dan Damkar Berita Acara Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/54/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

j. Pengurangan aset pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp15.003.500,00 yang mutasi ke Dinas Arsip Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/25/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025

k. Pengurangan aset pada Dinas Capil sebesar Rp28.274.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
   - Pengurangan aset sebesar Rp14.137.000,00 ke Dinas Perkim LH dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/19/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025
   - Pengurangan aset sebesar Rp14.137.000,00 ke Dinas Perhubungan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/18/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

l. Pengurangan aset pada Dinas Pangan dan Pertanian sebesar Rp127.828.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pengurangan aset sebesar Rp96.094.400,00 ke Kecamatan Padang Panjang Barat dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/30/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- Pengurangan aset sebesar Rp16.876.500,00 ke Sekretariat DPRD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/39/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- Pengurangan aset sebesar Rp14.858.000,00 ke Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/55/BA-BMD/PP/VII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

m. Pengurangan aset pada Dinas PUPR sebesar Rp59.390.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
   - Pengurangan aset sebesar Rp14.668.500,00 ke Dinas Perhubungan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/21/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025
   - Pengurangan aset sebesar Rp14.668.500,00 ke Kecamatan Padang Panjang Timur dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/22/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Pengurangan aset sebesar Rp14.668.500,00 ke BPKD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/20/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Pengurangan aset sebesar Rp15.385.000,00 ke Dinas Pendidikan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/10/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

n. Pengurangan aset pada Dinas DPMPTSP sebesar Rp132.821.800,00 dengan rincian sebagai berikut :
   - Pengurangan aset sebesar Rp120.000.000,00 ke Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/49/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Pengurangan aset sebesar Rp12.821.800,00 ke Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/13/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

o. Pengurangan aset pada Dinas Koperindag sebesar Rp430.239.200,00 dengan rincian sebagai berikut :
   - Pengurangan aset sebesar Rp45.000.000,00 ke Dinas Capil dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/05/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 19 Februari 2025.
   - Pengurangan aset sebesar Rp165.979.000,00 ke BPKD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/17/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 28 Agustus 2025
   - Pengurangan aset sebesar Rp170.300.000,00 ke Dinas Arsip dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/16/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Pengurangan aset sebesar Rp16.876.500,00 ke Setdako dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/45/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Pengurangan aset sebesar Rp16.876.500,00 ke Dinas Perhubungan dengan Berita Acara Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/51/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
   - Pengurangan aset sebesar Rp15.207.200,00 ke Dinas Perhuungan dengan Berita Acara Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/51/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

p. Pengurangan aset pada Dinas Satpol.PP dan Damkar sebesar Rp308.913.925,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pengurangan aset sebesar Rp16.922.750,00 ke Dinas Perkim LH dengan Berita Acara Nomor : 002.2.3.2/23/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- Pengurangan aset sebesar Rp16.420.675,00 ke BPKD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/24/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- Pengurangan aset sebesar Rp275.570.500,00 ke DPRD dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/38/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

q. Pengurangan aset pada Dinas Sosial sebesar Rp75.017.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Pengurangan aset sebesar Rp30.007.000,00 ke Dinas Perkim LH dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/15/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- Pengurangan aset sebesar Rp30.007.000,00 ke Dinas Pariwisata dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/14/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- Pengurangan aset sebesar Rp15.003.500 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/52/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

r. Pengurangan aset pada Kecamatan Padang Panjang Barat sebesar Rp40.632.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Pengurangan aset sebesar Rp14.137.000,00 ke Dinas Perhubungan dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/27/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- Pengurangan aset sebesar Rp12.358.000,00 ke Dinas Pariwisata dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/37/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- Pengurangan aset sebesar Rp14.137.000,00 ke Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/55/BA-BMD/PP/VII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

s. Pengurangan aset pada Kecamatan Padang Panjang Timur sebesar Rp135.600.000,00 mutasi pindah ke Bappeda dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/26/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

- Pengurangan mutasi aset Alat Rumah Tangga senilai Rp135.640.025,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - Pengurangan mutasi aset pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp77.550.000,00 mutasi ke Dinas Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/57/BA/BMD/PP/X-2025 tanggal 6 Oktober 2025.
  - Pengurangan mutasi aset pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp3.600.000,00 mutasi ke Kecamatan Padang Panjang Barat dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/02/BA/BMD/PP/II-2025 tanggal 8 Februari 2025.
  - Pengurangan mutasi aset pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp54.490.025,00 mutasi ke Dinas Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Pengurangan mutasi aset Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp17.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - Pengurangan mutasi aset pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.850.000,00 mutasi ke Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/08/BA-BMD/PP/V-2025 tanggal 20 Mei 2025.

- Pengurangan mutasi aset pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp15.600.000,00 yang mutasi ke Setdako dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/57/BA/BMD/PP/X-2025 tanggal 6 Oktober 2025.

- Pengurangan mutasi aset Alat Laboratorium pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas sebesar Rp6.600.000,00 yang mutasi Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berasal dari dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/52/BA-BMD/PP/VIII-2025 tanggal 13 Agustus 2025.

- Pengurangan mutasi aset Komputer sebesar Rp91.428.400,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - Pengurangan mutasi aset pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp29.000.000,00 yang mutasi ke Sekretariat Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/57/BA/BMD/PP/IX-2025 tanggal 6 Oktober 2025.
  - Pengurangan mutasi aset pada Inspektorat sebesar Rp22.196.500,00 yang mutasi ke Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/61/BA/BMD/PP/X-2025 tanggal 8 Oktober 2025
  - Pengurangan mutasi aset pada Inspektorat sebesar Rp40.231.900,00 yang mutasi ke Dinas Perkim LH yang berasal dari dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/61/BA/BMD/PP/X-2025 tanggal 8 Oktober 2025.

- Penyesuaian pengurangan aset yang berasal dari penghapusan sebesar Rp850.998.250,00 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Penghapusan aset tetap berupa alat angkutan senilai Rp850.998.250,00 dengan rincian sebagai berikut :
     - Penghapusan aset pada Sekretariat DPRD senilai Rp431.393.125,00 dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 45 tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025.
     - Penghapusan aset pada Sekretariat DPRD senilai Rp406.783.325,00 dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 102 tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025.
     - Penghapusan aset pada BPBD senilai Rp12.821.800 dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor : 000.2.4/60/SETDAKO-PP/2025 tanggal 23 Oktober 2025.

- Penyesuaian pengurangan aset yang berasal dari hibah kepada pihak ke tiga sebesar Rp24.825.000,00. Pengurangan aset ini berasal dari Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mutasi ke Polres Padang Panjang dengan Berita Acara Nomor : 000.2.4/02/BA/BPKD-PP/II-2025 tanggal 24 Februari 2025.
- Penyesuaian pengurangan aset yang berasal dari lain – lain sebesar Rp340.420.000,00. Pengurangan ini berasal dari reklas aset tetap angkutan kendaraan bermotor ke aset lainya karena rusak berat pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Per tanggal 31 Desember 2025 ada beberapa peralatan dan mesin Pemerintah Kota Padang Panjang yang dipinjam pakaikan kepada pihak lain sebesar Rp3.396.787.848,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pinjam pakai Kendaraan dinas Toyota Kijang Inova pada Kejaksaan Negeri BA 1007 N dengan nilai Kendaraan sebesar Rp278.620.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/02/BA-Aset/IV/2021 tanggal 12 April 2021.
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Toyota Inova pada Pengadilan Negeri BA 5 N / BA 1568 N dengan nilai Kendaraan sebesar Rp289.395.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/BA. Aset/I/2021 tanggal 4 Januari 2021
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Toyota Inova pada Kodim 0307 Tanah Datar BA 24 N dengan nilai Kendaraan sebesar Rp292.770.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/04/BPKD-Aset/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Toyota Inova pada Polres Padang Panjang BA 1505 N dengan nilai sebesar Rp173.500.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/06/BPKD.ASET/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.
- Pinjam pakai Kendaraan dinas toyota inova pada Polisi Militer Padang Panjang BA 1756 NZ dengan nilai Kendaraan sebesar Rp185.000.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/BA.Aset/IX/2020 tanggal 21 September 2020.
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Isuzu Panther dan Kendaraan roda dua pada kantor Samsat BA 1577 N dan BA 7667 N dengan nilai Kendaraan Rp253.515.612,00 dan Rp6.500.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/BPKD.Aset/II/2018 tanggal 15 Februari 2018.
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Toyota Avanza pada Badan Pertanahan BA 1585 NC dengan nilai sebesar Rp217.870.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/BPKD.ASET/I/2019 tanggal 28 Januari 2018.
- Pinjam pakai Kendaraan dinas KIA mobil Ambulance pada Secata B BA 2731 NE dengan nilai sebesar Rp125.000.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/BAASET/IX/2022 tanggal 7 September 2022.
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Toyota Rush pada Secata B BA 1736 NE dengan nilai sebesar Rp210.250.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/DPPKAD.ASET/I/2016 tanggal 1 Juni 2016.
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Toyota Kijang Inova pada Pengadilan Agama BA 26 N dengan nilai sebesar Rp304.129.618,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/BPKD.ASET/I/2021 tanggal 4 Januari 2020.
- Pinjam pakai Kendaraan dinas toyta inova pada Bawaslu Padang Panjang BA ex 37 N dengan nilai Kendaraan sebesar Rp185.000.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/BAASET/IX/2022 tanggal 7 September 2022.
- Pinjam pakai Kendaraan dinas Isuzu Panther pada Kementrian Agama BA 1575 N dengan nilai sebesar Rp304.129.618,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/01/BPKD.ASET/I/2021 tanggal 4 Januari 2020.
- Pinjam pakai Kendaraan Daihatsu Terios pada Polres Padang Panjang BA 1721 N dengan nilai Kendaraan sebesar Rp175.858.000,00 dengan surat perjanjian Nomor B/857/XI/106.4.1.6/2023 tanggal 6 November 2023
- Pinjam pakai Kenderaan Dinas Toyota Kijang Inova pada Brimob Padang Panjang BA 1715 NZ dengan nilai kendaraan sebesar Rp185.000.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/13/DPPKAD-ASET/XII/20215 tanggal 28 Desember 2015.
- Pinjam pakai kendaraan Dinas Toyota Rush pada Koramil Padang Panjang BA 1763 NZ dengan nilai kendaraan sebesar Rp210.250.000,00 dengan perjanjian Nomor : 900/04/BA-ASET/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.

Tabel 5.65 : Daftar Aset Yang Dipinjam Pakai Pihak Lain

Jenis kendaran	No Polisi	Nilai	Pemakai
Kendaraan Roda 4			
Toyota Kijang Innova	BA 1568 N	289.395.000,00	Pengadilan Negeri
Toyota Kijang Innova	BA 1007 N	278.620.000,00	Kejaksaan Negeri
Toyota Kijang Innova	BA 1756 NZ	185.000.000,00	Polisi Militer
Toypta Kijang Innova	BA 24 N	292.770.000,00	Kodim 0307
Toyota Kijang Innova	BA 1505 N	173.500.000,00	Polres Padang Panjang
Toyota Kijang Innova	BA 1715 N	185.000.000,00	Brimob
Isuzu Panther	BA 1577 N	253.515.612,00	Kantor Samsat
Toyota Avanza	BA 1585 NC	217.870.000,00	Badan Pertanahan
KIA Ambulance	BA 2731 NE	125.000.000,00	Secata B
Toyota Rush	BA 1736 N	210.250.000,00	Secata B
Toyota Kijang Innova	BA 26 N	304.129.618,00	Pengadilan Agama
Toyota Inova	BA ex 37 N	185.000.000,00	Bawaslu
Toyota Rush	BA 1763 NZ	210.250.000,00	Koramil
Daihatsu Terios	BA 1721 N	175.858.000,00	Polres
Isuzu Panther	BA 1575 N	304.129.618,00	Kementrian Agama
Kendaraan Roda 2			
Honda	BA 7667 N	6.500.000,00	Kantor Samsat
JUMLAH		**3.396.787.848,00**	

3) Gedung dan Bangunan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	749.206.750.883,30	**724.089.386.626.32**

Saldo aset gedung dan bangunan tahun 2025 adalah sebesar Rp749.206.750.883,30. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp724.089.386.626,32 maka saldo tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp25.117.364.256,98 atau naik sebesar 3,47%. Perubahan nilai gedung dan bangunan berasal dari :

- ✓ Realisasi belanja modal yang dikapitalisir sebesar Rp19.864.054.955,99
- ✓ Koreksi tambah sebesar Rp 7.902.511.924,99
- ✓ Koreksi kurang sebesar (Rp 2.649.202.624,00

Rp25.117.364.256,98

Adapun rincian gedung dan bangunan sebagai berikut :

a. Penambahan dari belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp19.864.054.955,99 terdiri dari :

Tabel 5. 66 : Daftar Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	19.864.054.955.99		19.864.054.955.99
Monumen	5.700.000,00	5.700.000,00	-
Jumlah	19.869.754.955,99	5.700.000,00	19,864,054,955.99

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 adalah sebesar Rp20.311.104.559,19 terjadi perbedaan bila dibandingkan dengan daftar Belanja Modal pada daftar kapitalisasi aset sebesar Rp441.349.603,20. Perbedaan ini diakibatkan adanya reklas aset tetap dari

Gedung Bangunan ke peralatan mesin, konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan Kajian dengan rincian sebagai berikut :

- Koreksi kurang dari belanja modal gedung dan bangunan ke peralatan mesin sebesar Rp219.153.960,00 pada Dinas Pendidikan. Hal ini adalah merupakan kegiatan pengadaan mebel pada sekolah SKB dan SDN 10 Padang Panjang Timur.
- Reklas aset dari gedung bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan (KDP) sebesar Rp150.000.000,00 pada Dinas PUPR.
- Reklas aset dari gedung bangunan ke kajian berupa dokumen perancanaan sebesar Rp71.134.483,20 dari Dinas Pendidikan.
- Reklas aset dari gedung bangunan ke kajian berupa dokumen perancanaan sebesar Rp1.061.160,00 dari Kecamatan Padan Panjang Timur.

Ada pun Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp19.864.054.955,99 dengan rincian:

Tabel 5.67 : Daftar Belanja Modal Bangunan Gedung

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
RSUD	8,059,883,754.72	0,00	8,059,883,754.72
Dinas PUPR	503,216,625.00	0.00	503,216,625.00
SEKRETARIAT DPRD	709,844,869.00	0,00	709,844,869.00
Pariwisata	285,219,600.00	0,00	285,219,600.00
Dinas Kesehatan	1,003,137,979.00	0,00	1,003,137,979.00
Kecamatan Padang Panjang Timur	119,361,645.00	0,00	119,361,645.00
Koperindag	422,665,212.39	0,00	422,665,212.39
Dinas Pendidikan	8,760,725,270.88	0,00	8,760,725,270.88
Jumlah	19,864,054,955.99	0,00	19,864,054,955.99

b. Penjelasan Mutasi Koreksi Tambah

Tabel 5.68 : Mutasi Koreksi Tambah

Jenis Aset	KOREKSI (+)			JUMLAH
	Mutasi OPD	Belanja Barang dan Jasa	Lain - Lain	
Gedung dan Bangunan				
Bangunan Gedung	1,500,161,750.00	45,828,570.00	6.356.521.604,99	7,902.511.924,99
Tugu Titik Kontrol	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1,500,161,750.00	45,828,570.00	6.356.521.604,99	7,902.511.924,99

- Penyesuaian koreksi penambahan yang berasal dari Mutasi antar OPD. Bangunan gedung senilai Rp1.500.161.750,00 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Penambahan nilai bangunan pada Dinas Koperindag sebesar Rp576.984.750,00 yang berasal dari Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/58/BA-BMD/PP/X-2025 tanggal 8 Oktober 2025.
  2. Penambahan nilai bangunan pada Dinas Sosial sebesar Rp923.177.000,00 yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Daerah. dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/67/BA-BMD/PP/V-2025 tanggal 20 Mei 2025.

- Penyesuaian koreksi penambahan yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp45.828.570,00. Penambahan ini berasal dari belanja pemeliharaan gedung kantor yang direklas ke aset tetap bangunan pada Dinas Koperindag.
- Penambahan dari lain-lain sebesar Rp6.356.521.604,99 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Penambahan reklas dari KPD ke aset gedung dan bangunan sebesar Rp5.997.597.500,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.
  2. Penambahan reklas dari utang belanja modal tahun 2025 aset gedung dan bangunan sebesar Rp32.044.146,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa konsultan perencanaan sebesar Rp29.097.096,00 dan konsultan pengawasan sebesar Rp2.947.050,00.
  3. Penambahan reklas dari asset tak berwujud berupa kajian dokumen perencanaan sebesar Rp40.630.800,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  4. Penambahan reklas dari utang belanja modal (sisa pekerjaan Pembangunan ICU 5%) tahun 2025 sebesar Rp196.677.158,99 pada Rumah Sakit Umum Daerah.
  5. Penambahan dari hasil penilaian bangunan depo kebersihan yang belum memiliki nilai sebesar Rp89.572.000,00 pada Dinas Perkim LH.

c. Penjelasan Mutasi Koreksi Kurang

Tabel 5.69 : Mutasi Koreksi Kurang

Jenis Aset	KOREKSI (-)			JUMLAH
	Mutasi OPD	Penghapusan	Lain-Lain	
Bangunan Gedung	1,500,161,750.00	107,100,000.00	1,041,940,874.00	2,649,202,624.00
Jumlah	1,500,161,750.00	107,100,000.00	1,041,940,874.00	2,649,202,624.00

- Penyesuaian koreksi pengurangan yang berasal dari Mutasi antar OPD Bangunan gedung sebesar Rp1.500.161.750,00 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pengurangan nilai bangunan pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp576.984.750,00 yang mutasi ke Dinas Koperindag dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/58/BA-BMD/PP/X-2025 tanggal 8 Oktober 2025.
  2. Pengurangan nilai bangunan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp923.177.000,00 yang mutasi ke Dinas Sosial dengan Berita Acara Nomor : 000.2.3.2/67/BA-BMD/PP/V-2025 tanggal 20 Mei 2025.
- Penyesuaian koreksi pengurangan yang berasal dari penghapusan sebesar Rp107.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pengurangan nilai bangunan yang berasal dari penghapusan pada Setdako sebesar Rp107.100.000,00 dengan SK penghapusan Nomor : 000.2.4/42/SETDAKO-PP/2025 tanggal 17 Juni 2025.
- Penyesuaian koreksi pengurangan yang berasal dari lain-lain sebesar Rp1.041.940.874,00 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pengurangan nilai bangunan yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp809.654.314,00 reklas ke asset lainnya akibat rusak berat terkena bencana,
  2. Pengurangan nilai bangunan yang berasal dari Dinas Kesehatan sebesar Rp232.286.460,00 reklas ke asset lainnya akibat rusak berat terkena bencana
  3. Pengurangan nilai bangunan yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akibat kesalahan pencatatan sebesar Rp100,00

Per tanggal 31 Desember 2024 ada beberapa aset Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Padang Panjang yang dipinjam pakaikan kepada pihak lain sebesar Rp607.446.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pinjam pakai bangunan sekolah nilai perolehan sebesar Rp565.727.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/09/DPPKAD-ASET/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015.
- Pinjam pakai bangunan rumah dinas penjaga sekolah dengan nilai perolehan sebesar Rp41.719.000,00 dengan surat perjanjian Nomor : 900/09/DPPKAD-ASET/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015.

Pada tahun anggaran 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang mendapatkan dana bantuan revitalisasi dari Pemerintah Pusat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp517.625.641,00 dengan Berita Acara Nomor : 421.2/030/SDN15PBB/I-2026. Dana ini digunakan untuk merehab dan memperbaiki bangunan sekolah yang terdampak karena bencana. Sekolah yang mendapatkan dana bantuan revitalisasi tersebut adalah SD Negeri 15 Padang Panjang Barat. Dana ini digunakan untuk rehab 3 ruang kelas, membangun toilet yang baru dan pengecatan rolling door. Realisasi dana revitalasi ini adalah 100%. Rehab bangunan sekolah ini belum dapat dicatat dalam daftar aset pengguna barang karena berita acaranya belum ditandatangani oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	**31 Desember 2025 (Rp)**	**31 Desember 2024 (Rp)**
	576.754.869.299,78	**555.752.670.791,41**

Saldo aset Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 adalah sebesar Rp576.754.869.299,78 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp555.752.670.791,49 maka saldo Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp21.002.198.508,37 atau sebesar 3,78%. Perubahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berasal dari :

✓ Belanja modal sebesar	Rp 21.002.198.508,37
✓ Koreksi tambah sebesar	Rp -
✓ Koreksi kurang sebesar	(Rp -)
	Rp 21.002.198.508,37

Adapun rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut :

Tabel 5.70 : Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jenis Aset	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Jalan dan Jembatan	8,226,025,566.00	0,00	8,226,025,566.00
Bangunan Air	9,378,824,186.37	33,762,000.00	9,345,062,186.37
Instalasi	3,315,030,501.00	25,358,000.00	3,289,672,501.00
Jaringan	141,438,255.00	0,00	141,438,255.00
Jumlah	21,061,318,508.37	59,120,000.00	21,002,198,508.37

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025 adalah sebesar Rp18.910.651.808,37 terjadi perbedaan bila dibandingkan dengan daftar Belanja Modal pada daftar kapitalisasi aset sebesar Rp2.150.666.700,00. Perbedaan ini diakibatkan adanya koreksi tambah dari belanja

modal peralatan mesin ke jaringan instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp2.150.666.700,00. Hal ini adalah merupakan kegiatan fisik pengadaan IPAL.
Penambahan Belanja Modal Jalan dan Jembatan tahun 2025 sebesar Rp8.226.025.566,00 dengan rincian :

Tabel 5.71 : Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
DINAS PUPR	6,154,649,728.00	0,00	6,154,649,728.00
DINAS PERKIM LH	2,071,375,838.00	0,00	2,071,375,838.00
Jumlah	8,226,025,566.00	0,00	8,226,025,566.00

Penambahan Belanja Modal Bangunan Air tahun 2025 sebesar Rp9.345.062.186,37 dengan rincian :

Tabel 5.72 : Belanja Modal Bangunan Air

Nama OPD	BM 2024	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Dinas Perkim LH	5,661,695,593.00	15,762,000.00	5,645,933,593.00
Dinas PUPR	3,717,128,593.37	18,000,000.00	3,699,128,593.37
Jumlah	9,378,824,186.37	33,762,000.00	9,345,062,186.37

Penambahan Belanja Modal Instalasi sebesar Rp3.289.672.501,00 dengan rincian:

Tabel 5.73 : Belanja Modal Instalasi

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
PUPR	233,420,000.00	25,358,000.00	208,062,000.00
PERKIM LH	205,943,800.00	0,00	205,943,800.00
RSUD	2,150,666,700.00	0,00	2,150,666,700.00
Kesehatan	725,000,001.00	0,00	725,000,001.00
Jumlah	3,315,030,501.00	25,358,000.00	3,289,672,501.00

Penambahan Belanja Modal Jaringan sebesar Rp141.438.255,00 dengan rincian :

Tabel 5.74 : Belanja Modal Jaringan

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Dinas Perhubungan	141,438,255.00	0,00	141,438,255.00
Jumlah	141,438,255.00	0,00	141,438,255.00

5) Aset Tetap Lainnya	**31 Desember 2025 (Rp)**	**31 Desember 2024 (Rp)**
	11.198.181.208,73	**10.400.762.083,73**

Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 adalah sebesar Rp11.198.181.208,73 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp10.400.762.083,73 maka saldo Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp797.419.125,00 atau 7,67%. Perubahan nilai aset tetap lainnya berasal dari :

- ✓ Realisasi belanja modal yang dikapitalisir Rp797.419.125,00
- ✓ Koreksi tambah sebesar Rp -
- ✓ Koreksi kurang sebesar (Rp -)

Rp797.419.125,00

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

a. Penambahan dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp797.419.125,00 terdiri dari :

Tabel 5.75 : Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Nama Aset	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Bahan Perpustakaan	911,322,756.00	113,903,631.00	797,419,125.00
Jumlah	911,322,756.00	113,903,631.00	797,419,125.00

Rincian belanja Modal Buku perpustakaan sebesar Rp797.419.125,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.76 : Modal Buku perpustakaan

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
DINAS PENDIDIKAN	911,322,756.00	113,903,631.00	797,419,125.00
Jumlah	911,322,756.00	113,903,631.00	797,419,125.00

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	10.050.094.318,20	**13.775.496.815,00**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp10.050.094.318,20 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp13.775.496.815,00 mengalami penurunsn sebesar Rp3.725.402.496,80 atau 27,04%. Penurunan ini diakibatkan adanya reklas asset KDP ke aset tetap jalan, bangunan dan kajian. Perubahan nilai konstruksi dalam pengerjaan berasal dari :

✓ Realisasi belanja modal yang dikapitalisir	Rp 150.000.000,00
✓ Koreksi tambah sebesar	Rp 2.122.195.003,20
✓ Koreksi kurang sebesar	(Rp 5.997.597.500,00)
	(Rp 3.725.402.496,80)

Adapun rincian dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut :

a. Penambahan dari belanja Modal Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp150.000.000,00 terdiri dari :
   1. Penambahan dari Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp150.000.000,00 merupakan belanja modal yang berasal dari konsultan pemeriksaan Convention Islamic Center pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

b. Penambahan dari hutang belanja modal dan reklas dari kajian sebesar Rp2.122.195.003,20 dengan rincian sebagai berikut :
   1. Penambahan yang berasal dari hutang belanja modal yang harus dibayar kembali sebesar Rp113.123.812,00 pada Dinas Perkim LH yang terdiri dari fisik Pembangunan/perbaikan DAM sebesar Rp83.068.064,00, biaya jasa konsultasi pengawasan sebesar Rp25.704.270,00 dan biaya jasa konsultasi perencanaan sebesar Rp4.351.478,00.
   2. Penambahan yang berasal dari reklas kajian ke KDP sebesar Rp2.009.071.191,20 yang terdiri dari :

- Penambahan yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp150.466.083,20.
- Penambahan yang berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp16.499.000,00.
- Penambahan yang berasal dari Dinas PUPR sebesar Rp1.632.083.708,00
- Penambahan yang berasal dari Dinas Perkim LH sebesar Rp210.022.400,00.

c. Pengurangan dari Mutasi Koreksi Kurang sebesar Rp5.997.597.500,00 adalah merupakan Reklas dari Konstuksi dalam Pengerjaan (KDP) ke asset bangunan Gedung pada Rumah Sakit Umum Daerah

Adapun rincian dari Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp9.559.983.023,00 terdiri dari :
   - Convention Islamic Center sebesar Rp6.089.174.000,00
   - Rusunawa sebesar Rp1.838.725.315,00
   - Dokumen perencanaan DED Area Silaing Bawah sebesar Rp290.877.000,00
   - Dokumen perencanaan DED Kantor Dinas Sosial sebesar Rp228.204.800,00
   - Dokumen perencanaan Biaya Studi Kelayakan Gedung Parkir sebesar Rp49.550.000,00
   - Dokumen perencanaan Penyusunan UKL dan UPL Rusunawa sebesar Rp46.124.000,00
   - Dokumen perencanaan Kajian Perencanaan Data Base Insfratuktur Kota sebesar Rp48.840.000,00
   - Dokumen perencanaan Kajian Peninjauan Kembali RT RW sebesar Rp48.395.000,00
   - Dokumen perencanaan Biaya Konsultan Perencanaan Lampu Jalan sebesar Rp166.510.868,00
   - Dokumen perencanaan DAK Jalan sebesar Rp51.045.840,00
   - Dokumen perencanaan Pemeliharaan Jalan sebesar Rp34.502.000,00
   - Dokumen perencanaan Sipil Listrik sebesar Rp42.410.400,00
   - Dokumen perencanaan Pembuatan Dokumen Izin Lingkungan Penataan Lanskap Kawasan Rest Area, Mifan dan PDIKM sebesar Rp52.130.000,00
   - Dokumen perencanaan Rehab Trotoar sebesar Rp26.801.200,00
   - Dokumen perencanaan Perencanaan Rehab/Pemeliharaan Jaringan sebesar Rp16.930.000,00
   - Dokumen perencanaan Rehab/Pemeliharaan Jaringan Rp16.833.200,00
   - Dokumen perencanaan Rehab/Pemeliharaan Irigasi sebesar Rp19.042.000,00
   - Dokumen perencanaan Konsultan Perencanaan Pembuatan dan Perbaikan Irigasi sebesar Rp18.130.320,00
   - Dokumen perencanaan Pekerjaan Pengaman Sungai sebesar Rp18.355.600,00
   - Dokumen perencanaan Lanjutan Pembangunan Riol sebesar Rp12.988.400,00

- Dokumen perencanaan Pembangunan Penutup Riol sebesar Rp10.624.400,00
- Dokumen perencanaan DED sebesar Rp67.677.280,00
- Dokumen perencanaan DED Rest Area sebesar Rp232.221.000,00
- Dokumen perencanaan Jalan dan Jembatan sebesar Rp79.200.000,00
- Dokumen perencanaan Drainase sebesar Rp54.690.400,00

2. Dinas Perkim LH sebesar Rp323.146.212,00 yang terdiri dari :
   - Dokumen perencanaan jalan sebesar Rp72.521.200,00
   - Dokumen perencanaan drainase sebesar Rp53.554.400,00
   - Dokumen perencanaan pendaman sebesar Rp78.222.800,00
   - Hutang belanja modal kegiatan pendaman sebesar Rp113.123.812,00.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp150.466.083,20 terdiri dari :
   - Dokumen perencanaan Lanjutan pembangunan Gedung Labor sebesar Rp35.868.400,00
   - Dokumen perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Asrama SMP 6 sebesar Rp40.613.200,00
   - Dokumen perencanaan Kajian Pembangunan asrama SMP N 6 PP sebesar Rp71.134.843,20
   - Dokumen perencanaan BM Rehab Sekolah sebesar Rp2.850.000,00
4. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp16.499.000,00 adalah merupakan Dokumen perencanaan pembangunan gedung IPSRS.

7) Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	(859.722.692.173,00)	(813.030.124.462,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 adalah sebesar Rp859.722.692.173,00 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 adalah sebesar Rp813.030.124.462,00 maka saldo tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp47.386.168.815,00 atau 5,83%. Berikut rincian akumulasi penyusutan aset per 31 Desember 2025 :

Tabel 5.77 : Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

NO	NAMA OPD	JUMLAH
1	Sekretariat DPRD	14,899,994,087.00
2	Sekretariat Daerah	31,343.099.696.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	364,800,750,809.00
4	Dinas Perhubungan	24,472,571,405.00
5	Dinas Kesehatan	168,934,022,900.00
7	Dinas Pendidikan	59,385,044,900.00
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4,990,025,515.00
9	Dinas Sosial	7,672,242,950.00
10	Dinas Kependudukan dan Capil	2,851,139,256.00
11	Dinas Pangan dan Pertanian	16,198,038,539.00
12	Dinas Koperindag	42,341,549,549.00
13	Badan Pengelola Keuangan Daerah	12,725,685,536.00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	2,414,533.976.00
15	Inspektorat Daerah	2,106,950,839.00
16	Bappeda	2,049,972,381.00
17	Dinas Perkim LH	44,993,032,099.00
18	Dinas Pariwisata	11,110,622,078.00

NO	NAMA OPD	JUMLAH
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,,622,006,304.00
20	Dinas Satpol.PP	7,288,897,261.00
21	Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia	5,535,459,830.00
22	Dinas Kominfo	12,482,637,890.00
23	Kecamatan Padang Panjang Timur	7,904,736,232.00
24	Kecamatan Padang Panjang Barat	7,599,617,445.00
	Jumlah	859,722,692,173.00

d. Aset Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	44.120.506.451,50	**40.735.322.541,50**

Saldo Aset Lainnya Tahun 2025 adalah sebesar Rp44.120.506.451,50 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp40.735.322.541,50 maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.385.183.910,00 atau 8,31%. Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut :

1) Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	23.349.000,00	**23.349.000,00**

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) tahun 2025 sebesar 23.349.000,00 berasal dari koreksi TP TGR yang sudah diterbitkan SKTJM/SK Pembebanan sementaranya**.** Jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp23.349.000,00 maka tagihan tuntutan ganti rugi tidak ada mengalami peningkatan atau penurunan. Adapun rincian TP/TGR ini berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 024/207/WAKO-PP/2016 tentang Pembebanan Ganti Rugi Kehilangan Barang Milik Daerah Kota Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut :

1. Kehilangan sepeda motor Honda Vario Techno CBS 125 pada tahun 2015 a.n Medi Rosdian dengan pembebanan TGR awal tahun 2016 sebesar Rp.12.600.000,00 sampai dengan tahun 2020 yang lalu telah dilakukan pembayaran TGR sebesar Rp2.000.000,00. Pada tahun 2021 disetor Kembali TGR sebesar Rp1.500.000,00 ke Kas Daerah. Pada tahun 2022 disetor Kembali TGR sebesar Rp1.000.000,00. Pada tahun 2023 disetor Kembali TGR sebesar Rp500.000,00. Pada tahun 2024 disetor Kembali TGR sebesar Rp500.000,00. Sehingga per 31 Desember 2024 Sisa TGR atas nama MR adalah sebesar Rp7.100.000,00.
2. Kehilangan sepeda motor satu unit pada tahun 2015 a.n RH dengan pembebanan TGR awal tahun 2016 sebesar Rp11.849.000,00 sampai dengan tahun 2024 belum ada pembayaran terhadap pembebanan TGR tersebut.
3. Kehilangan sepeda motor satu unit pada tahun 2023 a.n ZH. Akan tetapi yang menghilangkan sepeda motor tersebut adalah HT. Sehingga berdasarkan surat keterangan tangung jawab mutlak (SKTJM) Nomor 212 Tahun 2024 Tuntutan Ganti Rugi dibebankan kepada keduanya sebesar Rp12.400.000,00. Pada tahun 2024 telah disetor TGR sebesar Rp1.500.000 atas nama ZH dan Rp6.500.000,00 atas nama HT.

Tabel 5. 78 : Tuntutan Ganti Rugi

No	Tahun Kejadian	Uraian Kasus	Total Kerugian Per 31 Des 2023	Telah Ditindaklanjuti sebesar	Sisa Kerugian Per 31 Des 2024	OPD
1	2015	Kehilangan sepeda motor honda vario techno CBS 125	9.100.000,00	2.000.000,00	7.100.000,00	Disporbudpar a.n MR
2	2015	Kehilangan satu unit sepeda motor vario pada Dinas PU	11.849.000,00	-	11.849.000,00	Dinas PUPR a.n RH
3	2023	Kehilangan sepeda motor honda vario pada Dinas Kominfo	12.400.000,00	8.000.000,00	4.400.000,00	Dinas Kominfo a.n ZH dan HT
Jumlah			33.349.000,00	-	23.349.000,00	

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
2)	**Kemitraan dengan Pihak Ketiga**	**21.995.412.000,00**	**21.995.412.000,00**

Saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebesar Rp21.995.412.000,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.356.372.000,00 Sehingga nilai bersih dari aset kemitraan dengan pihak ketiga adalah sebesar Rp20.639.040.000,00 Aset kemitraan pihak ketiga terdiri dari nilai aset milik Pemerintah Kota Padang Panjang yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2024 adalah Mifan dengan nilai sebesar Rp21.995.412.000,00.

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tentang Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Perkampungan Minang Kabau Kota Padang Panjang (MIFAN). Kemitraan dengan pihak ketiga ini didasarkan atas perjanjian kerjasama Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT. Niagara Fantasy Island Nomor 44/PMD-MKV/X-2007 dan Nomor 07/NFI/PP/X/07.

   Pada dokumen perjanjian kerjasama tersebut terdapat lampiran yang merinci jenis aset Pemda yang masuk dalam objek perjanjian, yaitu meliputi tanah, bangunan dan peralatan mesin sebagaimana yang tercantum dalam berita acara nomor: 556/711/Persenibud-PP/X/2007 sebesar Rp.22.997.057.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tanah	Rp.	19,678,625,000.00
Peralatan dan Mesin	Rp.	396,932,000.00
Gedung dan Bangunan	Rp.	2,921,500,000.00
Jumlah	Rp.	22,997,057,000.00

   Pada tahun 2008 terjadi penghapusan sebesar Rp363.020.000,00 dengan BAST No.024/45/Wako-PP/2011 dengan rincian peralatan mesin sebesar Rp34.520.000,00 serta gedung dan bangunan sebesar Rp328.500.000,00.

   Pada tahun 2020 sebagian aset Kemitraan pihak ketiga mutasi aset ke Dinas Pariwisata sebesar Rp638.625.000 berdasarkan BA 900/20/BA-ASET/PP/IX-2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah sebesar Rp. 278.625.000,00
- Bangunan sebesar Rp. 360.000.000,00

Jumlah Rp. 638.625.000,00

Sehingga nilai kemitraan pihak ketiga Mifan 2021 adalah sebesar Rp21.995.412.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah sebesar Rp. 19.400.000.000,00
- Peralatan mesin sebesar Rp. 362.412.000,00
- Gedung bangunan sebesar Rp. 2.233.000.000,00

Jumlah Rp. 21.995.412.000,00

3) Aset Tak Berwujud	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	2.347.478.363,00	**5.364.309.956,00**

Saldo Aset Tak Berwujud Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.347.478.363,00 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.364.309.956,00. maka Aset Tak Berwujud Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.016.831.593,00 atau 56,24%.

- ✓ Realisasi belanja modal yang dikapitalisir Rp. 237.303.643,20
- ✓ Koreksi tambah sebesar Rp. -
- ✓ Koreksi kurang sebesar (Rp3.253.862.236,20)

(Rp3.016.831.593,00)

Tabel 5. 79 : Belanja Modal Aset Tak Berwujud

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	237.030.643,20		236.811.800,00
Jumlah	237.030.643,20	-	236.811.800,00

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2025 adalah sebesar Rp164.835.000,00 terjadi perbedaan bila dibandingkan dengan daftar Belanja Modal pada daftar kapitalisasi aset sebesar Rp72.195.643,20. Perbedaan ini diakibatkan adanya koreksi tambah dari belanja modal gedung dan bangunan ke aset lainnya pada aset tak berwujud dengan rincian sebagai berikut :

- Reklas dari gedung dan bangunan berupa kajian dokumen perencanaan sebesar Rp71.134.483,20 pada Dinas Pendidikan.
- Reklas dari gedung dan bangunan berupa kajian dokumen perencanaan sebesar Rp1.061.160,00 pada Kecamatan Padang Panjang Timur.

Ada pun rincian Belanja Modal Aset Tak Berwujud sebesar Rp236.811.800,00 sebagai berikut :

Tabel 5. 80 : Daftar Modal Aset Tak Berwujud

Nama OPD	BM 2025	Tidak Dikapitalisir	Dikapitalisir
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	235.969.483,20		235.969.483,20
Kecamatan Padang Panjang Timur	1.061.160,00		1.061.160,00
Jumlah	237.030.643,20	-	237.030.643,20

[

Pada tahun 2025 terjadi pengurangan aset tak berwujud sebesar Rp3.253.862.236,20 pengurangan ini disebabkan oleh :

1. Pengurangan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp240.295.523,20 terdiri dari :
   - Reklas kajian berupa dokumen perencanaan ke aset induk bangunan Gedung Pendidikan permanen sebesar Rp40.630.800,00
   - Reklas kajian berupa dokumen perencanaan ke aset konstruksi dalam pengerjaan (KDP) sebesar Rp150.466.083,20
   - Penghapusan kajian dokumen perencanaan sebesar Rp49.198.640,00
2. Pengurangan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp907.545.020,00 terdiri dari :
   - Reklas kajian berupa dokumen perencanaan pembangunan gedung IPSRS ke KDP sebesar Rp16.499.000,00
   - Penghapusan kajian berupa dokumen perencanaan apraisal pengadaan tanah pustu guguk malintang sebesar Rp9.421.000,00
   - Penghapusan kajian berupa konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan teknis/manajemen pembangunan sarana air bersih sebesar Rp813.904.120,00
   - Penghapusan kajian berupa konsultan perencanaan teknis pembangunan sarana air bersih/konsultan pengawasan teknis/manajemen kontruksi pembangunan sarana air bersih sebesar Rp67.720.500,00.
3. Pengurangan pada Dinas Pariwisata sebesar Rp174.613.325,00 terdiri dari :
   - Penghapusan kajian berupa dokumen Konsultan Perencanaan Menara Pembelian Steward sebesar Rp12.711.325,00
   - Penghapusan kajian berupa dokumen perencanaan konstruksi DED sarana olahraga sebesar Rp78.848.000,00
   - Penghapusan kajian berupa dokumen Kajian Wisata Stasiun Kereta Api sebesar Rp49.874.000,00
   - Penghapusan kajian berupa dokumen perencanaan kontraktual pengelolaan destinasi wisata sebesar Rp33.180.000,00
4. Pengurangan pada Setdako sebesar Rp66.126.400,00 terdiri dari :
   - Penghapusan kajian berupa dokumen Konsultan perencanaan rehab halaman, kolam dan taman rumah wako sebesar Rp49.138.000,00
   - Penghapusan kajian berupa Konsultan perencanaan rehab halaman, kolam dan taman rumah wawako sebesar Rp16.988.400,00
5. Pengurangan pada Kecamatan Padang Panjang Timur sebesar Rp1.061.160,00 berupa penghapusan kajian berupa Dokumen Perencanaan vertical garden.
6. Pengurangan pada Dinas PUPR sebesar Rp1.654.198.408,00 terdiri dari :
   - Reklas kajian berupa dokumen perencanaan DED Area Silaing Bawah ke KDP sebesar Rp290.877.000,00
   - Reklas kajian berupa dokumen perencanaan DED Kantor Dinas Sosial ke KDP sebesar Rp228.204.800,00.

- Reklas kajian berupa dokumen perencanaan Biaya Studi Kelayakan Gedung Parkir ke KDP sebesar Rp49.550.000,00
- Reklas kajian berupa dokumen perencanaan Penyusunan UKL dan UPL Rusunawa ke KDP sebesar Rp46.124.000,00
- Reklas kajian berupa dokumen perencanaan Data Base Insfratuktur Kota ke KDP sebesar Rp48.840.000,00.
- Reklas kajian berupa dokumen perencanaan Kajian Peninjauan Kembali RT RW ke KDP sebesar Rp48.395.000,00
- Reklas kajian berupa dokumen perencanaan Konsultan Perencanaan Lampu Jalan ke KDP sebesar Rp166.510.868,00
- Reklas kajian berupa dokumen Perencanaan DAK Jalan ke KDP sebesar Rp51.045.840,00
- Reklas kajian berupa dokumen Perencanaan Pemeliharaan Jalan ke KDP sebesar Rp34.502.000,00
- Reklas kajian berupa dokumen Perencanaan Sipil Listrik ke KDP sebesar Rp42.410.400,00
- Reklas kajian berupa dokumen Pembuatan Dokumen Izin Lingkungan Penataan Lanskap Kawasan Rest Area, Mifan dan PDIKM ke KDP sebesar Rp52.130.000,00
- Reklas kajian berupa dokumen Perencanaan Rehab Trotoar ke KDP sebesar Rp26.801.200,00
- Reklas kajian berupa dokumen Perencanaan Rehab/Pemeliharaan Jaringan ke KDP sebesar Rp16.930.000,00
- Reklas kajian berupa dokumen Perencanaan Rehab/Pemeliharaan Jaringan ke KDP sebesar Rp16.833.200,00
- Reklas kajian berupa dokumen Perencanaan Rehab/Pemeliharaan Irigasi ke KDP sebesar Rp19.042.000,00
- Reklas kajian berupa dokumen Konsultan Perencanaan Pembuatan dan Perbaikan Irigasi ke KDP sebesar Rp18.130.320,00
- Reklas kajian berupa dokumen Perencanaan Pekerjaan Pengaman Sungai ke KDP sebesar Rp18.355.600,00
- Reklas kajian berupa dokumen Perencanaan Lanjutan Pembangunan Riol ke KDP sebesar Rp12.988.400,00
- Reklas kajian berupa dokumen Perencanaan Pembangunan Penutup Riol ke KDP sebesar Rp10.624.400,00
- Reklas kajian berupa dokumen DED Perencanaan ke KDP sebesar Rp67.677.280,00
- Reklas kajian berupa dokumen Konsultan Perencanaan DED Rest Area ke KDP sebesar Rp232.221.000,00.
- Reklas kajian berupa dokumen konsultansi Perencanaan Jalan dan Jembatan ke KDP sebesar Rp79.200.000,00.
- Reklas kajian berupa dokumen konsultansi Perencanaan Drainase ke KDP sebesar Rp54.690.400,00.

7. Pengurangan pada Dinas Perkim LH sebesar Rp210.022.400,00 terdiri dari :
   - Reklas kajian berupa dokumen Konsultansi Perencanaan Pengembangan Bank Sampah Kurabu ke KDP sebesar Rp5.704.000,00

- Reklas kajian berupa dokumen Konsultansi Perencanaan Jalan dan Jembatan ke KDP sebesar Rp29.461.200,00.
- Reklas kajian berupa dokumen Konsultansi Perencanaan Jalan dan Jembatan ke KDP sebesar Rp19.050.000,00.
- Reklas kajian berupa dokumen Konsultansi Perencanaan Jalan dan Jembatan ke KDP sebesar Rp24.010.000,00.
- Reklas kajian berupa dokumen Konsultansi Perencanaan Drainase ke KDP sebesar Rp24.188.400,00
- Reklas kajian berupa dokumen Konsultansi Perencanaan Drainase ke KDP sebesar Rp29.366.000,00
- Reklas kajian berupa dokumen Konsultansi Perencanaan Pendaman ke KDP sebesar Rp28.387.600,00
- Reklas kajian berupa dokumen Konsultansi Perencanaan Pendaman ke KDP sebesar Rp25.415.600,00
- Reklas kajian berupa dokumen Konsultansi Perencanaan Pendaman ke KDP sebesar Rp24.439.000,00.

Berikut rincian dari aset tak berwujud adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 81 : Aset Tak Berwujud

OPD	Aset Tak Berwujud
	Sofware
Dinas Pendidikan	227.505.100,00
Dinas Kesehatan	72.540.000,00
Dinas Perhubungan	396.530.000,00
DPMPST	43.345.500,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	132.000.000,00
Dinas Pariwisata	561.007.763,00
BPKD	423.230.000,00
Dinas Koperindag	171.250.000,00
Bappeda	141.470.000,00
BKPSDM	114.850.000,00
Satdako	63.750.000,00
Jumlah	2.347.478.363,00

Amortisasi Tak Berwujud

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi nomor 78 tahun 2020 Aset Tetap Tidak Berwujud nilai penyusutannya harus dihitung. Akumulasi Amortisasi tahun 2025 sebesar Rp2.078.990.197,00 Bila dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4.600.404.117,00 maka amortisasi mengalami penurunan sebesar Rp2.521.413.920,00 atau sebesar 54,81%. Adapun rincian dari Akumulasi Amortisasi Tak Berwujud adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 82 : Tabel : Rincian Akumulasi Amortisasi Tak Berwujud

Nama OPD	Jumlah
Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga	62.670.100,00
Dinas Kesehatan	59.241.000,00
Dinas Perhubungan	396.530.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	43.345.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	132.000.000,00

Nama OPD	Jumlah
Dinas pariwisata	561.007.763,00
Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	97.029.167,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	141.470.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	407.096.667,00
BKPSDM	114.850.000,00
Sekretariat Daerah	63.750.000,00
Jumlah	**2.078.990.197,00**

4) Aset Lain-Lain	**31 Desember 2025 (Rp)**	**31 Desember 2024 (Rp)**
	67.967.532.685,31	**66.514.271.911,31**

Aset lain-lain merupakan aset yang sudah tidak digunakan dan dimanfaatkan lagi dalam kegiatan operasional sehari – hari dikarenakan rusak atau diserahkan kepada pihak lain dan dalam proses penghapusan. Nilai aset tetap lain-lain tahun 2025 sebesar Rp67.967.532.685,31 Jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp66.514.271.911,31 mengalami peningkatan sebesar Rp1.453.260.774,00 atau sebesar 2,18% yang berasal dari mutasi tambah dan mutasi kurang. Perubahan nilai aset lain-lain berasal dari :

✓	Koreksi tambah sebesar	Rp. 1.545.060.774,00
✓	Koreksi kurang sebesar	(Rp. 91.800.000,00)
	Jumlah	Rp 1.453.260.774,00

Adapun rincian penjelasannya sebagai berikut :

Koreksi tambah

Penjelasan Koreksi tambah :

1. Penambahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp162.700.000,00 berupa panjat tebing.
2. Penambahan akibat reklas dari alat angkutan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp340.420.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat.
3. Penambahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp809.654.314,00 yang merupakan reklas dari asset tetap gedung dan bangunan berupa tugu akibat bencana alam.
4. Penambahan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp232.286.460,00 yang merupakan reklas dari asset tetap gedung dan bangunan berupa gedung kesehatan kelurahan (puskel ganting) akibat bencana alam

Penjelasan Koreksi kurang :

1. Pengurangan pada Setdako sebesar Rp91.800.000,00 akibat dari penghapusan rumah dinas yang mengalami kebakaran dengan SK penghapusan Nomor : 000.2.4/42/SETDAKO-PP/2025 tanggal 17 Juni 2025.

Adapun rincian dari aset lain-lain adalah sebagai berikut :

Tabel 5.83 : Rincian Aset – Aset Lain

OPD	Jumlah
Dinas Pangan dan Pertanian	677,353,400.00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	114,503,100.00
Bappeda	355,374,743.00
Rumah Sakit Umum Daerah	7.226.253.037,00
BKPSDM	285,384,700.00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	481,406,420.00
Dinas Kesehatan	11,309,970,598.91
Dinas Perkim LH	3,570,567,273.00
Dinas Sosial	1,150,768,545.00
Kec Padang Panjang Barat	607,878,762.00
Kec Padang Panjang Timur	887,472,361.00
Dinas PUPR	13,112,960,793.07
Sekretariat DPRD	203,064,068.00
Sekretariat Daerah	1,295,106,245.00
Dinas Pariwisata	297,747,796.00
BPBD Kesbangpol	1,494,552,135.00
Dinas Perhubungan	218,667,858.00
Dinas Pendidikan	23,224,502,569.00
Dinas Perdangan, Koperasi dan UMKM	865,275,102.33
BPKD	209,129,443.00
Kominfo	6,121,100.00
Inspektorat	30,240,000.00
DPMPTSP	87,936,886.00
Arsip	255,295,750.00
Jumlah	67,967.532.685.31

5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	31 Desember 2025 (Rp) (49.762.123.399,81)	31 Desember 2024 (Rp) (49.241.141.208,81)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya untuk Tahun 2025 adalah sebesar Rp49.762.123.399,81 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp49.241.141.208,81 maka saldo Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp520.982.191,00 atau 1,06%. Adapun rincian dari penyusutan asset lainnya adalah sebagai berikut

Tabel 5.84 : Rincian Penyusutan Aset Lainnya

Nama OPD	Jumlah
Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga	16,176,933,892.91
Dinas Kesehatan	11,144,787,469.91
Rumah Sakit Umum Daerah	7.220.676.825,00
Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang	2,774,316,957.26
Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman dan LH	2,832,227,219.40
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebajaran	110,052,900.00
Dinas Sosial, Pengendalian Pendukung dan KB pemn. Pr. Dan PA	1,106,754,295.00
Dinas Pangan dan Pertanian	414,652,400.00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	282,273,845.00
Dinas Perhubungan	201,309,564.00
Dinas Komunikasi dan Informasi	5,128,528.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	83,983,486.00

Nama OPD	Jumlah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	255,295,750.00
Dinas pariwisata	241,914,038.00
Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	752,076,673.33
Inspektorat Daerah	30,240,000.00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	343,559,343.00
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1,565,501,443.00
BKPSDM	285,384,700.00
Sekretariat Daerah	1,119,246,963.00
Sekretariat DPRD	129,484,000.00
Kec. Padang Panjang Timur	780,609,023.00
Kec. Padang Panjang Barat	596,812,765.00
BPBD	1,308,901,319.00
Jumlah	49.762.123.399,81

t. *Treasuty Deposit Fasility* (TDF)

Treasuty Deposit Fasility (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran Transfer ke Daerah non tunai berupa fasilitas penyimpanan di Bank Indonesia. Saldo rekening TDF merupakan alokasi Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang belum disalurkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Saldo TDF per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.627.848.000,00. Nilai tersebut merupakan perhitungan kurang salur Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat. berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dan pencairan dana pada rekening TDF, terdapat kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kota Padang Panjang sebesar Rp3.627.848,000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	DBH PPh	Rp.	2.762.797.000,00
2.	DBH PBB	Rp.	410.811.000,00
3.	DBH SDA Minerba *Royalty*	Rp.	258.129.000,00
4.	DBH SDA Kehutanan-PSDH	Rp.	33.196.000,00
5.	DBH SDA Panas Bumi	Rp.	151.410.000,00
6.	DBH CHT	Rp.	11.505.000,00
	Jumlah	**Rp.**	**3.627.848.000,00**

e. Properti Investasi	**31 Desember 2025 (Rp)**	**31 Desember 2024 (Rp)**
	1.522.428.514,00	**1.566.344.276,00**

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset. Nilai properti investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah

Kota Padang Panjang per 31 Desember 2025 adalah 2.547.218.745, dikurangi penyusutan adalah sebesar Rp1.024.790.231,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Properti investasi berupa Gedung bangunan sebesar Rp975.780.500,00 pada Dinas Pangan dan Pertanian yang disewakan oleh pihak ketiga atas nama Erniwati, S.Pt. (ketua kelompok). Berdasarkan perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Kelompok Pengelolahan Hasil Peternakan Bukit Surungan Nomor : 524.4/19/Dispangtan-PP/III/2024 besaran sewa adalah sebesar Rp18.676.000,00 pertahun. Perjanjian sewa selama 4 tahun (2022 s/d 2025). Gedung dan bangunan yang disewakan dijadikan tempat penjualan hasil pengolahan peternakan bukit surungan (rumah susu)
2. Properti investasi berupa Gedung bangunan sebesar Rp1.571.438.245,00 pada Dinas Koperindag yang disewakan oleh pihak ketiga atas nama Yan Paunas. Berdasarkan perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Yan Paunas Nomor : 530485/Perdagkop,PP/VII/2022 besaran sewa adalah sebesar Rp203.603.750,00 selama 5 tahun. Perjanjian sewa selama 5 tahun (2022 s/d 2027). Gedung dan bangunan yang disewakan dijadikan café dengan nama café manyala.

   Akumulasi Penyusutan

   Akumulasi penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.024.790.231,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 85 : Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nama OPD	Jumlah
Dinas Pangan dan Pertanian	234.187.320,00
Dinas Koperindag	790.602.911,00
Jumlah	**1.024.790.231,00**

F. Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	21.236.412.579,09	**14.548.634.631,66**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo kewajiban jangka pendek untuk Tahun 2025 adalah sebesar Rp21.236.412.579,09. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp14.548.634.631,66, maka saldo Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.687.777.947,34 atau 45,97%. Kewajiban jangka pendek Tahun 2025 dan 2024 terdiri atas:

Tabel 5.86 : Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
1.	Utang PFK	0,00	0,00
2.	Pendapatan Diterima di Muka	423.118.792,08	489.447.350,00
3.	Utang Belanja	18.504.832.787,01	12.595.599.281,66
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.308.461.000,00	1.463.588.000,00
	JUMLAH	**21.236.412.579,09**	**14.548.634.631,66**

Berikut rincian kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025:

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Utang Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00 dan saldo Tahun 2024 adalah Rp0,00.

2) Pendapatan Diterima di Muka	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	423.118.792,08	489.447.350,00

Pendapatan diterima di muka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

Pendapatan diterima di muka Tahun 2025 adalah sebesar Rp423.118.792,08. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp489.447.350,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp66.328.557,92 atau 13,55%.

Pendapatan diterima di muka pada Tahun 2025 terdapat pada SKPD berikut :

1.	Dinas kesehatan (RSUD)	Rp	148.064.666,66
2.	BPKD	Rp	209.346.500,42
3.	Dinas Pangan dan Pertanian	Rp.	4.626.500,00
4.	Dinas Perdagkop UKM	Rp.	61.081.125,00
	Jumlah	**Rp**	**423.118.792,08**

Adapun penjelasan dari pendapatan diterima dimuka Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan

- Pendapatan atas sewa BMD oleh PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang di lokasi RSUD Kota Padang Panjang yang digunakan untuk penempatan ATM Bank Nagari dengan nilai kontrak sebesar Rp69.940.000,00 selama 5 tahun dari tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan 7 Agustus 2028. Sehingga per 31 Desember 2024 terdapat saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp37.301.333,33(32 bulan @Rp1.165.666,67);
- Pendapatan atas sewa BMD oleh PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang di lokasi RSUD Kota Padang Panjang yang digunakan untuk pemakaian gedung kantor kas Bank Nagari sebesar nilai kontrak sebesar Rp141.400.000,00 selama 5 tahun dari tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan 8 Desember 2029. Sehingga per 31 Desember 2024 terdapat saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp110.763.333,33 (47 bulan @Rp2.356.666,67);

b. Dinas Pertanian

Pendapatan diterima dimuka atas sewa BMD Gedung Rumah Susu Bukit Surungan dengan nilai kontrak sewa sebesar Rp27.759.000,00 dan jangka waktu selama 1 tahun dari tanggal 1 Maret 2024 s/d 28 Februari 2026.

Sehingga per 31 Desember 2025 terdapat saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp4.626.500,-(2 bulan @ Rp2.313.250,00)

c. BPKD

- Pendapatan atas sewa BMD oleh PT. Bank Nagari Cabang Padang Panjang di lokasi BPKD Kota Padang Panjang yang digunakan untuk Kantor Kas dengan nilai kontrak Rp107.500.000,00 selama 5 tahun dari tanggal 1 November 2024 s/d 31 Oktober 2029. Sehingga per 31 Desember 2025 terdapat saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp82.416.666,67(46 bulan @Rp1.791.666,67).
- Pendapatan diterima dimuka atas pendapatan pajak reklame sebesar Rp126.929.833,75,00 berdasarkan SKP sebanyak 350 reklame. Rincian atas pendapatan diterima di muka sebanyak 350 reklame tersebut dapat dilihat pada ***Lampiran 15.***

d. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

- Pendapatan atas sewa gedung dan bangunan yang digunakan untuk Café Menyala dengan nilai kontrak sebesar Rp203.603.750,00 selama 5 (lima) tahun dari tanggal 4 Juli 2022 s/d 4 Juli 2027. Sehingga per 31 Desember 2025 terdapat saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp61.081.125,00 (18 bulan @Rp3.393.395,83).

3) Utang Belanja	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	18.504.832.787,01	**12.595.599.281,66**

Saldo Utang belanja Tahun 2025 adalah sebesar Rp18.504.832.787,01. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp12.595.599.281,66, maka saldo Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.909.233.505,35 atau 46,92%.

Saldo utang belanja Tahun 2025 terdiri dari:

1.	Utang Belanja Pegawai	Rp	8.676.481.728,00
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	Rp	8.195.212.177,00
3.	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	1.511.551.827,01
4.	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	121.587.055,00
		Rp	**18.504.832.787,01**

Adapun rincian utang belanja Tahun 2025 sebesar Rp18.504.832.787,01 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a) Utang Belanja Pegawai

Utang belanja pegawai Tahun 2025 sebesar Rp8.676.481.728,00 terdiri dari:

1.	Gaji Pokok	Rp	9.240.880,00
2.	Tunjangan Keluarga PNS	Rp	449.652,00
3.	Tunjangan Keluarga PPPK	Rp	320.360,00
4.	Tunjangan Fungsional PNS	Rp	5.263.960,00
5.	Tunjangan Fungsional Umum	Rp	10.000,00
6.	Tunjangan Beras PNS	Rp	72.420,00

7.	Tunjangan PPh	Rp	206.563,00
8.	Pembulatan gaji	Rp	523,00
9.	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp	492.077,00
10..	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp	12.814,00
11.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp.	20.763,00
12.	Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp	62.304,00
13.	Utang Belanja Pegawai BLUD	Rp	8.660.329.412,00
	Jumlah	**Rp**	**8.676.481.728,00**

Adapun rincian utang belanja pegawai per SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 16.***

b) Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp8.195.212.177,00 terdiri dari :

1.	Utang Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp.	75.039.717,00
2.	Utang Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	Rp.	1.367.520,00
3.	Utang Jasa Pembersihan	Rp.	457.500,00
4.	Utang Tagihan Telepon	Rp.	4.296.931,00
5.	Utang Tagihan Air	Rp.	45.216.100,00
5.	Utang Tagihan Listrik	Rp.	298.833.957,00
6.	Utang Tagihan Internet	Rp.	26.508.026,00
7.	Utang Jasa konsultan Perencanaan	Rp.	29.097.096,00
8.	Utang Jasa Konsultan Pengawas	Rp.	2.947.050,00
9..	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	Rp	7.711.448.280,00
	Jumlah	**Rp.**	**8.195.212.177,00**

Utang belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat adalah sisa pembayaran atas perhitungan bobot pekerjaan Pembangunan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan pada Dinas PUPR (penambahan jaringan dan SR) di Padang Panjang Timur Tahun 2021 sebesar Rp75.039.717,00.

Utang belanja barang dan Jasa BLUD sebesar Rp7.711.448.280,00 terdiri atas :

- **BLUD RSUD**

1.	Utang Tagihan Telepon	Rp	641.672,00
2.	Utang Tagihan Air	Rp	31.179.000,00
3.	Utang Tagihan Listrik	Rp	46.356.279,00
4.	Utang Tagihan Internet	Rp	2.799.150,00
5.	Utang Belanja Cetak	Rp	113.625.650,00
6.	Utang Alat Listrik Elektronik	Rp.	20.645.275,00
7.	Utang Kerjasama Penyusunan dan Pelayanan	Rp.	128.205.000,00
8.	Retensi Pembangunan ICU dan HCU	Rp.	196.677.159,00
9.	Hutang CI	Rp.	11.685.000,00
10.	**Utang Usaha**	**Rp**	**6.927.410.572,00**

-	Belanja Bahan Kimia	Rp	885.281.147,00		
-	Bahan Habis Pakai	Rp.	2.491.859.100,00		
-	Obat-obatan	Rp.	3.531.482.465,00		
-	Suku Cadang	Rp.	18.787.860,00		
11.	**Utang Kepada Rumah Sakit Lainnya**			**Rp**	**174.473..000,00**
-	RSAM Bukittinggi	Rp.	53.292.000,00		
-	UDD Syahrial Leman	Rp.	53.900.000,00		
-	RS. Otak Dr.Drs. M Hatta	Rp.	67.081.000,00		
-	RS Yarsi Padang Panjang	Rp.	200.000,00		
12.	**Utang kepada pasien**			**Rp.**	**10.785.000,00**
	JUMLAH			**Rp**	**7.664.482.757,00**

- **BLUD Puskesmas**

  Utang belanja barang dan jasa pada BLUD Puskesmas berupa utang belanja jasa pelayanan kesehatan non ASN pada BLUD Puskesmas Bukit Surungan sebesar Rp5.029.586,00 dan Puskesmas Kebun Sikolos berupa belanaja obat PMT balita dan ibu hamil sebesar Rp41.935.937,00

Adapun rincian utang belanja barang dan jasa per SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 17.***

c) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp1.511,551.827,01 terdiri dari:

1. Utang belanja modal bangunan gedung kantor pada RSUD Padang Panjang senilai Rp120.400.000,00. Utang belanja modal gedung kantor tersebut merupakan utang belanja modal tahun 2023 berupa sisa pembayaran hasil penghitungan bobot pekerjaan pembangunan gedung NICU pada RSUD Padang Panjang sebesar 3,01% dari nilai kontrak sebesar Rp4.000.000.000,00 yang belum dibayarkan kepada penyedia.
2. Utang belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan pada Dinas Pendidikan senilai Rp218.332.941,70. Utang belanja modal gedung tempat pendidikan tersebut berupa sisa pembayaran atas pekerjaan pembangunan gedung SD 06 Kecamatan Padang Panjang Barat sebesar Rp212.394.481,70 dan sisa pembayaran belanja jasa konsultan perencanaan rehab ruang penunjang SMPN 6 Padang Panjang sebesar Rp5.938.460,00.
3. Utang belanja modal bangunan gedung tempat olahraga pada Dinas Porapar senilai Rp976.141.726,32. Utang belanja modal bangunan gedung tempat olahraga tersebut merupakan utang pembayaran retensi pemeliharaan pembangunan *Sport Center* pada Dinas Porapar Tahun 2024.
4. Utang Belanja Modal Pembangunan ICU dan HCU sebesar Rp196.677.158,99 pada RSUD Padang Panjang. Utang Belanja Modal

Pembangunan ICU dan HCU tersebut merupakan utang pembayaran retensi 5% dari nilai kontrak Rp3.933.543.179,71 tahun 2025.

d) Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp121.587.055,00. Saldo tersebut terdiri dari:

1. Utang Belanja Modal Jalan-jalan Kota pada Dinas PUPR sebesar Rp8.463.243,00
2. Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp113.123.812,00 pada dinas Perkim LH

4) Utang Jangka Pendek Lainnya	**31 Desember 2025 (Rp)**	**31 Desember 2024 (Rp)**
	2.308.461.000,00	**1.463.588.000,00**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2025 adalah Rp2.308.461.000,00. Saldo utang jangka pendek lainnya pada Tahun 2025 merupakan perhitungan kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 serta penyaluran ke Kas Daerah di Tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp1.463.588.000,00 maka saldo utang jangka pendek lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp844.873.000,00 atau 57,73%.

Adapun perhitungan saldo utang jangka pendek lainnya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a.	DBH SDA Perikanan (PMK No.120 Tahun 2025)	Rp.	1.197.668.000,00
b.	DBH SDA Perkebunan Sawit (PMK No. 120 Tahun 2025)	Rp.	1.110.793.000,00
	Jumlah	**Rp.**	**2.308.461.000,00**

G. Ekuitas

31 Desember 2025 (Rp)	**31 Desember 2024 (Rp)**
1.396.009.778.701,97	**1.366.938.989.052,48**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan keuangan. Saldo ekuitas diperoleh dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) surplus/defisit LO dan perubahan lainnya.

Berikut rincian ekuitas per 31 Desember 2025:

Ekuitas Awal	Rp	1.366.938.989.052,48
Surplus/Defisit LO	Rp	34.083.741.238,57
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	1.423.010.226,46
Ekuitas Akhir	**Rp**	**1.402.445.740.517,51**

5.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional memiliki keterkaitan dengan Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca disebabkan laporan operasional merupakan laporan berbasis akrual yang semua akun-akunnya mempengaruhi ekuitas entitas akuntansi.

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan mengenai kegiatan operasional baik berupa pendapatan maupun beban operasional Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1). Pendapatan-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	572.016.739.614,68	607.376.612.232,51

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp572.016.739.614,68. Jumlah ini menggambarkan pendapatan yang benar-benar menjadi hak Pemerintah Daerah pada Tahun 2025. Saldo pendapatan-LO berbeda dengan jumlah pendapatan-LRA karena pada tahun berjalan terdapat pendapatan yang telah menjadi hak Pemerintah Kota Padang Panjang namun kas belum diterima sampai akhir Tahun Anggaran 2025 atau sebaliknya. pendapatan-LO Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah-LO
2) Pendapatan Transfer-LO
    1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO
    2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO
    3. Transfer Antar Daerah -LO
3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
4) Surplus dari Kegiatan Non Operasional-LO
5) Pendapatan Luar Biasa-LO

Penjelasan terhadap pendapatan-LO Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	103.128.648.837,68	104.839.221.586,01

Pendapatan Asli Daerah–LO Tahun 2025 berjumlah Rp103.128.648.837,68 Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp104.839.221.586,01, maka saldo PAD-LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.710.572.748,33 atau 1,63% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.87 : Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Pajak Daerah	17.627.052.105,25	9.907.103.893,00	7.719.948.212,25	77,92
2.	Retribusi Daerah	66.207.101.582,00	75.175.901.380,00	(8.968.799.798,00)	(11,93)
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.991.779.256,00	7.922.888.824,00	68.890.432,00	0,87
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	11.302.395.894,43	11.833.327.489,01	(530.931.594,58)	(4,48)
	JUMLAH	**103.128.648.837,68**	**104.839.221.586,01**	**(1.710.572.748,33)**	**(1,63)**

1. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah–LO Tahun 2025 berjumlah Rp17.627.052.105,25 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.88 : Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Pajak Hotel	0,00	365.009.139,00	(365.009.139,00)	(100,00)
2.	Pajak Restoran	0,00	937.040.608,00	(937.040.608,00)	(100,00)
3.	Pajak Hiburan	0,00	135.234.900,00	(135.234.900,00)	(100,00)
4.	Pajak Reklame	189.696.278,25	170.763.352,00	18.932.926,25	11,09
5.	Pajak Penerangan Jalan	0,00	3.421.881.841,00	(3.421.881.841,00)	(100,00)
6.	Pajak Parkir	0,00	934.400,00	(934.400,00)	(100,00)
7.	Pajak Air Tanah	15.034.800,00	14.893.800,00	141.000,00	0,95
8.	PBB P2	1.416.184.524,00	1.407.623.353,00	8.561.171,00	0,61
9.	BPHTB	3.392.154.650,00	3.453.722.500,00	-61.567.850,00	(1,78)
10.	PBJT-Restoran	1.028.849.930,00	0,00	1.028.849.930,00	0,00
11.	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.286.494.551,00	0,00	3.286.494.551,00	0,00
12.	PBJT-Hotel	437.922.172,00	0,00	437.922.172,00	0,00
13.	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	962.200,00	0,00	962.200,00	0,00
14.	PBJT-Permainan Ketangkasan	185.554.000,00	0,00	185.554.000,00	0,00
15.	Opsen PKB	5.805.156.100,00	0,00	5.805.156.100,00	0,00
16.	Opsen BBNKB	1.869.042.900,00	0,00	1.869.042.900,00	0,00
	JUMLAH	**17.627.052.105,25**	**9.907.103.893,00**	**7.719.948.212,25**	**77,92**

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp9.907.103.893,00 maka pendapatan pajak daerah-LO untuk Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.719.948.212,25 atau 77,92%.

Pendapatan pajak daerah-LO dapat diformulasikan dengan pendapatan pajak-LRA dikurangi dengan penerimaan piutang tahun lalu dan ditambah dengan penambahan piutang tahun berjalan serta kondisi lain berupa koreksi atas saldo awal piutang dan pendapatan-LRA diterima dimuka. Perbandingan pendapatan pajak daerah-LRA dan pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.89 : Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah-LO dan LRA Tahun 2025

No.	Uraian	Pendapatan-LO (Rp.)	Pendapatan-LRA (Rp.)	Selisih
1.	Pajak Hotel	0,00		0,00
2.	Pajak Restoran	0,00		0,00
3.	Pajak Hiburan	0,00		0,00
4.	Pajak Reklame	189.696.278,25	231.749.137,00	(42.052.858,75)
5.	Pajak Penerangan Jalan	0,00		0,00
6.	Pajak Parkir	0,00		0,00
7.	Pajak Air Tanah	15.034.800,00	14.974.800,00	60.000,00
8.	PBB P2	1.416.184.524,00	1.219.003.598,00	197.180.926,00
9.	BPHTB	3.392.154.650,00	3.345.179.650,00	46.975.000,00
10.	PBJT-Restoran	1.028.849.930,00	1.028.849.930,00	0,00
11.	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.286.494.551,00	3.270.681.691,00	15.812.860,00
12.	PBJT-Hotel	437.922.172,00	437.922.172,00	0,00
13.	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	962.200,00	962.200,00	0,00
14.	PBJT-Permainan Ketangkasan	185.554.000,00	185.554.000,00	0,00
15.	Opsen PKB	5.805.156.100,00	5.765.943.600,00	39.212.500,00
16.	Opsen BBNKB	1.869.042.900,00	1.867.089.300,00	1.953.600,00
JUMLAH		**17.627.052.105,25**	**17.367.910.078,00**	**259.142.027,25**

Adapun penjelasan selisih sebagai berikut:

1) Pajak Reklame

Selisih pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA untuk pajak reklame sebesar Rp42.052.858,75 disebabkan oleh:

- Adanya pendapatan pajak reklame diterima dimuka pada Tahun 2024 sebesar Rp81.924.975,00 yang diakui sebagai pendapatan-LO Tahun 2024;
- Adanya pendapatan pajak reklame yang diterima dimuka di Tahun 2025 sebesar Rp126.929.833,75. Transaksi ini menambah pendapatan-LRA, namun tidak mempengaruhi pendapatan-LO;
- Adanya penerimaan piutang tahun lalu sebesar Rp. 8.511.200,00 yang mengurangi pendapatan-LO;
- Adanya penambahan piutang Tahun 2025 sebesar Rp11.463.200,00 yang menambah pendapatan-LO namun tidak mempengaruhi pendapatan-LRA.

2) Pajak Air Tanah

Pendapatan Pajak Air Tanah-LO tercatat sebesar Rp15.034.800,00 sementara pendapatan-LRA pajak air tanah adalah sebesar Rp14.974.800,00. Sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp60.000,00. Perbedaan ini disebabkan oleh :

- Adanya penerimaan piutang Tahun 2024 sebesar Rp4.677.000,00. Transaksi ini menambah pendapatan-LRA , tetapi tidak ada dampak pada pendapatan-LO.
- Adanya pengakuan piutang Tahun 2025 sebesar Rp4.737.000,00. Transaksi ini menambah pendapatan-LO 2025 , tetapi tidak mempengaruhi pendapatan LRA.

3) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pendapatan-LO PBBP2 Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.416.184.524,00 sementara pendapatan-LRA adalah sebesar Rp1.219.003.598,00. Perbedaan pendapatan-LO dan pendapatan-LRA pada PPBP2 sebesar Rp197.180.926,00 disebabkan oleh :

- Adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya di Tahun 2024 sebesar Rp306.501.146,00, dimana penerimaan ini menambah pendapatan-LRA, namun tidak ada pengaruh pada pendapatan-LO.
- Adanya pengakuan piutang di Tahun 2025 sebesar Rp503.682.072,00. Pengakuan piutang di tahun 2025 ini menambah pendapatan-LO, tapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA.

4) BPHT Pemindahan Hak

Pendapatan-LO BPHTB Pemindahan Hak Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.392.154.650,00 sementara pendapatan-LRA adalah sebesar Rp3.345.179.650,00. Perbedaan pendapatan-LO dan pendapatan-LRA pada PPBP2 sebesar Rp46.975.000,00 disebabkan oleh :

- Adanya pengakuan piutang di Tahun 2025 sebesar Rp46.975.000,00. Pengakuan piutang di tahun 2025 ini menambah pendapatan-LO, tapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA.

5) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain

Pendapatan-LO PBJT Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.286.494.551,00 sementara pendapatan-LRA adalah sebesar Rp3.270.681.691,00. Perbedaan pendapatan-LO dan pendapatan-LRA pada PPBP2 sebesar Rp15.812.860,00 disebabkan oleh :

- Adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya di Tahun 2024 sebesar Rp286.973.603,00, dimana penerimaan ini menambah pendapatan-LRA, namun tidak ada pengaruh pada pendapatan-LO.
- Adanya pengakuan piutang di Tahun 2025 sebesar Rp302.786.463,00. Pengakuan piutang di tahun 2025 ini menambah pendapatan-LO, tapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA.

6) Opsen PKB

Pendapatan-LO Opsen PKB Tahun 2025 adalah sebesar Rp5.805.156.100,00 sementara pendapatan-LRA adalah sebesar Rp5.765.943.600,00. Perbedaan pendapatan-LO dan pendapatan-LRA pada PPBP2 sebesar Rp39.212.500,00 disebabkan oleh :

- Adanya pengakuan piutang di Tahun 2025 sebesar Rp39.212.500,00. Pengakuan piutang di tahun 2025 ini menambah pendapatan-LO, tapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA.

7) Opsen BBNKB

Pendapatan-LO Opsen BBNKB Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.869.042.900,00 sementara pendapatan-LRA adalah sebesar

Rp1.867.089.300,00. Perbedaan pendapatan-LO dan pendapatan-LRA pada PPBP2 sebesar Rp1.953.600,00 disebabkan oleh :

- Adanya pengakuan piutang di Tahun 2025 sebesar Rp1.953.600,00. Pengakuan piutang di tahun 2025 ini menambah pendapatan-LO, tapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA.

2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp66.207.421.582,00 Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp75.175.901.380,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.968.479.798,00 atau 11,93%. Rincian pendapatan retribusi daerah-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.90 : Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	57.347.226.227,00	65.089.218.552,00	(7.741.922.325,00)	(11,89)
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	844.711.000,00	376.700.000,00	468.011.000,00	124,24
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	627.982.000,00	620.026.000,00	7.956.000,00	1,28
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	961.546.000,00	981.955.514,00	(20.409.514,00)	(2,08)
5.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	52.360.000,00	42.530.000,00	9.830.000,00	23,11
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	885.044.000,00	1.002.296.945,00	(117.252.945,00)	(11,70)
7.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.443.537.504,00	6.089.893.033,00	(1.646.355.529,00)	(27,03)
8.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	105.192.000,00	92.288.000,00	12.904.000,00	13,98
9.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	15.240.000,00	34.100.000,00	(18.860.000,00)	(55,31)
10.	Retribusi Rumah Potong Hewan	189.570.000,00	166.875.000,00	22.695.000,00	13,60
11.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	572.909.000,00	461.416.515,00	111.492.485,00	24,16
12.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	35.198.000,00	118.572.350,00	(83.374.350,00)	(70,32)
13.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	126.585.851,00	100.029.471,00	26.556.380,00	26,55
JUMLAH		**66.207.101.582,00**	**75.175.901.380,00**	**(8.968.799.798,00)**	**(11,93)**

Jika dibandingkan dengan pendapatan retribusi-LRA, maka terdapat perbedaan sebesar Rp2.354.218.967,00 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 91 : Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan LRA Tahun 2025

No.	Uraian	Pendapatan-LO (Rp.)	Pendapatan-LRA (Rp.)	Selisih
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	57.347.226.227,00	56.780.775.554,00	566.450.673,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	844.711.000,00	727.854.000,00	116.857.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	627.982.000,00	627.982.000,00	-
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	961.546.000,00	819.041.000,00	142.505.000,00
5.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	52.360.000,00	52.360.000,00	-
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	885.044.000,00	886.052.000,00	(1.008.000,00)
7.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.443.537.504,00	2.910.123.209,00	1.533.414.295,00
8.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	105.192.000,00	105.192.000,00	-
9.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	15.240.000,00	15.240.000,00	-
10.	Retribusi Rumah Potong Hewan	189.570.000,00	189.570.000,00	-
11.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	572.909.000,00	572.909.000,00	-

No.	Uraian	Pendapatan-LO (Rp.)	Pendapatan-LRA (Rp.)	Selisih
12.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	35.198.000,00	39.198.000,00	(4.000.000,00)
13.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	126.585.851,00	126.585.851,00	-
	JUMLAH	**66.207.101.582,00**	**63.852.882.615,00**	**2.354.218.968,00**

Berikut dijelaskan penyebab perbedaan antara pendapatan retribusi yang ada pada pendapatan-LO dengan pendapatan-LRA:

- **Retribusi Pelayanan Kesehatan**

  Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO Tahun 2025 sebesar Rp57.347.226.227,00 sedangkan saldo pendapatan retribusi pelayanan kesehatan-LRA adalah sebesar Rp56.780.775.554,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp566.450.673,00. Hal ini disebabkan oleh adanya pengakuan piutang retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 sebesar Rp10.783.178.024,00 yang menambah pendapatan LO. Penerimaan Piutang tahun sebelumnya di tahun 2025 sebesar Rp10.216.727.351,00 transaksi ini menambah pendapatan LRA namun tidak berpengaruh pada pendapatan LO.

- **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

  Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO Tahun 2024 tercatat sebesar Rp844.711.000,00 sementara pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan-LRA adalah sebesar Rp727.854.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp116.857.000,00 antara pendapatan-LO dengan pendapatan-LRA. Hal ini disebabkan oleh:

  Dinas Perdagkop UKM:
  Adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya di Tahun 2025 sebesar Rp34.428.000,00 transaksi ini menambah pendapatan LRA namun tidak berpengaruh pada pendapatan LO.

  Dinas Perkim LH:
  - Adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya di Tahun 2025 sebesar Rp54.311.000,00 transaksi ini menambah pendapatan LRA namun tidak berpengaruh pada pendapatan LO.
  - Adanya pengakuan piutang Tahun 2025 sebesar Rp205.596.000,00 Transaksi ini mempengaruhi pendapatan-LO (menambah), tetapi tidak ada pengaruh terhadap pendapatan-LRA.

- **Retribusi Pelayanan Pasar**

  Pendapatan-LO Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2025 tercatat sebesar Rp961.546.000,00, sementara pendapatan-LRA retribusi pelayanan pasar adalah sebesar Rp819.041.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp142.505.000,00. Perbedaan nilai tersebut disebabkan oleh:

  Dinas Perdagkop UKM:
  - Adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya di Tahun 2025 sebesar Rp62.641.500,00 transaksi ini menambah pendapatan LRA namun tidak berpengaruh pada pendapatan LO.

- Adanya pengakuan tambahan piutang Tahun 2025 sebesar Rp205.146.500,00. Transaksi ini menambah pendapatan-LO, namun tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA Tahun 2024

- **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

  Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO tahun 2025 adalah sebesar Rp885.044.000,00, sementara pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah-LRA adalah sebesar Rp886.052.000,00. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.008.000,00. Selisih ini disebabkan oleh:

  Sekretariat Daerah:
  Adanya penerimaan piutang pendapatan retribusi penyewaan tanah dan bangunan (sewa rumah dinas) Tahun 2024 yang diterima tahun 2025 sebesar Rp1.008.000,00 yang menambah pendapatan-LRA namun tidak mempengaruhi pendapatan-LO.

- **Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan**

  Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp4.443.537.504,00 sementara pendapatan retribusi pasar grosir dan pertokoan-LRA adalah sebesar Rp2.910.123.209,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.533.414.295,00 yang disebabkan oleh:

  Dinas Perdagkop UKM:

  - Transaksi penerimaan piutang tahun sebelumnya di Tahun 2025 sebesar Rp1.293.498.125,00. Transaksi ini menambah pendapatan-LRA Tahun 2025 tetapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LO;
  - Transaksi pengakuan piutang di Tahun 2025 sebesar Rp2.826.912.420,00 yang menambah pendapatan-LO, tetapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LRA.

- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

  Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp35.198.000,00 sementara pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah-LRA adalah sebesar Rp39.198.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.000.000,00 yang disebabkan oleh:

  Dinas Pangan dan Pertanian:
  Adanya penerimaan piutang tahun sebelumnya di Tahun 2025 sebesar Rp4.000.000,00. Transaksi ini menambah pendapatan-LRA Tahun 2025 tetapi tidak ada pengaruh pada pendapatan-LO;

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Saldo Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 adalah sebesar Rp7.991.779.256,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp7.922.888.824,00, maka pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp68.890.432,00 atau 0,87%. Saldo pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2025 tidak ada perbedaan dengan pendapatan-LRA.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2025 berasal dari bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Padang Panjang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Tahun 2025.

4. Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Saldo Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp11.302.715.894,43. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp11.833.327.489,01, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp530.611.594,58 atau 4,48%.

Tabel 5.92 : Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	617.126.600,00	0,00	617.126.600,00	0,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	166.302.583,33	101.618.866,67	64.683.716,66	63,65
3.	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Hasil Kerjasama Daerah	268.351.293,00	207.133.939,00	61.217.354,00	29,55
5.	Penerimaan Jasa Giro	1.115.370.125,00	1.117.181.863,00	(1.811.738,00)	(0,16)
6.	Pendapatan Bunga	786.348,00	293.394.126,00	(292.607.778,00)	(99,73)
7.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00
8.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.023.079.056,00	3.973.284.382,87	(1.950.205.326,87)	(49,08)
9.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	142.305.307,00	70.254.365,00	72.050.942,00	102,56
10.	Pendapatan Denda Retribusi	167.477.676,00	25.480.111,00	141.997.565,00	557,29
11.	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	15.000.000,00	874.508.333,71	(859.508.333,71)	(98,28)
12.	Pendapatan dari Pengembalian	1.941.836.032,76	4.253.794.718,59	(2.311.958.685,83)	(54,35)
13.	Pendapatan BLUD	4.837.280.873,34	911.199.283,17	3.926.081.590,17	430,87
14.	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	5.477.500,00	(5.477.500,00)	(100,00)
	JUMLAH	**11.302.715.894,43**	**11.833.327.489,01**	**(530.611.594,58)**	**(4,48)**

Jika dibandingkan antara pendapatan-LO dengan pendapatan-LRA, maka terdapat selisih sebagai berikut:

Tabel 5.93 : Perbandingan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dan LRA Tahun

No.	Uraian	Pendapatan-LO (Rp.)	Pendapatan-LRA (Rp.)	Selisih
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	617.126.600,00	617.126.600,00	0,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	166.302.583,33	92.569.000,00	73.733.583,33
3.	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur			0,00
4.	Hasil Kerjasama Daerah	268.351.293,00	268.351.293,00	0,00
5.	Penerimaan Jasa Giro	1.115.370.125,00	1.115.370.125,00	0,00
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	16.285.000,00	(16.285.000,00)
6.	Pendapatan Bunga	786.348,00	786.348,00	0,00

No.	Uraian	Pendapatan-LO (Rp.)	Pendapatan-LRA (Rp.)	Selisih
7.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Krugian Keuangan Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
8.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.023.079.056,00	2.023.079.056,00	0,00
9.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	142.305.307,00	142.305.307,00	0,00
10.	Pendapatan Denda Retribusi	167.477.676,00	181.525.858,00	(14.048.182,00)
11.	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
12.	Pendapatan dari Pengembalian	1.941.836.032,76	1.941.836.032,76	0,00
13.	Pendapatan BLUD	4.837.280.873,34	4.791.443.540,00	45.837.333,34
	JUMLAH	**11.302.715.894,43**	**11.213.478.159,76**	**89.237.734,67**

Selisih antara lain-lain PAD-LO dan lain-lain Pendapatan-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

  Terdapat perbedaan antara hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah-LO dan LRA sebesar Rp73.733.583,33 yang disebabkan oleh :

  - Adanya pengakuan pendapatan-LO Tahun 2025 terhadap pendapatan diterima dimuka Tahun 2024 sebesar Rp135.938.708,33 atas sewa BMD pada BPKD sebesar Rp21.500.000,00, pada Dinas Perdagkop UKM sebesar Rp 106.301.875,00, pada Dinas Pangan dan Pertanian sebesar Rp3.136.833,33 dan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp5.000.000,00. Transaksi ini menambah pendapatan-LO Tahun 2025.
  - Adanya pengakuan pendapatan diterima dimuka Tahun 2025 sebesar Rp65.707.625,00 atas sewa BMD pada Dinas Pangan dan Pertanian sebesar Rp4.626.500,00, pada Dinas Perdagkop UKM sebesar Rp61.081.125,00 transaksi tersebut mengurangi pendapatan-LO Tahun 2025.
  - Adanya pengakuan piutang atas sewa BMD pada Dinas Perhubungan sebesar Rp3.502.500,00 transaksi ini menambah pendapatan LO .

- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

  Selisih saldo hasil pengelolaan dana bergulir-LRA dan LO sebesar Rp16.285.000,00 merupakan penerimaan piutang dana bergulir tahun sebelumnya. Transaksi ini menambah pendapatan-LRA namun tidak berpengaruh pada nilai pendapatan-LO.

- Pendapatan Denda Retribusi Daerah

  Terdapat perbedaan antara pendapatan denda retribusi-LO dan LRA sebesar Rp14.048.182,00 yang disebabkan oleh:

  - Adanya penerimaan piutang denda retribusi pelayanan persampahan/Kebersihan pada Dinas Perdagkop UKM sebesar Rp2.763.000,00 yang menambah nilai pendapatan-LRA namun tidak mempengaruhi nilai pendapatan-LO.

- Adanya penerimaan piutang denda retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp12.600,00 yang menambah nilai pendapatan-LRA namun tidak mempengaruhi nilai pendapatan-LO.
- Adanya penerimaan piutang denda retribusi pasar grosir/pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan pada Dinas Perdagkop UKM sebesar Rp11.272.282,00 yang menambah nilai pendapatan-LRA namun tidak mempengaruhi nilai pendapatan-LO.

➢ Pendapatan BLUD (RSUD Kota Padang Panjang)

Terdapat selisih kurang antara pendapatan-LO dan LRA sebesar Rp45.837.333,34 yang disebabkan oleh:
- Adanya penerimaan piutang 2024 di Tahun 2025 sebesar Rp10.735.000,00 yang menambah pendapatan-LRA tetapi tidak mempengaruhi pendapatan-LO.
- Adanya pendapatan diterima dimuka tahun 2024 sebesar Rp189.167.000 yang menambah pendapatan-LO namun tidak berpengaruh pada pendapatan-LRA.
- Adanya pengakuan pendapatan diterima dimuka tahun 2025 sebesar Rp148.064.666,66 yang mengurangi pendapatan-LO namun tidak berpengaruh pada nilai pendapatan-LRA.
- Adanya pengakuan piutang pendapatan BLUD tahun 2025 sebesar Rp15.470.000,00 yang menambah pendapatan-LO namun tidak berpengaruh pada pendapatan-LRA.

b. Pendapatan Transfer-LO	**Tahun 2025 (Rp)**	**Tahun 2024 (Rp)**
	461.862.466.373,00	**487.511.117.676,00**

Pendapatan Transfer-LO merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi. Namun demikian penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut.

Pendapatan transfer-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp461.862.466.373,00 Jika dibandingkan dengan pendapatan transfer-LO Tahun 2024 sebesar Rp487.511.117.676,00, pendapatan transfer-LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp25.648.651.303,00 atau 5,26%. Berikut adalah rincian pendapatan transfer-LO Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.94 : Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	438.080.711.779,00	435.052.957.157,00	3.027.754.622,00	0,70

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	0,00	21.772.057.000,00	(21.772.057.000,00)	(100,00)
3.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.781.754.594,00	30.686.103.519,00	(6.904.348.925)	22,50
	JUMLAH	**461.862.466.373,00**	**487.511.117.676,00**	**(25.648.651.303,00)**	**(5,26)**

Selanjutnya, jika dibanding dengan pendapatan transfer-LRA Tahun 2025 sebesar Rp460.518.396.206,00 maka terdapat perbedaan antara pendapatan transfer-LO dan pendapatan transfer-LRA sebesar Rp1.344.070.167,00. Berikut adalah rincian pendapatan transfer-LO dan pendapatan transfer-LRA Tahun 2025:

Tabel 5.95 : Perbandingan Pendapatan Transfer-LO dan LRA Tahun 2025

No.	Uraian	Pendapatan-LO (Rp.)	Pendapatan-LRA (Rp.)	Selisih
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	438.080.711.779,00	435.977.261.779,00	2.103.450.000,00
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.781.754.594,00	24.541.134.427,00	(759.379.833,00)
	JUMLAH	**461.862.466.373,00**	**460.518.396.206,00**	**(1.344.070.167,00)**

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

Adapun rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5.96 : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Dana Bagi Hasil	10.855.740.000,00	7.592.104.260,00	3.263.635.740,00	42,99
2.	Dana Alokasi Umum	386.609.800.112,00	375.917.415.308,00	10.692.384.804,00	2,84
3.	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.115.348.945,00	15.722.870.984,00	(10.607.522.039,00)	(67,47)
4.	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	35.499.822.722,00	35.820.566.605,00	(320.743.883,00)	(0,90)
	JUMLAH	**438.080.711.779,00**	**435.052.957.157,00**	**3.027.754.622,00**	**0,70**

(1) Dana Bagi Hasil

Pendapatan Dana Bagi Hasil-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp10.855.740.000,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp7.592.104.260,00, maka pendapatan dana bagi hasil-LO Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.263.635.740,00 atau 42,99%. Pendapatan dana bagi hasil-LO Tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

1.	Pendapatan bagi hasil-LRA Tahun 2024	Rp.	8.752.290.000,00
2.	Utang Tahun 2024	Rp.	1.463.588.000,00
3.	Utang Tahun 2025	Rp.	(2.308.461.000,00)
4.	Saldo TDF Tahun 2024	Rp.	(679.525.000,00)
5.	Piutang Tahun 2024	Rp.	3.627.848.000,00
	Jumlah	Rp.	**10.855.740.000,00**

(2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 adalah sebesar Rp386.609.800.112,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar sebesar Rp375.917.415.308,00, maka Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.629.384.804,00 atau 2,84%.

(3) Dana Alokasi Khusus-Fisik

Pendapatan-LO Dana Alokasi Khusus-Fisik Tahun 2025 adalah sebesar Rp5.115.348.945,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp15.722.870.984,00, maka pendapatan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.607.522.039,00 atau 67,47%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.97 : Dana Alokasi Khusus-Fisik Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	DAK Bidang Pendidikan SD	0,00	1.207.535.192,00	(1.207.535.192,00)	(100,00)
2.	DAK Bidang Pendidikan SMP	0,00	2.223.483.877,00	(2.223.483.877,00)	(100,00)
3.	DAK Bidang Pendidikan SKB	0,00	536.879.555,00	(536.879.555,00)	(100,00)
4.	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	11.105.320.000,00	(11.105.320.000,00)	(100,00)
5.	DAK Kesehatan & KB	0,00	180.850.000,00	(180.850.000,00)	(100,00)
6.	DAK Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	468.802.360,00	(468.802.360,00)	(100,00)
7.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD-LO	571.830.765,00	0,00	571.830.765,00	0,00
8.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	4.543.518.180,00	0,00	4.543.518.180,00	0,00
	JUMLAH	**5.115.348.945,00**	**15.722.870.984,00**	**(10.607.522.039,00)**	**(67,47)**

(4). Dana Alokasi Khusus-Non Fisik

Pendapatan-LO Dana Alokasi Khusus-Non Fisik Tahun 2025 adalah sebesar Rp35.499.822.722,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp35.820.566.605,00, maka pendapatan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp320.743.883,00 atau 0.90%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.98 : Dana Alokasi Khusus-Non Fisik Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	BOS Reguler	8.811.549.600,00	8.761.512.474,00	50.037.126,00	0,57
2.	BOS Kinerja	0,00	395.000.000,00	(395.000.000,00)	(100,00)
3.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	0,00	17.920.269.000,00	(17.920.269.000,00)	(100,00)
4.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	240.250.000,00	(240.250.000,00)	(100,00)
5.	BOP PAUD	0,00	1.417.783.756,00	(1.417.783.756,00)	(100,00)
6.	BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	569.547.000,00	(569.547.000,00)	(100,00)
7.	Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	2.579.677.431,00	(2.579.677.431,00)	(100,00)
8.	Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	553.076.836,00	(553.076.836,00)	(100,00)
9.	Bantuan Operasional Kesehatan - Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	333.513.500,00	(333.513.500,00)	(100,00)
10.	Bantuan Operasional Kesehatan - BOKB	0,00	966.046.580,00	(966.046.580,00)	(100,00)
11.	Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	242.880.211,00	(242.880.211,00)	(100,00)
12.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	385.750.000,00	0,00	385.750.000,00	0,00
13.	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	1.321.841.108,00	0,00	1.321.841.108,00	0,00
14.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	392.336.000,00	0,00	392.336.000,00	0,00
15.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	160.712.982,00	0,00	160.712.982,00	0,00
16.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
17.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
18.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	1.160.391.251,00	0,00	1.160.391.251,00	0,00
19.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	390.069.000,00	0,00	390.069.000,00	0,00
20.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	1.778.282.349,00	1.841.009.817,00	(62.727.468,00)	(3,41)
21.	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru-	19.105.792.500,00	0,00	19.105.792.500,00	0,00
22.	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana-LO	873.817.932,00	0,00	873.817.932,00	0,00
23.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah LO	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
24.	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian-LO	59.280.000,00	0,00	59.280.000,00	0,00
	JUMLAH	**35.499.822.722,00**	**35.820.566.605,00**	**(320.743.883,00)**	**(0,90)**

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Saldo Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO pada Tahun 2025 berupa Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp21.772.057.000,00, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp21.772.057.000,00 atau 100,00%.

3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

5.4.1.1.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil–LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp22.371.754.594,00. Pendapatan bagi hasil Tahun 2025 terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Jika dibandingkan dengan pendapatan-LO Tahun 2024 sebesar Rp29.550.730.519,00 maka pendapatan-LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.178.975.925,0000 atau 24,29%. Rincian pendapatan bagi hasil pajak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.99 : Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	51.239.496,00	6.704.783.999,00	(6.653.544.503,00)	(99,24)
2.	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	48.143.258,00	3.061.122.141,00	(3.012.978.883,00)	(98,43)
3.	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.255.678.754,00	9.885.781.576,00	2.369.897.178,00	23,97
4.	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dari Pemanfaatan Air Permukaan	1.131.474,00	143.690.852,00	(142.559.378,00)	(99,21)
5.	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	10.015.561.612,00	9.755.351.951,00	260.209.661,00	2,67
	JUMLAH	**22.371.754.594,00**	**29.550.730.519,00**	**(7.178.975.925,00)**	**(24,29)**

Berikut adalah rincian perbandingan pendapatan bagi hasil pajak-LO dan LRA:

Tabel 5.100 : Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO dan LRA Tahun 2025

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	51.239.496,00	1.963.119.743,00	(1.911.880.247,00)
2.	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	48.143.258,00	733.569.204,00	(685.425.946,00)
3.	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.255.678.754,00	10.357.422.793,00	(1.898.255.961,00)
4.	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dari Pemanfaatan Air Permukaan	1.131.474,00	61.461.075,00	(60.329.601,00)
5.	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	10.015.561.612,00	10.015.561.612,00	-
	JUMLAH	**22.371.754.594,00**	**23.131.134.427,00**	**(759.379.833,00)**

Jika dibandingkan dengan pendapatan-LRA sebesar Rp23.131.134.427,00 maka pendapatan-LO lebih rendah sebesar Rp759.379.833,00. Selisih tersebut berasal dari :

- Piutang Tahun 2024 yang merupakan kurang salur dana bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi sebesar Rp8.373.725.681,00. Nilai piutang tersebut mempengaruhi (mengurangi) pendapatan-LO Tahun 2025.
- Piutang Tahun 2025 yang merupakan kurang salur pendapatan dana bagi hasil Pemerintah Provinsi sebesar Rp7.614.345.848,00 yang mempengaruhi (menambah) pendapatan-LO Tahun 2025.

(2) Bantuan Keuangan

Selain pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang juga

menerima pendapatan transfer antar daerah berupa bantuan khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar sebesar Rp1.410.000.000,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.410.000.000,00 atau 100,00%.

c.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan-LO	Tahun 2025 (Rp) 7.025.624.404,00	Tahun 2024 (Rp) 15.026.272.970,50

Saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp7.025.624.404,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp15.026.272.970,50, maka saldo lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan-LO pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.000.648.566,50 atau 53.24%. Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tahun 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 sebesar Rp3.019.979.960,00, jika dibandingkan dengan pendapatan hibah-LO Tahun 2024 sebesar Rp14.965.885.386,50 maka pendapatan hibah-LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp11.945.905.426,50 dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat.
  Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2025 sebesar Rp1.603.677.149,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Pendapatan hibah pada Dinas Perhubungan yang berasal dari Kementrian Perhubungan dengan total nilai Rp598.000.000,00 berupa kendaraan bermotor perorangan (bus sekolah)
  - Pendapatan hibah pada Dinas Sosial P2KBP3A yang berasal dari BKKB berupa alat alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi senilai Rp47.581.150,00.
  - Pendapatan hibah pada BPBD Kesbangpol yang berasal dari BNPB senilai Rp319.899.999,00 berupa kendaraan bermotor angkutan barang (mobil Pick Up) dan persediaan/barang habis pakai penanggulangan bencana sebesar Rp400.740.000,00 berupa paket sembako, Kasur lipat, alat kebersihan dan makanan siap saji.

    Pada tanggal 27 November 2025 terjadi bencana alam Hidrometeorologi sehingga pada tanggal 31 Desember 2025 masih ada persediaan berupa sembako dan kebutuhan habis pakai lainnya yang berasal dari sumbangan masyarakat dan instansi swasta lainnya. Daftar rincian persediaan dapat dilihat dalam ***Lampiran 17. a***

- Pendapatan hibah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berasal dari Kementrian Dalam Negeri berupa Alat Keamanan senilai Rp237.456.000,00

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah.
  Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebesar Rp1.366.302.811,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Pendapatan hibah barang pada Dinas Kesehatan yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat berupa persediaan obat, bahan medis habis pakai dan vaksin senilai Rp1.365.545.971,00.
  - Pendapatan hibah pada Dinas Sosial P2KBP3A yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Tanah Datar senilai Rp756.840,00.

- Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis

  Sumbangan pihak ketiga/sejenis Tahun 2025 sebesar Rp50.000.000,00 berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana

Dana Darurat pada pada Tahap Pasca Bencana Tahun 2025 sebesar Rp4.000.000.000,00 untuk menanggulangi kondisi pasca Bencana Hydrometeorologi dimana Kota Padang Panjang termasuk salah satu Kabupaten/kota yang terdampak bencana tersebut

3. Lain-Lain Pendapatan-LO.

Lain-lain Pendapatan LO Tahun 2025 sebesar Rp5.644.444,00, jika dibandingkan dengan lain-lain pendapatan-LO Tahun 2024 sebesar Rp60.387.584,00 maka lain-lain pendapatan-LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp54.743.140,00 atau 90,65%

Lain-lain pendapatan-LO Tahun 2025 adalah pendapatan atas kontribusi dari Sumber Lain yang sah dan tidak mengikat.

2). Beban

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
537.932.998.376,11	**620.133.972.330,05**

Beban merupakan kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Saldo beban Tahun 2025 adalah Rp537.932.998.376,11. Jumlah ini menggambarkan beban yang benar-benar menjadi kewajiban di Tahun 2025.

Saldo beban operasi berbeda dengan jumlah realisasi belanja yang disebabkan bebarapa hal antara lain pembayaran atas utang belanja tahun lalu namun tidak diakui sebagai beban di tahun berjalan, pengakuan utang belanja pada tahun berjalan, reklasifikasi belanja, pengakuan beban dibayar dimuka, kapitalisir belanja jasa ke aset tetap dan perhitungan persediaan akhir barang habis pakai.

Adapun rincian beban Tahun 2025 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.101 : Rincian Beban Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
I.	**BEBAN OPERASI**	**489.131.919.854,11**	**568.415.826.555,05**	**(79.283.906.700,94)**	**(13,95)**
	a. Beban Pegawai	280.692.965.418,36	303.794.887.831,64	(23.101.922.413.28)	(7,60)
	b. Beban Barang dan Jasa	191.803.589.036,20	221.950.115.288,81	(30.146.526.252,61)	(13,58)
	c. Beban Subsidi	60.700.008,00	4.456.800,00	56.243.208,00	1.261,96
	d. Beban Hibah	7.100.765.108,73	17.174.049.136,00	(10.073.284.027,27)	(58,65)
	e. Beban Bantuan Sosial	7.044.965.000,00	10.784.726.000,00	(3.739.761.000,00)	(34,68)
	f. Beban Penyisihan Piutang	2.428.935.282,82	14.707.591.498,60	(12.278.656.214,78)	(83,49)
II.	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**	**48.169.814.738,00**	**51.497.739.587,00**	**(3.327.924.849,00)**	**(6,46)**
	a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	14.576.645.571,00	14.369.837.318,00	206.808.253,00	1,44
	b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.200.641.817,00	15.336.126.756,00	(2.135.484.939,00)	(13,92)
	c. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	19.931.687.460,00	21.299.049.318,00	(1.367.361.858,00)	(6,42)
	d. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	416.924.128,00	492.726.195,00	(75.802.067,00)	(15,38)
	e. Beban Penyusutan Properti Investasi	43.915.762,00	0,00	43.915.762,00	100,00
III.	**BEBAN TAK TERDUGA**	**631.263.784,00**	**220.406.188,00**	**410.857.596,00**	**186,41**
	a. Beban Tak Terduga	631.263.784,00	220.406.188,00	410.857.596,00	186,41
	JUMLAH	**537.932.998.376,11**	**620.133.972.330,05**	**(82.200.973.953,94)**	**(13,26)**

a. Beban Operasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	489.131.919.854,11	**568.415.826.555,05**

Adapun rincian Beban Operasi pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai Tahun 2025 adalah sebesar Rp280.692.965.418,36. Jika dibanding dengan beban pegawai Tahun 2024 sebesar Rp303.794.887.831,64 maka beban pegawai Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp23. 101.922.413,28 atau 7,60%. Adapun rincian beban pegawai Tahun 2025 terdiri dari

Tabel 5.102 : Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	149.159.767.406,00	147.003.825.286,00	2.155.942.120,00	1,47
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	97.247.074.188,00	102.346.620.890,00	(5.099.546.702,00)	(4,98)

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
3.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	19.581.895.321,75	(19.581.895.321,75)	(100,00)
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.622.512.800,00	7.676.645.018,00	(54.132.218,00)	(0,71)
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	363.256.738,00	209.513.404,25	153.743.333,75	73,38
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan serta KDH/WKDH	500.039.710,00	499.702.996,00	336.714,00	0,07
7.	Beban Pegawai BLUD	25.800.314.576,36	26.476.684.915,64	(676.370.339,28)	(2,55)
	JUMLAH	**280.692.965.418,36**	**303.794.887.831,64**	**(23.101.922.413,28)**	**(7,60)**

Apabila dibandingkan dengan saldo belanja pegawai Tahun 2025 sebesar Rp278.088.171.575,00, maka saldo beban pegawai lebih tinggi sebesar Rp2.604.793.843,36. Berikut rincian perbedaan beban pegawai dan belanja pegawai Tahun 2025:

Tabel 5.103 : Perbandingan Saldo Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2025

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	149.159.767.406,00	149.175.877.796,00	(16.110.390,00)
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	97.247.074.188,00	97.247.074.188,00	0,00
3.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00		0,00
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.622.512.800,00	7.622.512.800,00	0,00
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	363.256.738,00	363.256.738,00	0,00
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan serta KDH/WKDH	500.039.710,00	500.039.710,00	0,00
7.	Beban Pegawai BLUD	25.800.314.576,36	23.179.410.343,00	2.620.904.233,36
	JUMLAH	**280.692.965.418,36**	**278.088.171.575,00**	**2.604.793.843,36**

Adapun selisih sebesar Rp2.604.793.843,36 antara beban pegawai dengan belanja pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Beban gaji dan tunjangan lebih rendah sebesar Rp16.110.390,00 dari belanja gaji dan tunjangan dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang gaji dan tunjangan Tahun 2024	Rp	(32.262.706,00)
b. Utang gaji dan tunjangan Tahun 2025	Rp	16.152.316,00
Jumlah	**Rp**	**(16.110.390,00)**

- Terdapat selisih antara beban pegawai BLUD dan belanja pegawai BLUD sebesar Rp2.620.904.233,36 dengan penjelasan sebagai berikut:

a.	Utang belanja BLUD RSUD Tahun 2024	Rp.	(6.831.587.752,64)
b.	Utang belanja BLUD RSUD Tahun 2025	Rp.	8.660.329.412,00
c.	Koreksi utang belanja BLUD tahun 2024	Rp.	792.162.574,00
	Jumlah	**Rp.**	**2.620.904.233,36**

2. Beban Barang dan Jasa

Saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 adalah sebesar Rp191.803.589.036,20. Jika dibandingkan dengan saldo beban barang dan jasa Tahun 2024 sebesar Rp221.950.115.288,81, maka saldo Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp30.146.526.252,61 atau 13,58%.

Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, beban barang dan jasa BOS dan beban barang dan jasa BLUD dengan rincian sebagai berikut.

a. Beban Barang

Saldo Beban Barang Tahun 2025 adalah sebesar Rp29.674.566.768,28. Jika dibanding dengan saldo beban barang Tahun 2024 sebesar Rp36.093.563.857,08 maka saldo beban barang Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.418.997.088,80 atau 17,78%

Adapun rincian beban barang Tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 5.104 : Rincian Beban Barang Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Barang Pakai Habis	28.121.935.655,28	34.585.613.312,08	(6.463.677.656,80)	(18,69)
2.	Beban Barang tak Pakai Habis	0,00	58.946.200,00	(58.946.200,00)	(100,00)
3.	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.552.631.113,00	1.449.004.345,00	103.626.768	7,15
	JUMLAH	**29.674.566.768,28**	**36.093.563.857,08**	**(6.418.997.088,80)**	**(17,78)**

Jika dibandingkan dengan saldo belanja barang sebesar Rp24.655.816.835,60, maka terdapat selisih sebesar Rp5.018.749.932,68 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.105 : Perbandingan Saldo Beban Barang - Belanja Barang Tahun 2025

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Barang Pakai Habis	28.121.935.655,28	23.793.594.691,60	4.328.340.963,68
2.	Beban Barang tak Pakai Habis	0,00	0,00	0,00
3.	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.552.631.113,00	862.222.144,00	690.408.969,00
	JUMLAH	**29.674.566.768,28**	**24.655.816.835,60**	**5.018.749.932,68**

Adapun selisih sebesar Rp5.018.749.932,68 antara beban barang dengan belanja barang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Persediaan dari pendapatan Hibah Rp 1.814.623.961,00
  - Dinas Kesehatan Rp 1.365.545.971,00
  - Dinas Sosial Rp 48.337.990,00
  - BPBD Rp 400.740.000,00
- Belanja modal tidak dikapitalisir Rp 690.408.969,00
  - Belanja modal peralatan dan mesin Rp552.805.338,00
  - Belanja modal Gedung dan bangunan Rp 5.700.000,00

Belanja modal aset jalan, jaringan dan irigasi Rp 18.000.000,00

Belanja modal aset tetap lainnya Rp113.903.631,00

- Koreksi Persediaan 2024 Rp 24.931.652,34

  Dinas Perhubungan. Rp 25.000.000,00

  Dinas Pertanian Rp (68.347,66)

- koreksi persediaan dari UPTD Rp 35.719.500,00

  penambahan bibit ternak pada dinas

- Utang belanja barang Rp 1.367.520.00

  Utang belanja barang untuk dijual/diserahkan pada pihak ketiga pada Dinas Pendidikan.

- Penggunaan barang pakai habis Rp1.854.670.780,34

  Persediaan awal Rp 11.344.850.920,73

  Persediaan akhir (Rp 9.490.180.140,39)

- Reklas antar rekening Rp 597.027.550,00

Reklas beban pemeliharaan ke bahan bakar minyak	533.946.550,00
Reklas beban alat/bahan perabor kantor ke mebel (aset tetap)	(2.910.000,00)
Reklas beban alat untuk kegiatan kantor lainnya ke home use (aset tetap)	(5.772.000,00)
Reklas beban jasa penyelenggaraan acara ke persediaan	26.629.000,00
Reklas beban jasa konsultansi konsultansi perencanaan dan pengawasan ke persediaan	19.776.000,00
Reklas instalasi air kotor ke persediaan	25.358.000,00
	597.027.550,00

b. Beban Jasa

Saldo Beban Jasa Tahun 2025 adalah sebesar Rp78.124.342.185,50. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp87.684.351.192,17, maka beban jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.560.009.006,67 atau 10,90%. Adapun rincian beban jasa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.106: Rincian Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Jasa Kantor	62.543.184.702,00	70.713.026.523,00	(8.169.841.821,00)	(11,55)
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.727.408.676,91	9.123.388.774,83	604.019.902,08	6,62
3.	Beban Sewa Tanah	235.334.167,00	276.630.833,33	(41.296.666,33)	(14,93)
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.234.792.896,00	2.760.333.998,00	(525.541.102,00)	(19,04)
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	939.748.600,00	2.018.256.750,00	(1.078.508.150,00)	(53,44)
6.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	6.035.000,00	58.500.000,00	(52.465.000,00)	(89,68)
7.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	361.525.910,59	571.476.763,01	(209.950.852,42)	(36,74)
8.	Beban Jasa Konsultansi non Konstruksi	485.707.939,00	539.085.000,00	(53.377.061,00)	(9,90)
9.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek	1.590.604.294,00	1.495.612.550,00	94.991.744,00	6,35

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
10.	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	128.040.000,00	(128.040.000,00)	100,00
	JUMLAH	**78.124.342.185,50**	**87.684.351.192,17**	**(9.560.009.006,67)**	**(10,90)**

Jika dibandingkan dengan belanja jasa sebesar Rp78.164.011.624,50 maka terdapat selisih sebesar Rp39.669.439,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.107 : Perbandingan Beban Jasa - Belanja Jasa Tahun 2025

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Jasa Kantor	62.543.184.702,00	62.591.452.307,00	(48.267.605,00)
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.727.408.676,91	9.727.408.676,91	0,00
3.	Beban Sewa Tanah	235.334.167,00	229.185.000,00	6.149.167,00
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.234.792.896,00	2.212.567.897,00	22.224.999,00
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	939.748.600,00	939.748.600,00	0,00
6.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	6.035.000,00	6.035.000,00	0,00
7.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	361.525.910,59	381.301.910,59	(19.776.000,00)
8.	Beban Jasa Konsultansi non Konstruksi	485.707.939,00	485.707.939,00	0,00
9.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek	1.590.604.294,00	1.590.604.294,00	0,00
10.	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**78.124.342.185,50**	**78.164.011.624,50**	**(39.669.439,00)**

Selisih antara baban jasa dengan belanja jasa-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Beban Jasa Kantor**

1.	Utang belanja Tahun 2024	Rp.	(396.271.119,00)
2.	Utang belanja Tahun 2025	Rp.	375.312.514,00
3.	Reklas ke Persediaan	Rp.	(26.629.000,00)
4.	Reklas ke Aset Tetap	Rp.	(680.000,00)
	Jumlah	**Rp.**	**(48.267.605,00)**

- **Beban Sewa Tanah**

1.	Beban bayar dimuka Tahun 2024	Rp.	(7.662.500,00)
2.	Beban bayar dimuka Tahun 2025	Rp.	12.457.500,00
	Jumlah	**Rp.**	**6.149.167,00**

- **Beban Sewa Peralatan dan Mesin**

1.	Beban bayar dimuka Tahun 2024	Rp.	92.725.000,00
2.	Beban bayar dimuka Tahun 2025	Rp.	(70.500.001,00)
	Jumlah	**Rp.**	**22.224.999,00**

- **Beban Jasa Konsultansi Konstruksi**

Selisih beban jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp19.776.000,00 merupakan reklas ke persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang terdiri dari :

1.	Beban Jasa Konsulatnsi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Rp.	(11.618.000,00)
2.	Beban Jasa Konsulta nsi Pengawas Arsitektu	Rp.	(8.158.000,00)
	Jumlah	**Rp.**	**(19.776.000,00)**

c. Beban Pemeliharaan

Saldo Beban Pemeliharaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp11.036.192.015,42. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp11.072.376.489,00, maka beban pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp36.184.473,58 atau 0,33%. Berikut adalah rincian beban pemeliharaan Tahun 2025:

Tabel 5.108 : Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	65.199.000,00	0,00	65.199.000,00	0,00
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.089.400.842,00	3.301.387.111,00	(211.986.269,00)	(6,42)
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.823.584.506,00	5.846.432.127,00	(22.847.621,00)	(0,39)
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.058.007.667,42	1.924.557.251,00	133.450.416,42	6,93
5.	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	100,00
	JUMLAH	**11.036.192.015,42**	**11.072.376.489,00**	**(36.184.473,58)**	**(0,33)**

Jika dibandingkan dengan saldo belanja pemeliharaan sebesar Rp11.620.447.135,42, maka terdapat selisih antara beban pemeliharaan dan belanja pemeliharaan sebesar Rp584.255.120,00. Berikut rincian selisih beban dan belanja pemeliharaan Tahun 2025:

Tabel 5.109 : Perbandingan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2025

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	65.199.000,00	65.199.000,00	0,00
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.089.400.842,00	3.627.827.392,00	(538.426.550,00)
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.823.584.506,00	5.869.413.076,00	(45.828.570,00)
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.058.007.667,42	2.058.007.667,42	0,00
5.	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00		0,00
	JUMLAH	**11.036.192.015,42**	**11.620.447.135,42**	**(584.255.120,00)**

Adanya selisih antara beban pemeliharaan dengan belanja pemeliharaan ini adalah sebagai berikut:

- **Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**
  Selisih sebesar Rp538.426.550,00 merupakan reklasifikasi beban pemeliharaan kendaraan ke beban barang dan jasa (beban BBM).

- **Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**

  Selisih sebesar Rp45.828.570,00 merupakan kapitalisir beban pemeliharaan gedung dan bangunan ke aset tetap.

d. Beban Perjalanan Dinas

Saldo Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 adalah sebesar Rp20.499.008.243,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp34.933.707.882,00, maka beban perjalanan dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.434.699.639,00 atau 41,32%.

Tabel 5.110 : Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.479.008.243,00	34.893.807.882,00	(14.414.799.639,00)	(41,31)
2.	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	20.000.000,00	39.900.000,00	(19.900.000,00)	(49,87)
	JUMLAH	**20.499.008.243,00**	**34.933.707.882,00**	**(14.434.699.639,00)**	**(41,32)**

Tabel 5.111 : Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas dan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.479.008.243,00	20.479.008.243,00	0,00
2.	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	JUMLAH	**20.499.008.243,00**	**20.499.008.243,00**	**0,00**

Dari tabel diatas dapat dilihat tidak terdapat perbedaan belanja perjalanan dinas dan beban perjalanan dinas tahun 2025.

e. Beban Uang dan/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Saldo Beban Uang dan/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2025 adalah sebesar Rp8.148.938.586,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp9.255.396.142,00, maka saldo beban uang dan/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.106.457.556,00 atau 11,95%.

Tabel 5.112 : Rincian Beban Uang dan/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.560.658.900,00	8.444.598.280,00	(1.883.939.380,00)	(22,31)
2.	Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.588.279.686,00	810.797.862,00	777.481.824,00	95,89
	JUMLAH	**8.148.938.586,00**	**9.255.396.142,00**	**(1.106.457.556,00)**	**(11,95)**

Tabel 5.113 : Perbandingan Beban Uang dan/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masayarakat dan Belanja Tahun 2025

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.560.658.900,00	6.560.658.900,00	0,00
2	Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.588.279.686,00	1.588.279.686,00	0,00
	JUMLAH	**8.148.938.586,00**	**8.148.938.586,00**	**0,00**

Dari tabel diatas terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan/selisih antara saldo beban uang yang diberikan kepada pihak ketiga dengan saldo belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga Tahun 2025.

f. Beban Barang dan Jasa BOS

Saldo Beban Barang dan Jasa BOS merupakan pengeluaran/konsumsi aset atau timbulnya kewajiban atas pengelolaan dana BOS pada SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Padang Panjang selama Tahun 2025.

Saldo beban barang dan jasa BOS Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00, jika dibandingkan dengan beban barang dan jasa BOS Tahun 2024 sebesar Rp5.212.465.510,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp5.212.465.510,00 atau 100,00%.

Pada tahun 2025 tidak terdapat belanja barang dan jasa BOS LRA sehingga tidak terdapat perbedaan antara beban barang dan jasa BOS LO dengan beban barang dan jasa BOS LRA.

g. Beban Barang dan Jasa BOSP

Saldo Beban Barang dan Jasa BOSP merupakan pengeluaran/konsumsi aset atau timbulnya kewajiban atas pengelolaan dana BOS Reguler, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan sekolah negeri di Kota Padang Panjang selama Tahun 2025.

Tabel 5.114 : Perbandingan Beban Barang dan Jasa BOSP Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	5.166.235.474,00	0,00	5.166.235.474,00	0,00
2.	Beban Barang dan Jasa BOSP-PAUD	85.033.200,00	84.160.008,00	873.192,00	1,04
3.	Beban Barang dan Jasa BOSP-Kesetaraan	126.548.000,00	205.594.500,00	(79.046.500,00)	(38,45)
	Jumlah	**5.377.816.674,,00**	**289.754.508,00**	**5.088.062.162,00**	**1.755,99**

Saldo beban barang dan jasa BOSP Tahun 2025 adalah sebesar Rp5.377.816.674,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp289.754.508,00, maka saldo beban barang dan jasa BOSP Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.088.062.162,00 atau 1.755,99%.

Tabel 5.115 : Perbandingan Beban Barang dan Jasa BOSP dengan Belanja Barang dan Jasa BOSP Tahun 2025

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	5.166.235.474,00	5.166.235.474,00	0,00
2.	Beban Barang dan Jasa BOSP-PAUD	85.033.200,00	85.033.200,00	0,00
3.	Beban Barang dan Jasa BOSP-Kesetaraan	126.548.000,00	126.548.000,00	0,00
	JUMLAH	**5.377.816.674,00**	**5.377.816.674,00**	**0,00**

Dari tabel diatas tidak terdapat perbedaan antara saldo beban barang dan jasa BOSP dan belanja barang dan jasa BOSP pada Tahun 2025.

h. Beban Barang dan BOK Puskesmas

Saldo Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas merupakan pengeluaran/konsumsi aset atau timbulnya kewajiban atas pengelolaan dana pada Puskesmas. Saldo beban barang dan jasa BOK Puskesmas Tahun 2025 sebesar Rp2.009.667.149,00. Jika dibandingkan dengan saldo beban barang dan jasa BOK Puskesmas Tahun 2024 sebesar Rp0,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.009.667.149,00 atau 100,00%.

Jika dibandingkan dengan saldo belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebesar Rp2.009.667.149,00 maka tidak terdapat selisih antara beban barang dan jasa BOK Puskesmas dengan belanja barang dan jasa BOK Puskemas.

i. Beban Barang dan Jasa BLUD

Saldo Beban Barang dan Jasa BLUD merupakan pengeluaran/konsumsi aset atau timbulnya kewajiban atas pengelolaan dana pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 4 (empat) BLUD Puskesmas. Saldo beban barang dan jasa BLUD Tahun 2025 sebesar Rp36.933.057.415,00. Jika dibandingkan dengan saldo beban barang dan jasa BLUD Tahun 2024 sebesar Rp37.408.499.708,56 terdapat penurunan sebesar Rp475.442.293,56 atau 1.27%.

Jika dibandingkan dengan saldo belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp33.142.947.211,00 maka terdapat selisih sebesar Rp3.790.110.204,00. Selisih tersebut terdiri dari:

Utang Tahun 2024	Rp.	(3.921.338.076,00)
Utang Tahun 2025	Rp.	7.711.448.280,00
Jumlah	**Rp.**	**(3.790.110.204,00)**

3. Beban Subsidi

Saldo beban subsidi Tahun 2025 adalah sebesar Rp60.700.008,00. Belanja subsidi digunakan untuk pelaksanaan Program Subsidi Bunga Untuk Pelaku Usaha Mikro sebagai pengganti Program Pengelolaan Dana Bergulir yang telah dihentikan operasionalnya pada bulan Februari 2024.

Jika dibandingkan dengan saldo belanja subsidi sebesar Rp60.700.008,00 maka tidak terdapat perbedaan antara saldo beban subsidi dengan saldo belanja subsidi pada Tahun 2025.

4. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban yang atas belanja hibah baik hibah uang ataupun hibah barang yang diberikan kepada pemerintah pusat, badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Saldo beban hibah Tahun 2025 sebesar Rp7.100.765.108,73,00 jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp17.174.049.136,00, maka saldo beban hibah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.073.284.027,27 atau 58,65%.

Tabel 5.116 : Rincian Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	707.670.336,37	10.820.015.784,00	(10.112.345.447,63)	(93,46)
2.	Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.176.274.037,36	2.040.220.030,00	136.054.007,36	6,67
3.	Beban Hibah Dana BOS	0,00	1.970.680.183,00	(1.970.680.183,00)	100,00
4.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	792.094.916,00	699.852.380,00	92.242.536,00	13,18
5.	Beban Hibah Dana BOSP	3.424.725.819,00	1.643.280.759,00	1.781.445.060,00	108,41
	JUMLAH	**7.100.765.108,73**	**17.174.049.136,00**	**(10.073.284.027,27)**	**(58,65)**

Beban hibah dana BOSP merupakan pengeluaran/penggunaan dana BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan oleh sekolah swasta dengan rincian sebagai berikut:

1.	BOS	Rp.	1.938.754.719,00
2.	BOP PAUD	Rp.	1.230.671.100,00
3	BOP Kesetaraan	Rp.	255.300.000,00
	Jumlah	**Rp.**	**3.424.725.819,00**

Tabel 5.117 : Perbandingan Belanja Hibah dan Beban Hibah Tahun 2025

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	707.670.336,37	707.670.336,37	0,00
2.	Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	2.176.274.037,36	2.176.274.037,36	0,00

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
3.	Beban Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00
4.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	792.094.916,00	792.094.916,00	0,00
5.	Beban Hibah Dana BOSP	3.424.725.819,00	3.424.725.819,00	0,00
	JUMLAH	**7.100.765.108,73**	**7.100.765.108,73**	**0,00**

Dari table diatas dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan antara belanja hibah dengan beban hibah tahun 2025.

5. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban atas belanja bantuan sosial kepada individu dan keluarga, dimana pada Tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp7.044.965.000,00. Bila dibandingkan dengan beban bantuan sosial Tahun 2024 sebesar Rp10.784.726.000,00 maka beban bantuan sosial Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.739.761.000,00 atau 34,68%.

Tabel 5.118 : Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu	4.824.965.000,00	7.882.726.000,00	(3.057.761.000,00)	(38,79)
3.	Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Keluarga	2.220.000.000,00	2.902.000.000,00	(682.000.000,00)	(23,50)
	JUMLAH	**7.044.965.000,00**	**10.784.726.000,00**	**(3.739.761.000,00)**	**(34,68)**

Tabel 5. 119 : Perbandingan Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial

No.	Uraian	LO	LRA	Selisih
1.	Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu	4.824.965.000,00	4.824.965.000,00	0,00
2.	Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Keluarga	2.220.000.000,00	2.220.000.000,00	0,00
	JUMLAH	**7.044.965.000,00**	**7.044.965.000,00**	**0,00**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak terdapat selisih antara beban bantuan sosial dengan belanja bantuan sosial pada tahun 2025.

6. Beban Penyisihan Piutang

Saldo Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.428.935.282,82. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp14.707.591.498,60, maka saldo beban penyisihan piutang Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp12.278.656.215,78 atau 83,49%.

Tabel 5.120 : Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	206.804.609,37	216.193.595,03	(9.388.985,66)	(4,34)
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	2.220.619.835,95	14.374.877.378,57	(12.154.257.542,62)	(84,55)
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.510.837,50	116.520.525,00	(115.009.687,50)	(98,70)
JUMLAH		**2.428.935.282,82**	**14.707.591.498,60**	**(12.278.656.215,78)**	**(83,49)**

b.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2025 (Rp) 48.169.814.738,00	Tahun 2024 (Rp) 51.497.739.587,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp48.169.814.738,00 jika dibandingkan dengan beban penyusutan dan amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp51.497.739.587,00, maka beban penyusutan dan amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.327.924.849,00 atau 6,46%.

Tabel 5.121 : Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	14.576.645.571,00	14.369.837.318,00	206.808.253,00	1,44
2.	Beban Penysutan Gedung dan Bangunan	13.200.641.817,00	15.336.126.756,00	(2.135.484.939,00)	(13,92)
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	19.931.687.460,00	21.299.049.318,00	(1.367.361.858,00)	(6,42)
4.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	416.924.128,00	492.726.195,00	(75.802.067,00)	(15,38)
5.	Beban Penyusutan Properti Investasi	43.915.762,00	0,00	43.915.762,00	100,00
JUMLAH		**48.169.814.738,00**	**51.497.739.587,00**	**(3.327.924.849,00)**	**(6,46)**

c.	Beban Tak Terduga	Tahun 2025 (Rp) 631.263.784,00	Tahun 2024 (Rp) 220.406.188,00

Saldo Beban Tak Terduga Tahun 2025 adalah sebesar Rp631.263.784,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 adalah Rp220.406.188,00 terdapat kenaikan sebesar Rp410.857.596,00 atau 186,41%.

Beban tak terduga Tahun 2025 sebesar Rp631.263.784 digunakan untuk penyelenggaraan dapur umum dampak bencana Hidrometeorologi, penanganan

darurat bencana hidrometeorologi serta pemenuhan kebutuhan obat dan BMHP dengan rincian sebagai berikut:

▪ Dinas Sosial P2KBPKA	Rp. 200.842.700,00
▪ BPBD Kesatuan Bangsa Politik	Rp. 411.186.200,00
▪ Dinas Kesehatan	Rp. 19.234.884,00
Jumlah	**Rp. 631.263.784,00**

3). Surplus/(Defisit) dari Operasional	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	34.083.741.238,57	**(12.757.360.097,54)**

Surplus/(defisit) dari operasi adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Berikut rincian surplus/(defisit) dari operasi Tahun 2025:

1.	Pendapatan-LO	Rp. 572.016.739.614,68
2.	Beban	Rp. (537.932.998.376,11)
3.	**Surplus/(Defisit) dari Operasi**	**Rp. 34.083.741.238,57**

Jika dibanding dengan surplus/(defisit) dari operasi Tahun 2024 sebesar Rp(12.757.360.097,54) maka surplus/(defisit) dari operasi Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp40.405.139.520,57 atau 316,72%.

4). Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	0,00	**246.278.500,00**

Pada Tahun 2025 tidak terdapat surplus dari kegiatan non operasional. Jika dibandingkan dengan surplus dari kegiatan non operasional Tahun 2024 sebesar Rp246.278.500,00, maka surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp246.278.500,00 atau 100,00%.

a. Surplus Non Operasional
Surplus non operasional Tahun 2025 adalah NIHIL

b. Defisit Non operasional
Defisit non operasional Tahun 2025 adalah NIHIL

5). Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	34.083.741.238,57	**(12.511.081.597,54)**

Surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp34.083.741.238,57. Jika dibandingkan dengan surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa Tahun 2024 sebesar Rp(12.511.081.597,54), maka surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp46.594.822.836,11. Rincian perhitungan surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa adalah sebagai berikut:

Surplus/(defisit) dari operasional	Rp.	34.083.741.238,57
Surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional	Rp.	0,00
Surplus/(defisit) sebalum pos luar biasa	**Rp.**	**34.083.741.238,57**

6). Pos Luar Biasa	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	(Rp)	**(Rp)**
	0,00	**0,00**

Pos luar biasa untuk memuat transaksi yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Saldo pos luar biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah NIHIL.

7). Surplus/(Defisit)-LO	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	(Rp)	**(Rp)**
	34.083.741.238,57	**(12.511.081.597,54)**

Surplus/(defisit)-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan-LO	Rp	572.016.739.614,68
Beban	Rp	(537.932.998.376,11)
Surplus/(defisit) dari operasi	**Rp**	**34.083.741.238,57**
Surplus dari kegiatan non operasional	Rp	0,00
Pos luar biasa	Rp	0,00
Surplus/(defisit)-LO	**Rp**	**34.083.741.238,57**

5.5 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas serta setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas ini berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang dan untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Untuk Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini tidak termasuk realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS, dan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Kota Padang Panjang di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber dana dari luar.

Tabel 5.122 : Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	17.367.910.078,00	9.688.742.631,00
Penerimaan Retribusi Daerah	63.852.882.614,00	64.086.171.794,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.991.779.256,00	7.922.888.824,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	10.596.351.559,76	12.427.485.057,88
Penerimaan Dana Transfer Umum-DBH	8.752.290.000,00	9.855.955.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	386.609.,800.112,00	375.917.415.308,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik	5,115,348,945.00	15.722.870.984,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	35,499,822,722.00	35.820.566.605,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	-	21.772.057.000,00
Penerimaan Bagi Hasil	23,131,134,427.00	28.546.475.247,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	1,410,000,000.00	1.135.373.000,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5,644,444.00	60.387.584,00
Penerimaan Dana Darurat	4,000,000,000.00	-
Penerimaan Hibah	50,000,000.00	-
Jumlah Arus Masuk Kas	**564.382.964.157,76**	**582.956.389.034,88**
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	278.088.171.575,00	311.212.828.135,00
Pembayaran Barang dan Jasa	183.618.653.458,52	214.426.378.424,14
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Subsidi	60.700.008,00	4.456.800,00
Pembayaran Hibah	7.100.765.108,73	17.174.049.136,00
Pembayaran Bantuan Sosial	7.044.965.000,00	10.415.226.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	-	-
Pembayaran Tak Terduga	631.263.784,00	769.005.193,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	**476.544.518.934,25**	**554.001.943.688,14**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	**87.838.445.223,51**	**28.954.445.346,74**

Arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp87.838.445.223,51 yang merupakan selisih lebih antara arus kas masuk sebesar Rp564.382.964.157,76 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp476.544.518.934,25.

Arus kas masuk dari aktivitas operasi bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp99.808.923.507,76, pendapatan transfer sebesar Rp460.518.396.206,00, penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp5.644.444,00., pendapatan dana darurat sebesar Rp4.000.000.000,00 dan pendapatan hibah sebesar Rp50.000.000,00. Dari kelima sumber arus kas masuk terlihat bahwa pendapatan transfer merupakan penyumbang terbesar untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah Kota Padang Panjang.

Di sisi lain, arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2025 digunakan untuk belanja operasi sebesar Rp475.913.255.150,25, belanja tak terduga sebesar Rp631.263.784,00. Arus kas keluar terbesar adalah untuk belanja operasi yang dalam hal ini digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

b. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Tabel 5.123 : Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	615.926.600,00	228.578.500,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	1.200.000,00	17.700.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan dari Divestasi	0,00	1.386.758.189,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**617.126.600,00**	**1.633.036.689,00**
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	0,00	9.421.400,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	14.811.794.052,00	14.731.124.143,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	20.311.104.559,19	39.342.022.232,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.910.651.808,37	16.570.946.513,46
Perolehan Aset Tetap Lainnya	911.322.756,00	1.004.874.127,00
Perolehan Aset Lainnya	164.835.000,00	93.500.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	1.000.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**55.109.708.175,56**	**72.751.888.415,46**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	**(54.492.581.575,56)**	**(71.118.851.726,46)**

Arus kas bersih dari aktivitas investasi per 31 Desember 2025 mengalami defisit sebesar Rp54.492.581.575,56. Arus kas keluar dari aktivitas investasi digunakan untuk belanja modal dalam rangka perolehan aset tetap.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yangbertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang.

Pada Tahun 2025 tidak terdapat arus kas masuk dan keluar dari aktivitas pendanaan, sehinga arus kas bersih dari aktivitas pendanaan per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00.

d. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Daerah.

Tabel 5.124 : Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	6.765.725.172,00	19.000.124.546,00
Penerimaan setoran UYHD dari Bendahara	74.200,00	11.050.950,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**6.765.799.372,00**	**19.011.175.496,00**
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	6.765.725.172,00	19.000.124.546,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**6.765.725.172,00**	**19.000.124.546,00**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**74.200,00**	**11.050.950,00**

Tabel 5. 125: Penerimaan dan Pengeluaran PFK Tahun 2025

Uraian	Penerimaan PFK	Pengeluaran PFK
IWP	5.465.633.075,00	5.465.633.075,00
JKK	223.989.001,00	223.989.001,00
JKM	671.967.269,00	671.967.269,00
PPh Pasal 21	404.135.827,00	404.135.827,00
Jumlah	**6.765.725.172,00**	**6.765.725.172,00**

e. Kenaikan/Penurunan Bersih Selama Periode

Keempat jenis aktivitas kas yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025 seperti yang telah dijelaskan diatas menyebabkan terjadinya kenaikan bersih kas sebesar Rp33.345.937.847,95:

Tabel 5. 126: Penurunan Bersih Kas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	87.838.445.223,51	28.954.445.346,74
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(54.492.581.575,56)	(71.118.851.726,46)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	74.200,00	11.050.950,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**33.345.937.847,95**	**(42.153.355.429,72)**

f. Saldo Awal

Saldo awal pada Laporan Arus Kas Tahun 2025 merupakan saldo akhir Laporan Arus Kas Tahun 2024. Nilai yang tercatat pada Laporan Arus Kas Tahun 2025 adalah sebesar Rp6.451.331,469,94 terdiri dari:

1.	Saldo Kas Daerah di BUD	Rp.	5.231.959.422,06
2.	Kas di Rek. Bendaharan Pengeluaran	Rp.	0,00
3.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	0,00
4.	Kas di BLUD	Rp.	333.726.527,88
6.	Kas Dana BOK Puskesmas	Rp.	633.371.651,00
7.	Saldo Kas Dana BOSP	Rp.	252.273.869,00
	Jumlah	**Rp.**	**6.451.331.469,94**

g. Saldo Akhir

Saldo akhir kas di BUD dan kas daerah Tahun 2025 adalah Rp39.797.269.317,89 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode	Rp	33.345.937.847,95
2.	Saldo Awal Kas BUD	Rp	6.451.331.469,94
	Saldo Akhir Kas BUD	**Rp**	**39.797.269.317,89**

Saldo akhir kas di BUD dan kas daerah sebesar Rp39.797.269.317,89 dapat dirinci sebagai berikut :

1.	Saldo Kas Daerah di BUD	Rp	38.053.573.214,01
2.	Kas di Rek. Bendaharan Pengeluaran	Rp	38.500.000,00
3.	Kas Lainnya	Rp	39.313.100,00
4.	Kas di BLUD	Rp	1.046.925.015,88
6.	Kas Dana Kapitasi FKPT	Rp	0,00
7.	Saldo Kas Dana BOSP	Rp	216.971.137,00
8.	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas	Rp	401.986.851,00
	Jumlah	**Rp**	**39.797.269.317,89**

5.5 PENJELASAN AKUN-AKUN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi perubahan ekuitas selama satu periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

a. Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 adalah Rp1.366.938.989.052,48 yang merupakan saldo akhir dari ekuitas Tahun 2024.

b. Surplus/(Defisit) LO

Saldo Surplus/(Defisit) LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp34.083.741.238,57 merupakan surplus atas kegiatan operasional basis akrual yang menambah nilai Neraca Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025.

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

1) Koreksi Penyisihan Piutang

Terdapat penambahan nilai ekuitas akibat adanya penurunan nilai penyisihan piutang Tahun 2025 sebesar Rp1.087.304.807,96 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Dinas Kesehatan	Rp.	1.018.050.325,96
2.	Dinas Pangan dan Pertanian	Rp.	4.000.000,00
3.	Dinas Perdagkop UKM	Rp.	48.459.182,00
4.	BPKD	Rp.	16.285.000,00
5.	Sekretariat Daerah	Rp.	510.300,00
	Jumlah	Rp.	**1.087.304.807,96**

2) Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap Tahun 2025 sebesar Rp25.311.900,00 yang merupakan kenaikan nilai ekuitas disebabkan oleh adanya koreksi nilai aset tetap, mutasi aset tetap antar SKPD, dan akibat adanya penghapusan aset tetap pada beberapa SKPD sebagai berikut:

1.	Dinas Pendidikan	Rp.	(100,00)
2.	Dinas Pekerjaan Umum	Rp.	(775.983.750,00)
2.	Dinas Perkim LH	Rp.	89.572.000,00
3.	Dinas Sosial	Rp.	1.082.302.583,00
4.	Dinas DPMPTSP	Rp.	(2.075.760,00)
5.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Rp.	(16.060.000,00)
6.	Dinas perdagkop UMKM	Rp.	576.984.750,00
7.	BPKD	Rp.	(881.227.823,00)
8.	Sekretariat Daerah	Rp.	549.895.238,00
9.	Sekretariat DPRD	Rp.	(598.095.238,00)
	Jumlah	Rp.	**25.311.900,00**

3) Koreksi Aset Lainnya

Kenaikan nilai ekuitas yang disebabkan karena adanya koreksi aset lainnya sebesar Rp56.457.092,00 berupa penghapusan aset rusak pada beberapa SKPD sebagai berikut:

1.	Dinas Pendidikan	Rp.	162.700.000,00
2.	Dinas Kesehatan	Rp.	(9.421.400,00)
3.	Dinas Pariwisata	Rp.	(29.682.034,00)
4.	Sekretariat Daerah	Rp.	(66.096.000,00)
5.	Sekretariat Daerah	Rp.	(1.043.474,00)
	Jumlah	Rp.	**56.457.092,00**

4) Koreksi Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Tetap/Aset Lainnya

Penurunan nilai ekuitas yang disebabkan karena adanya koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap/aset lainnya sebesar Rp1.325.382.407,00 pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

1.	Dinas Pendidikan	Rp.	119.931.689,00
2.	Dinas Kesehatan	Rp.	(9.995.996,00)
3.	Dinas PUPR	Rp.	1.152.057.303,00
4.	Dinas Perkim LH	Rp.	210.022.803,00
5.	Dinas Sosial	Rp.	(23.752.246,00)
6.	Dinas Pangan dan Pertanian	Rp.	(66.389,00)
7.	Dinas DPMPTSP	Rp.	13.125.265,00
8.	Dinas Porapar	Rp.	(4.933)
9.	Dinas perdagkop UMKM	Rp.	(35.569.413,00)
10.	Sekretariat Daerah	Rp.	(14.852.150,00)
11.	Kecamatan PP Timur	Rp.	(54.820.794,00)
12.	Kecamatan PP Barat	Rp.	(26.151.260,00)
13.	BPBD Kesbang Pol	Rp.	(4.434.805,00)
14.	Inspektorat	Rp.	(106.667,00)
	Jumlah	Rp.	**1.325.382.407,00**

5) Koreksi Piutang

Penurunan nilai ekuitas yang disebabkan karena adanya transaksi yang mempengaruhi rekening piutang sebesar (Rp1.121.126.223,00) berupa penurunan piutang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun sebelumnya (2024) pada Dinas Kesehatan.

6) Koreksi Utang

Penambahan nilai ekuitas yang disebabkan karena adanya transaksi yang mempengaruhi rekening utang sebesar Rp792.162.574,00 berupa penurunan utang belanja pegawai BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah tahun sebelumnya (2024) pada Dinas Kesehatan.

7) Koreksi Persediaan

Penambahan nilai ekuitas yang disebabkan karena adanya transaksi yang mempengaruhi rekening persediaan sebesar Rp60.651.152,34 berupa penambahan persediaan bibit ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian sebesar

Rp35.651.152,34 dan penambahan persediaan bahan cetak sebesar Rp25.000.000 pada Dinas Perhubungan.

8) Koreksi Investasi

Penurunan nilai ekuitas yang disebabkan karena adanya transaksi di BPKD yang mempengaruhi nilai investasi sebesar (Rp803.133.483,84) berupa bagian dari kerugian Perumda Tirta Serambi tahun 2025.

d. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2025 adalah Rp1.396.009.778.700,26 yang berasal dari akumulasi nilai ekuitas awal, surplus/(defisit) LO dan dampak kumulatif dari koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas:

1.	Ekuitas Awal	Rp	1.366.938.989.052,48
2.	Surplus/Defisit LO	Rp	34.083.741.238,57
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar	Rp	1.423.010.226,46
4.	Ekuitas Akhir	**Rp**	**1.402.445.740.517,51**

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili

Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975). Padang Panjang merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Sumatera Barat dengan luas 2.300 Ha. Mencakup 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Masing-masing kecamatan terdiri dari 8 (delapan) kelurahan. Adapun rincian wilayah administrasi Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 127 : Wilayah Kecamatan, Kelurahan, dan Luas Wilayah Kota Padang Panjang

	Wilayah	Luas	
		Ha	%
I	**Kecamatan Padang Panjang Timur**	**1.325**	**57,61**
	Kelurahan Koto Panjang	133	5,78
	Kelurahan Koto Katik	101	4,39
	Kelurahan Ngalau	145	6,30
	Kelurahan Ekor Lubuk	280	12,17
	Kelurahann Sigando	140	6,09
	Kelurahan Ganting	310	13,48
	Kelurahan Guguk Malintang	190	8,26
	Kelurahan Tanah Pak Lambik	26	1,13
II	**Kecamatan Padang Panjang Barat**	**975**	**42,39**
	Kelurahan Silaing Bawah	561	11,35
	Kelurahan Silaing Atas	54	2,35
	Kelurahan Pasar Usang	59	2,75
	Kelurahan Kampung Manggis	316	13,74
	Kelurahan Tanah Hitam	72	3,13
	Kelurahan Pasar Baru	23	1,00
	Kelurahan Bukit Surungan	121	5,26
	Kelurahan Balai-Balai	69	3,00
	Padang Panjang	**2,300**	**100**

Secara astronomis, Kota Padang Panjang terletak antara 0°27’-0°32’ Lintang Selatan dan 100°20’-100°30’ Bujur Timur. RKPD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 II-2. Geostrategis Kota Padang Panjang terletak di bagian tengah Provinsi Sumatera Barat. Posisi Kota Padang Panjang sangat strategis karena berada pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Perkotaan Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar, dan berada pada jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Secara topografis, Kota Padang Panjang memiliki dataran tinggi bergelombang dengan ketinggian antara 650 hingga 850 meter di atas permukaan laut. Topografi yang tidak merata ini mengakibatkan sebagian besar lahan tidak mungkin dimanfaatkan untuk pemukiman. Kondisi fisik

permukaan tanah Kota Padang Panjang terdiri dari mikrorelief yang miring dari utara ke selatan, serta sebagian terdiri dari lembah yang curam dan perbukitan.

Dilihat dari jumlah penduduk Kota Padang Panjang mencatat jumlah penduduk sebanyak 58.627 orang, terdiri dari 29.461 laki-laki dan 29.166 perempuan. Dalam lima tahun terakhir (2019-2023), laju pertumbuhan penduduk Kota Padang Panjang mencapai 2,05% dengan peningkatan dari 53.693 orang pada 2019 menjadi 58.627 orang pada 2023. Kota Padang Panjang memiliki kepadatan penduduk 2.549 orang per km2, dengan kecamatan Padang Panjang Barat menjadi yang paling padat, mencapai 3.405 orang per km2. Meskipun begitu, perbedaan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin relatif kecil, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,01. Artinya, setiap 101 penduduk laki-laki setara dengan 100 penduduk perempuan di Kota Padang Panjang

6.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara Pembangunan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 menetapkan tema Pembangunan yaitu "Peningkatan Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah dan Kualitas SDM Berkarakter, Maju dan Berdaya Saing".

Rencana program dan kegiatan pembangunan merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan tercapainya tujuan, sasaran pembangunan daerah, serta memenuhi standar pelayanan minimal serta pemenuhan pelayanan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan dan disusunlah program dan kegiatan yang lebih konkret yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sesuai Bidang Urusan Pemerintah Derah, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar serta urusan pilihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai target prioritas pembangunan Tahun 2025, direncanakan 137 program dengan 330 kegiatan dan 776 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang. Rekapitulasi kebutuhan dana/pagu indikatif berdasarkan prioritas pembangunan Kota Padang Panjang serta rencana kerja pemerintah daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 berdasarkan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5. 128 : Rekapitulasi Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025

Perangkat Daerah	Jumlah Prog	Jumlah Keg	Jumlah Sub Keg	%	Pagu Indikatif
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3	13	80	19,08	113.231.779.195
Dinas Kesehatan	5	15	46	27,79	164.925.438.037
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10	19	46	4,38	25.965.352.251
Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	14	22	37	4,95	29.358.624.906

Perangkat Daerah	Jumlah Prog	Jumlah Keg	Jumlah Sub Keg	%	Pagu Indikatif
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	3	10	25	2,31	13.726.650.523
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	13	29	55	1,97	11.720.229.145
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	13	25	0,94	5.576.360.112
Dinas Pangan Dan Pertanian	10	22	42	1,82	10.787.208.876
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	11	23	0,54	3.222.599.142
Dinas Perhubungan	2	12	24	1,98	11.737.042.929
Dinas Komunikasi Dan Informatika	5	9	23	1,29	7.678.757.686
Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	12	18	33	3,41	20.221.375.517
Dinas Pemuda Olah Raga Dan Pariwisata	8	18	37	1,62	9.632.434.365
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4	11	21	0,88	5.250.809.773
Sekretariat Daerah	3	16	47	7,97	47.308.703.699
Sekretariat DPRD	2	14	40	5,36	31.807.563.222
Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4	16	27	0,97	5.785.766.037
Badan Pengelola Keuangan Daerah	4	11	32	2,91	17.276.698.845
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	10	22	1,60	9.501.596.993
Inspektorat Daerah	3	7	26	0,99	5.854.888.067
Kecamatan Padang Panjang Timur	6	11	23	2,82	16.711.452.140
Kecamatan Padang Panjang Barat	5	13	25	2,90	17.201.483.588
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	6	10	17	1,51	8.969.795.069
Total	**137**	**330**	**776**	**100**	**593.452.610.117**

BAB VII
PENUTUP

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025 baik itu pendapatan dan belanja telah diupayakan optimalisasi dalam pengelolaannya, selain itu LKPD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan menerapkan basis akrual.

Terhadap berbagai kendala yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025 ini, Pemerintah Kota Padang Panjang bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Piutang Pajak Daerah	3.324.190.208,00	304.146.886,00	0,00	3.628.337.094,00
		Piutang Transfer Antar Daerah	8.373.725.681,00	0,00	(759.379.833,00)	7.614.345.848,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.048.587.550,00	0,00	(16.285.000,00)	3.032.302.550,00
		Piutang Retribusi Daerah	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
		Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	183.550.103,70	0,00	0,00	183.550.103,70
2	DINAS KESEHATAN	Piutang Retribusi Daerah	11.412.022.574,00	0,00	(554.675.550,00)	10.857.347.024,00
3	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Piutang Retribusi Daerah	15.798.445.664,00	1.675.919.295,00	(34.428.000,00)	17.439.936.959,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	14.048.182,00	0,00	(14.048.182,00)	0,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	3.502.500,00	0,00	3.502.500,00
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Piutang Retribusi Daerah	75.511.250,00	151.285.000,00	0,00	226.796.250,00
6	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Piutang Retribusi Daerah	116.600.000,00	0,00	(4.000.000,00)	112.600.000,00
7	SEKRETARIAT DAERAH	Piutang Retribusi Daerah	1.008.000,00	0,00	(1.008.000,00)	0,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	12.600,00	0,00	(12.600,00)	0,00
8	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	10.735.000,00	4.735.000,00	0,00	15.470.000,00

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAHAN KOTA PADANG PANJANG
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1		0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Akhir tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2007	Bank Nagari BPD Sumbar	Perda	Saham	40.398.602.746,39	40.398.602.746,39	0,00	40.398.602.746,39	0,00	0,00	0,00	40.398.602.746,39
2	1982	Perusahaan Daerah Air Minum	Perda	Laba	10.044.802.968,84	10.847.936.452,68	0,00	10.847.936.452,68	0,00	0,00	0,00	10.044.802.968,84
3	2010	Balairung Citra Jaya Sumbar	Perda	Saham	2.824.899.000,00	2.824.899.000,00	0,00	2.824.899.000,00	0,00	0,00	(803.133.483,84)	2.824.899.000,00
				TOTAL	**53.268.304.715,23**	**54.071.438.199,07**	**0,00**	**54.071.438.199,07**	**0,00**	**0,00**	**(803.133.483,84)**	**53.268.304.715,23**

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAHAN KOTA PADANG PANJANG
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	214.596.303.405,98	12.028.831.700,08	37.175.105,00	226.587.960.001,06
2	DINAS KESEHATAN	304.286.201.679,99	21.670.568.723,71	6.585.307.460,00	319.371.462.943,70
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	656.256.141.735,62	13.015.423.654,37	1.446.029.564,00	667.825.535.825,99
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	103.254.869.436,86	9.001.799.779,00	289.120.000,00	111.967.549.215,86
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9.015.519.802,00	3.035.544.690,00	308.913.925,00	11.742.150.567,00
6	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.035.981.276,00	1.323.644.975,00	75.017.500,00	16.284.608.751,00
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.957.860.329,00	338.251.349,00	195.761.825,00	4.100.349.853,00
8	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	38.538.103.844,75	8.621.500,00	127.828.900,00	38.418.896.444,75
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.877.449.000,30	302.291.800,00	28.274.000,00	4.151.466.800,30
10	DINAS PERHUBUNGAN	44.834.732.666,25	939.302.921,00	0,00	45.774.035.587,25
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.378.009.019,00	205.232.000,00	188.300.000,00	15.394.941.019,00
12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	188.331.361.944,64	1.436.599.032,39	430.239.200,00	189.337.721.777,03
13	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	260.853.423.500,00	411.431.700,00	0,00	261.264.855.200,00
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10.391.018.316,00	200.291.005,00	122.150.000,00	10.469.159.321,00
15	SEKRETARIAT DAERAH	67.344.369.890,77	5.111.678.919,00	1.223.243.750,00	71.232.805.059,77
16	SEKRETARIAT DPRD	32.904.106.581,07	1.225.672.392,00	2.440.681.150,00	31.689.097.823,07
17	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.202.698.476,00	135.600.000,00	91.030.600,00	2.247.267.876,00
18	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	24.601.447.666,00	324.158.675,00	2.189.019.760,00	22.736.586.581,00
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	20.718.977.575,94	108.129.995,00	58.962.000,00	20.768.145.570,94
20	INSPEKTORAT DAERAH	3.149.283.900,00	92.745.001,00	92.451.400,00	3.149.577.501,00
21	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	15.877.417.189,20	145.355.145,00	135.600.000,00	15.887.172.334,20
22	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	17.328.777.830,52	209.495.100,00	40.632.000,00	17.497.640.930,52
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	8.756.113.541,00	319.899.999,00	12.821.800,00	9.063.191.740,00
TOTAL		**2.061.490.168.606,89**	**71.590.570.055,55**	**16.118.559.939,00**	**2.116.962.178.723,44**

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAHAN KOTA PADANG PANJANG
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
1	**Tanah**	**422.654.124.475,00**	**124.400.000,00**	**124.400.000,00**	**422.654.124.475,00**
2	**Peralatan dan Mesin**	**332.270.509.070,43**	**19.627.790.538,00**	**7.347.359.815,00**	**344.550.939.793,43**
	a. Alat Besar	10.901.304.031,00	71.944.470,00	0,00	10.973.248.501,00
	b. Alat Angkutan	62.648.753.249,00	11.371.251.279,00	7.071.416.390,00	66.948.588.138,00
	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.534.468.957,00	17.522.600,00	0,00	8.551.991.557,00
	d. Alat Pertanian	1.295.421.354,00	3.000.000,00	0,00	1.298.421.354,00
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	61.847.937.497,29	3.258.727.925,00	160.465.025,00	64.946.200.397,29
	f. Alat Studio dan Komunikasi dan Pemancar	17.510.221.370,00	372.819.125,00	17.450.000,00	17.865.590.495,00
	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	107.512.158.527,10	1.241.918.510,00	0,00	108.754.077.037,10
	h. Alat Laboratorium	9.320.580.913,68	667.977.140,00	6.600.000,00	9.981.958.053,68
	i. Alat Persenjataan	2.349.890.350,00	237.456.000,00	0,00	2.587.346.350,00
	j. Komputer	42.446.757.589,97	2.380.773.489,00	91.428.400,00	44.736.102.678,97
	k. Alat Keselamatan Kerja	2.147.337.850,00	4.400.000,00	0,00	2.151.737.850,00
	l. Rambu-rambu	5.165.787.681,39	0,00	0,00	5.165.787.681,39
	m. Peralatan Olah Raga	589.889.700,00	0,00	0,00	589.889.700,00
3	**Bangunan dan Gedung**	**724.089.386.626,32**	**27.766.566.880,98**	**2.649.202.624,00**	**749.206.750.883,30**
	a. Bangunan Gedung	717.148.320.140,99	27.766.566.880,98	2.649.202.624,00	742.265.684.397,97
	b. Monumen	4.831.126.976,00	0,00	0,00	4.831.126.976,00
	c. Bangunan Menara	72.246.500,00	0,00	0,00	72.246.500,00
	d. Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.037.693.009,33	0,00	0,00	2.037.693.009,33
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**555.752.670.791,41**	**21.002.198.508,37**	**0,00**	**576.754.869.299,78**
	a. Jalan dan Jembatan	373.395.920.881,71	8.226.025.566,00	0,00	381.621.946.447,71
	b. Bangunan Air/Irigasi	132.134.095.879,15	9.345.062.186,37	0,00	141.479.158.065,52
	c. Instalasi	10.534.523.881,00	3.289.672.501,00	0,00	13.824.196.382,00
	d. Jaringan	39.688.130.149,55	141.438.255,00	0,00	39.829.568.404,55
5	**Aset Tetap Lainnya**	**10.400.762.083,73**	**797.419.125,00**	**0,00**	**11.198.181.208,73**
	a. Buku Perpustakaan	6.250.381.283,99	797.419.125,00	0,00	7.047.800.408,99
	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	2.067.136.901,00	0,00	0,00	2.067.136.901,00
	c. Hewan	86.000.000,00	0,00	0,00	86.000.000,00
	d. Tanaman	807.859.600,00	0,00	0,00	807.859.600,00
	e. Aset Tetap dalam Renovasi	1.189.384.298,74	0,00	0,00	1.189.384.298,74
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	**13.775.496.815,00**	**2.272.195.003,20**	**5.997.597.500,00**	**10.050.094.318,20**
7	**Properti Investasi**	**2.547.218.745**	**0,00**	**0,00**	**2.547.218.745,00**
TOTAL		**2.061.490.168.606,89**	**71.590.570.055,55**	**16.118.559.939,00**	**2.116.962.178.723,44**

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAHAN KOTA PADANG PANJANG
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI / PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	150.466.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.466.083,20
2	DINAS KESEHATAN	5.997.597.500,00	0,00	16.499.000,00	0,00	0,00	0,00	5.997.597.500,00	0,00	0,00	0,00	16.499.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.777.899.315,00	0,00	1.782.083.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559.983.023,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	323.146.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.146.212,00
TOTAL		**13.775.496.815,00**	**0,00**	**2.272.195.003,20**	**0,00**	**0,00-**	**0,00**	**5.997.597.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.050.094.318,20**

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAHAN KOTA PADANG PANJANG
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	23.293.633.709,00	398.669.483,20	240.295.523,20	23.452.007.669,00
2	DINAS KESEHATAN	18.943.602.195,91	572.706.460,00	907.545.020,00	18.608.763.635,91
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13.969.353.887,07	809.654.314,00	1.654.198.408,00	13.124.809.793,07
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	3.780.589.673,00	0,00	210.022.400,00	3.570.567.273,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	114.503.100,00	0,00	0,00	114.503.100,00
6	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.150.768.545,00	0,00	0,00	1.150.768.545,00
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	131.282.386,00	0,00	0,00	131.282.386,00
8	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	677.353.400,00	0,00	0,00	677.353.400,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	481.406.420,00	0,00	0,00	481.406.420,00
10	DINAS PERHUBUNGAN	615.197.858,00	0,00	0,00	615.197.858,00
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.521.100,00	0,00	0,00	10.521.100,00
12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1.036.525.102,33	0,00	0,00	1.036.525.102,33
13	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1.040.468.884,00	0,00	174.613.325,00	865.855.559,00
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	387.295.750,00	0,00	0,00	387.295.750,00
15	SEKRETARIAT DAERAH	1.516.782.645,00	0,00	157.926.400,00	1.358.856.245,00
16	SEKRETARIAT DPRD	203.064.068,00	0,00	0,00	203.064.068,00
17	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	496.844.743,00	0,00	0,00	496.844.743,00
18	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	22.627.771.443,00	0,00	0,00	22.627.771.443,00
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	400.234.700,00	0,00	0,00	400.234.700,00
20	INSPEKTORAT DAERAH	30.240.000,00	0,00	0,00	30.240.000,00
21	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	887.472.361,00	1.061.160,00	1.061.160,00	887.472.361,00
22	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	607.878.762,00	0,00	0,00	607.878.762,00
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	1.494.552.135,00	0,00	0,00	1.494.552.135,00
TOTAL		**93.897.342.867,31**	**1.782.091.417,20**	**3.345.662.236,20**	**92.333.772.048,31**

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAHAN KOTA PADANG PANJANG
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAHAN KOTA PADANG PANJANG
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Utang Jangka Pendek lainnya	1.463.588.000,00	844.873.000,00	0,00	2.308.461.000,00
2	Utang Belanja	12.595.599.281,66	5.909.233.505,35	0,00	18.504.832.787,01
3	Pendapatan Diterima Dimuka	489.447.350,00	0,00	66.328.557,92	423.118.792,08
TOTAL		**14.548.634.631,66**	**6.754.106.505,35**	**66.328.557,92**	**21.236.412.579,09**

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAHAN KOTA PADANG PANJANG
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
		0,00	0,00	0,00	0,00

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TA 2025 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN XX.1
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	BUMD/ Perusahaan Daerah	Sumber	Status	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	Bidang Pelayanan Air Besih																	
	PDAM	-	-	10.809.749.543,00	16.373.827.768,00	0,00	27.183.577.311,00	589.360.188,00	3.755.704.909,00	4.345.065.097,00	30.922.444.926,00	0,00	0,00	180.477.371,00	(7.329.264.825,00)	23.773.657.472,00	86,16	2.048.348.978.786,25
	Sub Total (1)			10.809.749.543,00	16.373.827.768,00	0,00	27.183.577.311,00	589.360.188,00	3.755.704.909,00	4.345.065.097,00	30.922.444.926,00	0,00	0,00	180.477.371,00	(7.329.264.825,00)	23.773.657.472,00	86,16	2.048.348.978.786,25
Total Seluruh Bidang industri				10.809.749.543,00	16.373.827.768,00	0,00	27.183.577.311,00	589.360.188,00	3.755.704.909,00	4.345.065.097,00	30.922.444.926,00	0,00	0,00	180.477.371,00	(7.329.264.825,00)	23.773.657.472,00	86,16	2.048.348.978.786,25

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN XX.2
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	BUMD/ Perusahaan Daerah	Sumber	Status	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	Bidang Pelayanan Air Besih								
	PDAM	-	-	10.921.777.174,00	11.786.086.403,00	(864.309.229,00)	(74.533.229,00)	0,00	(938.842.458,00)
	Sub Total (1)			10.921.777.174,00	11.786.086.403,00	(864.309.229,00)	(74.533.229,00)	0,00	(938.842.458,00)
Total Seluruh Bidang industri				10.921.777.174,00	11.786.086.403,00	(864.309.229,00)	(74.533.229,00)	0,00	(938.842.458,00)

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS